



RPJMD
2018-2023



BAPPEDA
KOTA JAMBI

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA JAMBI TAHUN 2018 - 2023



WALIKOTA JAMBI
PROPINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA JAMBI TAHUN 2018 - 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan pada hakekatnya merupakan upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sekaligus bagian dari proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara guna mewujudkan tujuan pembangunan. Dalam pengertian lain, pembangunan dapat diartikan sebagai rangkaian upaya berkesinambungan dan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan pembangunan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tujuan pembangunan daerah adalah dalam rangka untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya membutuhkan sinergisitas antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lainnya.

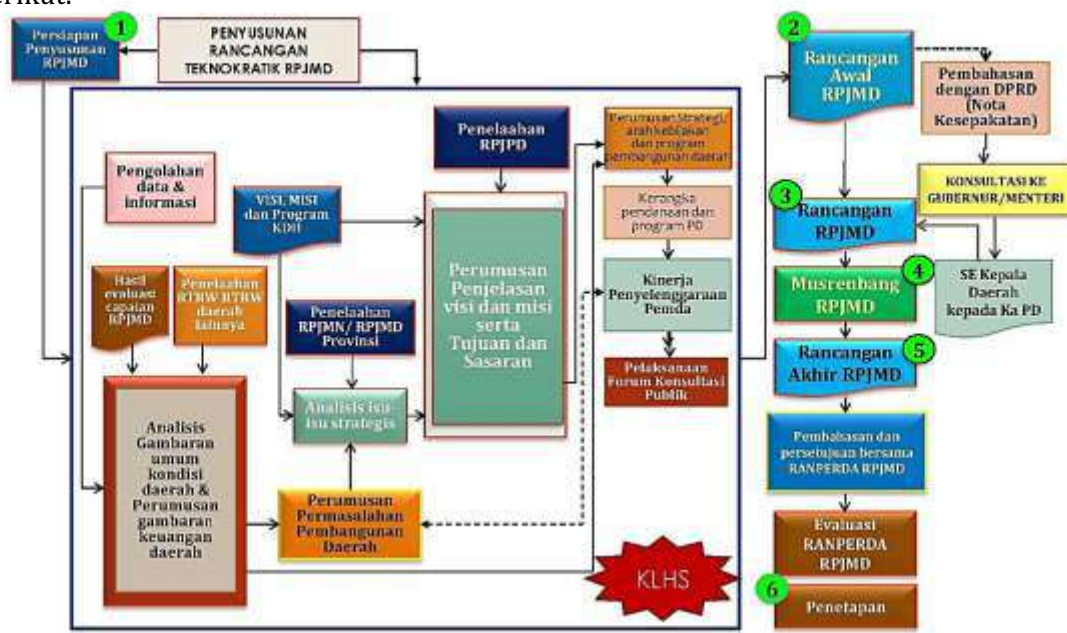
Proses pembangunan daerah dilakukan melalui beberapa tahapan diantaranya tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Pada tahap perencanaan, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional dengan berazaskan teknokratik, partisipatif, politis, dan atas-bawah serta bawah-atas yang dirumuskan secara transparan, *responsif*, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang wajib dirumuskan sesuai kaidah-kaidah diatas. Berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih paling lama 6 bulan sejak pelantikan harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk waktu 5 (lima) Tahun masa jabatannya yang tentunya berlaku untuk Kota Jambi, sebagai salah satu daerah yang melaksanakan Pilkada di Tahun 2018.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2018-2023 disusun melalui berbagai tahapan, analisis, uji publik, pembahasan bersama perangkat daerah dan DPRD serta pemangku kepentingan lainnya. Secara umum tahapan penyusunan RPJMD adalah sebagai berikut:

- 1) Persiapan Penyusunan RPJMD
- 2) Penyusunan Rancangan Awal RPJMD, yang terdiri dari:
 - a) Penyusunan rancangan awal RPJMD
 - b) Konsultasi Publik
 - c) Pembahasan dan kesepakatan bersama kepala daerah dengan DPRD
 - d) Konsultasi ke Gubernur
- 3) Penyusunan Rancangan RPJMD
- 4) Pelaksanaan Musrenbang RPJMD
- 5) Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD
- 6) Penetapan Peraturan Daerah Tentang RPJMD

Adapun tahapan proses penyusunan secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1.1.
Bagan Alir Tahapan Penyusunan RPJMD Kota Jambi

Berdasarkan tahapan dan proses yang telah dilakukan dalam penyusunan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 serta merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perencanaan pembangunan daerah, RPJMD memiliki peranan dan fungsi yang sangat penting dan memiliki nilai-nilai strategis dan politis sebagai berikut:

1. RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 merupakan media untuk mengimplementasikan janji Kepala Daerah terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat.
2. RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 merupakan pedoman pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 5 (lima) Tahun.
3. RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 merupakan pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
4. RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah selama 5 (lima) Tahun.
5. RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 merupakan pedoman bagi daerah dalam penyusunan rencana pembangunan daerah yang selaras dengan rencana pembangunan nasional dan provinsi.
6. RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 merupakan alat atau instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pelaksanaan pengendalian pembangunan.
7. RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 merupakan pedoman penilaian keberhasilan Pemerintah Daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilaporkan Kepala Daerah di setiap akhir Tahun anggaran dan pada akhir masa Jabatan.

RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari akhir tahapan ke-3 dan awal tahapan ke-4 dari 4 tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi Tahun 2005-2025. Pada tahap ke-3 pembangunan diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian

berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Sedangkan di Tahap ke-4 merupakan tahap dimana menjadikan Kota Jambi sebagai kota yang mandiri dengan struktur perekonomian yang mantap melalui sektor jasa sebagai pendorong perekonomian utama yang didukung dengan ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas sebagai aktor pembangunan bukan hanya sebagai objek pembangunan. Pada periode keempat yang merupakan periode akhir pembangunan diarahkan pada pemantapan capaian hasil pembangunan pada periode sebelumnya bukan saja perkembangan perdagangan barang dan jasa yang telah mampu menjadi tulang punggung perekonomian kota, tetapi juga ditopang profesionalisme aktor pembangunan, demokratisasi, dan berbasis kepada masyarakat yang berakhlak dan berbudaya.

RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 juga merupakan rencana pembangunan jangka menengah Wali kota dan Wakil Wali Kota terpilih periode Tahun 2018-2023 hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2018. Sehubungan dengan dilantiknya pasangan Dr. H. Syarif Fasha, ME dan Dr. dr. H. Maulana, MKM sebagai Wali kota dan Wakil Wali kota Kota Jambi periode 2018-2023 pada tanggal 7 November 2018 oleh Plt. Gubernur Jambi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.15-8334 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Wali Kota Jambi Provinsi Jambi tanggal 25 Oktober 2018 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 132.15-8335 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Wakil Wali Kota Jambi Provinsi Jambi tanggal 25 Oktober 2018, Pemerintahan Kota Jambi menyusun dan menetapkan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 dalam rangka menjalankan dan mencapai visi dan misi pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota periode Tahun 2018 – 2023, yang selanjutnya RPJMD menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah dan rencana Tahunan RKPD.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan dokumen RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Republik Indonesia Nomor 20);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 22. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
 23. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015– 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 2-218/2018);
26. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2009 Nomor 13);
27. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 09);
28. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Struktur Perangkat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14).

1.3. Hubungan RPJMD Kota Jambi dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Mengacu kepada sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang perencanaan pembangunan secara umum. RPJMD Kota Jambi adalah merupakan kesatuan dari seluruh dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah Kota Jambi. Secara Hierarchy, RPJMD Kota Jambi periode 2018-2023, sangat berhubungan erat dengan dokumen perencanaan lainnya, antara lain:

1. RPJMD Kota Jambi dengan RPJPD Kota Jambi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023 mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi yang merupakan Rancangan Pembangunan Periode ke empat dari RPJPD Kota Jambi 2005-2025. Dalam RPJPD Kota Jambi, visi yang telah ditetapkan adalah **“Pusat Perdagangan Barang dan Jasa, yang Religius dan Berbudaya”**, dimana visi tersebut dituangkan dalam visi RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 yaitu **“Menjadikan Kota**

Jambi Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa Berbasis Masyarakat Berakhlak Dan Berbudaya dengan Mengedepankan Pelayanan Prima” yang dituangkan dalam 5 (lima) Misi yang saling terkait satu sama lainnya sebagaimana cita-cita nasional bangsa Indonesia sesuai UUD 1945 yaitu mewujudkan “Masyarakat Adil dan Makmur”.



Gambar 1.2.
Tahapan Pembangunan dan Arahan Kebijakan RPJPD Kota Jambi 2005-2025

2. RPJMD Kota Jambi dengan RPJMD Provinsi Jambi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023 selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi periode 2016-2021 Berdasarkan kondisi riil Kota Jambi dilihat dari RPJMD Provinsi Jambi dan RPJMN adalah penerapan atau manifestasi dari seluruh program unggulan masing-masing RPJMD dituangkan dalam misi-misi terkait yang dapat dikerjakan dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun ke depan oleh seluruh organisasi perangkat daerah. Terdapat 6 (enam) misi RPJMD Provinsi Jambi yaitu:

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan daerah dan desa yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif serta berorientasi pelayanan publik.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender.
3. Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan jaminan kepastian hukum.
4. Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis dan agroindustri

5. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur umum, Pengelolaan energy dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan.
6. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

3. Hubungan RPJMD Kota Jambi dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Jambi

Dalam perspektif perencanaan tata ruang wilayah Provinsi Jambi, Kota Jambi merupakan bagian dari Kawasan Strategis Metropolitan Jambi dan Kawasan Strategis Muara Bulian-Jambi. Secara administratif lokasi Kawasan Strategis Metropolitan Jambi terdapat di Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi. Kawasan Strategis Metropolitan Jambi merupakan kawasan yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi dan strategis, dengan sektor unggulan yaitu perdagangan, jasa dan industri. Kawasan Strategis Metropolitan Jambi ini berfungsi untuk mendorong upaya optimalisasi Kota Jambi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan mendukung pengembangan sektor perdagangan, jasa dan industri skala nasional di Provinsi Jambi.

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Provinsi Jambi yang terkait dengan Kota Jambi antara lain:

1. Pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah Barat Tengah dan Timur, melalui salah satu strategi yaitu meningkatkan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang pengembangan pusat-pusat pelayanan berupa pengembangan fasilitas bongkar muat termasuk di PKN;
2. Pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder dan tersier sesuai daya dukung wilayah, melalui beberapa strategi seperti meningkatkan dan mengembangkan kawasan agropolitan dengan melengkapi fasilitas perdagangan pusat koleksi distribusi, meningkatkan dan mengembangkan kegiatan jasa perdagangan untuk mendukung kegiatan primer dan sekunder, serta menciptakan lapangan kerja perkotaan;
3. Pengoptimalisasian pemanfaatan kawasan budidaya untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah melalui strategi antara lain mengembangkan sektor unggulan di masing-masing kabupaten/kota sesuai dengan potensi yang ada, dan meningkatkan pemanfaatan kawasan budidaya sesuai dengan kapasitas daya dukung lingkungan;
4. Penetapan pusat-pusat kegiatan perkotaan untuk mendukung pelayanan sosial/ekonomi dan pengembangan wilayah, melalui strategi pemantapan PKN Kota Jambi sebagai pusat orientasi wilayah menuju Metropolitan Jambi.

4. Hubungan RPJMD Kota Jambi dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Jambi

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan. Dokumen Rencana Tata Ruang (RTR) memberikan arahan pembangunan yang bersifat spasial dan berimplikasi pada keruangan. Sedangkan Rencana Pembangunan, memberi payung konseptual bagi pembangunan secara spasial sebagai perwujudan visi misi kepala daerah.

Oleh karena itu, penyusunan RPJMD Kota Jambi juga memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola penataan ruang yang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033 sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kota Jambi.

Sebagaimana diketahui, tujuan RTRW Kota Jambi adalah untuk mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan dan jasa. Adapun kebijakan dan strategi implementasi penataan ruang wilayah Kota Jambi terdiri atas:

1. Kebijakan pemantapan peran dan fungsi kota sebagai Pusat Pemerintahan, Perdagangan, dan Jasa Regional, melalui strategi:

- a) Menyediakan fasilitas perdagangan pusat koleksi distribusi dan jasa guna mendukung upaya pembangunan kawasan agropolitan Provinsi Jambi;
- b) Memperkuat fungsi kompleks pemerintahan, perdagangan, dan jasa terpadu berskala regional.

2. Kebijakan pemantapan peran dan fungsi kota sebagai Pusat Pemerintahan, Perdagangan, dan Jasa Regional, melalui strategi:

- a) Memperkuat kemampuan Bandara Sultan Thaha sebagai pusat penyebaran tersier;
- b) Meningkatkan kemampuan jaringan jalan arteri sebagai penunjang utama konektivitas regional;
- c) Mengembangkan simpul dan jaringan transportasi kereta api yang terpadu dengan moda transportasi lainnya;
- d) Memperkuat kemampuan DAS Batanghari sebagai jaringan transportasi regional berbasis alam.

3. Kebijakan pembentukan struktur ruang kota yang optimal dan peningkatan kemampuan infrastruktur perkotaan, melalui strategi:

- a) Mengembangkan pusat-pusat pelayanan kota dengan berbasis suatu fungsi utama yang didukung oleh kemampuan bagian wilayah kota;
- b) Mempercepat penguatan kemampuan dan fungsi jaringan jalan kota;
- c) Mendorong pengembangan moda transportasi massal yang terkoneksi dengan pusat-pusat kegiatan;
- d) Mempercepat pemerataan akses pergerakan penumpang dan barang dari Selatan-Utara kota;
- e) Meningkatkan kemampuan utilitas perkotaan meliputi listrik, minyak, gas, persampahan dan air bersih;
- f) Mendorong pengembangan prasarana permukiman ramah lingkungan.

4. Kebijakan peningkatan kegiatan ekonomi perkotaan yang diakomodasi dalam pola ruang internal kota yang produktif dan berbasis ekologi melalui strategi:

- a) Mengembangkan kegiatan jasa, perdagangan dan industri untuk mendukung kegiatan ekonomi primer dan sekunder regional, serta menciptakan lapangan kerja perkotaan terutama di kawasan Metropolitan Jambi;
- b) Mendorong pengembangan kegiatan pariwisata dan jasa kreatif berbasis potensi lingkungan hidup dan budaya;
- c) Mendorong pengembangan kegiatan industri maupun ekonomi beresiko tinggi dengan berbasis mitigasi bencana dan pencemaran;
- d) Mempermudah akses investasi dan peran serta dunia usaha maupun masyarakat dalam menggerakkan kegiatan ekonomi produktif dalam skala kawasan ataupun komunitas.

5. Kebijakan penyelenggaraan pemanfaatan ruang kota yang berkelanjutan (*social and environmentally sustainable*) melalui strategi:

- a) Memeratakan akses penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum, meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pelayanan umum;
- b) Mendorong pengembangan kegiatan berbasis kearifan lokal dan budaya penduduk Jambi;
- c) Memastikan penyelenggaraan pemanfaatan ruang berbasis mitigasi bencana;
- d) Mempercepat pemenuhan standar penyediaan ruang terbuka hijau perkotaan secara merata.

6. Kebijakan pembentukan ruang-ruang perkotaan yang mendukung pengembangan sumber daya manusia melalui strategi:

- a) Menyediakan fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, dan sosial lainnya sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum;
- b) Memperkuat aksesibilitas ruang terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan dan sosial lainnya secara merata di seluruh wilayah kota;
- c) Mengadakan ruang-ruang publik (hijau dan non hijau) serta ruang rekreasi untuk memungkinkan masyarakat berinteraksi.

7. Kebijakan penguatan aspek pengawasan dan pengendalian di dalam penyelenggaraan penataan ruang kota melalui strategi:

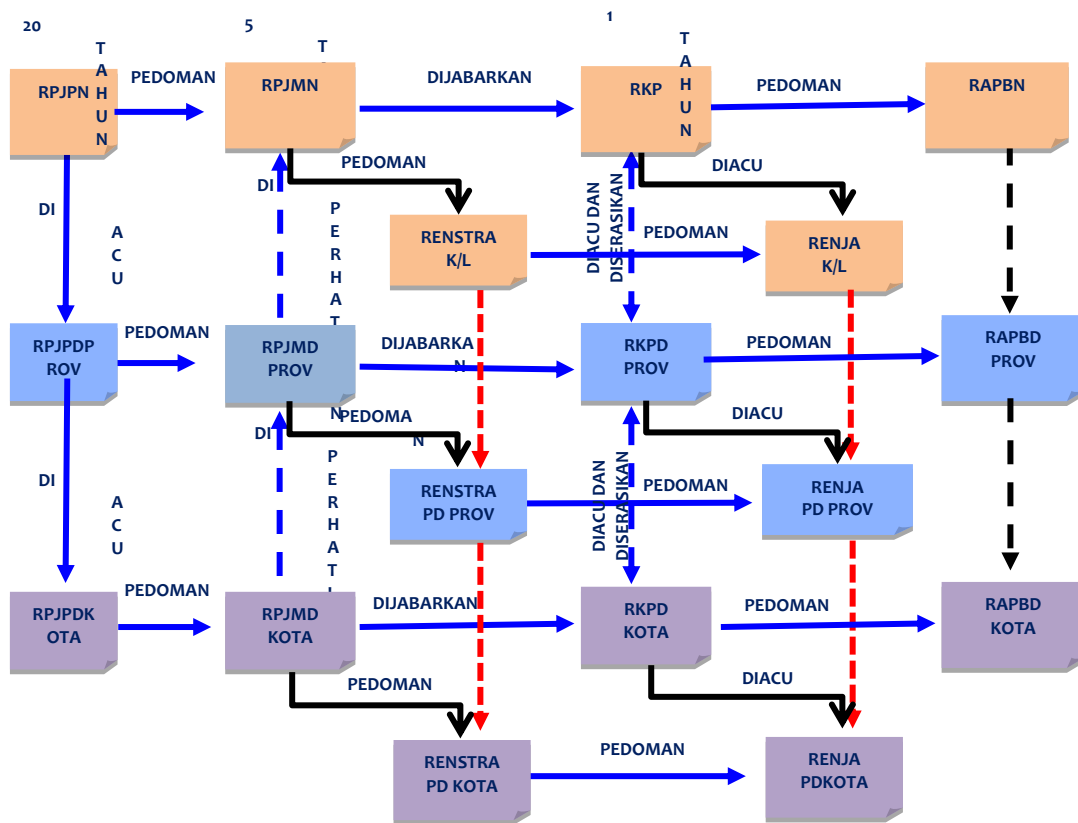
- a) Memastikan keterkaitan implementasi kebijakan penataan ruang dan substansi rencana umum tata ruang (melalui produk RTRW) ke dalam berbagai produk rencana rinci tata ruang;
- b) Memperkuat penyelenggaraan kegiatan pengawasan dan pengendalian tata ruang;
- c) Memperkuat koordinasi pihak-pihak yang merupakan *leading sector* penataan ruang kota;
- d) Mewujudkan mekanisme insentif-disinsentif dan mekanisme sanksi yang berkeadilan dalam penyelenggaraan penataan ruang kota.

5. RPJMD Kota Jambi dengan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Kota Jambi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023 sangat terkait dengan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Kota Jambi Tahun 2018-2023, hubungan ini tergambar dalam sebuah gambar yang dilingkupi oleh Rancangan Pembangunan Nasional diikuti oleh Rencana Kerja Provinsi Jambi atau level diatas Rencana Kerja Pemerintah Kota Jambi.

Hubungan Rencana Strategis yang dijabarkan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam RPJMD periode 2018-2023 sebagai turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi periode 2005-2025. RPJMD periode 2018-2023 sebagai turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi periode 2005-2025 akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah setiap Tahunnya.

Adapun hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dapat dilihat dari gambar di bawah ini.



Gambar 1.3.
Hubungan RPJMD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018–2023 adalah tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) Tahun, yang memuat visi, misi Kepala Daerah, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi dan program pembangunan.

Tujuan penyusunan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018–2023 adalah:

1. Menjabarkan dan menetapkan visi, misi, dan program pembangunan daerah jangka menengah;
2. Memberikan gambaran tentang gambaran keuangan daerah dan pendanaan pembangunan daerah jangka menengah;
3. Menetapkan arah pembangunan dan pedoman untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan perencanaan penganggaran;
4. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang selaras dan terpadu dengan perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi Jambi;

5. Memberikan instrumen dan indikator untuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018–2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terdiri dari 9 bab, dengan uraian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang kondisi Kota Jambi secara komprehensif sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan. Aspek yang disajikan diantaranya aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan analisis pengelolaan keuangan daerah yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas riil atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Bab ini menyajikan mengenai kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan kerangka pendanaan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini memuat berbagai permasalahan pembangunan yang diuraikan berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) Tahun mendatang.

- BAB V** **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**
- Bab ini menjelaskan visi dan misi Pemerintah Kota Jambi untuk kurun waktu 5 (lima) Tahun ke depan, yang disertai dengan tujuan dan sasarannya.
- BAB VI** **STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**
- Bab ini memuat dan menjelaskan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Bab ini juga menyajikan program pembangunan daerah yang dirumuskan dari masing-masing strategi untuk selanjutnya dijabarkan dalam program prioritas atau program operasional pada perangkat daerah.
- BAB VII** **KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**
- Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif, target dan Perangkat Daerah pelaksana berdasarkan bidang urusan.
- BAB VIII** **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**
- Bab ini berisikan penetapan indikator kinerja daerah. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagai indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan
- BAB IX** **PENUTUP**

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1. Letak Geografis dan Kondisi Administrasi Kota

Kota Jambi sebagai pusat wilayah dan Ibukota Provinsi Jambi, secara geografis terletak pada koordinat 01°32'45" sampai dengan 01°41'41' Lintang Selatan dan 103°31'29" sampai dengan 103°40'6" Bujur Timur. Secara administrasi wilayah Kota Jambi berbatasan langsung dengan:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi

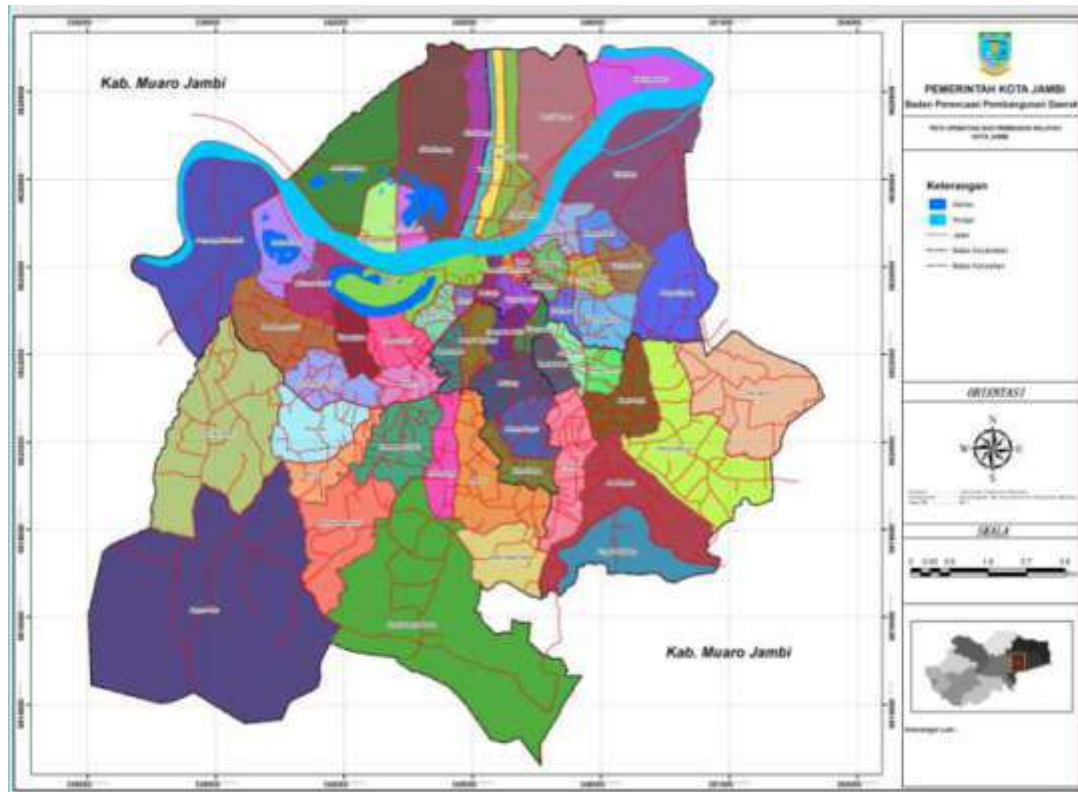
Luas keseluruhan wilayah administrasi Kota Jambi menurut Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 1986 seluas 205,38 KM² atau sekitar 0,38% dari luas wilayah Provinsi Jambi dan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 seluas 175,53 KM². Secara administratif Kota Jambi terbagi atas 11 Kecamatan dan 62 Kelurahan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Luas Wilayah Administratif Kecamatan dan Jumlah Kelurahan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)	Jumlah Kelurahan
1.	Telanaipura	19,20	10,93%	6
2.	Kotabaru	26,26	14,96%	5
3.	Jambi Timur	14,32	8,15%	9
4.	Jambi Selatan	7,51	4,27%	5
5.	Jelutung	7,63	4,34%	7
6.	Pasar Jambi	1,67	0,95%	4
7.	Danau Sipin	7,27	4,14%	5
8.	Danau Teluk	15,20	8,65%	5
9.	Pelayangan	12,77	10,12%	6
10.	Alam Barajo	39,87	22,71%	5
11.	Paal Merah	23,77	13,54%	5
Jumlah		175,53	100	62

Sumber: RTRW Kota Jambi 2013-2033, 2018 (data diolah)

Untuk lebih jelasnya mengenai letak orientasi dan batas administrasi dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini.

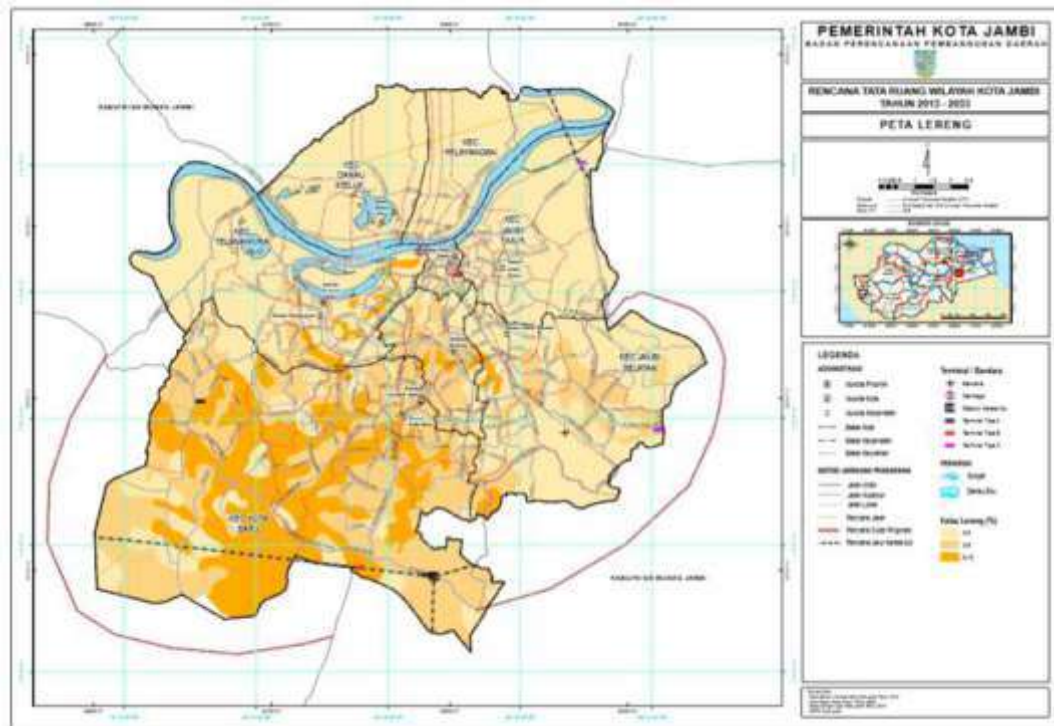


Sumber: RTRW Kota Jambi 2013-2033, 2018 (data diolah)

Gambar 2.1.
Peta Orientasi dan Pembagian Wilayah Kota Jambi

2.1.1.2. Topografi

Secara umum berdasarkan bentang alamnya, Kota Jambi berada pada ketinggian antara 10 sampai dengan 60 meter dari permukaan laut (mdpl) dan sebagian besar wilayah Kecamatan seperti: Pasar Jambi, Pelayangan, dan Danau Teluk berada pada ketinggian 0 – 10 meter dari permukaan laut, sedangkan wilayah Kecamatan Telanaipura, Jambi Selatan, Jambi Timur dan Kota Baru sebagian besar berada pada ketinggian 10 – 40 meter dari permukaan laut.



Sumber: RTRW Kota Jambi 2013-2033, 2018 (data diolah)

Gambar 2.2.
Peta Topografi Kota Jambi

2.1.1.3. Geologi

Dilihat dari struktur batuan, pada umumnya wilayah Kota Jambi terbentuk dari struktur batuan endapan permukaan, batuan sedimen umur miosen dan batuan sedimen umur pliosen. Struktur batuan endapan permukaan pada umumnya tersebar di sebelah utara Sungai Batanghari, meliputi Kecamatan Danau Teluk dan Kecamatan Pelayangan. Sedangkan batuan sedimen umur miosen tersebar di sebelah barat wilayah Kota Jambi meliputi Kecamatan Kota Baru.

Berdasarkan luasannya, jenis batuan endapan permukaan menempati areal seluas 10.454 hektar mencapai 50,90% dari total wilayah Kota Jambi, batuan sedimen umur miosen seluas 8.375 hektar (40,78%) dan batuan sedimen umur pliosen seluas 1.709 hektar (8,32%). Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.2. berikut.

Tabel 2.2.
Formasi Geologi Kota Jambi

NO.	FORMASI GEOLOGI	LUAS (HA)	%
1.	Endapan Permukaan	10.454	50,90
2.	Batuan Sedimen Umur miosen	8.375	40,78
3.	Batuan Sedimen Umur pliosen	1.709	8,32
Jumlah		20.538	100,00

Sumber: Data Pokok Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2013

2.1.1.4. Klimatologi

Pada Tahun 2017 umumnya wilayah Kota Jambi dan sekitarnya beriklim tropis dengan dipengaruhi oleh dua musim, yaitu Musim Barat dan Musim Timur. Pada saat musim barat angin bertiup ke arah barat yang biasanya terjadi pada April–Oktober, sementara musim Timur angin bertiup ke arah Timur dan Selatan yang berlangsung pada Oktober–April. Musim kemarau umumnya terjadi pada Mei sampai September dan musim hujan terjadi pada Oktober sampai April.

Selama Tahun 2017 suhu udara rata-rata Kota Jambi terendah sebesar 26,5°C terjadi pada Februari dan tertinggi sebesar 27,2°C terjadi pada November, dengan kelembaban udara rata-rata terendah 82% pada Mei dan Agustus, kelembaban tertinggi sebesar 85% terjadi pada Maret, Oktober dan Desember. Rata-rata suhu dan kelembaban udara menurut bulan pada Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3.
Rata-rata suhu dan kelembaban udara

Bulan	Suhu Udara (°C)			Kelembaban Udara (%)		
	Maks	Min	Rata-rata	Maks	Min	Rata-rata
Januari	35,4	22,0	27,1	98	42	83
Februari	33,5	21,5	26,5	100	52	84
Maret	34,4	22,0	26,8	100	56	85
April	34,2	22,8	26,9	100	58	83
Mei	33,4	22,5	27,2	100	59	82
Juni	34,0	21,5	27,2	99	57	85
Juli	33,8	22,4	26,8	100	55	84
Agustus	33,6	21,6	27,0	99	49	82
September	34,1	22,1	27,1	100	51	84
Oktober	34,6	23,4	27,1	98	58	85
November	34,0	21,7	27,2	100	52	84
Desember	34,4	21,6	26,9	100	56	85

Sumber: BPS Kota Jambi, 2018

Curah hujan paling tinggi selama Tahun 2017 terjadi pada November yaitu 340 mm³ dan paling rendah terjadi pada Juli yaitu 55 mm³. Sedangkan hari hujan paling banyak terjadi pada Desember sebanyak 25 hari, dan hari hujan paling sedikit sebanyak 15 hari terjadi pada Juni. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.4.
Jumlah Curah Hujan dari Hari Hujan Menurut Bulan
Di Kota Jambi Tahun 2017

Bulan	Curah Hujan (mm ³)	Hari Hujan (hari)
Januari	129	20
Februari	191	21
Maret	196	23
April	298	24
Mei	158	22
Juni	233	15
Juli	55	17
Agustus	68	19
September	216	21

Bulan	Curah Hujan (mm ³)	Hari Hujan (hari)
Oktober	230	19
November	340	18
Desember	273	25

Sumber: BPS Kota Jambi, 2018

2.1.1.5. Hidrologi dan Hidrogeologi

Kota Jambi dibelah oleh Sungai Batanghari sehingga membentuk morfologi kota terbelah dengan 2 (dua) bagian besar yaitu bagian Selatan dan bagian Utara. Bagian selatan merupakan bagian terbesar wilayah Kota Jambi. Pada wilayah ini sedikitnya terdapat 5 (lima) buah anak Sungai Batanghari, yaitu:

1. Sungai Kenali Besar

Sungai ini melewati Kecamatan Kotabaru dan Kecamatan Telanaipura, kemudian masuk kedalam Danau Kenali terus ke Danau Sipin dan akhirnya bermuara ke Sungai Batanghari.

2. Sungai Kambang

Daerah pengaliran Sungai Kambang meliputi sebagian Kelurahan Simpang III Sipin di Kecamatan Kota Baru dan Kelurahan Simpang IV Sipin.

3. Sungai Asam

Daerah pengaliran Sungai Asam meliputi Kecamatan Kota Baru (yaitu meliputi sebagian Kelurahan Kenali Asam Bawah, sebagian Kelurahan Kenali Asam Atas, Kelurahan Sukakarya, Kelurahan Simpang III Sipin dan Kelurahan Paal Lima), Kecamatan Jelutung (yaitu meliputi Kelurahan Jelutung, Kelurahan Lebak Bandung dan Kelurahan Cempaka Putih), Kecamatan Pasar Jambi (meliputi Kelurahan Beringin dan Kelurahan Orang Kayo Hitam).

4. Sungai Tembuku

Daerah pengaliran Sungai Tembuku meliputi sebagian Kecamatan Thehok, Kelurahan Tambak Sari, sebagian Kelurahan Kebon Handil, Kelurahan Jelutung, sebagian Kelurahan Cempaka Putih, Kelurahan Talang Jauh, sebagian Kelurahan Sulanjana, Kelurahan Rajawali dan Kelurahan Kasang.

5. Sungai Selincah

Daerah pengaliran Sungai Selincah meliputi Kelurahan Talang Bakung dan Kelurahan Sijenjang.

Sungai Batanghari selain berfungsi hidrologis juga berfungsi sebagai prasarana transportasi dan penunjang kegiatan ekonomi masyarakat serta sebagai sumber air baku untuk air minum. Sedangkan danau yang ada di Kota Jambi antara lain adalah Danau Sipin, Danau Teluk, Danau Penyengat dan Danau Kambang.

2.1.1.6. Penggunaan Lahan

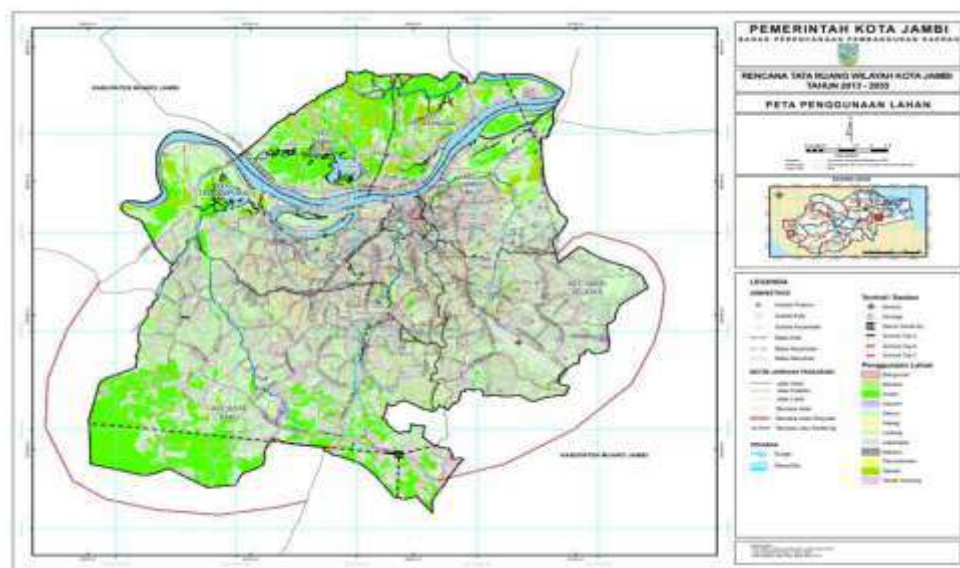
Hasil pengolahan citra satelit Kota Jambi Tahun 2013 yang memperhatikan kemajuan pembangunan Tahun 2017 dengan skala peta 1:5.000 menunjukkan

persentase tertinggi pada penggunaan lahan permukiman sebesar 26,48%, Hutan sebesar 18,29% dan Bangunan 13,56%.

Tabel 2.5.
Penggunaan Lahan Di Kota Jambi

Penggunaan Lahan	Luas	
	Hektar	%
Bangunan	2.380	13,56
Belukar	1.073	6,11
Danau	245	1,39
Hutan	3.209	18,29
Industri	113	0,64
Jalan	744	4,24
Kebun	2.083	11,87
Kilang	0	0,00
Kolam	100	0,57
Ladang	1.181	6,73
Lapangan	29	0,17
Makam	34	0,19
Mesjid	13	0,08
Parit	23	0,13
Permukiman	4.648	26,48
Sawah	636	3,62
Sungai	758	4,32
Tanah Kosong	281	1,60
Jumlah	17.553	100,00

Sumber: Peta Citra Satelit 2013, 2018 (data diolah)



Sumber: RTRW Kota Jambi 2013-2033,2018

Gambar 2.3.
Peta Penggunaan Lahan di Kota Jambi

2.1.1.7. Wilayah Rawan Bencana

Kota Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013 – 2033 Lembaran Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 membagi kawasan rawan bencana di Kota Jambi menjadi kawasan rawan bencana banjir dan kawasan rawan bencana kebakaran.

Kawasan rawan bencana banjir adalah meliputi Kecamatan Telanaipura; Kecamatan Pasar Jambi; Kecamatan Jambi Timur; Kecamatan Danau Teluk; dan Kecamatan Pelayangan. Rencana pengelolaan kawasan rawan bencana banjir dilakukan melalui:

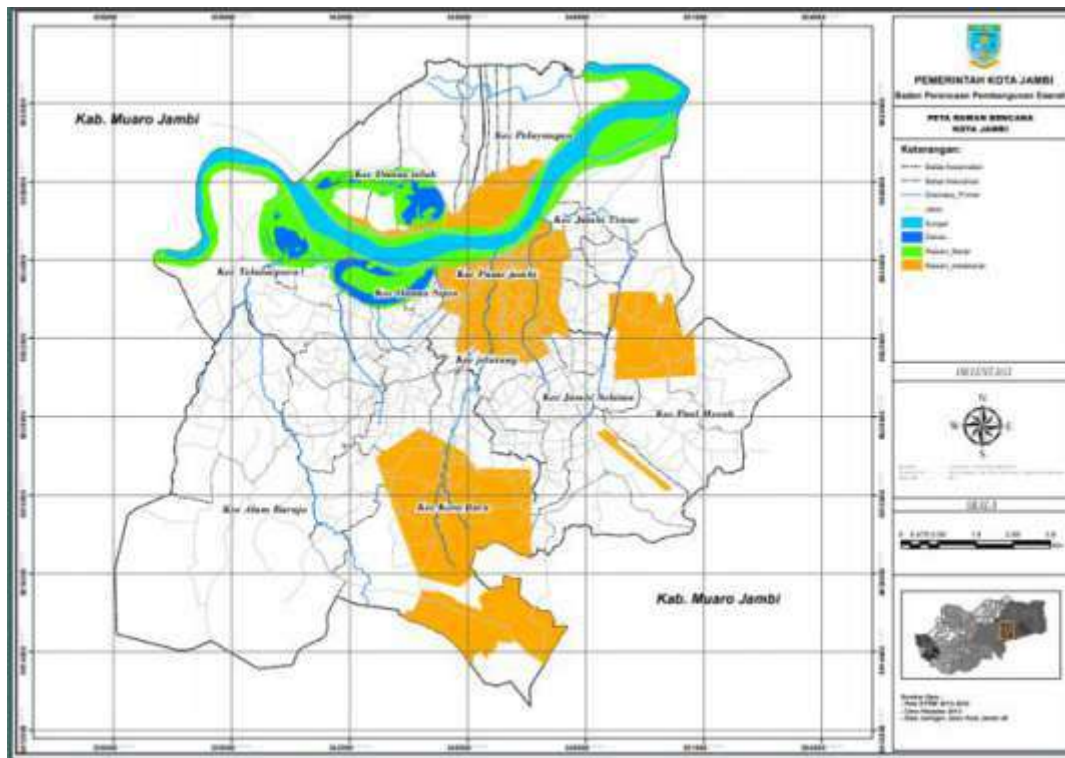
- a. Kerjasama dengan daerah lain yang juga dialiri oleh DAS Batanghari untuk penyelamatan ekosistem sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- b. Pembatasan pengembangan kegiatan budidaya di sekitar DAS Batanghari
- c. Melaksanakan peninjauan kembali atas perizinan kegiatan – kegiatan budidaya dengan prioritas pada lokasi – lokasi yang berada di sekitar sistem DAS Batanghari yang telah dan berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan.

Sedangkan Kawasan rawan bencana kebakaran di Kota Jambi, meliputi:

- a. Kecamatan Danau Teluk;
- b. Kecamatan Pelayangan
- c. Kecamatan Telanaipura
- d. Kecamatan Pasar Jambi
- e. Kecamatan Jambi Timur
- f. Kecamatan Jelutung

Adapun rencana pengelolaan kawasan rawan bencana kebakaran dilakukan melalui:

- a. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana kebakaran di setiap kecamatan;
- b. Peningkatan aksesibilitas armada pemadam kebakaran pada lokasi – lokasi rawan bencana;
- c. Pengaturan jarak bangunan dan kepadatan bangunan



Sumber: RTRW Kota Jambi 2013-2033, 2017

Gambar 2.4.
Peta Rawan Bencana Kota Jambi

2.1.2. Kondisi Kependudukan

1. Jumlah Penduduk

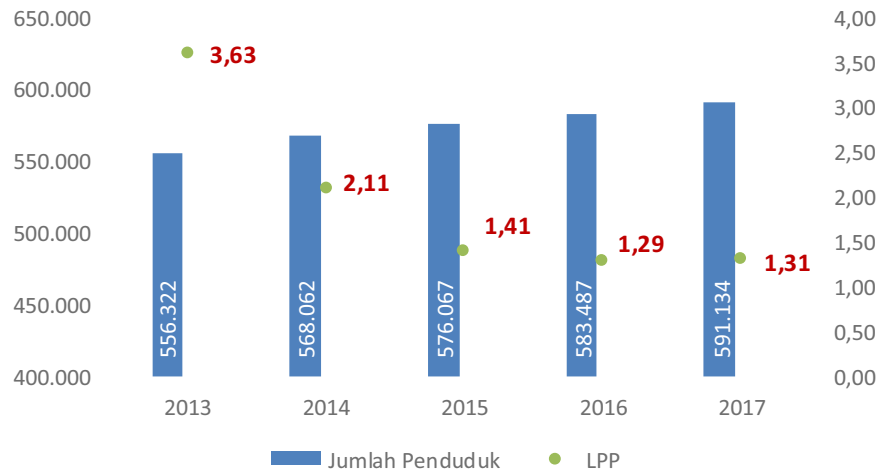
Setiap Tahun jumlah penduduk di Kota Jambi terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2013 jumlah penduduk Kota Jambi adalah 556.332 jiwa, dan terus meningkat menjadi 591.134 jiwa pada Tahun 2017. Adapun pertumbuhan penduduknya setiap Tahun selama kurun waktu 2013-2017 berkisar antara 1,29% sampai dengan 3,63% pertahunnya, dengan angka pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 1,95%. Tabel dibawah ini menunjukkan jumlah dan pertumbuhan penduduk di Kota Jambi dari Tahun 2013-2017.

Tabel 2.6.
Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kota Jambi Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan (%)
2013	556.332	3,63
2014	568.062	2,11
2015	576.067	1,41
2016	583.487	1,29
2017	591.134	1,31
Rata-rata		1,95

Sumber: BPS Kota Jambi, 2018 (data diolah)

Perkembangan jumlah penduduk pada kurun waktu Tahun 2013-2017 mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan setiap Tahunnya atau terjadi pertumbuhan negatif, seperti ditunjukkan dalam gambar berikut ini.



Sumber: BPS, Kota Jambi Dalam Angka, 2018 (data diolah)

Gambar 2.5.
Perkembangan Demografi Kota Jambi 2013 - 2017

Penduduk Kota Jambi Tahun 2017 sebanyak 591.134 jiwa yang terdiri atas 297.036 jiwa penduduk laki-laki dan 294.098 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan jumlah penduduk Tahun 2015. Pada Tahun 2017 penduduk Kota Jambi mengalami pertumbuhan sebesar 1,31 persen dengan rasio jenis kelamin 101,15. Distribusi atau sebaran penduduk tertinggi pada kurun waktu Tahun 2013-2017 berada di Kecamatan Alam Barajo kemudian Kecamatan Paal Merah. Jumlah penduduk tertinggi bukan berarti kepadatan penduduk di Kecamatan Alam Barajo dan Paal Merah juga tinggi. Kepadatan penduduk di Kota Jambi Tahun 2017 mencapai 3.384 jiwa/km² dengan kepadatan tertinggi di Kecamatan Jambi Selatan sebesar 8.245 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Danau Teluk sebesar 791 jiwa/km². Dari distribusi atau sebaran penduduknya di 11 kecamatan di Kota Jambi, kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling banyak adalah Kecamatan Alam Barajo dengan penduduk sebanyak 99.366 jiwa pada Tahun 2017 atau sekitar 16,73 persen dari total penduduk Kota Jambi, diikuti oleh Kecamatan Paal Merah sebanyak 92.061 jiwa atau 15,50 persen dan Kecamatan Kotabaru sebanyak 75.370 jiwa atau sekitar 12,69 persen. Sementara itu kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Danau Teluk yaitu sebanyak 12.029 jiwa, atau 2,03 persen dari total penduduk Kota Jambi.

Tingginya jumlah penduduk di Kecamatan Alam Barajo dan Kecamatan Paal Merah dikarenakan kedua kecamatan ini memang mempunyai wilayah yang lebih luas dibandingkan wilayah kecamatan lainnya. Berdasarkan kepadatannya, sebagian besar

penduduk Kota Jambi terkonsentrasi di 3 (tiga) kecamatan yang berada di pusat kota. Hal ini terlihat dari kepadatan penduduknya yang lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya, yaitu Kecamatan Jambi Selatan 8.245 Jiwa/Km² pada Tahun 2017, Kecamatan Jelutung 7.989 jiwa/km² dan Kecamatan Pasar Jambi 7.174 jiwa/km². Sedangkan 8 (delapan) kecamatan lainnya memiliki kepadatan penduduk yang berkisar antara 791 Jiwa/Km² hingga 6.630 Jiwa/Km². Hal ini berarti terdapat ketimpangan sangat besar sebaran penduduk di 3 (tiga) kecamatan kawasan pusat kota dan 8 kecamatan lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7.
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Jambi Tahun 2013-2017 per Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan (jiwa/Km ²)				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Kotabaru	26,26	2.798	2.655	2.729	2.799	2.870
2.	Alam Barajo	39,87	2.056	2.254	2.317	2.377	2.492
3.	Jambi Selatan	7,51	8.320	7.953	8.053	8.139	8.245
4.	Paal Merah	23,77	3.517	3.667	3.709	3.744	3.873
5.	Jelutung	7,64	8.365	8.124	8.181	8.234	7.989
6.	Pasar Jambi	1,68	7.885	7.513	7.496	7.474	7.174
7.	Telanaipura	19,2	2.250	2.553	2.578	2.603	2.688
8.	Danau Sipin	7,28	5.960	6.432	6.496	6.557	6.630
9.	Danau Teluk	15,21	786	786	789	791	791
10.	Pelayangan	12,78	1.030	1.037	1.046	1.054	1.055
11.	Jambi Timur	14,33	4.602	4.596	4.616	4.634	4.658
Kota Jambi		175,53	3.169	3.236	3.282	3.324	3.384

Sumber: BPS Kota Jambi, 2018 (data diolah)

2. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Struktur Usia

Berdasarkan jumlah penduduk menurut jenis kelamin diketahui bahwa Kota Jambi memiliki jumlah penduduk dengan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan (*sex ratio*) relatif konstan setiap Tahunnya, yaitu berkisar antara 101,00 sampai dengan 101,17 untuk kurun waktu Tahun 2013 – 2017. Hal ini berarti dari 100 penduduk perempuan di Kota Jambi terdapat 101 penduduk laki-laki. Tabel berikut memperlihatkan jumlah penduduk di Kota Jambi menurut jenis kelamin.

Tabel 2.8.
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kota Jambi Tahun 2013-2017

Tahun	Jenis Kelamin				Laki + Perempuan	Sex Ratio
	Laki-Laki		Perempuan			
	Jumlah	%	Jumlah	%		
2013	286.289	50,29	283.042	49,71	569.331	101,00
2014	285.492	50,26	282.570	49,74	568.062	101,01

2015	289.713	50,29	286.354	49,71	576.067	101,17
2016	293.217	50,25	290.270	49,75	583.487	101,03
2017	297.036	50,25	294.098	49,75	591.134	101,15

Sumber: BPS Kota Jambi, 2018 (data diolah)

Tingginya angka *sex ratio* di beberapa kecamatan yang merupakan sentra bisnis, diperkirakan kaum migran yang masuk ke Kota Jambi lebih didominasi oleh penduduk laki-laki berusia produktif (usia 15-64 Tahun) yang bertujuan mencari nafkah/bekerja. Analisa ini didukung oleh lebih tingginya jumlah penduduk usia produktif laki-laki dibandingkan perempuan pada Tahun 2015. Tidak dapat dipungkiri, tingginya laju pertumbuhan ekonomi Kota Jambi telah menjadi magnet bagi penduduk dari daerah lain untuk tinggal dan mencari nafkah di Kota Jambi. Penduduk usia produktif merupakan suatu modal dalam pelaksanaan pembangunan di segala sektor, dengan harapan produktivitas dan efektivitas yang terjadi didukung pula dengan sarana dan prasarana pembangunan, dimana manusia merupakan tujuan dan pelaksana pembangunan. Keluasan pilihan bagi usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya secara kumulatif tentu akan mendorong naiknya angka IPM.

2.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan perkembangan dan karakteristik wilayah Kota Jambi, teridentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perdagangan jasa, perumahan permukiman, industri dan lain-lain. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Jambi 2013-2033 yang telah disahkan melalui Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013, pengembangan struktur ruang Kota Jambi memiliki 3 (tiga) fokus kebijakan yaitu:

- a) perwujudan pusat – pusat kegiatan yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa utama dengan skala pelayanan lokal dan nasional dengan prinsip berkelanjutan
- b) peningkatan aksesibilitas perkotaan; dan
- c) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana perkotaan yang dapat mendorong perkembangan kegiatan dan perbaikan lingkungan secara komprehensif.

Sedangkan kebijakan pengembangan pola ruang meliputi:

- a) Kebijakan pengelolaan kawasan lindung, meliputi:
 - peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung; dan
 - peningkatan dan penyediaan ruang terbuka hijau yang proporsional diseluruh wilayah kota; dan
- b) Kebijakan pengembangan kawasan budidaya, meliputi:
 - pengaturan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung;
 - pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien;

- Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi; dan
- Pengembangan kawasan strategis cagar budaya

Selain itu terdapat potensi pengembangan wilayah yang kemudian ditetapkan sebagai kawasan strategis sebagai berikut:

- a) kawasan strategis dari perspektif ekonomi, pada kawasan perdagangan dan jasa di BWK I Kecamatan Pasar Jambi, sebagian Kecamatan Jambi Timur dan sebagian Kecamatan Jelutung;
- b) kawasan strategis dari perspektif sosial budaya, pada kawasan Jambi Kota Seberang, Kecamatan Pelayangan dan Kecamatan Danau Teluk

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

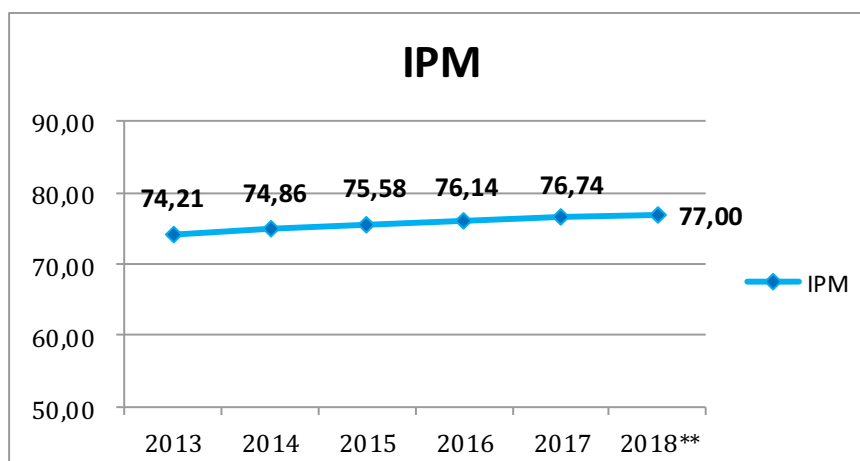
2.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada Tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan Tahunan Human Development Report (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar:

1. Umur panjang dan hidup sehat
2. Pengetahuan
3. Standar hidup layak

Capaian IPM Kota Jambi Tahun 2013 – 2018** dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.6.
Perkembangan IPM Kota Jambi Tahun 2013-2018**

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia Kota Jambi terus mengalami kenaikan, pada Tahun 2013 Indeks Pembangunan Manusia sebesar 74,21 poin meningkat menjadi 77,00 poin pada Tahun 2018** atau mengalami kenaikan 2,79 poin. Peningkatan indeks pembangunan manusia menandakan harapan untuk hidup, baik dari dimensi kesehatan, harapan hidup, sekolah maupun hidup layak semakin panjang.

2. Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan (2.100 kilo kalori) dan bukan makanan. Konsep yang dipakai oleh pemerintah (BPS) dan juga beberapa negara lain dalam menentukan kemiskinan adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Penduduk dikatakan miskin jika penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan garis kemiskinan adalah rupiah yang diperlukan agar penduduk dapat hidup layak secara minimum yang mencakup pemenuhan kebutuhan minimum akan makanan (2.100 kkal/kapita/hari) dan bukan makanan.

Tabel 2.9.
Data Kemiskinan Kota Jambi 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Tingkat Kemiskinan (%) (P0)	9,96	8,94	9,67	8,87	8,84
Penduduk Miskin (orang)	50.090	50.950	55.510	51.610	52.080
Garis Kemiskinan (Rp/bulan/kapita)	346.099	359.686	372.600	397.088	413.722
Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,23	0,98	1,36	1,59	1,13
Keparahan Kemiskinan (P2)	0,26	0,20	0,25	0,43	0,27

Sumber: BPS Kota Jambi, 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kemiskinan di Kota Jambi masih berada pada angka yang masih tinggi yaitu 8,84 % pada Tahun 2017. Dengan tingkat kemiskinan 8,84% tentunya menjadi permasalahan dan isu strategis yang harus menjadi prioritas dalam pembangunan kedepan. Namun demikian jika dilihat dari Tahun 2013 tingkat kemiskinan berada pada 9,96%, laju penurunan tingkat kemiskinan sudah menunjukkan hasil yang positif, walaupun belum menunjukkan angka yang cukup signifikan penurunannya, dengan rata-rata penurunan sekitar 0,03% perTahun.

3. PDRB Menurut Lapangan Usaha

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Penghitungan PDRB dilakukan atas dasar harga berlaku (harga-harga pada Tahun penghitungan) dan atas dasar harga konstan (harga-harga pada Tahun yang dijadikan Tahun dasar penghitungan) untuk dapat melihat besarnya nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari masing-masing lapangan usaha (kategorial) maupun dari sisi penggunaan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha mengalami peningkatan dari Rp.16.583,95 milyar pada Tahun 2013

menjadi Rp.26.294,31 milyar pada Tahun 2017. Begitu pula dengan PDRB Kota Jambi atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha Tahun 2013 meningkat dari Rp. 13.939,74 milyar menjadi Rp. 17.728,34 milyar pada Tahun 2017. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.10. dan tabel 2.11.

Tabel 2.10.
Produk Domestik Regional Bruto Kota Jambi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013–2017 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	Tahun				
	2013	2014	2015	2016*	2017**
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	222,96	259,50	285,98	310,93	318,35
B Pertambangan dan Penggalian	934,93	945,87	541,71	519,83	407,74
C Industri Pengolahan	1.988,89	2.254,42	2.467,77	2.655,30	2.830,67
D Pengadaan Listrik dan Gas	24,08	30,78	38,21	47,92	55,56
E Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	47,19	51,11	56,36	62,06	66,78
F Konstruksi	1.685,21	1.830,53	1.929,78	2.090,38	2.308,87
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.121,00	5.021,86	5.999,14	7.233,21	7.952,23
H Transportasi dan Pergudangan	1.963,93	2.162,10	2.535,82	3.072,60	3.329,32
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	357,05	439,12	484,23	558,39	631,99
J Informasi dan Komunikasi	721,77	788,72	941,74	1.115,13	1.205,59
K Jasa Keuangan dan Asuransi	1.090,06	1.179,77	1.251,24	1.465,86	1.536,12
L Real Estate	437,89	480,60	527,00	586,66	634,74
M,N Jasa Perusahaan	497,99	554,29	633,41	729,19	792,13
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.208,89	1.597,56	2.021,31	2.152,99	2.263,90
P Jasa Pendidikan	813,56	830,90	956,33	1.091,38	1.190,86
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	346,36	419,77	473,04	544,57	587,99
R,S,T ,U Jasa Lainnya	122,20	130,62	150,39	169,12	181,46
PDRB	16.583,95	18.977,51	21.293,45	24.405,53	26.294,31
PDRB TANPA MIGAS	15.735,29	18.129,99	20.855,76	23.967,72	25.904,38

Sumber: BPS Kota Jambi, 2018

* Angka Sementara

**Angka Perbaikan

Tabel 2.11.
Produk Domestik Regional Bruto Kota Jambi Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013–2017 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	Tahun				
	2013	2014	2015	2016*	2017**
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	167,00	176,10	180,64	183,86	187,68
B Pertambangan dan Penggalian	760,24	766,19	526,09	509,00	418,28
C Industri Pengolahan	1.751,32	1.866,51	1.962,94	2.045,89	2.124,29

Lapangan Usaha	Tahun				
	2013	2014	2015	2016*	2017**
D Pengadaan Listrik dan Gas	23,52	27,64	29,45	31,18	31,73
E Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	38,82	40,08	41,27	42,99	43,96
F Konstruksi	1.421,24	1.479,15	1.516,11	1.578,66	1.703,57
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.318,51	3.763,51	4.219,92	4.544,46	4.784,48
H Transportasi dan Pergudangan	1.744,40	1.887,58	1.995,12	2.242,84	2.398,29
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	280,18	336,43	350,23	379,07	415,17
J Informasi dan Komunikasi	683,71	709,84	776,30	843,49	900,36
K Jasa Keuangan dan Asuransi	889,81	919,66	936,67	1.050,08	1.085,94
L Real Estate	377,29	392,46	402,01	421,73	444,99
M,N Jasa Perusahaan	394,13	418,40	446,93	476,18	504,52
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	996,42	1.142,18	1.215,55	1.251,81	1.282,75
P Jasa Pendidikan	665,36	674,12	725,60	771,53	805,60
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	315,47	364,42	401,89	430,57	457,50
R,S,T ,U Jasa Lainnya	112,32	115,97	125,23	133,10	139,24
PDRB	13.939,74	15.080,23	15.851,95	16.936,44	17.728,34
PDRB TANPA MIGAS	13.247,72	14.387,71	15.400,74	16.484,68	17.321,02

Sumber: BPS Kota Jambi, 2018

* Angka Sementara

**Angka Perbaikan

Berdasarkan Tabel 2.10 dan 2.11 terlihat bahwa secara agregat seluruh lapangan usaha atau kategori pembentuk perekonomian regional Kota Jambi mengalami peningkatan, kecuali kategori usaha pertambangan dan penggalian (sekunder). Kondisi ini menggambarkan tren peningkatan total output barang dan jasa yang dihasilkan di Kota Jambi dibandingkan Tahun sebelumnya. Peningkatan PDRB sejalan dengan adanya peningkatan jumlah angkatan kerja (Tabel 2.55), sedangkan peningkatan tingkat partisipasi tenaga kerja, membuktikan terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja yang tersedia, sehingga secara makro perekonomian Kota Jambi tumbuh secara berkualitas.

4. Struktur Perekonomian

Dari besaran PDRB, dapat digambarkan kontribusi nilai tambah setiap kategori dalam pembentukan PDRB atau distribusi persentase kategorial terhadap pembentukan PDRB sehingga terlihat struktur perekonomiannya. Semakin besar persentase suatu kategori semakin besar pengaruh kategori tersebut dalam membentuk struktur ekonomi suatu daerah, sehingga akan tampak kategori-kategori yang dominan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi wilayah bersangkutan. Lengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.12.

Tabel 2.12.
Distribusi PDRB Atas Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2013-2017 (Persen)

Lapangan Usaha	Tahun				
	2013	2014	2015	2016*	2017**
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,34	1,37	1,34	1,27	1,21
B Pertambangan dan Penggalian	5,64	4,98	2,54	2,13	1,55
C Industri Pengolahan	11,99	11,88	11,59	10,88	10,77
D Pengadaan Listrik dan Gas	0,15	0,16	0,18	0,20	0,21
E Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,28	0,27	0,26	0,25	0,25
F Konstruksi	10,16	9,65	9,06	8,57	8,78
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	24,85	26,46	28,17	29,64	30,24
H Transportasi dan Pergudangan	11,84	11,39	11,91	12,59	12,66
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,15	2,31	2,27	2,29	2,40
J Informasi dan Komunikasi	4,35	4,16	4,42	4,57	4,58
K Jasa Keuangan dan Asuransi	6,57	6,22	5,88	6,01	5,84
L Real Estate	2,64	2,53	2,47	2,40	2,41
M,N Jasa Perusahaan					
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,29	8,42	9,49	4,47	4,53
P Jasa Pendidikan	4,91	4,38	4,49	4,47	4,53
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,09	2,21	2,22	2,23	2,24
R,S,T ,U Jasa Lainnya	0,74	0,69	0,71	0,69	0,69
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PDRB TANPA MIGAS	94,88	95,53	97,94	98,21	98,52

Sumber: BPS Kota Jambi, 2018

* Angka Sementara

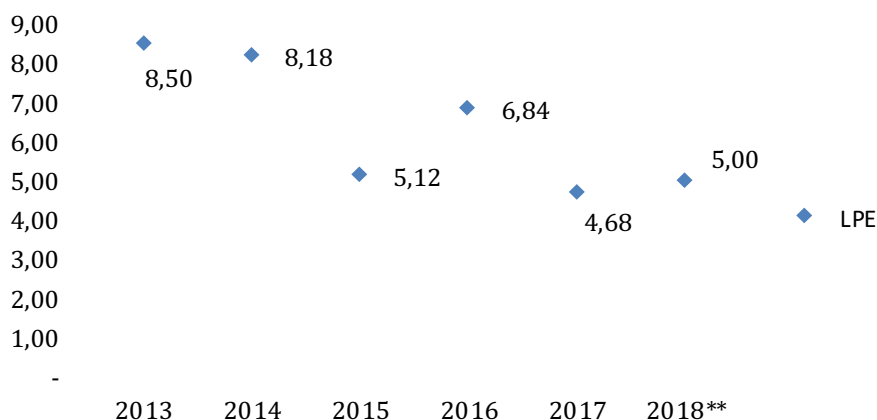
**Angka Perbaikan

Dari tabel 2.11, selama Tahun 2013-2017 kategori yang paling besar kontribusinya adalah kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 30,24%, Transportasi dan Pergudangan sebesar 12,66%, kemudian Industri Pengolahan sebesar 10,77%. Berdasarkan kelompok kategori, maka kategori-kategori yang produksinya bukan dalam bentuk fisik (Tersier) berkontribusi dominan dalam penciptaan nilai tambah di Kota Jambi, disusul kategori-kategori yang mengolah bahan baku menjadi barang lain yang lebih tinggi nilainya (Sekunder). Sedangkan kategori-kategori yang tidak mengolah bahan baku, yang hanya mendayagunakan sumber-sumber alam (Primer) kontribusinya semakin kecil. Pergeseran kontribusi kategorial mengindikasikan dominasi perekonomian Kota Jambi akan menuju pada struktur ekonomi yang berbasis pada perdagangan dan jasa skala regional, sehingga pembangunan sektor ekonomi mesti diarahkan untuk memfasilitasi terwujudnya Kota Jambi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi utama di Propinsi Jambi dan sekitarnya.

5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian di suatu wilayah. Umumnya, laju pertumbuhan ekonomi (LPE) diukur dengan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Dalam rentang

Tahun 2013-2018, LPE Kota Jambi tertinggi pada Tahun 2013 tercatat 8,50%. Pada Tahun selanjutnya, LPE Kota Jambi mengalami fluktuasi, hal ini dipengaruhi oleh sentimen ekonomi global maupun nasional. Namun secara rata-rata, laju pertumbuhan ekonomi Kota Jambi dalam kurun waktu 5 Tahun terakhir berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional maupun Provinsi Jambi.



Sumber: BPS Kota Jambi, 2018 (data diolah)

Gambar 2.7.
Laju Pertumbuhan Ekonomi

6. PDRB Menurut Penggunaan

Dilihat dari PDRB menurut Penggunaan, komponen pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga merupakan pengeluaran terbesar kedua setelah ekspor atas barang dan jasa yang tersedia. Dari data menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kota Jambi sebagian masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Data berikut menunjukkan bahwa pada periode Tahun 2013-2017 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan, baik dari sisi nominal (Atas Dasar Harga Berlaku) maupun secara riil (Atas Dasar Harga Konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga yang pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 2.13.
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap PDRB Kota Jambi Tahun 2013-2017 (Milyar Rupiah)

No.	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
PDRB						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	16.583,95	18.977,51	21.293,45	24.405,53	26.294,31
2.	Atas Dasar Harga Konstan	13.939,74	15.080,23	15.851,95	16.936,44	17.728,34
PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA						

No.	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	10.710,25	12.086,27	13.123,57	14.189,01	15.682,34
2.	Atas Dasar Harga Konstan	9.122,70	9.598,45	10.072,15	10.526,96	11.071,36
Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga thd PDRB (persen)						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	64,58	63,69	61,63	58,14	59,64
2.	Atas Dasar Harga Konstan	65,44	63,65	63,54	62,16	62,45

Sumber: BPS Kota Jambi, 2018

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah a) *Scarcity*, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah. b) *Excludable consumption*, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga). c) *Rivalrous competition*, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa.

Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri a) *Non rivalry*, yaitu pengeluaran satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. b) *Non excludable*, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut.

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah memiliki kecenderungan meningkat, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada Tahun 2013 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku adalah sebesar 4.287,97 miliar rupiah (2014); 4.702,83 miliar rupiah (2015); dan 5.000,77 miliar rupiah (2016); 5.154,58 miliar rupiah serta (2017) sebesar 5.274,12. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan pada masing-masing Tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Tabel 2.14.
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah terhadap PDRB Kota Jambi Tahun 2013-2017 (Milyar Rupiah)

No.	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
PDRB						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	16.583,95	18.977,51	21.293,45	24.405,53	26.294,31
2.	Atas Dasar Harga Konstan	13.939,74	15.080,23	15.851,95	16.936,44	17.728,34
PENGELUARAN KONSUMSI PEMERINTAH						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	4.287,97	4.702,83	5.000,77	5.154,58	5.274,12
2.	Atas Dasar Harga Konstan	3.357,06	3.411,11	3.424,91	3.311,91	3.399,45
Persentase Pengeluaran Konsumsi Pemerintah thd PDRB (persen)						

No.	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	25,86	24,78	23,49	21,12	20,06
2.	Atas Dasar Harga Konstan	24,08	22,62	21,61	19,55	19,18

Sumber: BPS Kota Jambi, 2018

Kota Jambi memiliki potensi menarik investasi atau menurut istilah PDRB disebut Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Berdasar Tabel 2.15, PMTB atas dasar harga berlaku meningkat dari Rp. 4.677,71 milyar pada Tahun 2013 menjadi Rp.4,6378 milyar pada Tahun 2017. Pertumbuhan investasi/PMTB didorong meningkatnya investasi kategori bangunan, seiring meningkatnya kegiatan pembangunan kategori swasta dan pemerintah khususnya pembangunan infrastruktur.

Tabel 2.15.
Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Terhadap PDRB Kota Jambi Tahun 2013-2017 (Milyar Rupiah)

No.	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
PDRB						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	16.583,95	18.977,51	21.293,45	24.405,53	26.294,31
2.	Atas Dasar Harga Konstan	13.939,74	15.080,23	15.851,95	16.936,44	17.728,34
Pembentukan Modal Tetap Bruto						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	4.677,71	4.993,04	5.123,10	5.611,09	6.247,44
2.	Atas Dasar Harga Konstan	4.006,63	4.033,81	4.014,60	4.223,48	4.678,80
Persentase PMTB thd PDRB (persen)						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	28,21	26,31	24,06	22,99	23,76
2.	Atas Dasar Harga Konstan	28,74	26,75	25,33	24,94	26,39

Sumber: BPS Kota Jambi, 2018

7. PDRB Perkapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kota Jambi atas dasar harga berlaku Tahun 2013 hingga 2017 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2013 PDRB per kapita tercatat sebesar 29,12 juta rupiah naik menjadi 44,48 juta rupiah pada Tahun 2017. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

Namun peningkatan PDRB perkapita ini, belum menggambarkan secara riil kenaikan daya beli masyarakat Kota Jambi karena masih tergantung pada faktor inflasi.

Untuk memantau perkembangan daya beli masyarakat bisa digunakan PDRB perkapita atas dasar harga konstan. Tahun 2013 sebesar Rp. 24,48 juta rupiah menjadi sebesar Rp. 29,99 juta rupiah pada Tahun 2017. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.16.

Tabel 2.16.
Pendapatan Perkapita Kota Jambi dan Laju Pertumbuhannya Tahun 2013-2017

No.	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
PDRB (miliar rupiah)						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	16.583,95	18.977,51	21.293,45	24.405,53	26.294,31
2.	Atas Dasar Harga Konstan	13.939,74	15.080,23	15.851,95	16.936,44	17.728,34
PDRB per Kapita (ribu rupiah)						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	29.128,83	33.407,46	39.963,50	41.827,03	44.481,13
2.	Atas Dasar Harga Konstan	24.484,41	26.546,80	27.517,55	29.026,25	29.990,39
Pertumbuhan PDRB per Kapita (persen)						
	Atas Dasar Harga Konstan	6,21	8,42	3,66	5,48	3,32

Sumber: BPS Kota Jambi, 2018

8. Inflasi

Laju inflasi dalam kurun waktu 5 Tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.17.
Nilai Inflasi rata-rata di Kota Jambi Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata
Laju Inflasi	8,74	8,72	1,37	4,54	2,68	5,21

Sumber: BPS Kota Jambi, 2018

Laju inflasi Kota Jambi selama 5 Tahun terakhir mengalami fluktuasi yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah dalam hal *administered price* terutama kenaikan BBM dan tarif dasar listrik pada Tahun 2013 dan 2014. Pada Tahun 2015, terjadi penurunan laju inflasi yang terimplikasi dari penurunan aktivitas ekonomi yang disebabkan oleh kebakaran lahan dan kabut asap. Untuk Tahun 2016 dan 2017 laju inflasi terjadi pada kelompok *volatile food*.

Laju inflasi Kota Jambi Tahun 2017 terjadi karena adanya kenaikan indeks harga pada 7 (tujuh) kelompok pengeluaran yaitu kelompok bahan makanan sebesar 3,69 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,17 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,30 persen, kelompok sandang sebesar 0,14 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,09 persen,

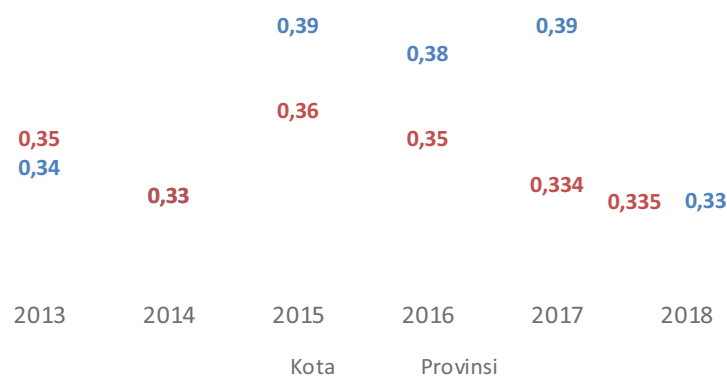
kelompok pendidikan, rekreasi dan olah ragasebesar 0,62 persen serta kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 2,77 persen.

Jika melihat inflasi pada Tahun 2016 dan 2017 yang terjadi pada *volatile food* maka kebijakan yang perlu diambil antara lain adalah fokus pada peningkatan jumlah pasokan dengan memperhatikan tata niaga perdagangan, memperbaiki sarana dan prasarana pasar dan menumbuh kembangkan usaha pedagang-pedagang kecil. Dengan kegiatan yang diarahkan pada Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan dan melaksanakan penyuluhan sumber-sumber pangan alternatif yang disesuaikan dengan kondisi Kota Jambi.

9. Indeks Gini

Salah satu ukuran kesenjangan ekonomi yang biasa digunakan adalah Koefisien Gini. Kesenjangan ekonomi diukur dengan seberapa besar perbandingan distribusi dari pengeluaran dengan distribusi pemerataan ideal (*uniform*) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Kesenjangan tersebut diilustrasikan dalam bentuk Kurva Lorenz. Apabila kedua garis distribusi tersebut berimpit, berarti pemerataan pendapatannya sempurna, sedangkan apabila daerah antara kedua garis distribusi tersebut sangat lebar maka pemerataan pendapatannya sangat timpang. Koefisien Gini yang lebih besar dari 0,50 menunjukkan ketimpangan distribusi pendapatan yang cukup serius.

Koefisien Gini di Kota Jambi berdasarkan hasil Survey Sosial Ekonomi Daerah (Suseda) Kota Jambi Tahun 2018 mencapai 0,33 yang berarti pemerataan pendapatannya kategori sedang dan angka ini lebih rendah dari Koefisien Gini Provinsi sebesar 0,335. Keadaan ini mengindikasikan bahwa arah dan kebijakan pembangunan ekonomi Kota Jambi telah dapat mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Peningkatan pendapatan yang diterima golongan atas lebih besar daripada yang diterima golongan bawah.



Sumber: BPS Kota Jambi, 2018

Gambar 2.8.
Perkembangan Koefisien Gini di Kota Jambi Tahun 2013-2018

2.2.2. Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1. Pendidikan

1. Angka Melek Huruf

Parameter pembangunan pendidikan dapat dilihat dari tinggi rendahnya derajat pendidikan masyarakat dengan indikator antara lain tingginya angka melek huruf (AMH) dan tingginya angka rata-rata lama sekolah (RLS). Untuk mendapatkan angka yang tinggi pada kedua indikator tersebut tentu dibutuhkan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, seperti jumlah sekolah dan ruang kelas/rombongan belajar (rombel) yang mencukupi, banyaknya guru yang mengajar telah mencukupi untuk semua murid serta kualitas guru pun sangat menentukan berhasil tidaknya suatu pendidikan.

Adapun perkembangan angka melek huruf di Kota Jambi dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.18.
Perkembangan Angka Melek Huruf di Kota Jambi Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah penduduk usia diatas 15 Tahun yang bisa membaca dan menulis	411.458	419.340	406.997	461.118	461.198
Jumlah penduduk usia 15 Tahun keatas	418.164	425.462	407.235	461.203	461.257
Angka melek huruf	0,98	0,98	0,99	0,99	0,99

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2018

Melek huruf dapat disebut juga dengan melek aksara yaitu kemampuan membaca dan menulis, jadi angka melek huruf penduduk usia 15 Tahun keatas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya tanpa harus mengerti apa yang adibaca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 Tahun ke atas, dimana pada data tersebut angka melek huruf untuk Penduduk diatas 15 Tahun sudah sangat baik tinggal 0.01 yang menjadi PR kita.

2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Komponen yang diperhitungkan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari dimensi pendidikan adalah angka harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS). Peningkatan angka RLS dari 10,57 Tahun 2013 menjadi 10,66 pada Tahun 2017 menunjukkan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Jambi periode pembangunan lima Tahun yang lalu. Perkembangan rata-rata lama sekolah di Kota Jambi dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.19.
Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kota Jambi Tahun 2012-2016

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017

Angka Rata-Rata Lama Sekolah	10,57	10,62	10,63	10,65	10,66
------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2018

3. Angka Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan salah satu output yang biasa digunakan untuk memotret pemerataan pembangunan pendidikan dan deskripsi harapan peningkatan kualitas pendidikan pada masa yang akan datang. Tren positif HLS Kota Jambi dari 13,62 poin menjadi 14,63 poin pada Tahun 2017 menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan sector pendidikan, sehingga dapat dikatakan bahwa kualitas pendidikan cenderung akan terus meningkat seiring dengan perkembangan angka harapan lama sekolah. Gambaran perkembangan angka harapan sekolah di Kota Jambi dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.20.

Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Kota Jambi Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Harapan Lama Sekolah	13,62	13,80	13,80	13,81	14,63

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2018

4. Angka Partisipasi Kasar

Perkembangan angka partisipasi kasar (APK) di Kota Jambi dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.21.

Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A, SMP/MTS/Paket B dan SMA/SMK/Paket C di Kota Jambi Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
SD/MI/Paket A						
1	Jumlah Siswa di Jenjang SD	64.398	70.520	71.011	71.197	73.485
2	Jumlah Penduduk Usia 7 - 12 Tahun	62.992	64.793	65.228	65.393	66.234
3	APK SD/MI, Paket A	102,23%	108,84%	108,87%	108,88%	110,95%
SMP/MTS/Paket B						
1	Jumlah Siswa di Jenjang SMP	24.634	24.634	34.894	35.962	34.985
2	Jumlah Penduduk Usia 13 - 15 Tahun	22.633	22.633	31.614	32.574	31.236
3	APK SMP/MTS, Paket B	108,84%	108,84%	110,38%	110,40%	112,00%
SMA/SMK/Paket C						
1	Jumlah Siswa di Jenjang SMA	28.955	28.955	35.015	33.710	Pengelolaan Provinsi
2	Jumlah Penduduk Usia 16 - 18 Tahun	32.201	32.201	38.532	35.984	Pengelolaan Provinsi
3	APK SMA/SMK, Paket C	89,92%	89,92%	90,87%	93,68%	Pengelolaan Provinsi

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2018

Persentase angka partisipasi kasar merupakan indikator pendidikan yang mengukur tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. APK adalah jumlah penduduk yang bersekolah pada jenjang tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk usia jenjang tertentu. Persentase APK di Kota Jambi terhitung cukup tinggi bahkan melebihi 100% untuk tingkat SD dan SMP, hal ini menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya.

Secara umum, pada tingkat SD/MI capaian APK dari Tahun 2013 sampai 2017 mengalami peningkatan dan berada pada angka di atas 100%. Di Tahun 2013 APK Kota Jambi mencapai 102,23% meningkat di Tahun 2017 menjadi 110,95%. Pada tingkat SMP, APK di tingkat SMP sudah mencapai lebih dari 100% dan cenderung meningkat. Di Tahun 2013 APK Kota Jambi mencapai 108,84% meningkat di Tahun 2017 menjadi 110,40%.

Pada tingkat SMA, APK tingkat SMA belum mencapai 100%, tertinggi baru mencapai 93,68% di Tahun 2016. Namun angka capaiannya mengalami kenaikan setiap Tahunnya. Melihat angka capaian APK Kota Jambi di tiap tingkatan yang mendekati atau bahkan melebihi angka 100%, hal ini dapat disampaikan bahwa tingkat partisipasi penduduk usia sekolah di Kota Jambi termasuk tinggi.

5. Angka Pendidikan yang ditamatkan

Persentase pendidikan yang ditamatkan merupakan salah satu indikator untuk mengukur kualitas SDM di suatu wilayah. Angka pendidikan yang ditamatkan adalah perbandingan jumlah penduduk yang mencapai jumlah pendidikan tingkat tertentu pada Tahun bersangkutan dengan total jumlah penduduk pada Tahun bersangkutan.

Adapun angka pendidikan yang ditamatkan di Kota Jambi dari Tahun 2013 sampai dengan 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.22.
Angka Kelulusan SD/MI di Kota Jambi Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Siswa Lulus Sekolah di Jenjang SD	10.695	9.842	11.164	11.164	11.074
2.	Jumlah Siswa SD	10.695	9.842	11.164	11.164	11.074
3.	Angka Kelulusan SD/MI	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2018

Tabel 2.23.
Angka Kelulusan SMP/MTS di Kota Jambi Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Siswa Lulus Sekolah di Jenjang SMP/MTS	7.383	10.551	13.448	13.448	13.343
2.	Jumlah Siswa SMP/MTS	7.465	10.551	13.448	13.448	13.343
3.	Angka Kelulusan SMP/MTS	98,90%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2018

Persentase tingkat kelulusan SD/MI dan SMP/MTS di Kota Jambi cenderung stabil. Hal ini dikarenakan minat belajar penduduk di Kota Jambi mulai tingkat SD/MI dengan tingkat SMP/MTS masih terbilang tinggi. Selain itu jumlah sekolah untuk tingkat SD/MI dan SMP/MTS tersebar di wilayah Kelurahan sehingga memudahkan murid untuk bersekolah.

6. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur seberapa banyak anak usia sekolah yang bersekolah tepat waktu. APM didefinisikan sebagai jumlah siswa/penduduk kelompok usia tertentu yang bersekolah pada tingkat pendidikan tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk kelompok usia tertentu.

Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat daya serap partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar pada tabel berikut:

Tabel 2.24.
Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A, SMP/MTS/Paket B dan SMA/SMK/Paket C di Kota Jambi Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
SD/MI/Paket A						
1	Jumlah Siswa Usia 7-12 Tahun	60.847	64.684	65.154	65.325	66.212
2	Jumlah Penduduk Usia 7 - 12 Tahun	62.992	64.793	65.228	65.393	66.234
3	APM SD/MI, Paket A	99,76%	99,83%	99,89%	99,90%	99,97%
SMP/MTS/Paket B						
1	Jumlah Siswa Usia 13-15 Tahun	20.679	29.573	30.775	29.989	29.698
2	Jumlah Penduduk Usia 13 - 15 Tahun	22.633	31.614	32.574	31.614	31.236
3	APM SMP/MTS, Paket B	91,37%	93,54%	94,48%	94,86%	95,08%
SMA/SMK/Paket C						
1	Jumlah Siswa Usia 16-18 Tahun	23.865	30.140	28.436	28.162	Pengelolaan Provinsi
2	Jumlah Penduduk Usia 16 - 18 Tahun	32.201	38.532	35.984	36.550	Pengelolaan Provinsi
3	APM SMA/SMK, Paket C	74,11%	78,22%	79,02%	79,22%	Pengelolaan Provinsi

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2018

Tabel di atas menunjukkan APM Kota Jambi yang meningkat setiap Tahunnya di setiap tingkatan. Untuk tingkat SD/MI, pada Tahun 2013-2017 hampir seluruh anak usia sekolah bersekolah. Hal ini dapat dilihat dari besarnya APM tingkat SD/MI yang berada pada 99,97%. Anak usia sekolah tingkat SMP/MTs, angka APM yang dicapai cukup tinggi di kisaran 95,08%. Sementara itu untuk capaian angka APM di tingkat SMA/MA/SMK, masih dapat dikatakan cukup tinggi dengan angka yang berkisar antara 74,11 sampai 79,22%.

2.2.2.2. Kesehatan

Gambaran umum indikator makro kesehatan Kota Jambi dalam kurun waktu 2013 – 2017 adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.25.
Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kota Jambi Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Kematian Bayi	27	9	9	9	12
2	Jumlah Kelahiran Hidup	13.592	13.079	12.745	10.430	13.039

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2018

Indikasi penurunan angka kematian bayi dari 27 jiwa pada Tahun 2013 menjadi 12 orang Tahun 2017 didukung dengan meningkatnya jumlah kelahiran hidup bayi di Kota Jambi secara umum menggambarkan adanya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Kota Jambi periode 2013-2017. Hal ini didukung juga dengan fakta adanya penurunan jumlah balita gizi buruk dengan PBGB di Kota Jambi yang semakin menurun dari 0.03% Tahun 2013 turun menjadi 0.01 Tahun 2017.

Tabel 2.26.
Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Jambi Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Balita Gizi Buruk	18	10	11	5	6
2	Jumlah Balita	59.462	56.670	58.012	52.933	72.942
3	Rasio PBGB (%)	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2018

2.2.2.3. Ketenagakerjaan

Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari rasio penduduk yang bekerja. Kesempatan kerja sebagai hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja. Rasio penduduk yang bekerja (PYB) di Kota Jambi dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 mengalami peningkatan cukup berarti dari 92,69% menjadi 94,45%. Secara lengkap ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.27.
Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Jambi Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016***	2017
1	Penduduk Yang Bekerja (PYB)	230.478	235.722	254.351	-	268.264
2	Angkatan Kerja (AK)	248.663	262.291	274.449	-	284.018
3	Rasio PYB (%)	92,69	89,87	92,68	-	94,45

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi & UMKM Kota Jambi, 2018

*** BPS Kota Jambi tidak melakukan Sensus Sakernas 2016 dikarenakan kebijakan pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran

2.2.2.4. Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Seni budaya merupakan wujud kearifan lokal yang keberadaannya harus dipertahankan masyarakat dan pemerintah daerah.

Tabel 2.28.
Jumlah Grup dan Gedung Seni Budaya

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Grup Kesenian (unit)	185	185	185	185	185
Jumlah Gedung Kesenian (unit)	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Pariwisata & Budaya Kota Jambi, 2018

Sementara itu aktivitas kesehatan masyarakat dalam menjaga kebugaran tubuhnya dan bersosialisasi, salah satunya ditunjukkan dengan banyaknya klub olahraga. Dari Tahun 2013 sampai dengan 2017, jumlah klub olahraga tidak ada penambahan hanya 28 cabang olahraga dengan jumlah gedung hanya 4 unit, artinya ketersediaan gedung olahraga masih kurang di Kota Jambi.

Tabel 2.29.
Jumlah Cabang Olahraga dan Gedung Olahraga

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Cabang Olahraga (unit)	28	28	28	28	28
Jumlah Gedung Olahraga (unit)	4	4	4	4	4

Sumber: Dinas Pemuda & Olahraga Kota Jambi, 2018

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

2.3.1.1. Urusan Pendidikan

1. Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah (APS) merupakan perbandingan antara jumlah anak usia 7-12; 13-15 dan 16-18 Tahun yang sedang bersekolah dibagi seluruh jumlah anak usia SD (7-12); usia SMP (13-15) dan usia SMA (16-18). Realisasi APS yang dicapai pada Tahun 2017 untuk usia SD/MI sebesar 99,99%, artinya dari seluruh penduduk usia 7-12 Tahun yang masih bersekolah sebesar 99,99 persen, sisanya 0,01% ada yang tidak/belum sekolah dan yang sudah tidak bersekolah lagi (putus sekolah). Sementara itu, angka partisipasi sekolah penduduk usia SMP/MTs sebesar 95,07%. Angka Partisipasi Sekolah di masing-masing tingkatan dari Tahun 2013-2017 relatif mengalami kenaikan. Hal ini menandakan minat masyarakat untuk sekolah di Kota

Jambi semakin tinggi. APS pada tingkatan SMP/MTs cenderung lebih rendah dibandingkan SD/MI kondisi ini mengindikasikan adanya kemungkinan anak usia sekolah yang tidak melanjutkan ke sekolah menengah ataupun bekerja setelah tamat SD/MI.

Tabel 2.30.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Formal Penduduk Kota Jambi Tahun 2013-2017

No	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah murid usia 7-12 thn	62.847	64.684	67.552	62.444	66.212
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 Tahun	62.992	64.793	67.651	62.544	66.234
1.3.	APS SD/MI	99,76	99,83	99,85	99,84	99,99
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah murid usia 13-15 thn	28.369	29.573	30.357	27.918	29.698
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 Tahun	30.948	31.614	32.420	27.968	31.236
2.3.	APS SMP/MTs	91,66	93,54	93,63	99,82	95,07

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2018

2. Ketersediaan Sekolah

Tabel 2.31. menunjukkan perkembangan jumlah SD/MI dan SMP/MTs di Kota Jambi Tahun 2013-2017. Secara umum, sampai dengan Tahun 2017 terjadi peningkatan jumlah gedung sekolah di setiap tingkat/jenjang pendidikan.

Tabel 2.31.

Rasio Ketersediaan Sekolah di Kota Jambi Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	SD/MI					
1.1.	Jumlah Sekolah	247	256	258	263	263
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 Tahun	62.992	64.793	67.651	62.544	66.234
1.3.	Rasio	39.21	39.51	38.13	42.05	39.70
2.	SMP/MTS					
2.1.	Jumlah sekolah	97	96	96	103	107
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 Tahun	30.948	31.614	32.420	27.968	31.236
2.3.	Rasio	31.34	30.36	29.61	36.82	34.25

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2018

Sebaran gedung sekolah perkecamatan dapat terlihat pada Tabel 2.31, untuk tingkat SD dan SMP relatif sebaran antar kecamatan cukup merata. Persebaran ini

dirasa masih kurang dalam menggambarkan ketersediaan sarana pendidikan, rasio guru-murid dan rasio kelas-murid dapat melengkapinya.

Tabel 2.32.
Jumlah Sekolah Menurut Kecamatan di Kota Jambi Tahun 2017

No	Kecamatan	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA/SMK
1.	Kotabaru	37	12	5
2.	Alam Barajo	10	2	2
3.	Jambi Selatan	43	10	6
4.	Paal Merah	5	6	5
5.	Jelutung	32	7	5
6.	Pasar Jambi	6	3	0
7.	Telanaipura	38	16	8
8.	Danau Sipin	3	2	6
9.	Danau Teluk	10	1	1
10.	Pelayangan	6	1	0
11.	Jambi Timur	40	12	5
Kota Jambi		230	72	43

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2018

Adapun kondisi ruang kelas SD/MI di Kota Jambi berdasarkan tingkat kerusakan setiap kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.33.
Kondisi Ruang Kelas SD/MI Tahun 2017

No	Kecamatan	Ruang Kelas SD/MI			
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
1.	Kotabaru	26	56	8	14
2.	Alam Barajo	8	88	0	0
3.	Jambi Selatan	11	26	15	18
4.	Paal Merah	78	211	52	45
5.	Jelutung	92	127	62	95
6.	Pasar Jambi	103	123	32	30
7.	Telanaipura	39	177	58	49
8.	Danau Sipin	16	30	17	13
9.	Danau Teluk	8	29	10	5
10.	Pelayangan	3	13	19	25
11.	Jambi Timur	157	192	12	49
Kota Jambi		541	1.072	285	343

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2018

Banyaknya ruang kelas SD/MI yang rusak ringan sampai rusak berat membutuhkan perhatian lebih besar dari pemerintah agar kualitas pendidikan dasar dan menengah lebih baik pada masa yang akan datang. Kebijakan yang sama juga dibutuhkan pada sekolah tingkat SMP/MTs yang kondisinya hampir sama seperti ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.34.
Kondisi Ruang Kelas SMP/MTs Tahun 2017

No	Kecamatan	Ruang Kelas SD/MI			
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
1.	Kotabaru	40	97	44	30

No	Kecamatan	Ruang Kelas SD/MI			
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
2.	Alam Barajo	0	0	0	0
3.	Jambi Selatan	32	51	3	3
4.	Paal Merah	22	25	17	13
5.	Jelutung	49	9	4	4
6.	Pasar Jambi	36	16	0	8
7.	Telanaipura	60	110	4	22
8.	Danau Sipin	15	5	0	0
9.	Danau Teluk	0	17	0	0
10.	Pelayangan	0	6	0	0
11.	Jambi Timur	48	73	16	19
Kota Jambi		302	409	88	99

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2018

3. Rasio Guru-Murid

Salah satu penunjang peningkatan angka indikator rata-rata lama sekolah adalah tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, seperti jumlah sekolah dan ruang kelas/rombongan belajar (rombel) yang mencukupi untuk semua penduduk usia sekolah, juga banyaknya guru yang mengajar mencukupi untuk semua murid. Selain jumlah guru yang mencukupi, kualitas guru pun sangat menentukan berhasil tidaknya suatu Pendidikan.

Tabel 2.35.

Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Jambi Tahun 2013-2017

No	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah Guru	3.267	3.561	3.477	3.354	3.607
1.2.	Jumlah Murid	65.732	69.870	69.958	69.973	66.212
1.3.	Rasio	0,049	0,050	0,049	0,047	0,054
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah Guru	2.228	2.269	2.295	2.273	1.777
2.2.	Jumlah Murid	24.835	34.710	34.838	34.928	29.698
2.3.	Rasio	0,089	0,065	0,065	0,065	0,059

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2018

Berdasarkan Tabel 2.35 dan 2.36 dapat dijelaskan bahwa rasio kecukupan guru dan murid untuk tingkatan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Jambi sudah sangat baik. Rasio SD/MI sebesar 0,0642 dan SMP/MTs 0,059 jauh lebih besar dibandingkan standar rasio ideal guru dan murid yakni 1:28. Gambaran jumlah guru dan murid jenjang pendidikan dasar menurut kecamatan Tahun 2017 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.36.

Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Jambi Menurut Kecamatan Tahun 2013-2017

No	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio

1	2	3	4	(5=3/4)	6	7	(8=6/7)
1	Kec. Alam Barajo	412	8.254	0,049	139	2.179	0,063
2	Kec. Danau Sipin	294	4.620	0,063	167	3.397	0,049
3	Kec. Danau Teluk	104	1.456	0,071	28	584	0,047
4	Kec. Jambi Selatan	401	7.856	0,051	126	3.045	0,041
5	Kec. Jambi Timur	578	9.779	0,059	268	4.425	0,060
6	Kec. Jelutung	456	7.452	0,061	120	1.917	0,062
7	Kec. Kota Baru	392	7.650	0,051	310	4.802	0,064
8	Kec. Paal Merah	328	7.781	0,042	205	4.125	0,049
9	Kec. Pasar Jambi	79	1.258	0,062	133	1.258	0,105
10	Kec. Pelayangan	90	1.167	0,077	18	124	0,145
11	Kec. Telanai Pura	473	8.939	0,052	263	3842	0,068
Jumlah		3.607	66.212	0,0642	1.777	29.698	0,059

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2018

4. Angka Kelulusan

Angka kelulusan untuk masing-masing jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.37.
Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA
Kota Jambi Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
SD/MI/Paket A						
1	Jumlah Siswa Lulus Sekolah di Jenjang SD	10,695	9,842	11,164	11,164	11.074
2	Jumlah Siswa SD	10,695	9,842	11,164	11,164	11.074
3	Angka Kelulusan SD/MI	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
SMP/MTS/Paket B						
1	Jumlah Siswa Lulus Sekolah di Jenjang SMP/MTS	7,383	10,551	13,448	13,448	13.343
2	Jumlah Siswa SMP/MTS	7,465	10,551	13,448	13,448	13.343
3	Angka Kelulusan SMP/MTS	98.90%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
SMA/SMK/Paket C						
1	Jumlah Siswa Lulus Sekolah di Jenjang SMA/SMK	8,674	9,918	10,533	10,533	Pengelolaan Provinsi
2	Jumlah Siswa SMA/SMK	8,680	9,922	10,533	10,533	Pengelolaan Provinsi
3	Angka Kelulusan SMA/SMK	99.93%	99.96%	100.00%	100.00%	Pengelolaan Provinsi

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2018

Angka kelulusan siswa yang mencapai 100% dengan rasio guru dan murid yang tinggi, memberikan pilihan kebijakan pembangunan sektor pendidikan dasar dan menengah di Kota Jambi pada masa yang akan datang adalah optimalisasi sumber daya yang ada sehingga kualitas lulusan menjadi semakin berdaya saing di skala nasional dan global.

Banyaknya sarana sekolah yang masih rusak ringan sampai berat, menyebabkan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pelayanan dasar pendidikan pada masa yang akan datang harus lebih fokus pada penyediaan sarana dan prasarana sekolah yang masih kurang baik. Sedangkan pada sisi sumber daya manusia dibidang

pendidikan yang sudah cukup membutuhkan perhatian pada upaya peningkatan kualitas pendidikan para guru maupun murid.

2.3.1.2. Urusan Kesehatan

Status kesehatan penduduk dipengaruhi oleh banyak faktor dan diantaranya adalah layanan kesehatan. Efektifitas layanan kesehatan secara makro ditentukan, antara lain: (1) Aksesibilitas sarana kesehatan, seperti: rumah sakit, puskesmas dan balai pengobatan; (2) Aksesibilitas tenaga pemberi layanan, seperti: dokter, perawat, bidang dan apoteker; dan (3) Luas wilayah layanan serta jumlah yang harus dilayani. Semakin luas wilayah layanan, maka semakin berat upaya yang harus dilakukan untuk menjangkau masyarakat dan dijangkau masyarakat. Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin besar beban tugas yang harus dilakukan.

Data capaian pelayanan umum urusan kesehatan dalam kurun waktu Tahun 2013 – 2017 secara umum mengalami tren yang terus meningkat. Secara lengkap data capaian indikator kinerja pembangunan daerah urusan kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.38.
Rasio Posyandu per Satuan Balita Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Posyandu	453	459	460	460	460
2	Jumlah Balita	59.462	56.670	58.012	52.933	72.942
3	Rasio RPPB (%)	7,62	8,10	7,93	8,69	6,31

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2018

Tabel 2.39.
Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Rumah Sakit	17	17	14	14	17
2	Jumlah Penduduk	556.332	568.062	576.067	583.487	591.134
3	Rasio RSPP (%)	0,0031	0,0030	0,0024	0,0024	0,0029

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2018

Tabel 2.40.
Rasio Puskesmas/Pustu per Satuan Penduduk Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu	58	58	58	59	59
2	Jumlah Penduduk	556.332	568.062	576.067	583.487	591.134
3	Rasio P5 (%)	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2018

Tabel 2.41.
Rasio Dokter per Satuan Penduduk Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Dokter	252	258	255	255	259
2	Jumlah Penduduk	556.332	568.062	576.067	583.487	591.134
3	Rasio DPP (%)	0,045	0,045	0,044	0,043	0,043

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2018

Pada Tahun 2016, jumlah rumah sakit di Kota Jambi sebanyak 15 unit, puskesmas ini sebanyak 20 unit terdiri dari puskesmas perawatan 3 unit, puskesmas Non perawatan 17 unit, puskesmas pembantu 39 unit, dan poskesdes 8 unit. Pemberi layanan kesehatan, terdiri dari dokter umum sebanyak 185 orang, dokter spesialis 189 orang, dokter gigi 53 orang, bidan 529 orang, dan perawat sebanyak 1.216 orang.

Upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat dilakukan secara rawat jalan bagi masyarakat yang mendapat gangguan kesehatan ringan dan pelayanan rawat inap bagi masyarakat yang mendapatkan gangguan kesehatan hingga berat. Sebagian besar sarana pelayanan puskesmas dipersiapkan untuk pelayanan kesehatan dasar terutama pelayanan rawat jalan, sedangkan rumah sakit disamping memberikan pelayanan pada kasus rujukan untuk rawat inap juga melayani kunjungan rawat jalan.

Untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Jambi telah menambah pelayanan puskesmas menjadi 24 jam di 20 Puskesmas yang menerima pelayanan Poliklinik Umum, Ibu Hamil dan Emergensi, yaitu Puskesmas AurDuri, Simpang IV Sipin, Tanjung Pinang, Talang Banjar, Kebun Kopi, Tahtul Yaman, Koni, Paal V, Paal X, Simpang Kawat, Kebun Handil, Talang Bakung, Payo Selincih, Paal Merah I, Paal Merah II, Kenali Besar dan Rawasari. Selain itu ada 3 Puskesmas yang terakreditasi yang memiliki mutu pelayanan, SDM dan sarana prasarana yang baik yang sesuai dengan standarisasi akreditasi, meliputi Puskesmas Pakuan Baru, Tanjung Pinang dan Simpang kawat dan Puskesmas yang rawat inap 24 jam ada 3 Puskesmas yaitu Puskesmas PakuanBaru, Olak Kemang dan Putri Ayu.

Sedangkan Rumah Sakit Umum Daerah H Abdul Manap yang merupakan satu-satunya rumah sakit milik Pemerintah Kota Jambi melayani pasien umum, pasien yang menggunakan jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), Jamsostek, Trimitra dan BPJS. Rumah Sakit Umum Daerah H Abdul Manap merupakan Rumah Sakit Rujukan Regional Wilayah Timur untuk Rumah Sakit yang memiliki Type C meliputi Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjabtim.

Menurut WHO rasio ideal dokter dengan penduduk adalah 1:2.500, untuk itu Kota Jambi masih membutuhkan banyak tenaga kesehatan khususnya dokter umum dan dokter spesialis. Selain itu masih perlu peningkatan sarana dan prasarana kesehatan baik yang melayani penduduk Kota Jambi sendiri maupun pusat layanan kesehatan yang melayani skala regional kabupaten disekitarnya.

2.3.1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kewenangan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk pemerintah kabupaten/ kota mencakup sub urusan berikut: Sumber Daya Air (SDA), Air Minum, Persampahan, Air Limbah, Drainase, Permukiman, Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Jalan, Jasa Konstruksi, dan Penataan Ruang. Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan/wilayah, disamping faktor kualitas lingkungan hidup, image, dan masyarakat (budaya). Sementara itu, kinerja infrastruktur merupakan faktor kunci dalam menentukan daya saing global, selain kinerja ekonomi makro, efisiensi pemerintah, dan efisiensi usaha.

Pembangunan infrastruktur wilayah yang menjadi fokus kegiatan pekerjaan umum pada hakekatnya tidak dapat dipisahkan dari penataan ruang. Dimana infrastruktur diharapkan menjadi trigger bagi tumbuh kembangnya pusat-pusat kegiatan baru yang bersinergi dan lebih lanjut berimplikasi pada akselerasi pembangunan dan perekonomian daerah.

Infrastruktur wilayah terdiri dari beberapa aspek yaitu infrastruktur jalan, sumber daya air dan irigasi, listrik dan energi, telekomunikasi, serta sarana dan prasarana permukiman. Kebutuhan akan infrastruktur wilayah tidak terlepas dari fungsi dan peranannya terhadap pengembangan wilayah, yaitu sebagai pengarah dan pembentuk struktur tata ruang, pemenuhan kebutuhan wilayah, pemacu pertumbuhan wilayah, serta pengikat wilayah.

Pada kawasan perkotaan seperti Kota Jambi, ketersediaan infrastruktur jalan menjadi salah satu yang mendapat perhatian khusus. Hal ini tentunya tidak lepas dari pesatnya pertumbuhan perkotaan yang mengakibatkan daya tampung jalan semakin berkurang dan membutuhkan operasional cost yang mumpuni untuk memastikan kualitasnya dalam kondisi baik. Kondisi status jalan kota dalam kondisi baik dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.42.
Rasio Panjang Jalan yang Baik di Kota Jambi Tahun 2013-2017

No	Variabel	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Panjang Jalan Status Kota (Km)	506.67	506.67	506.67	510.452	510.452
2	Panjang Jalan Kondisi Baik (Km)	331.56	344.54	431.38	456.00	466.14
3	Ratio Jaringan Jalan Kondisi Baik (%)	65.44	68.10	85.14	90.00	92.00

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi, 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat dalam lima Tahun terakhir rasio panjang jalan yang baik di Kota Jambi setiap Tahunnya terus mengalami perbaikan. Khususnya pada periode 5 Tahun terakhir dimana peningkatan rata-rata ratio panjang jalan yang baik berkisar $\pm 6,29\%$ dan ditambah lagi dengan peningkatan panjang jalan status kota dari 506,67 Km menjadi 510,452 Km pada Tahun 2017. Sebagai dampak dari inventarisir jalan kota berbasis GIS serta adanya peningkatan status jalan lingkungan yang diharapkan mampu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat khususnya terkait aksesibilitas kawasan perkotaan.

Sedangkan untuk transportasi udara di Kota Jambi dilayani oleh Bandar Udara Sultan Thaha Saifudin dan transportasi sungai di Kota Jambi terbatas bagi kapal motor yang tidak terlalu besar, mengingat kondisi sedimentasi yang berpengaruh pada kedalaman Sungai Batanghari. Untuk memasok kebutuhan bahan pangan untuk Kota Jambi di lakukan bongkar muat di Dermaga Angso Duo baru. Untuk keperluan Bongkar Muat kapal yang besar pelayanannya dilakukan melalui Pelabuhan Talang Duku yang berada di Kabupaten Muaro Jambi.

Pada aspek infrastruktur sumber daya air, kondisi infrastruktur yang mendukung upaya konservasi, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air dan sistem

informasi sumber daya air dirasakan masih belum memadai. Potensi sumber daya air di Kota Jambi yang besar belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang kegiatan pertanian, industri, dan kebutuhan domestik.

Sungai Batanghari yang melintasi Kota Jambi merupakan bagian dari Sub DAS Batanghari hilir yang masih berada dalam kesatuan DAS Batanghari. Sub DAS Batanghari hilir memiliki luas 861.904 Ha, panjang sungai 2.287,33 Km, dan keliling Sub DAS 630.693,80 Km. Sedangkan panjang sungai Batanghari yang melintasi Kota Jambi yaitu \pm 18 Km. Posisinya yang termasuk bagian hilir dari DAS Batanghari membuat sungai Batanghari yang berada di Kota Jambi juga mendapatkan imbas dari kondisi lingkungan di hulunya. Sedimentasi DAS Batanghari saat ini semakin parah, penyebabnya diduga adalah usaha pertambangan, penebangan liar, perkebunan (sawit), dan adanya industri pengolahan kayu (sawmill/penggergajian kayu) di sepanjang DAS Batanghari baik legal maupun illegal, serta kegiatan permukiman yang berada di sepanjang sungai.

Berdasarkan analisis status mutunya pada stasiun pemantauan kualitas air Sungai Batanghari telah tercemar berat dan untuk beberapa parameter tidak memenuhi kriteria mutu air kelas I dan II. Penggunaan air sungai Batanghari sebagai sumber Baku Air Minum perlu dilakukan pengolahan lebih lanjut sesuai dengan kondisinya sehingga memenuhi syarat untuk baku mutu air minum. Namun demikian Pemerintah Kota Jambi juga terus berupaya menggali potensi sumber air baku yang baru seperti halnya rencana pembangunan embung pada lokasi yang memungkinkan.

Untuk meminimalisir akses negatif seperti banjir dan peningkatan tingkat pencemaran, dinilai perlu dilakukan peningkatan jaringan drainase Kota Jambi. Dimana sesuai SK Walikota Jambi Nomor 464 Tahun 2016 total panjang drainase Kota Jambi adalah 127,2 Km dengan capaian realisasi panjang drainase dalam kondisi baik dalam tabel berikut.

Tabel 2.43.
Rasio Panjang Drainase yang Baik di Kota Jambi Tahun 2013-2017

No	Variabel	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Panjang Drainase Status Kota (Km)	127,2	127,2	127,2	127,2	127,2
2	Panjang Drainase Kondisi Baik (Km)	59,36	70,27	105,94	107,10	114,48
3	Ratio Jaringan Drainase Kondisi Baik (%)	46,67	57,60	83,29	84,20	90,00

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi, 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat dalam lima Tahun terakhir rasio panjang Drainase yang baik di Kota Jambi setiap Tahunnya terus mengalami perbaikan. Khususnya pada periode 5 Tahun terakhir dimana peningkatan rata-rata ratio panjang jalan yang baik berkisar \pm 11,34% per Tahunnya.

Terkait dengan urusan penataan ruang dimana rasio ketaatan terhadap RTRW ditargetkan sebesar 100% setiap Tahunnya. Target capaian ini di wujudkan dengan cara tertib pemberian perizinan yang sesuai dengan peruntukan ruang yang telah ditetapkan dalam Perda No. 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang terdiri dari rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan dan rencana kawasan strategis. Untuk indikator rasio ketaatan terhadap RTRW ditargetkan mencapai angka

100% setiap Tahunnya belum mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini terlihat masih adanya pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan dalam RTRW, sebagai contoh pembuatan bangunan yang menyalahi ketentuan GSB (Garis Sepadan Bangunan), kemudian pemasangan papan merek reklame yang tidak memenuhi standar pemasangan yang telah ditetapkan.

Fakta dari adanya beberapa pelanggaran yang masih ditemukan tersebut, ketaatan terhadap tata ruang juga menuntut lebih optimalnya fungsi pengawasan dari instansi teknis, dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Jambi diminta untuk lebih profesional dan proaktif terkait ketertiban administrasi rekomendasi perizinan serta pengawasan. Selain terkait ketaatan terhadap rencana tata ruang tersebut, pemenuhan rasio RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah Kota Jambi sesuai amanat UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang juga menjadi perhatian Pemerintah Kota Jambi. Capaian target tersebut dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 2.44.
Rasio Ruang Terbuka Hijau di Kota Jambi Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Luas Kota Jambi	17.533	17.533	17.533	17.533	17.533	17.533	17.533
Luas RTH (Ha)	1.175,40	1.193,72	1.212,05	1.272,14	1.290,47	1.609,53	1.844,47
Ratio RTH (%)	6.70	6.81	6.91	7.26	7.36	9.18	10.52

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, 2018

Tingginya harga dan terbatasnya lahan merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Jambi dalam mencapai target RTH tersebut. Sebagaimana tergambar pada tabel diatas rasio RTH di Kota Jambi pada Tahun 2016 baru mencapai 7,36% atau seluas 1.290,47 ha. Hal ini tentunya masih jauh dari yang ditargetkan. Salah satu upaya yang dilakukan Kota Jambi adalah dengan melakukan pendataan lebih valid dan terdigitasi dengan baik dan terus melaksanakan "land banking" setiap Tahunnya. Setelah dilakukan pendataan aset dan ruang hijau dengan digitasi, perbaikan data luasan rasio RTH Kota Jambi di Tahun 2018 telah mencapai 10,52% atau seluas 1.844,47 Ha. Penambahan luasan RTH ini secara signifikan didapatkan dari data ruang hijau aset Provinsi Jambi, vegetasi taman pada median dan bahu jalan (*pedestrian*), serta data luasan pekarangan rumah hunian dan gedung non hunian.

Peningkatan pelayanan dasar khususnya yang terkait dengan cakupan pelayanan jaringan air minum masih terus mengalami peningkatan, hal ini dapat terlihat dari data yang saat ini masih 75% yang artinya masih ada 25% lagi yang belum terlayani fasilitas air bersih khususnya dengan jaringan perpipaan.

Tabel 2.45.
Jumlah Pelanggan dan Cakupan Pelayanan Air Bersih di Kota Jambi Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017

Jumlah Pelanggan (SL)	61.660	62.883	64.847	69.379	72.965
Cakupan Pelayanan (%)	65	67	68	72	75

Sumber: PDAM Tirta Mayang Kota Jambi, 2018

2.3.1.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kewenangan urusan Perumahan dan Permukiman untuk pemerintah kabupaten/ kota mencakup sub urusan berikut: 1) Perumahan; 2) Kawasan Permukiman; 3) Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; 4) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU); 5) Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pelaksanaan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman salah satunya adalah serah terima aset Prasarana Sarana Utilitas Perumahan Formal dalam lima Tahun terakhir serah terima PSU perumahan formal belum menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan hal ini sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.46.
Prasarana Sarana Utilitas Perumahan Formal

No	Uraian	Tahun					Jumlah
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Jumlah Perumahan Formal	44	13	57	30	46	190
2	Jumlah PSU yang sudah diserahkan ke Pemkot	-	-	2	6	1	9
3	Jumlah PSU yang sudah diverifikasi	-	-	53	19	13	85

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi, 2018

Selain terkait dengan perumahan formal ada kegiatan peningkatan kualitas rumah layak huni yang belum tertangani seluruhnya, konsistensi Pemerintah Kota Jambi dalam penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.47.
Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

No	Uraian	Tahun					Jumlah
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	-	-	-	300	232	532

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi, 2018

Berdasarkan Tabel 2.47 dan Tabel 2.48 rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) baru mencapai 3,49% atau sebanyak 532 unit rumah, sedangkan 96,51% sisanya belum memperoleh bantuan rehabilitasi rumah dari Pemerintah Kota Jambi. Banyaknya unit RTLH membutuhkan dukungan anggaran dan kebijakan yang kuat agar dapat terwujud Kota Jambi dengan kondisi rumah layak huni yang semakin merata.

Tabel 2.48.**Data Jumlah Rumah di Kota Jambi per Kecamatan**

Kecamatan	Jumlah Rumah	Jumlah Rumah Layak	Jumlah RTLH
Alam Barajo	7.064	6.122	942
Danau Sipin	7.722	6.367	1.355
Danau Teluk	2.357	1.855	502
Jambi Selatan	8.189	7.667	522
Jambi Timur	11.895	10.856	1.039
Jelutung	13.224	9.441	3.783
Kotabaru	30.216	27.848	2.368
Paal Merah	34.098	33.001	1.097
Pasar Jambi	3.074	1.574	1.500
Pelayangan	2.641	1.789	852
Telanaipura	11.390	10.121	1.269
Total	131.870	116.641	15.229

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi, 2018

Berdasarkan yang disampaikan pada Tahun 2017 jumlah RTLH sebanyak 15.229 unit dan telah dilaksanakan beberapa Tahun sehingga yang tersisa saat ini sebanyak 14.697 unit. Prioritas lain dalam pelaksanaan urusan perumahan dan permukiman adalah penanganan kawasan kumuh. Target nasional penanganan wilayah kumuh di Kota Jambi telah ditetapkan melalui Keputusan Walikota Jambi pada Tahun 2016 terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) lokasi dengan luas total 986,57 hektar. Intervensi penanganan terhadap lokasi kawasan kumuh tersebut dilakukan dengan integrasi program antara pemerintah baik Kota, Provinsi maupun Pusat dan swasta, berhasil mengurangi luas kawasan kumuh menjadi 206,24 hektar. Dan pada Tahun 2018 hasil Updating yang dilakukan, sisa luasan kawasan kumuh menjadi 152,99 hektar dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.49.**Kawasan Kumuh di Kota Jambi Berdasarkan SK Walikota**

No	Nama Kawasan	Kriteria Kekumuhan	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	Sisa Luas (Ha)
1.	Kawasan Kumuh Orang Kayo Hitam		10,06	
2.	Kawasan Kumuh Beringin		23,02	
3.	Kawasan Kumuh Cempaka Putih - Sei. Asam		45,41	
4.	Kawasan Kumuh Lebak Bandung		3,71	
5.	Kawasan Kumuh Talang Jauh		18,01	
6.	Kawasan Kumuh Pakuan Baru		13,93	
7.	Kawasan Kumuh Payo Lebar		3,41	
8.	Kawasan Kumuh Jelutung		27,03	
9.	Kawasan Kumuh Kebun Handil		9,89	
10.	Kawasan Kumuh Handil Jaya		4,12	
11.	Kawasan Kumuh Suka Karya		3,41	
12.	Kawasan Kumuh Kenali Asam Atas		2,60	
13.	Kawasan Kumuh Legok		147,34	
14.	Kawasan Kumuh Murni		14,04	
15.	Kawasan Kumuh Solok Sipin		1,61	
16.	Kawasan Kumuh Sejinjang		64,19	
17.	Kawasan Kumuh Kasang		36,28	
18.	Kawasan Kumuh Rajawali		29,41	
19.	Kawasan Kumuh Kasang Jaya		9,97	
20.	Kawasan Kumuh Tanjung Sari		51,72	

No	Nama Kawasan	Kriteria Kekumuhan	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	Sisa Luas (Ha)
21.	Kawasan Kumuh Tanjung Pinang		53,98	
22.	Kawasan Kumuh Sulanjana – Budiman		55,13	
23.	Kawasan Kumuh Payo Selincah		8,79	
24.	Kawasan Kumuh Penyengat Rendah		41,13	
25.	Kawasan Kumuh Teluk Kenali		14,16	
26.	Kawasan Kumuh Buluran Kenali		18,09	
27.	Kawasan Kumuh Pematang Sulur		36,16	
28.	Kawasan Kumuh Telanaipura		2,55	
29.	Kawasan Kumuh Rawasari		7,29	
30.	Kawasan Kumuh Kenali Besar		13,64	
31.	Kawasan Kumuh Bagan Pete		6,97	
32.	Kawasan Kumuh Jelmu		12,14	
33.	Kawasan Kumuh Mudung Laut		31,10	
34.	Kawasan Kumuh Tengah		14,26	
35.	Kawasan Kumuh Tanjung Johor		2,80	
36.	Kawasan Kumuh Tanjung Pasir – Tanjung Raden – Pasir Panjang		70,54	
37.	Kawasan Kumuh Arab Melayu		23,91	
38.	Kawasan Kumuh Ulu Gedong – Olak Kemang		54,78	
TOTAL			986,57	

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi, 2018

Selain menangani urusan perumahan serta penanganan kawasan kumuh, Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman juga menangani Penerangan Lampu Jalan Umum, dimana saat ini jumlah titik lampu jalan yang telah terpasang sampai dengan di Kota Jambi baik pada jalan primer maupun jalan lingkungan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.50.
Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum yang Terpasang di Kota Jambi

Kecamatan	Jumlah Lampu Terpasang
Telanaipura	1.179
Jambi Selatan	1.335
Jambi Timur	1.404
Pasar Jambi	908
Pelayangan	451
Danau Teluk	461
Kotabaru	2.377
Jelutung	1.358
Alam Barajo	2.121
Danau Sipin	1.034
Paal Merah	1.484
TOTAL	14.112

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi, 2018

Dari total sebanyak 14.112 titik lampu jalan yang terpasang diantaranya telah menggunakan lampu hemat energy (LED) kapasitas 150 watt sebanyak 652 titik dan kapasitas 60 watt sebanyak 507 titik.

Untuk jumlah pemakaman umum yang ada di Kota Jambi yang juga merupakan tanggung jawab urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman sampai dengan Tahun 2017 sebanyak 95 lokasi dengan luas sekitar 926.368 M².

2.3.1.5. Urusan Keamanan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan kewenangan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat merupakan urusan wajib pelayanan dasar. Upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat menjadiprasyarat bagi terselenggaranya tata kehidupan masyarakat, aktivitas sosial ekonomi dan pembangunan daerah.

Sampai Tahun 2017, jumlah personil Satpol PP 263 orang. Apabila jumlah ideal anggota Satpol PP adalah 1:1500, dengan jumlah penduduk ±609.620 jiwa, maka seharusnya jumlah personil Satpol PP Kota Jambi adalah 500an orang. Selanjutnya jumlah Pos Siskamling sampai Tahun 2017 adalah 582 buah yang tersebar di 62 kelurahan, sehingga Rasio Pos Siskamling per Jumlah Kelurahan 9,39.

Tabel 2.51.
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja di Kota Jambi Tahun 2017

Uraian	Tahun 2017	
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk	$\frac{263 \text{ orang}}{609.620 \text{ jiwa}}$	0,04
Rasio Pos Siskamling per Jumlah Kelurahan	$\frac{582}{62}$	9,39

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, 2018

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), khususnya yang tercantum pada pasal 3, menyatakan bahwa Satpol PP mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.

Berkaitan dengan peraturan tersebut petugas Satpol PP Kota Jambi telah melakukan penyelesaian atas masalah yang terkait dengan penegakan perda dan penegakan K3. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.52.
Persentase Penyelesaian Penegakan Hukum
Di Kota Jambi Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Pelanggaran Perda	tad	tad	20	24	tad
Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda	tad	tad	20	24	tad
Persentase Penyelesaian Penegakan Perda (%)	tad	tad	100	100	tad
Jumlah Pelanggaran K3	102	377	552	703	tad

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3	102	377	552	703	tad
Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (%)	100	100	100	100	tad

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, 2018

Penanggulangan ketentraman dan ketertiban serta pendekatan yang dilakukan di Kota Jambi sesuai dengan jenis gangguannya, artinya jika terjadi demonstrasi atau kerusuhan di berbagai tempat di Kota Jambi, baik kantor pemerintah maupun di tempat-tempat lain, maka personil Satpol PP akan turun langsung ke lapangan untuk mengawasi pelaksanaan demonstrasi tersebut. Jika terjadi kekacauan atau anarkisme maka personil Satpol PP akan bertindak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Kendala lain yang juga menjadi perhatian Pemerintah Kota Jambi, yaitu menyangkut Pedagang Kaki Lima. Pertumbuhan pedagang kaki lima di Kota Jambi sangat pesat, hal tersebut menunjukkan makin menggeliatnya roda perekonomian di Kota Jambi. Namun disatu sisi pertumbuhan pedagang kaki lima menyumbangkan kesembrawutan dan kemacetan, oleh karena itu Pemerintah Kota Jambi telah menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pedagang Kaki lima yaitu Peraturan Daerah Nomor5 Tahun 2006 dan Peraturan Walikota Nomor6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaannya. Namun, dalam pelaksanaannya masih di jumpai pedagang-pedagang yang tidak mematuhi aturan, untuk itu Satuan Polisi Pamong Praja mengadakan razia-razia dan penertiban pedagang kaki lima termasuk area parkir di Kota Jambi.

2.3.1.6. Urusan Sosial

Peningkatan jumlah penduduk lanjut usia akan berpengaruh pada pelayanan sosial dasar yang harus disediakan oleh Pemerintah Kota Jambi, berdasarkan hasil data Dinas Sosial jumlah penduduk lanjut usia (lansia) pada Tahun 2017 sebanyak 19.229 orang lansia potensial dan 8.482 lansia miskin , untuk Tahun 2017 Dinas Sosial Memberikan bantuan terdiri dari 88 orang mendapat bantuan APBN dan 6 orang mendapatkan bantuan APBD untuk lansia. Data tersebut bukan berarti menunjukkan bahwa penduduk lansia seluruhnya terlantar, namun sebagian besar masih memiliki anak tetapi keluarga miskin, sehingga didata sebagai lansia terlantar, keberadaan sarana sosial khususnya panti jompo memiliki peran dalam memelihara keberadaan PMKS khususnya pada lansia. Terbatasnya jumlah panti jompo menyebabkan belum maksimalnya melindungi dan memelihara lansia di Kota Jambi dimana saat ini Kota Jambi baru memiliki 1 buah panti jompo.

Sesuai dengan amanat UU nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosaial diantaranya melalui jaminan sosial dan perlindungan sosial. Jaminan sosial bertujuan menjamin PMKS yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. Sementara itu perlindungan sosial dimaksud untuk mencegah dan menangani resiko dari goncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan atau masyarakat agar keberlangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai kebutuhan dasar minimal. Tahun 2017 ditetapkan sebanyak 31.707 orang PMKS memperoleh bantuan

sosial untuk pemenuhan dasar, untuk mencapai target tersebut dilaksanakan kegiatan peningkatan dan pembinaan pelayanan PMKS yang didalamnya terdiri dari rangkaian sub kegiatan pelayanan pemberdayaan lanjut usia. Dari target yang ditetapkan baru dapat direalisasikan sebesar 26.751 orang PMKS (84,4%).

Disamping itu selain memberikan bantuan kebutuhan dasar Pemerintah Kota Jambi dalam hal ini dinas sosial juga memberikan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti pelatihan kuliner dan bantuan bagi kelompok usaha bersama (KUBE), dll, sesuai dengan ketrampilan masing-masing. Berdasarkan data jumlah populasi penanganan PMKS meningkat 4.340 atau 69,8% dari Tahun 2013 sebesar 6.229 orang menjadi 10.569 orang pada Tahun 2017, sementara jumlah PMKS yang ditangani hanya sebesar 70% dari Tahun 2013 hingga 2017. Kenaikan terjadi pada Tahun 2017 yang mencapai 80%. Salah satu tidak tercapainya target penanganan ialah keterbatasan anggaran dan tinggi partisipasi masyarakat PMKS yang ingin mendapatkan kegiatan tersebut.

Tabel 2.53.
Penanganan PMKS di Kota Jambi Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Populasi PMKS	6.229	6.229	7.563	9.039	10.569
2.	Jumlah Penanganan	3.891	3.891	4.671	5.317	7.398
3.	Persentase	60,07	60,07	61,92	70,00	70,00

Sumber: Dinas Sosial Kota Jambi, 2018

Selain data PMKS, terdapat juga beberapa terdapat beberapa jenis kasus/pelanggaran yang telah diidentifikasi oleh kepolisian resort beserta pengadilan di wilayah Kota Jambi. Beberapa data yang terhadap pelanggaran sosial tersebut dirangkum pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.54.
Data Jumlah Pelanggaran / Kasus Di Kota Jambi

No	Uraian	Jumlah Kasus
1	Pelanggaran lalu lintas	13.826
2	Kecelakaan lalu lintas	403
3	Tahanan kepolisian	1.527
4	Perkara pidana anak	29
5	Perkara pidana biasa	1.005
6	Perkara tipikor	45
7	Perkara pidana cepat	30
8	Perkara lalu lintas di pengadilan	34.959
9	Perkara pidana cepat di pengadilan	35.994

Sumber: Dinas Sosial Kota Jambi, 2018

2.3.2. Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.3.2.1. Tenaga Kerja

Urusan ketenagakerjaan merupakan salah satu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang diamanatkan oleh UU 23 Tahun 2014. Kewenangan pemerintah daerah terkait dengan ketenagakerjaan antara lain terkait dengan pelatihan tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan tenaga kerja dan pengawasan industrial.

Pelayanan urusan tenaga kerja dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dari kurun waktu 2013-2016 dan pada Tahun 2017 seiring dengan pembentukan perangkat daerah urusan tenaga kerja dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja. Berikut capaian pelayanan urusan tenaga kerja sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.55.
Rasio Penduduk Yang Bekerja di Kota Jambi Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016***	2017
1	Penduduk Yang Bekerja (PYB)	230.478	235.722	254.351	-	268.264
2	Angkatan Kerja (AK)	248.663	262.291	274.449	-	284.018
3	Rasio PYB (%)	92,69	89,87	92,68	-	94,45

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi & UMKM Kota Jambi, 2018

*** BPS Kota Jambi tidak melakukan Sensus Sakernas 2016 dikarenakan kebijakan pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan data yang mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah, adapun kondisi di Kota Jambi dapat di lihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.56.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Jambi Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016***	2017
1	Angkatan Kerja (AK)	248.663	262.291	274.449	dt	284.018
2	Penduduk Usia Kerja (PUK)	412.249	420.428	428.542	dt	443.343
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) %	60,32	62,39	64,04	dt	64,06

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi & UMKM Kota Jambi, 2018

*** BPS Kota Jambi tidak melakukan Sensus Sakernas 2016 dikarenakan kebijakan pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Seperti pada Tahun 2017 di kota Jambi sebesar 64% artinya dari 100 penduduk usia 15 Tahun keatas sebanyak 64 orang tersedia untuk memproduksi pada periode tertentu. Adapun kondisi pencari kerja yang mendaftar di Kota Jambi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.57.
Pencari Kerja yang Ditempatkan Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pencari Kerja Yang Ditempatkan	639	2.164	1.665	2.237	2.703
2	Pencari Kerja Yang Mendaftar	8.450	6.491	4.692	5.903	5.431
3	Pencari Kerja Yang ditempatkan (Rasio) %	7,56	33,34	35,49	37,90	49,77

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi & UMKM Kota Jambi, 2018

Meskipun dari data tersebut ini di Kota Jambi jumlah pencari kerja yang ditempatkan semakin besar jumlahnya dari Tahun ke Tahun, namun tetap dibutuhkan upaya lebih kuat agar antara pasokan tenaga kerja dengan tenaga kerja yang ditempatkan bias lebih maksimal. Hal ini diharapkan agar tidak terjadi peningkatan angka pengangguran di Kota Jambi.

Sedangkan kondisi pengangguran terbuka di Kota Jambi dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.58.
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Jambi Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016***	2017
1	Pengangguran Terbuka	18.185	26.569	20.098	dt	15.754
2	Angkatan Kerja (AK)	248.663	262.291	274.449	dt	284.018
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) %	7,31	10,13	7,32	dt	5,55

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi & UMKM Kota Jambi, 2018

*** BPS Kota Jambi tidak melakukan Sensus Sakernas 2016 dikarenakan kebijakan pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran

TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Di Kota Jambi kondisi pada Tahun 2017 sekitar 5,5 %, artinya dari 100 penduduk usia 15 Tahun keatas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja) sebanyak 5 orang merupakan pengangguran.

2.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peningkatan kualitas hidup perempuan dilaksanakan diberbagai bidang pembangunan, diantaranya dengan meningkatnya partisipasi perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah, berdasarkan data kepegawaian Kota Jambi Tahun 2013 - 2016 persentase rata-rata perempuan yang bekerja di pemerintahan tidak mengalami

peningkatan disebabkan salah satunya belum adanya penerimaan pegawai baru di pemerintahan dan selain itu juga setiap Tahunnya bertambah jumlah pegawai negeri Kota Jambi yang pensiun, terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.59.
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan di Kota Jambi Tahun 2013-2016

No	Uraian	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1	Jumlah pekerja perempuan (orang)	92.399	93.797	81.588	89.061
2	Jumlah pekerja perempuan dilembaga pemerintah (orang)	4.930	5.156	5.227	4.554
3	Persentase	5.34%	5.50%	6.41%	5.11%

Sumber: BKPSDMD Kota Jambi, 2018

Disamping itu juga selain dari perempuan bekerja di lembaga pemerintah terdapat pekerja perempuan yang bekerja di sektor swasta, bila dilihat dari kurun waktu empat Tahun terakhir pekerja perempuan sektor swasta yang mendominasi.

Tabel 2.60.
Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta di Kota Jambi Tahun 2013-2016

No	Uraian	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1	Jumlah pekerja perempuan (orang)	92.399	93.797	81.588	89.061
2	Jumlah pekerja perempuan disektor swasta (orang)	87.469	88.641	76.361	84.507
3	Persentase	94.66%	94.50	93.59	94.89

Sumber: DPMPPA Kota Jambi, 2018

Partisipasi angkatan kerja perempuan berdasarkan data survey angkatan kerja nasional (sakernas) Tahun 2013 -2015, persentasi rata-rata perempuan yang berkerja mengalami peningkatan dari 43,05% menjadi 46,69% atau 45,17% setiap Tahunnya.

Tabel 2.61.
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota Jambi Tahun 2013-2016

No	Uraian	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1	Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan	204.387	209.688	213.694	-
2	Jumlah angkatan kerja perempuan	89.545	95.991	99.978	-
3	Persentase	43.05	45.78	46.69	-

Sumber: BPS Prov. Jambi, 2018

Partisipasi angkatan kerja perempuan di sektor privat maupun sektor publik menunjukkan level partisipasi yang cukup tinggi. Sehingga dibutuhkan kebijakan dan program yang fokus pada pemberdayaan dan peningkatan kapasitas tenaga kerja perempuan agar dapat menopang ekonomi keluarga secara mandiri, namun tetap mampu mengelola rumah tangga secara baik untuk masa depan keluarga dan anak-anak.

Tabel 2.62.
Rasio Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan
Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan di Kota Jambi Tahun 2013-2016

No	Uraian	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1	Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak-anak	4 kasus	20 kasus	60 kasus	44 kasus
2	Jumlah pengaduan yang terselesaikan	4 kasus	20 kasus	60 kasus	44 kasus
3	Persentase	100	100	100	100

Sumber: DPMPPA Kota Jambi, 2018

Tindak kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga masih dianggap sebagai masalah pribadi dan bisa menimbulkan aib keluarga, sehingga banyak warga yang tidak berani melaporkan permasalahan tersebut. Kekerasan ini terjadi mayoritas karena masalah ekonomi keluarga, serta usia pernikahan dini yang menyebabkan secara mental masih cukup labil. Seiring dengan sosialisasi dan pelatihan terkait dengan penanganan korban kekerasan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi, masyarakat sudah berani untuk melaporkannya bila terjadi tindak kekerasan baik yang dari korban maupun dari warga setempat kejadian.

Kesadaran masyarakat khususnya perempuan di Kota Jambi untuk melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga (Perempuan dan Anak-anak) mengalami peningkatan yang signifikan, hal ini terlihat dari pada Tahun 2013 terjadi pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak sebanyak 4 kasus, namun pada Tahun 2015 mencapai 60 kasus, dan pada Tahun 2016 terjadi penurunan sebesar 36,4% atau 16 kasus.

Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak-anak dari tindakan kekerasan dari Tahun 2013-2016 berfluktuasi, yaitu sebanyak 4 kasus (Tahun 2013), 20 kasus (Tahun 2014), 60 kasus (Tahun 2015) dan pada Tahun 2016 sebanyak 44 kasus, namun dari fluktuasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak semua pengaduan dapat diselesaikan 100%.

2.3.2.3. Pangan

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun

mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Ketahanan pangan di suatu daerah mencakup empat komponen, yaitu: (1) kecukupan ketersediaan pangan; (2) stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari Tahun ke Tahun; (3) aksesibilitas/keterjangkauan terhadap pangan; dan (4) kualitas/keamanan pangan.

Pangan strategis merupakan pangan yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak di masyarakat. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015, jenis pangan strategis ditetapkan berdasarkan alokasi pengeluaran rumah tangga secara nasional untuk pangan tersebut tinggi, memiliki pengaruh tingkat inflasi dan memiliki kandungan gizi tinggi untuk kebutuhan manusia. Adapun jenis pangan strategis antara lain: beras, tepung terigu, kacang kedelai, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, ikan segar, cabe, bawang merah, gula dan minyak goreng.

Kecukupan ketersediaan pangan strategis di Kota Jambi sudah cukup memadai secara kemandirian, situasi kemandirian pangan di Kota Jambi Tahun 2017 adalah: dari segi ketersediaan Energi Kota Jambi terpenuhi sebesar 2.459 kkal/kap/hari (103,9% AKE) dari angka kecukupan energi yang seharusnya dipenuhi sebesar 2.400 kkal/kap/hari; dari segi ketersediaan Protein Kota Jambi terpenuhi sebesar 63,57 gr/kap/hari (109% AKP) dari angka kecukupan protein yang seharusnya dipenuhi sebesar 63 gr/kap/hari; dari segi ketersediaan Lemak Kota Jambi terpenuhi sebesar 59,12 gr/kap/hari (124% AKL) dari angka kecukupan lemak yang seharusnya dipenuhi sebesar 47,34 gr/kap/hari, dan skor PPH 89,70.

Berkaitan dengan informasi pasokan yang belum ada sehingga menyulitkan dalam penentuan jumlah besaran ekspor dan impor pangan yang keluar masuk Kota Jambi. Untuk mengetahui jumlah pangan yang masuk dan keluar digunakan estimasi ekspor dan impor dengan standar defiasi eror yang kecil. Data estimasi ekspor impor yang dimaksud merupakan hasil estimasi dari data konsumsi pangan yang bersumber dari data Susenas. Penghitungan estimasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan menggunakan data pangan yang dikonsumsi namun tidak dapat diproduksi secara mandiri oleh daerah sehingga pangan tersebut di asumsikan di impor dari luar daerah dan sebaliknya apabila konsumsi terhadap jenis pangan tertentu lebih rendah dari produksinya maka over supply diasumsikan sebagai ekspor.

Berkaitan dengan kualitas/keamanan pangan segar, pemerintah Kota Jambi secara rutin melakukan pengecekan sampel bahan pangan segar agar dapat dikonsumsi secara aman oleh masyarakat, namun belum dapat menjangkau seluruh kalangan masyarakat.

Kuantitas dan kualitas konsumsi pangan merupakan hal penting yang harus diperhatikan karena kelebihan atau kekurangan terhadap satu atau beberapa jenis pangan akan mengakibatkan keadaan malnutrisi atau gizi salah serta penyakit. Tercapainya pencapaian penganekaragaman konsumsi pangan penduduk diukur melalui pencapaian nilai komposisi pola pangan dan gizi seimbang. Implementasi

indikator kuantitatif tersebut disebut skor Pola Pangan Harapan (PPH), yaitu susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama.

Tabel 2.63.

Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Kota Jambi Tahun 2017

Kelompok Pangan	Berat Pangan Gram /Kapita /Hari	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
		Kkal /Kapita	%	%AKE	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
Padi-padian	271,5	1.140,8	53,6	53,1	0,5	26,8	26,5	25,0	25,0
Umbi-umbian	42,2	40,2	1,9	1,9	0,5	0,9	0,9	2,5	0,9
Pangan Hewani	135,0	266,4	12,5	12,4	2,0	25,0	24,8	24,0	24,0
Minyak dan Lemak	38,2	344,4	16,2	16,0	0,5	8,1	8,0	5,0	5,0
Buah/Biji Berminyak	6,1	33,0	1,6	1,5	0,5	0,8	0,8	1,0	0,8
Kacang-kacangan	32,3	79,9	3,8	3,7	2,0	7,5	7,4	10,0	7,4
Gula	27,9	101,5	4,8	4,7	0,5	2,4	2,4	2,5	2,4
Sayur dan Buah	271,0	99,4	4,7	4,6	5,0	23,3	23,1	30,0	23,1
Lain-lain	48,8	23,4	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sumber: Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan Kota Jambi, 2018

Berdasarkan hasil analisis konsumsi Tahun 2017, PPH Kota Jambi sudah mendekati nilai optimal, yaitu telah mencapai 89,70 akan tetapi masih berada di bawah nilai skor PPH ideal minimal 90, hal ini diakibatkan salah satunya dengan kurangnya keberagaman konsumsi pangan oleh masyarakat Kota Jambi terutama kurangnya konsumsi Buah/Biji berminyak dengan skor 0,8 dari skor ideal 1; Umbi-umbian dengan skor 0,9 dari skor ideal 2,5; Kacang-kacangan dengan skor 7,4 dari skor ideal 10; sayuran dan buah dengan skor PPHnya hanya 23,1 dari skor idealnya.

2.3.2.4. Pertanahan

Kewenangan urusan pertanahan kabupaten/kota sesuai dengan amanat Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Bidang Pertanahan yang meliputi 9 sub bidang yaitu 1) pemberian izin lokasi; 2) penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan; 3) penyelesaian sengketa tanah garapan; 4). penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; 5) penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee; 6) penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat; 7) pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong; 8) pemberian izin membuka tanah dan 9) perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaannya kewenangan pemerintah Kota Jambi terkait pelayanan pertanahan masih belum optimal, hal ini dikarenakan kewenangan pelayanan pertanahan masih di lakukan oleh BPN.

Indikator lain dari penyelenggaraan pemerintahan di urusan pertanahan adalah penyelesaian izin lokasi. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya (Permen Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang izin lokasi). Pemberian izin lokasi ini mendukung upaya peningkatan ekonomi di wilayah Kota Jambi, karena dengan semakin banyaknya izin lokasi yang dikeluarkan berarti semakin banyak penanaman modal di Kota Jambi.

Tabel 2.64.
Indikator Urusan Pertanahan Kota Jambi 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Bidang Tanah Milik Pemerintah Kota	Jumlah	595	606	608	614	614
2.	Jumlah Bidang Tanah Milik Pemerintah Kota telah bersertifikat	Jumlah	291	293	295	295	295
3.	Persentase Tanah Milik Pemerintah Kota telah bersertifikat	%	49	48	49	48	48

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kota Jambi dan DPKAD Kota Jambi, 2018

Selain itu dapat di informasikan jumlah yang mengajukan pembuatan sertifikat kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi selama periode dari Tahun 2013 sampai 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.65.
Jumlah Pembuatan Sertifikat Tanah di Kota Jambi

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Hak Milik	7.755	6.304	6.008	5.743	8.927
2.	Hak Guna Bangunan	1.296	540	906	890	1.817
3.	Hak Pakai	16	17	24	35	26
4.	Hak Pengelolaan	0	0	0	0	0
5.	Hipotek	5.532	5.526	5.198	4.929	4.037

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi, 2018

Perbandingan jumlah sertifikat dengan jumlah bangunan bias menjadi tolok ukur kinerja dalam pembangunan di sektor kepemilikan properti penduduk Kota Jambi dari 131.870 unit bangunan rumah di Kota Jambi, hanya terdapat 8.927 sertifikat Hak Milik, 1.817 kavling lahan HGB dan 26 kategori Hak Pakai. Kondisi demikian menggambarkan masih lemahnya status kepemilikan lahan di Kota Jambi, sehingga untuk menjamin Hak Kepemilikan Properti masyarakat perlu kebijakan yang mendorong upaya sertifikasi lahan masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah agar properti yang mereka punyai memiliki nilai ekonomi untuk kesejahteraan yang lebih baik.

2.3.2.5. Lingkungan Hidup

Kewenangan pemerintah daerah dalam bidang lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi perencanaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup, pengendalian pencemaran/ kerusakan, pengelolaan

keanekaragaman hayati, pengelolaan limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan, pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan.

Di bidang pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, Pemerintah Kota Jambi menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran air dan udara, pelaksanaan AMDAL, UKL dan UPL, pengawasan terhadap jenis usaha dan menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan lingkungan hidup. Pengawasan dan pengendalian terhadap status mutu air di Kota Jambi ditetapkan pada 8 Sub-das dan 3 danau. Berdasarkan hasil analisis laborat terhadap sample air sungai yang diobservasi/diuji dan dilakukan penghitungan Indeks Pencemaran, secara umum menunjukkan indikasi tercemar ringan sampai sedang. Hasil pemantauan Tahun 2017 Faktor pembatas (tekanan) ditunjukkan oleh parameter yang melampaui Baku Mutu, meliputi: DO, Sulfida sbg (H2S) dan Detergent (MBAS).

Pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL di Kota Jambi tercapai kinerja 100% pada Tahun 2017, yang menunjukkan bahwa seluruh kegiatan yang berpotensi pada permasalahan lingkungan berada dalam pengawasan pemerintah. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL dan UPL) sebagai bagian dari pengawasan dan pengendalian pada usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL. Pengawasan terhadap pelaksanaan UKL dan UPL trend-nya setiap Tahun meningkat namun capaiannya masih termasuk rendah. Pada Tahun 2016 cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL dan UPL tercapai sebesar 18,87%. Sementara itu dilihat dari kepatuhan usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air pada Tahun 2016 mencapai 80%.

Tabel 2.66.
Indikator Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Kota Jambi Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Pemantauan status mutu air (sungai)	%	100	100	100	100	100
2.	Pemantauan kualitas air	Titik	22	22	22	22	24
3.	Pemantauan kualitas udara	Titik	4	4	4	5	5
4.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	Jml Dok	-	0	1	6	0
5.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL/UPL	Jml Dok	-	8	37	44	17
6.	Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	%	100	100	100	100	100
7.	Ketersediaan Laboratorium Penelitian Lingkungan	Unit	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, 2018

Penanganan sampah selama 5 Tahun terakhir mengalami peningkatan dengan asumsi volume timbulan sampah sebesar 2,5 lt/orang/hari. Volume sampah yang

masuk ke TPA Talang Gulo sama dengan volume sampah terangkut, rata-rata pada Tahun 2017 sebesar 163 Ton/hari.

Tabel 2.67.
Persentase Penanganan Sampah Kota Jambi

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Sampah yang ditangani	332.150	370.475	378.670	406.397	410.260
2.	Volume Produksi Sampah	545.857	571.444	578.475	555.627	560.037
3.	Persentase Penanganan Sampah (%)	60,85	64,83	65,46	73,14	73,25
4.	Jumlah TPS	335	366	402	443	455
5.	Jumlah Daya Tampung TPS (m ³ /hari)	n/a	836	906	994	1.018
6.	Jumlah Penduduk	556.332	568.062	576.067	583.487	591.134
7.	Rasio Daya Tampung TPS terhadap Jumlah Penduduk	n/a	679,50	635,83	587,01	580,68

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, 2018

Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Jambi rata-rata selama 5 Tahun terakhir berada di nilai 45-64 dengan kategori sedikit memenuhi (kualitas air sering buruk dan tidak memenuhi standar). Parameter pencemar yang tertinggi untuk air adalah E.Choli yang berasal dari limbah domestik. Sedangkan kriteria Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Jambi rata-rata selama 5 Tahun masih Sangat Baik, dengan indeks di atas 82.

Tabel 2.68.
Indikator Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan Kota Jambi Tahun 2013 - 2017

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Indeks Kualitas Air	46.39	46.32	46.05	45.79	39.41
2.	Indeks Kualitas Udara	99.08	96.48	95.33	93.05	91.27
3.	Indeks Tutupan Lahan	n/a	25.14	26.84	27.77	27.77

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, 2018

Indeks Tutupan Lahan (ITL) Kota Jambi pada Tahun 2017 sebesar 27,77, sehingga dapat dihitung Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Jambi pada Tahun 2014 dan 2017 adalah sebagai berikut:

$$IKLH = (IKA \times 30\%) + (IKU \times 30\%) + (ITL \times 40\%)$$

$$IKLH \text{ 2014} = (46.32 \times 30\%) + (96.48 \times 30\%) + (25.14 \times 40\%) = 52,89$$

$$IKLH \text{ 2017} = (39.41 \times 30\%) + (91,27 \times 30\%) + (27,77 \times 40\%) = 50,21$$

IKLH Kota Jambi mengalami peningkatan indeks Tahun 2014 ke Tahun 2017 yaitu 52,89 menjadi 50,21 (kategori cukup).

2.3.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan kependudukan dan catatan sipil meliputi empat sub urusan yaitu sub urusan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Profil Kependudukan. Dalam menjalankan urusan tersebut, perangkat daerah yang membidangi urusan ini menjalankan Program Penataan

Administrasi Kependudukan. Program ini diimplementasikan untuk melayani penduduk dalam memperoleh KTP Elektronik (KTP-el), pelayanan penerbitan akta kelahiran, pelayanan penerbitan akta kematian, pencatatan perkawinan non muslim, dan pelayanan kartu keluarga.

Hingga Tahun 2017, jumlah penduduk yang sudah terlayani pembuatan KTP-el sebanyak 348.022 orang. Jika dipersandingkan dengan penduduk dewasa sebagaimana data pada tabel, maka capaian penduduk ber KTP-el baru mencapai 59,88%. Kondisi ini menurun dibandingkan Tahun 2013 yang mencapai 74,55%

Tahun 2016 bayi lahir 1 Tahun yang berakte kelahiran sebanyak 8.287 bayi dengan jumlah bayi lahir 8.935. Kondisi ini naik turun setiap Tahunnya karena kepemilikan akte sangat tergantung kepada orang tua yang secara aktif mendaftarkan bayi lahirnya. Hal ini dapat dilihat pada Tahun 2013, dimana bayi lahir 1 Tahun yang berakte 9.191 bayi sedangkan bayi lahirnya 10.004. Dengan demikian, semua bayi yang lahir belum memperoleh akta kelahiran. Data capaian pelayanan umum urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil Tahun 2013-2017 adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.69.
Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Jambi Tahun 2013-2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di Tahun bersangkutan	Jiwa	9.191	9.116	8.327	8.287	Tad
2.	Jumlah kelahiran di Tahun bersangkutan	Jiwa	10.004	9.887	9.017	8.935	Tad
3.	Jumlah penduduk wajib KTP	Jiwa	401.560	411.483	418.231	438.234	581.230
4.	Jumlah penduduk yang ber KTP	Jiwa	299.371	301.113	301.122	308.077	348.022
5.	Persentase Penduduk ber KTP	%	74,55%	73,18%	72,00%	70,30%	59,88%
5.	Jumlah keseluruhan pasangan nikah	Pasangan	259.092	263.684	266.605	273.263	336.393
6.	Jumlah pasangan nikah berakte nikah	Pasangan	72.857	73.639	74.241	78.811	94.961

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi, 2018

2.3.2.7. Pemberdayaan Masyarakat

Pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat di Kota Jambi dapat dilihat dari data capaian berikut.

Tabel 2.70.
Capaian Urusan Pemberdayaan Masyarakat

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	62	62	62	62	62
2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	70	70	70	70	73

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
3.	Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (buah)	0	0	0	0	0
4.	PKK aktif	70	70	70	70	73
5.	Posyandu aktif	460	460	460	460	460
6.	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%)					
	Penerima Manfaat dari Program Bangkit Berdaya: (kelompok)					
	a. Bidang Infrastruktur	0	22	202	324	310
	b. Bidang Ekonomi	0	0	0	0	0
	c. Bidang Sosial	0	0	0	0	0

Sumber: BPMPPA Kota Jambi dan BPS Kota Jambi, 2018

Rata-rata kelompok LPM di tingkat kelurahan telah terbina 100% dan kelompok binaan PKK di 62 kelurahan dan 11 kecamatan pada Tahun 2017 telah tercapai 100%. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) belum dapat teridentifikasi secara menyeluruh dan harus dilakukan koordinasi data dan Informasi kepada OPD terkait. Untuk penerimaan manfaat program Bangkit Berdaya dalam kelompok. Usaha Ekonomi dan Sosial masih perlu dilakukan koordinasi data & informasi dengan OPD terkait serta sektor swasta.

2.3.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Lingkup kewenangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang diamanatkan oleh Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah meliputi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk, pelaksanaan KIE pengendalian penduduk baik yang bersifat medis maupun kearifan lokal, distribusi peralatan dan perlengkapan kontrasepsi, pendayagunaan PKB/PLKB, serta pembinaan keluarga sejahtera.

Penduduk merupakan faktor penting dalam pembangunan, karena penduduk dapat menjadi modal namun juga dapat menjadi masalah bagi pembangunan suatu daerah. Oleh karena itu penduduk harus dikendalikan salahsatunya melalui program keluarga berencana. Pelaksanaan urusan penendalian penduduk dan keluarga berencana dalam kurun waktu Tahun 2013 – 2016 adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.71.
Pelaksanaan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Total Fertility Rate (TFR)	2,08	2,06	2,04	2,05	2,05
2.	Rasio akseptor KB	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
3.	Cakupan peserta KB aktif (%)	78,96	78,11	74,34	71,27	42,25
4.	Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	25.275	23.627	91.431	tad	8.651
5.	Angka Pemakaian Kontrasepsi bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49 Tahun	77,1	76,06	72,32	67,99	68,78

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi, 2018

2.3.2.9. Perhubungan

Perhubungan sebagai salah satu mata rantai jaringan distribusi barang dan mobilitas penumpang berkembang sangat dinamis, serta berperan di dalam mendukung, mendorong, dan menunjang segala aspek kehidupan baik dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Pertumbuhan sektor transportasi akan mencerminkan pertumbuhan ekonomi secara langsung sehingga transportasi mempunyai peranan yang penting dan strategis, baik secara makro maupun mikro. Keberhasilan sektor transportasi secara makro dapat terlihat dari sumbangan nilai tambahnya dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), dampak ganda (*multiplier effect*) yang ditimbulkannya terhadap pertumbuhan sektor-sektor lain dan kemampuannya meredam laju inflasi melalui kelancaran distribusi barang dan jasa ke seluruh pelosok tanah air. Oleh karenanya ketersediaan infrastruktur transportasi yang handal dan memadai merupakan hal yang sangat penting untuk diupayakan guna mewujudkan ketersediaan infrastruktur transportasi yang handal dan memadai.

Pelayanan urusan perhubungan berkaitan dengan mobilitas masyarakat baik dalam pengadaan transportasi maupun sarana dan prasarananya. Pelaksanaan urusan perhubungan dalam kurun waktu Tahun 2013 - 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.72.

Indikator Sarana dan Fasilitas Perhubungan Kota Jambi Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Pelabuhan Laut/Terminal Bus (unit)					
	a. Terminal	6	6	5	5	2
	b. Pelabuhan					
2.	Jumlah terminal dalam kondisi baik (unit)	6	6	5	5	2
3.	Ketersediaan rambu-rambu lalu lintas (%)					
	a. Jumlah total rambu (unit)	176	286	356	491	607
	b. Jumlah rambu lalu lintas (unit)	176	110	70	135	116
	c. Jumlah kebutuhan rambu lalu lintas (unit)	-	-	-	-	822
4.	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik (%)	-	-	-	-	-
5.	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guadrill (%))	-	-	-	-	61%
6.	Jumlah total fasilitas perlengkapan jalan (unit)					
	a. Jumlah halte (unit)	-	-	1	-	2
	b. Jumlah marka jalan (unit)	891	856	859	-	3341
	c. Jumlah paku jalan (unit)	-	329	441	-	-
	d. Jumlah APILL (unit)	35	35	35	38	38
7.	Jumlah ATCS (unit)	-	-	-	-	-
8.	Jumlah kasus pelanggaran lalu lintas (kasus)	-	-	-	13826	12769
9.	Persentase fasilitas perlengkapan jalan dalam kondisi baik (%)					
10.	Jumlah kecelakaan (jumlah)	195	237	262	403	414
11.	Jumlah korban kecelakaan					

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
	a. Meninggal	37	43	32	25	30
	b. Luka Berat	103	47	22	19	3
	c. Luka Ringan			379	656	655
12.	Jumlah Lokasi Parkir Dalam Kawasan (titik)	1	1	1	1	1
13.	Jumlah Lokasi Parkir Luar Kawasan (titik)	143	155	160	263	433

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Jambi, 2018

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa kasus pelanggaran lalu lintas masih sangat tinggi di Kota Jambi dan jumlahnya fluktuatif cenderung menurun. Pada Tahun 2016 kasus pelanggaran lalu lintas tercatat 13.826 kasus. Jumlah kasus ini berkurang sampai dengan 12.769 kasus di Tahun 2017. Masih tingginya angka pelanggaran lalu lintas ini mengindikasikan bahwa tingkat kesadaran masyarakat pengguna jalan dalam mematuhi peraturan lalu lintas di Kota Jambi masih rendah.

Untuk memberikan jaminan keamanan bagi pengguna kendaraan umum dan barang, setiap kendaraan umum diwajibkan melakukan pengujian kendaraan bermotor. Angkutan umum yang akan dioperasikan di jalan wajib memiliki pengujian agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Kota Jambi telah memiliki sarana pengujian kendaraan sebanyak 1 unit yang beroperasi dengan baik. Waktu lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) kelayakan angkutan umum 45 menit per kendaraan dengan variasi biaya pengujian yang berbeda tergantung jenis kendaraannya. Persentase angkutan umum yang diuji setiap Tahun cenderung menurun dari Tahun 2013-2017.

Tabel 2.73.
Pembangunan Urusan Perhubungan Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Satuan	Capaian Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/ Kota	Unit	1	1	1	1	1
2.	Jumlah kendaraan yang telah melakukan uji						
	a. Mobil Penumpang Umum	Unit	175	146	113	94	115
	b. Mobil Bus	Unit	1150	1861	894	863	805
	c. Mobil Barang	Unit	29389	20538	27259	27508	25342
3	Jumlah kendaraan bermotor yang wajib uji (dua kali uji)						
	a. Mobil Penumpang Umum	Unit	27	51	51	52	62

No	Uraian	Satuan	Capaian Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
	b. Mobil Bus	Unit	401	446	457	466	478
	c. Mobil Barang	Unit	102289	12542	14488	15829	16876
4.	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	Menit	45	45	45	45	45
5.	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum						
	a. Mobil Penumpang Umum	Rupiah	30000	-	-	-	-
	b. Kereta Gandeng/Tempel	Rupiah	37000	-	-	-	-
	c. Mobil Bus, Mobil Barang dan Kendaraan Khusus						
	1) JBB dibawah 2 ton	Rupiah	37000	50000	50000	50000	50000
	2) JBB diatas 2 s/d 7 ton	Rupiah	40000	60000	60000	60000	60000
	3) JBB diatas 7 s/d 14 ton	Rupiah	45000	75000	75000	75000	75000
	4) JBB diatas 14s/d 24 ton	Rupiah	50000	100000	100000	100000	100000
	5) JBB diatas 24 ton	Rupiah	55000	120000	120000	120000	120000
	d. Plat/tanda uji	Rupiah	7000	10000	10000	10000	10000
	e. Biaya Denda	Rupiah					
	f. Buku Uji	Rupiah	12500	15000	15000	15000	15000
	g. Tanda Samping Uji (Cat)	Rupiah					
	h. Tanda Samping Uji (Stiker)	Rupiah	13000	20000	20000	20000	20000

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Jambi, 2018

2.3.2.10. Komunikasi dan Informatika

Kewenangan urusan komunikasi dan informatika menurut Undang-Undang Pemerintah Daerah meliputi sub urusan informasi dan komunikasi publik yaitu Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Sedangkan rincian kewenangan untuk sub urusan aplikasi informatika adalah Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Ketersediaan dan keterbukaan informasi menjadi syarat mutlak pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan keterbukaan Informasi tersebut masyarakat bisa dengan mudah mengakses kebutuhan akan informasi khususnya yang bersifat terbuka (publik). Jaminan akan keterbukaan informasi semakin dikuatkan dengan adanya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam UU no 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah dicanangkan bahwa arah pembangunan sektor Kominfo adalah membangun masyarakat Indonesia berbasis pengetahuan (*knowledge based*

society) yang disebut sebagai Masyarakat Informasi Indonesia. Untuk itu jaringan informasi dan komunikasi harus terus dikembangkan agar penyampaian informasi atau pesan dapat lebih cepat sampai kepada yang berkepentingan. Oleh karena itu pembentukan dan pemberdayaan masyarakat di bidang komunikasi dan informatika sangat dibutuhkan.

Untuk mendistribusikan Informasi Nasional di Kota Jambi dilaksanakan melalui beberapa media antara lain media massa seperti majalah, radio, dan televisi; media baru seperti website (media online); media tradisional seperti pertunjukan rakyat; media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya; dan/atau Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho.

Tabel 2.74.
Capaian urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2013-2017

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Website milik Pemerintah Daerah	3	5	8	14	25
2.	Persentase SKPD telah memiliki website	5,55	9,25	14,81	25,92	46,29
3.	Persentase update website Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100
4.	Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui:					
	a. Media massa seperti majalah, radio, dan televisi.	-	-	-	-	-
	b. Media baru seperti website (media online).	2	2	2	2	2
	c. Media tradisional seperti pertunjukan rakyat.	-	-	-	-	1

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi, 2018

Tuntutan pelayanan bidang komunikasi dan Informasi semakin meningkat seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi komunikasi dan informasi yang ada. Semakin meningkatnya kemampuan masyarakat luas dalam penguasaan teknologi komunikasi dan informasi juga harus diimbangi oleh pemerintah daerah sebagai aktor utama pelaksana pembangunan. Untuk memudahkan komunikasi antar pemerintah dengan masyarakat saat ini Kota Jambi telah memiliki website resmi yang dikelola oleh pemerintah. Selain itu, untuk memberikan pelayanan informasi dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat, semua Pemerintah Daerah di Kota Jambi telah memiliki website. Meskipun sudah semua Perangkat Daerah memiliki website, tetapi belum semua website milik Perangkat Daerah aktif melakukan updating informasi. Hal ini dikarenakan keterbatasan sumberdaya manusia yang memiliki kualifikasi di bidang teknologi informasi pada setiap perangkat daerah.

Tabel 2.75.
Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal di Kota Jambi Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Jenis Surat Kabar Terbitan Nasional	15	15	15	15	15

2.	Jumlah Jenis Surat Kabar Terbitan Lokal	32	32	32	32	32
Total		47	47	47	47	47

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi, 2018

Untuk penyiaran Radio/TV dari Tahun 2013 sampai dengan 2017 secara keseluruhan mengalami peningkatan terutama pada rentang waktu Tahun 2014 sampai Tahun 2015. Pada periode Tahun ini semua penyiaran baik radio maupun televisi mengalami peningkatan yang cukup signifikan kecuali untuk penyiaran radio nasional yang jumlah konstan pada 1 penyiaran. Hal ini dikarenakan semakin berkembangnya Kota Jambi sehingga berdampak positif terhadap jumlah penyiaran untuk radio maupun televisi baik lokal maupun nasional.

Tabel 2.76.
Jumlah Penyiaran Radio/TV Tahun 2013 s/d 2017 Kota Jambi

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Penyiaran Radio Lokal	8	8	8	13	13
2.	Jumlah Penyiaran Radio Nasional	1	1	1	1	1
3.	Jumlah Penyiaran TV Lokal	2	2	2	15	15
4.	Jumlah Penyiaran TV Nasional	6	6	10	14	14
Total		47	17	17	21	43

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi, 2018

2.3.2.11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Pengembangan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan kegiatan yang penting dalam rangka mewujudkan ekonomi kerakyatan. Hal tersebut ditunjukkan oleh besarnya potensi koperasi dan UMKM di Kota Jambi baik dari peningkatan jumlah usaha kecil dan menengah, penyerapan tenaga kerja dan jumlah unit usahanya. Pencapaian kinerja urusan Koperasi dan UKM dengan mendasarkan indikator koperasi aktif, menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Dari hasil verifikasi data koperasi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kota Jambi pada Tahun 2017, di Kota Jambi terdapat 804 koperasi, namun sebanyak 423 koperasi (52,61%) merupakan koperasi tidak aktif. Dari kondisi tersebut nampaknya perlu peningkatan kapasitas pengurus dalam manajemen koperasi sehingga kinerja koperasi semakin baik. Disamping itu dalam rangka menyelaraskan visi Kota Jambi "Menjadikan Kota Jambi sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa Berbasis Masyarakat Berakhlak dan Berbudaya dengan Mengedepankan Pelayanan Prima", perlu pergeseran arah pengembangan koperasi di Kota Jambi.

Tabel 2.77.
Persentase Koperasi Aktif di Kota Jambi Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah koperasi aktif	347	346	362	377	381
2	Jumlah koperasi	745	774	787	801	804
3	Persentase koperasi aktif	46,58	44,70	46,00	47,07	47,39

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kota Jambi, 2018

Selain koperasi, upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah pemberdayaan dan pembinaan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Penentuan kriteria usaha mikro, kecil dan menengah secara jelas telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan;

Jumlah UMKM di Kota Jambi mengalami peningkatan dari Tahun ke Tahun. Jika pada Tahun 2013 jumlah UMKM hanya sebesar 10.556 unit, tumbuh menjadi 10.763 unit pada Tahun 2017. Hal tersebut menunjukkan bahwa UMKM menjadi salah satu sektor perekonomian yang bisa diandalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal yang perlu mendapatkan perhatian terkait dengan pengembangan sektor UMKM di Kota Jambi adalah mengenai pembinaan. Dari jumlah yang sangat banyak tersebut, baru sebagian kecil yang memiliki sertifikat/perijinan pada Tahun 2017 jumlah UMKM yang memiliki sertifikat sebanyak 335 unit.

Permasalahan lain yang menjadi kendala dalam pengembangan UMKM adalah kemampuan fasilitasi pemerintah untuk mengikutsertakan pelaku UMKM dalam pameran-pameran. Keikutsertaan pelaku UMKM dalam pameran tersebut cukup penting dalam rangka mengenalkan produk dan memperluas jaringan pasar. Data yang ada menunjukkan sampai Tahun 2017 baru 0,0074% pelaku UMKM atau sebanyak 80 pelaku yang mendapatkan kesempatan mengikuti pameran.

Tabel 2.78.
Indikator Urusan UMKM Kota Jambi Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Unit	10.556	10.556	10.545	10.704	10.763
2.	Persentase UMKM yang telah mengikuti Pameran	%	0,0040	0,0047	0,0071	0,0070	0,0074
		Unit	43	50	75	75	80
3.	Cakupan bina kelompok UMKM	Unit	-	-	-	-	-
4.	Jumlah UMKM yang memiliki perijinan/sertifikasi	Unit / Tahun	-	-	15	58	335
5.	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	%	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kota Jambi, 2018

2.3.2.12. Penanaman Modal

Penanaman modal merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemampuan dan daya saing daerah serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu didorong agar kinerja sektor penanaman modal dapat meningkat. Iklim investasi di Kota Jambi saat ini cukup kondusif, selama jenis investasinya tidak bertentangan dengan norma sosial di masyarakat dan cenderung pro rakyat seperti tidak mematikan usaha lokal, mengutamakan dan memberdayakan tenaga kerja lokal, serta jenis usahanya tidak menimbulkan penurunan kualitas lingkungan.

Potensi dan peluang penanaman modal di Kota Jambi cukup terbuka khususnya di bidang usaha mikro dan jasa termasuk investasi di bidang perdagangan, namun potensi dan peluang penanaman modal di bidang industri besar relatif terbatas karena keterbatasan lahan.

Perkembangan penanaman modal di Kota Jambi menunjukkan kecenderungan meningkat. Total realisasi investasi berskala nasional di Kota Jambi Tahun 2017 sebesar Rp 640,53 milyar. Nilai tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan total realisasi Investasi Tahun 2016 sebesar Rp 541,94 milyar.

Tabel 2.79.
Jumlah Investor dan Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)
Kota Jambi 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (unit)	n/a	5	12	22	14
2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Milyar)	n/a	48	413,13	541,94	640,53
3.	Jenis Izin yang Dilayani	n/a	43	43	51	73
4.	Izin yang Diterbitkan	n/a	13.062	16.651	11.265	10.172

Sumber: DPMPTSP Kota Jambi, 2018

Saat ini salah satu kendala penanaman modal di Kota Jambi adalah masih terbatasnya daya dukung infrastruktur dan suprastruktur perekonomian, sehingga masih perlu dilakukan perbaikan-perbaikan dan penataan infrastruktur dan suprastruktur perekonomian. Langkah lainnya untuk meningkatkan investasi di Kota Jambi, perlu dibuat pemetaan peluang dan potensi penanaman modal di Kota Jambi, karena meningkatnya penanaman modal akan memberikan pengaruh positif bagi pengurangan pengangguran. Pemetaan peluang dan potensi penanaman modal di Kota Jambi dibuat berdasarkan zonasi, tata ruang atau sentra/klaster produk unggulan kewilayahan. Kegiatan promosi dan pameran-pameran potensi dan peluang investasi di Kota Jambi perlu lebih ditingkatkan, terutama di event-event besar.

Tabel 2.80.
Daya Serap Tenaga Kerjadi Kota Jambi 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN	(n/a)	87	160	957	2.859
2.	Jumlah seluruh PMA/PMDN	(n/a)	5	12	22	14

3.	Rasio daya serap tenaga kerja (%)	(n/a)	87	91	96	143
----	-----------------------------------	-------	----	----	----	-----

Sumber: DPMPTSP Kota Jambi, 2018

Berdasarkan tabel di atas, daya serap tenaga kerja di Kota Jambi, pada Tahun 2014 rasio daya serap tenaga kerja sebesar 87% , terjadi peningkatan pada Tahun 2015 dan 2016 sebesar 91% dan 96% dan kemudian Tahun 2017 meningkat signifikan menjadi sebesar 143%.

2.3.2.13. Kepemudaan dan Olah Raga

Pembangunan pemuda dan olahraga mempunyai peran strategis dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pemuda memiliki peran aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan. Sementara itu, olahraga memiliki peran untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh, menanamkan nilai moral, akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat persatuan dan kesatuan.

Berdasarkan data pelaksanaan urusan kepemudaan dan olahraga di Kota Jambi dalam kurun waktu Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.81.
Capaian Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah klub olahraga (buah)	28	28	28	28	28
2	Jumlah gedung olahraga (buah)	4	4	4	4	4
3	Jumlah kegiatan olahraga (kali)	28	28	28	28	28
4	Jumlah organisasi pemuda (buah)	15	15	15	14	20
5	Jumlah kegiatan kepemudaan (kali)	1	6	6	6	6
6	Jumlah kegiatan olahraga (kali)	28	28	28	28	28

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi, 2018

2.3.2.14. Statistik

Kewenangan pemerintah daerah dalam Urusan Statistik sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah Kabupaten/Kota. Data statistik merupakan salah satu instrumen dalam perumusan kebijakan serta evaluasi pembangunan yang lebih tepat sasaran. Kunci pokok keberhasilan sebuah perencanaan terletak pada ketersediaan data dan informasi statistik yang andal dan terpercaya. Data dan informasi statistik yang berkualitas menjadi rujukan semua pihak dalam merancang kebijakan maupun dalam melakukan pemantauan dan evaluasi agar sasaran yang ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Data statistik sudah menjadi kebutuhan publik dalam arti luas, bukan saja untuk kepentingan pemerintah saja tetapi juga menjadi kebutuhan para stakeholders, dunia usaha, akademisi, para pengamat serta masyarakat pada umumnya. Pelaksanaan urusan stastistik di Kota Jambi telah dilaksanakan oleh Bappeda Kota Jambi sebagai Perangkat Daerah yang memiliki Tupoksi penyelenggaraan urusan statistik. Hasil dari

pelaksanaan urusan statistik antara lain adalah Buku “Kota Jambi dalam Angka” sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan Kota Jambi. Sejak Tahun 2017 berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang perangkat daerah kewenangan urusan statistik daerah menjadi kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi.

2.3.2.15. Persandian

Urusan Pemerintahan Bidang Persandian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dimana kewenangan Pemerintah Daerah, dalam hal ini Kota Jambi adalah a) penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah, dan b) penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaannya di Kota Jambi, Urusan Persandian dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, dimana permasalahannya dihadapkan pada kurangnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) bidang persandian dan belum optimalnya pelatihan SDM dan pengembangan teknologi informasi dalam penyelenggaraan bidang persandian. Di sisi lain, penyelenggaraan urusan persandian juga belum mendapatkan perhatian dan kewenangan yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 belum dilaksanakan dengan optimal.

Indikator yang dapat digunakan untuk melihat kinerja pembangunan pada urusan persandian berkaitan dengan ketersediaan Tempat Kegiatan Sandi (TKS), sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan keahlian di bidang persandian, dan informasi persandian.

Tabel 2.82.

Capaian Urusan Persandian Kota Jambi Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah SDM sandi yang memiliki kualifikasi atau kompetensi persandian	Orang	1	1	1	2	2
2.	Persentase informasi terenkripsi yang diserahkan kepada Kepala Daerah	%	50	100	66,67	50	75

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi, 2018

2.3.2.16. Kebudayaan

Pelaksanaan urusan kebudayaan di Kota Jambi difokuskan untuk mengangkat kesenian tradisonal, upacara-upacara adat yang berkembang di masyarakat. Penyelenggaraan urusan kebudayaan ditujukan untuk melestarikan nilai-nilai budaya dengan cara pembinaan sanggar-sanggar seni dan pelestarian cagar budaya di Kota Jambi. Peningkatan sarana dan prasarana seni dan budaya serta pelaksanaannya dan mengikuti even-even seni budaya di dalam maupun di luar daerah.

Adapun capaian pelaksanaan urusan kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.83.
Capaian Urusan Kebudayaan

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	1	3	3	5	5
2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya (buah)	-	-	-	-	-
3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (buah)	3	3	3	3	3

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi, 2018

Kinerja pembangunan sektor kepariwistaan, seni dan budaya khususnya pada upaya pembangunan daya tarik wisata budaya (*cultural tourism*) dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan melalui kegiatan festival seni dan budaya serta kegiatan pelestarian kawasan cagar budaya. Sebagai wilayah perkotaan, maka pengembangan pariwisata Kota Jambi harus focus pada pariwisata kota (*urban tourism*), sehingga aktifitas apresiasi terhadap seni dan budaya serta kawasan bersejarah (*heritage*) perlu ditingkatkan agar daya tarik wisatawan untuk berkunjung semakin meningkat. Harapan dari peningkatan kunjungan ini adalah peningkatan pengeluaran wisatawan yang berdampak *multiplier* pada ekonomi masyarakat.

2.3.2.17. Perpustakaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan bidang perpustakaan untuk Pemerintah Daerah meliputi:

- a) Pembinaan perpustakaan, dengan lingkup:
 - ✓ Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - ✓ Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- b) Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno, dengan lingkup:
 - ✓ Pelestarian naskah kuno milik Daerah Kabupaten/Kota
 - ✓ Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Perpustakaan memiliki peran yang sangat strategis dalam mentransformasikan ilmu pengetahuan menuju masyarakat cerdas, kritis dan inovatif, disamping sebagai pelestari nilai budaya di masyarakat. Pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan diarahkan pada meningkatnya kegemaran membaca masyarakat (*reading habit society*) menuju masyarakat belajar (*learning society*) yang berujung pada peningkatan kecerdasan kehidupan bangsa. Oleh sebab itu, perpustakaan harus menyediakan koleksi yang lengkap dan mudah serta murah.

Rasio kinerja urusan perpustakaan dari Tahun ke Tahun mengalami peningkatan, hal ini terlihat dari jumlah koleksi judul buku yang terdapat di perpustakaan, dimana pada Tahun 2013 hanya sebanyak 1.549 judul mengalami peningkatan signifikan pada Tahun 2017 sebanyak 20.128 judul, tetapi secara perbandingan jumlah penduduk hanya 7,81%, artinya hal ini harus terus ditingkatkan.

Secara detail pelaksanaan urusan perpustakaan di Kota Jambi yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.84.
Capaian Urusan Perpustakaan

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah perpustakaan (buah)	1	1	1	1	1
2.	Jumlah pengunjung perpustakaan per Tahun (orang)	11.769	12.692	14.896	28.435	37.337
3.	Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (judul)	1.549	1.215	18.298	19.569	20.128
4.	Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (eks)	4.028	1.863	41.326	44.639	46.180
5.	Jumlah Penduduk (Jiwa)	556.332	568.062	576.067	583.487	591.134
6.	Eksemplar buku per jumlah penduduk Kota Jambi(%)	0,72	0,33	7,17	7,65	7,81

Sumber: Dinas Kearsip dan Perpustakaan Kota Jambi, 2018

2.3.2.18. Kearsipan

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten pada Urusan Kearsipan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah terkait dengan pengelolaan arsip, perlindungan dan penyelamatan arsip, dan perizinan. Pengelolaan arsip meliputi pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis. Untuk perlindungan dan penyelamatan arsip meliputi pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 Tahun, penyelamatan arsip pada Perangkat Daerah, autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media.

Pengelolaan arsip statis mencakup kegiatan yang dilakukan guna penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip dengan cara mengoptimalkan sarana dan prasarana kearsipan yang ada didalam pengelolaannya. Pelaksanaan urusan kearsipan di Kota Jambi dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Capaian pelaksanaan urusan kearsipan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.85.
Capaian Urusan Kearsipan

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah SKPD Yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku	-	-	-	1	12
2.	Jumlah SKPD	50	50	50	50	50
3.	Persentase Pengolahan Arsip secara Baku	0	0	0	2	24

Sumber: Dinas Kearsip dan Perpustakaan Kota Jambi, 2018

2.3.3. Layanan Urusan Pilihan

2.3.3.1. Kelautan dan perikanan

Peran sektor kelautan dan perikanan dalam pengembangan perekonomian di Kota Jambi sangat strategis, karena sektor ini sangat diperlukan dalam upaya

mendukung pemenuhan kebutuhan pangan (protein hewani), menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Kewenangan urusan kelautan dan perikanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mencakup sub urusan (1) Perikanan Tangkap meliputi: (a). Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota, (b) Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI); dan sub urusan Perikanan Budidaya meliputi: (a) Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, (b) Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, dan (c) Pengelolaan pembudidayaan ikan.

Kontribusi sektor perikanan selama beberapa Tahun terakhir relatif kecil akan tetapi terus menunjukkan tren naik terhadap PDRB di Kota Jambi dari sisi nilai tetapi dilihat dari persentasenya tren tiap Tahun menurun, pada Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 berada pada kisaran 0,06%-0,07%.

Potensi areal perikanan di Kota Jambi pada Tahun 2017 sebesar 6.917,54 Ha, terdiri dari perairan umum 968 Ha, kolam 163,54 Ha, dan Keramba 5.786 Ha. Produksi perikanan dalam kurun waktu Tahun 2013-2017 menunjukkan penurunan yang signifikan. Produksi ikan pada Tahun 2013 sebesar 3.519,49 ton menurun menjadi 3.140,72 ton pada Tahun 2017.

Tabel 2.86.

Produksi Perikanan di Kota Jambi Menurut Sumber Produksi Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013 (ton)	2014 (ton)	2015 (ton)	2016 (ton)	2017 (ton)
1	Perairan Umum	697,33	598,47	678,27	908,34	751,20
2	Sawah	0	0	0	0	0
3	Tambak (Kolam)	1.545,66	1.662,96	1.246,75	1.130,75	979,97
4	Keramba	1,282,99	1.312,88	1.082,95	1.435,98	1.409,55
	Total	3.519,49	3.574,31	3.007,97	3.475,06	3.140,72

Sumber: Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan Kota Jambi, 2018

2.3.3.2. Pariwisata

Peran pariwisata di Kota Jambi ditujukan untuk meningkatkan peran yang berbasis potensi daerah dan memperhatikan kearifan lokal melalui peningkatan-peningkatan kunjungan wisata, penyelenggaraan event dan promosi pariwisata baik tingkat nasional maupun internasional.

Namun dalam hal peningkatan-peningkatan ini masih dihadapi berbagai masalah, diantaranya belum dimilikinya dokumen perencanaan yang terintegrasi di bidang pariwisata, belum optimalnya promosi potensi pariwisata daerah dan belum optimalnya pembinaan, koordinasi dan sinergitas antar stakeholder bidang kepariwisataan. Saat ini di Kota Jambi telah terbentuk lembaga kepariwisataan antara lain PHRI (Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia); ASITA (Asosiasi Indonesia Tours dan Travel). Permasalahan yang paling utama adalah Kota Jambi tidak memiliki objek wisata yang dapat dijual kepada daerah lainnya .

Tabel 2.87.
Indikator Urusan Pariwisata Kota Jambi Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	2,15	2,31	2,27	2,29	2,40
2.	Dokumen RIPPDA Kota Jambi	Dok	-	-	-	1	-
3.	Tersusunnya sistem informasi kepariwisataan	sistem	-	-	-	-	-
4.	Jumlah Restoran	Unit	tad	tad	479	527	617
5.	Jumlah Hotel						
	a. Berbintang	Unit	tad	tad	23	26	28
	b. Non Bintang	Unit	tad	tad	68	67	68

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi, 2018

Permasalahan-permasalahan tersebut secara tidak langsung berpengaruh terhadap kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Kota Jambi selama 5 Tahun terakhir yang peningkatannya belum signifikan. Kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Kota Jambi pada Tahun 2013-Tahun 2017 berada pada kisaran 2%, yaitu pada Tahun 2013 sebesar 2,15%, dan pada Tahun 2017 sebesar 2,40%.

2.3.3.3. Pertanian

Kewenangan urusan pertanian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mencakup sub urusan Sarana Pertanian, Prasarana Pertanian, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian, dan Perizinan Usaha Pertanian.

Tabel 2.88.
Indikator Urusan Pertanian Kota Jambi Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Produksi Padi	ton	9.577,38	7.186,30	2.012	4.383	5.509,5
2.	Produksi Palawija	ton	1.133,09	2.280,32	1.292,92	3.012,26	6.750,36
3.	Produksi Sayur-sayuran	ton	7.401,31	7.498,12	54.570	8.497,8	6.660,31
4.	Produksi Tanaman Buah-buahan	kwintal	26.912,2	27.290,5	34.329,85	28.010,5	10.327,8
5.	Produksi Daging	Kg	9.548.257	6.427.090	5.451.876	6.024.856	tad
6.	Produksi Telur	Kg	4.647.466	4.075.622	2.665.976	2.818.750	tad

Sumber: BPS Kota Jambi, 2018

Luas padi sawah yang dipanen dalam Kota Jambi pada Tahun 2017 adalah sebesar 1.359 Ha dengan produksi sebesar 5.509,5 ton. Jika dibandingkan Tahun 2016 yang luas panennya sebesar 1.349 Ha produksi sebesar 4.383 ton berarti terjadi peningkatan luas panen dan produksi masing-masing sebesar 0.7% dan 25.7%.

Untuk Palawija, produksi palawija seperti jagung sebesar 351,5 ton, ubi kayu sebesar 6.294,5 ton, ubi jalar 95,28 ton, dan kacang tanah sebesar 54,08 ton. Data produksi tanaman buahbuahan di Kota Jambi seperti jeruk siam 74,8 ton, alpukat 485,5

ton, pepaya 3.658,04 ton, dan pisang 2.037,49 ton, mangga dan rambutan masing-masing sebesar 486,05 ton dan 1.131,57 ton

Sarana prasarana milik Pemerintah Kota Jambi yang ada saat ini untuk memenuhi kebutuhan daging hewan adalah Rumah Potong Hewan (RPH). Untuk memenuhi daging yang aman, sehat, utuh dan halal perlu ditunjang oleh sarana dan prasarana memadai sesuai dengan standar teknis RPH, sehingga masih perlu dilakukan berbagai perbaikan dan pemeliharaan RPH. Untuk ternak unggas, saat ini Pemerintah Kota Jambi belum memiliki Rumah Potong Unggas, saat ini pemotongan unggas dilakukan tersebar oleh para pedagang unggas di pasar-pasar, dan belum memenuhi kaidah-kaidah keamanan dan kesehatan.

2.3.3.4. Perdagangan

Perdagangan secara garis besar dibagi menjadi dua, yakni perdagangan dalam negeri (domestik) dan perdagangan luar negeri (internasional). Perdagangan dalam negeri adalah perdagangan yang dilakukan dalam ruang lingkup dalam negeri saja atau nasional. Penjual, pembeli, dan tempat transaksinya juga hanya bersifat domestik atau dilakukan di dalam negeri saja. Sedangkan perdagangan luar negeri/internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antarperorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain.

Terkait dengan pelaksanaan perdagangan dalam negeri, pemerintah telah memiliki arah kebijakan dan pengendalian. Kebijakan dan pengendalian Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud yaitu:

- 1) Peningkatan efisiensi dan efektivitas distribusi;
- 2) Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha;
- 3) Pengintegrasian dan perluasan Pasar dalam negeri;
- 4) Peningkatan akses Pasar bagi Produk Dalam Negeri; dan
- 5) Pelindungan konsumen.

Sedangkan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan perdagangan luar negeri meliputi:

- 1) Peningkatan daya saing produk Ekspor Indonesia;
- 2) Peningkatan dan perluasan akses Pasar di luar negeri; dan
- 3) Peningkatan kemampuan Eksportir dan Importir sehingga menjadi Pelaku Usaha yang andal.

Terkait dengan perdagangan dalam negeri, sarana prasarana perdagangan yang dimiliki Kota Jambi antara lain adalah tersedianya pasar. Tahun 2017 tercatat ada 21 pasar daerah yang tersebar di seluruh wilayah Kota Jambi dan hanya 7 yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Jambi. Dari total seluruh pasar tersebut hanya 1 unit yang memenuhi kriteria sebagai pasar sehat.

Selain penyediaan pasar, untuk mendukung sektor perdagangan dalam negeri juga dilakukan penataan terhadap kawasan perdagangan kaki lima dan pembinaan terhadap para pedagang. Jumlah kawasan perdagangan kaki lima yang ditata sebanyak 2 lokasi. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menjaga kondusifitas sektor perdagangan adalah dengan melakukan pengawasan terhadap pasar; pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan; Pemantuan ketersediaan harga, pasokan, akses pangandikumpulkan secara rutin /periodik; dan upaya perlindungan terhadap konsumen.

Tabel 2.89.
Indikator Urusan Perdagangan Kota Jambi Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Pasar yang diawasi						
	a. Pasar Tradisional	Unit	6	6	6	6	7
	b. Pasar Modern	Unit	-	-	-	-	-
2.	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan daerah.	frekuensi	-	-	-	-	-
3.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB)*	%	24,85	26,46	28,17	29,64	30,24
4.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB)*	Milyar Rupiah	4.121,00	5.021,86	5.999,14	7.233,21	7.952,23
5.	Jumlah pasar daerah	Unit	19	19	19	19	21
6.	Jumlah pasar daerah kategori sehat	Unit	-	1	1	1	1
7.	Lokasi PKL yang tertata	Lokasi	-	-	-	2	2

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, 2018

2.3.3.5. Perindustrian

Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan salah satu sektor usaha yang mempunyai peranan cukup strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional. Disamping mampu menyerap tenaga kerja dan menyediakan lapangan usaha secara dominan, IKM juga memberikan kontribusi pendapatan bagi masyarakat luas. Jika ditinjau dari sisi kualitas dan kuantitas, komoditi IKM ini terus mengalami peningkatan. Namun demikian, IKM saat ini dihadapkan pada persaingan pasar yang lebih ketat lagi ketika telah berlakunya Kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau *ASEAN Economic Community (AEC)*, yang berlaku sejak Tahun 2015. Produk dari luar negeri terutama negara-negara ASEAN semakin deras masuk ke pasar Indonesia dengan harga dan kualitas yang cukup bersaing. Apabila kondisi ini tidak segera diantisipasi dikhawatirkan produk IKM kita akan kalah bersaing dan tersingkir.

Untuk menghadapi dampak negatif akibat adanya persaingan, perlu dilakukan langkah antisipatif dengan cara meningkatkan kemampuan daya saing para IKM, yaitu dengan melakukan peningkatan desain, standardisasi mutu, peningkatan kualitas produk dan inovasi desain produk baik aspek sumber daya manusia, teknologi maupun peluang pasar.

Gambaran kinerja urusan perindustrian di Kota Jambi selama kurun waktu Tahun 2013-2017 dapat dilihat dari capaian indikator bidang perindustrian seperti Jumlah dan pertumbuhan IKM (Industri Kecil dan Menengah) serta kontribusi sektor Industri terhadap PDRB.

Tabel 2.90.
Indikator Pertumbuhan IKM Kota Jambi Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah IKM	Unit	-	-	2.403	2.884	2.990
2.	Jumlah IKM yang mendapat binaan atau bantuan	Unit	-	-	-	402	792
3.	Jumlah sentra industri yang berkembang	Sentra	-	-	-	3	3
4.	Jumlah IKM, yang telah mengikuti pameran promosi produk	Unit	-	-	20	30	45
5.	Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi HaKI	Unit	-	-	10	20	35
6.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (ADHB)*	%	11,99	11,88	11,59	10,88	10,77
7.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (ADHB)*	Milyar Rupiah	1.988,8 9	2.254,4 2	2.467,7 7	2.655,30	2.830,67

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, 2018

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa secara kuantitatif jumlah IKM mengalami peningkatan setiap Tahunnya dari 2015 hingga 2017, yaitu dari 2.403 unit menjadi 2.990 unit. Namun, dari segi pertumbuhan mengalami perlambatan. Di sisi lain, peningkatan jumlah IKM di Kota Jambi ini belum dibarengi dengan pembinaan maupun pemberian bantuan. Hal ini dilihat dari jumlah IKM yang mendapat binaan yang sangat rendah proporsinya dibandingkan jumlah IKM yang ada, pada Tahun 2015, yaitu tidak ada yang dibina dan Tahun 2017 sebanyak 792 IKM. Demikian halnya dengan jumlah produk IKM yang dipromosikan di Kota Jambi yang tergolong sangat sedikit, dimana Tahun 2015 hanya 20 IKM yang mengikuti promosi produk dan Tahun 2017 sebesar 45 IKM, artinya secara rata-rata hanya 6-7% IKM yang dibina mampu untuk mempromosikan produknya.

Sementara itu, kontribusi sektor industri terhadap PDRB (ADHB) Kota Jambi terus menunjukkan peningkatan dan menjadi sektor dengan kontribusi terbesar ketiga terhadap PDRB selama periode Tahun 2013-2017. Peningkatan sektor industri ini juga sejalan dengan peningkatan jumlah sentra industri yang berkembang setiap Tahunnya.

2.3.4. Urusan Penunjang

2.3.4.1. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan memiliki peranan yang penting dalam proses penganggaran dan pelaksanaan pembangunan daerah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen perencanaan pembangunan daerah yang harus disusun meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 Tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 Tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk kurun waktu 1 Tahun. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan Teknokratik, Politik, Partisipatif, Top-down dan Bottom-up. Di Kota Jambi dokumen perencanaan yang telah dimiliki yaitu: RPJPD

Tahun 2005-2025, RPJMD yang disusun setiap 5 Tahun sekali, dan RKPD yang disusun setiap Tahun.

Penyusunan rencana pembangunan didahului dengan evaluasi pembangunan daerah agar rencana yang disusun dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh daerah. Evaluasi kinerja pembangunan dilaksanakan dengan menyusun laporan evaluasi hasil RPJMD dan evaluasi RKPD setiap Tahun sebagai dasar dalam penyusunan RKPD Tahun berikutnya. Penyusunan dokumen perencanaan multisektor juga menjadi tanggung jawab perangkat daerah fungsi perencanaan pembangunan. Beberapa dokumen perencanaan multisektor yang telah diamanatkan oleh pemerintah telah disusun, antara lain RAD Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK), Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), dan Rencana Aksi Daerah Pencapaian SDG's. Berbagai dokumen perencanaan multi sektor tentunya akan disesuaikan dengan kebijakan terbaru sebagaimana termuat dalam RPJMD dan RPJMN dan peraturan perundang-undangan yang terbaru.

Jumlah dokumen perencanaan per Tahun yang telah disusun meningkat selama periode Tahun 2013-2017, yaitu dari 13 dokumen menjadi 14 dokumen. Dari beberapa dokumen perencanaan yang telah disusun, sampai dengan Tahun 2017 telah mencapai 100% yang diimplementasikan, yaitu ditindaklanjuti dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan/atau dasar penyusunan dokumen/rencana kegiatan oleh PD lainnya.

Tabel 2.91.
Indikator Urusan Perencanaan Kota Jambi Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	Dok/th	7	6	6	6	6
2.	Jumlah kajian/dokumen/laporan perencanaan bidang infrastruktur dana pengembangan wilayah yang tersusun	Dok/th	-	2	2	1	1
3.	Jumlah kajian/dokumen/laporan perencanaan bidang pemerintahan, sosial dan budaya yang tersusun	Dok/th	-	-	7	2	4
4.	Jumlah kajian/dokumen/laporan perencanaan bidang ekonomi yang tersusun	Dok/th	6	4	5	4	3

Sumber: Bappeda Kota Jambi, 2018

Selain dari jumlah dokumen dan implementasi perencanaan dalam pembangunan, tidak kalah penting dilihat dari sisi kualitas perencanaan pembangunan daerah yang diukur dengan kesesuaian perencanaan program yang membandingkan kesesuaian antara rencana dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.92.
Capaian Kesesuaian Perencanaan Program Kota Jambi Tahun 2013-2017

No	Uraian	Capaian Kinerja Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah program RKPD	54	54	54	54	54
2.	Jumlah program RPJMD	54	54	54	54	54
3.	Ratio penjabaran program RPJMD dalam RKPD	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Bappeda Kota Jambi, 2018

2.3.4.2. Keuangan

Kinerja keuangan daerah terutama dilihat dari pendapatan asli daerah yang menunjukkan tingkat kemandirian daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Dalam kurun waktu Tahun 2013-2017, persentase kontribusi PAD terhadap total APBD dari sebesar 12,70% pada Tahun 2013 meningkat menjadi sebesar 26,50% pada Tahun 2017. Selama ini ada dua sektor yang memberikan kontribusi terbesar bagi penerimaan Kota Jambi yaitu Sektor Pajak Daerah: PPU, Parkir dan PBB, serta lain-lain PAD yang sah. Adapun kendala yang dihadapi dalam peningkatan PAD yaitu kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah dan retribusi daerah secara mandiri masih rendah sehingga perlu peran aktif petugas pajak daerah untuk melakukan pengawasan dan penagihan.

Pengelolaan keuangan daerah Kota Jambi menunjukkan kinerja yang baik. Meskipun demikian penerapan manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis accrual dirasa belum optimal. Berdasarkan hasil audit BPK, laporan keuangan pemerintah daerah Kota Jambi memperoleh status **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Jambi dalam rangka mempertahankan status tersebut yaitu menindaklanjuti temuan pengecualian atas LKPD, penyusunan Peraturan Walikota dan surat edaran Walikota sebagai pedoman perangkat daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, penggunaan sistem informasi manajemen daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, dan rekonsiliasi angka dalam laporan.

Tabel 2.93.
Indikator Urusan Keuangan Kota Jambi Tahun 2013-2017

No	Indikator	Capaian Kinerja Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Belanja Langsung terhadap total APBD (%)	41,81	42,71	52,12	49,31	56,85
2.	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD (Realisasi) (%)	12,70	18,50	19,00	18,30	26,50
3.	Rasio SILPA terhadap total belanja Tahun sebelumnya (%)	12,87	10,90	11,90	8,50	9,00
4.	Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja (%)	85,64	87,19	85,45	86,04	89,54
5.	Rasio realisasi PAD terhadap target PAD (%)	112	125	86	91	102
6.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	tad	WDP	Disclemer	WTP	WTP
7.	Rasio Belanja Modal dibanding Total Belanja Daerah	23,72	23,17	26,99	27,79	28,02
8.	Rasio Belanja Pegawai Tidak Langsung dibanding Total Belanja Daerah (%)	55,09	54,83	48,55	47,28	40,71

No	Indikator	Capaian Kinerja Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
9.	Persentase penyusunan APBD tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah Kota Jambi, 2018

2.3.4.3. Penelitian dan Pengembangan

Salah satu urusan penunjang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah adalah penelitian dan pengembangan. Jumlah kajian yang telah dilaksanakan oleh Bappeda Kota Jambi Hal ini juga disebabkan masih minimnya produk penelitian yang mendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan masih minimnya kegiatan pengembangan yang mendukung inovasi produk-produk kreatif dalam rangka pengembangan perekonomian Kota Jambi.

Pengembangan inovasi yang lahir dari program penelitian dan pengembangan mesti diarahkan dalam bentuk diversifikasi produk yang dilaksanakan oleh perangkat daerah teknis yang menyelenggarakan masing-masing urusan pemerintahan, pembangunan maupun pelayanan umum. Kebijakan seperti ini berimplikasi pada dorongan pelembagaan terhadap program dan kegiatan yang berbasis pada hasil penelitian dan pengembangan oleh masing-masing sektor.

2.3.4.4. Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Jambi maka peran aparatur sipil negara (ASN) yang profesional dan penempatan aparat berdasarkan "merit system" semakin penting. Kewenangan pemerintah Kota Jambi dalam manajemen kepegawaian daerah yaitu: (1) melaksanakan pembinaan teknis dan (2) pelayanan administratif kepegawaian sesuai peraturan yang baru yaitu UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Roadmap Reformasi Birokrasi secara Nasional. Pembinaan teknis administratif, meningkatkan kedisiplinan ASN dalam rangka meningkatkan profesionalisme pegawai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai pelayan publik.

Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan dan pelayanan publik. Upaya mengukur profesionalitas ASN dilakukan berdasarkan Peraturan Menpan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. IP ASN ini merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi dalam rangka pengembangan profesionalitas profesi ASN. Indikator pengukuran profesionalitas ASN meliputi 4 (empat) dimensi yaitu: a) Kualifikasi 25%, b) Kompetensi 40%, c) Kinerja 30% dan d) Disiplin 5%.

Posisi IP ASN Kota Jambi pada tahun 2018 sebesar 68, yang berarti berada pada kategori 'Rendah'. Rendahnya profesionalitas ASN ini secara umum disebabkan oleh belum optimalnya dimensi kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki ASN. Upaya Pemerintah Kota Jambi untuk meningkatkan indeks tersebut adalah meningkatkan kualifikasi ASN (pendidikan formal/tugas belajar bagi ASN) dan kompetensi

(kompetensi teknis, manajerial maupun sosial kultural). Upaya tersebut dilakukan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel berikut menunjukkan bahwa jumlah PNS dalam kurun waktu 2013-2017 yang tersebar di 50 perangkat daerah.

Tabel 2.94.
Indikator Urusan Kepegawaian dan Diklat Kota Jambi Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah ASN	Orang	8.134	7.902	8.030	6.886	6.581
2.	Jumlah ASN berpendidikan S-3	Orang	1	16	13	8	10
3.	Jumlah ASN berpendidikan S-2	Orang	175	380	416	323	319
4.	Jumlah ASN berpendidikan S-1	Orang	3.608	4.493	4.602	3.855	3.722
5.	Jumlah ASN berpendidikan SLTA/Sederajat	Orang	2.978	1.622	1.635	1.445	1.307
6.	Jumlah ASN berpendidikan SLTP/Sederajat	Orang	164	126	122	108	97
7.	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Pim II	Orang	0	0	1	0	2
8.	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Pim III	Orang	15	0	11	19	19
9.	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Pim IV	Orang	80	0	0	0	7
10.	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Teknis setiap Tahun	Orang	399	340	80	370	240
11.	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Prajabatan	Orang	37	0	243	0	1
12.	Jumlah ASN pensiun setiap Tahun	Orang	308	160	245	364	343
13.	Jumlah kasus pelanggaran disiplin ASN dalam satu Tahun yang ditangani	Kasus	55	52	88	40	36
14.	Persentase pengelolaan data kepegawaian	%	65	80	88	90	95

Sumber: BKPSDMDKota Jambi, 2018

2.3.4.5. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kota Jambi merupakan salah satu perangkat daerah yang termasuk pada kelompok urusan penunjang pemerintahan. Sekretariat daerah memiliki fungsi penyusunan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah daerah, pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk menjalankan tugas tersebut, Sekretariat Daerah Kota Jambi didukung oleh 9 bagian, yang meliputi: 1) Bagian Tata Pemerintahan, 2) Bagian Hukum, 3) Bagian Pembangunan, 4) Bagian Perekonomian, 5) Bagian Kesejahteraan Rakyat, 6) Bagian Organisasi, 7) Bagian Umum, 8) Bagian Kerjasama Daerah, dan 9) Bagian Humas

Tabel 2.95.
Indikator Urusan Sekretariat Daerah Kota Jambi Tahun 2013-2017

No	Indikator	Capaian Kinerja Tahun
----	-----------	-----------------------

		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Nilai LPPD	1,66 (sedang)	1,66 (sedang)	2,84 (tinggi)	3,06 (sangat tinggi)	Hasil blm keluar
2.	Jumlah Peraturan Daerah yang diterbitkan	11	12	16	16	5
3.	Jumlah Peraturan Kepala Daerah yang diterbitkan	25	51	42	80	5
4.	Jumlah Produk Hukum daerah yang tersosialisasikan	-	3	1	1	5
5.	Persentase paket pengadaan B/J yang diumumkan melalui LPSE Kota Jambi	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Nilai LKjIP	n/a	n/a	n/a	CC	B
7.	Jumlah kerjasama daerah	12	11	7	13	23
8.	Persentase publikasi kegiatan KDH/WKDH	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Persentase pemenuhan pelayanan KDH/WKDH	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: *Bagian Organisasi Setda-Kota Jambi Kota Jambi, 2018*

2.3.4.6. Sekretariat Dewan

Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, adalah menyusun dan mengesahkan Peraturan Daerah serta melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jumlah anggota DPRD Kota Jambi sebanyak 45 orang yang berasal dari 8 fraksi di DPRD, dengan perincian berdasarkan jumlah anggota berdasarkan fraksi, sebagai berikut, 8 anggota dewan dari Fraksi Demokrat, 8 anggota dewan dari Fraksi PDI-P, 6 anggota dari fraksi Gerindra, 5 anggota dari fraksi PAN, 5 anggota dewan dari fraksi Hanura, 4 anggota dari fraksi PKB, 5 anggota dari fraksi Golkar dan 4 anggota dewan dari fraksi PPP

Sekretariat DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada Anggota DPRD. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi a) memfasilitasi rapat anggota DPRD; b) pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD; c) penyusunan rencana anggaran, pengelolaan dan pembukuan keuangan DPRD; d) pengelolaan kehumasan, keprotokolan, perpustakaan dan dokumentasi; e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tabel 2.96.

Indikator Urusan Sekretariat DPRD Kota Jambi Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	PERDA yang ditetapkan	Perda	7	7	17	15	12
2.	RAPERDA yang disetujui dalam Prolegda	Ranperda	9	13	22	24	17
3.	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	Kep	39	40	29	36	30
4.	Persentase Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	%	100	100	100	100	100

Sumber: *Sekretariat DPRD Kota Jambi Kota Jambi, 2018*

2.3.4.7. Pengawasan

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), Pemerintah Kota Jambi dalam penyelenggaraan pemerintahan berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat berdasarkan amanat undang-undang. Untuk mencapai hal tersebut, salah satu bentuk yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan melakukan pengawasan terhadap berbagai penyelenggaraan pemerintah daerah. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan sepenuhnya dilaksanakan oleh Inspektorat. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan di lingkungan Pemerintahan Kota Jambi secara berkala dan menginformasikan hasilnya kepada publik.

Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat bersifat internal dalam rangka meningkatkan kinerja urusan pembangunan daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Jambi, obyek pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan kebijakan kepala daerah. Pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah dilakukan dengan pemeriksaan terhadap laporan penyelenggaraan pemerintah dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan. Laporan hasil pemeriksaan di Kota Jambi pada Tahun 2017 mencapai 68 laporan dengan kinerja laporan hasil tindak lanjut temuan hasil pengawasan yang telah disusun sangat baik yaitu mencapai 100%.

Salah satu tugas dan fungsi lain dari pelaksanaan pengawasan di daerah adalah menindak lanjuti hasil temuan dari instansi pemeriksa dari tingkat pusat, dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK salah satunya akan menghasilkan temuan-temuan atas tindakan pengelolaan keuangan di daerah. Temuan-temuan tersebut kemudian harus ditindak lanjuti oleh Inspektorat. Sampai Tahun 2017, rasio temuan BPK yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat Kota Jambi telah mencapai 100%.

Terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, Kota Jambi telah meraih skor 71,28. Dengan pencapaian skor tersebut artinya, dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Kota Jambi telah mampu menunjukkan kecenderungan perbaikan dan/atau sebagian besar target yang relevan terpenuhi.

Tabel 2.97.
Indikator Urusan Pengawasan Kota Jambi Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	%	75,0	71,9	66,7	66,2	64,52
2.	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	LHP	56	96	96	89	68
3.	Persentase laporan hasil tindak lanjut temuan hasil pengawasan yang telah disusun	%	100	100	100	100	100
4.	Persentase tenaga pemeriksa yang menguasai teknik/teori pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	%	10%	10%	20%	30%	40%

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
5.	Meningkatnya level kapabilitas Inspektorat Kota	level	N/A	N/A	N/A	N/A	Level II
6.	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	N/A	58,27	55,09	55,74	71,28

Sumber: Inspektorat Kota Jambi, 2018

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah didefinisikan oleh *Centre for Regional and Urban Studies (CURDS)*, Inggris sebagai kemampuan sektor bisnis atau perusahaan pada suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan yang tinggi serta tingkat kekayaan yang lebih merata untuk penduduknya. Daya saing daerah menilai kemampuan suatu daerah untuk bersaing dengan daerah lain dalam memproduksi dan memasarkan barang dan jasanya.

Daya saing daerah menjadi salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah yang disesuaikan dengan potensi, kekhasan, dan unggulan dari daerah itu sendiri. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Untuk melihat tingkat daya saing daerah diantaranya dapat dilihat melalui indikator makro ekonomi seperti LPE dan PDRB per kapita.

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dan pengeluaran konsumsi non pangan per kapita. Berikut ini disajikan beberapa hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kemampuan ekonomi daerah sebagai berikut.

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

Berdasarkan Hukum Engel/Engel Law bahwa semakin tinggi pendapatan/kesejahteraan seseorang, maka proporsi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan makanan akan menurun, namun sebaliknya pengeluaran untuk non makanan proporsinya akan semakin meningkat.

Data berikut menunjukkan bahwa pada periode Tahun 2013 - 2017 pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga mengalami peningkatan signifikan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumahtangga. Pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 2.98.
Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga
di Kota Jambi Tahun 2013-2017

Komponen Pengeluaran	Tahun				
	2013	2014	2015	2016**	2017*
Total Konsumsi Rumah Tangga					
ADHB (Miliar Rp)	10.710,25	12.086,27	13.123,57	14.189,01	15.682,34
ADHK 2010 (Miliar Rp)	9.122,70	9.598,45	10.072,15	10.526,96	11.071,36
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	64,58	63,69	61,63	58,14	59,64
Rata-rata konsumsi RT					
ADHB (Juta Rp)	80,63	89,73	96,04	102,51	111,84
ADHK 2010 (Juta Rp)	68,68	71,26	73,71	76,06	78,95
Rata-rata konsumsi Perkapita					
ADHB (Juta Rp)	18,81	21,28	22,78	24,32	26,53
ADHK 2010 (JutaRp)	16,02	16,90	17,48	18,04	18,73
Pertumbuhan					
Total konsumsi RT	4,76	3,76	3,44	3,19	3,81
Perkapita	4,36	5,45	3,48	3,19	3,81

Sumber: BPS Kota Jambi, 2018

Selama periode 2013 - 2017 proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap total PDRB fluktuatif, yaitu 64,58 persen (2013); 63,69 persen (2014); 61,63 persen (2015); 58,14 persen (2016) dan 59,64 persen (2017). Posisi tertinggi terjadi pada Tahun 2013 sebesar 64,58 persen dan terendah pada Tahun 2016 sebesar 58,14 persen.

Pada masa pemulihan ekonomi, biasanya institusi rumahtangga memperbaiki perilaku atau pola konsumsinya. Hal tersebut terjadi karena secara umum tingkat pendapatan masyarakat akan naik dan di sisi lain persediaan atau penawaran berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik bertambah. Kondisi semacam ini memicu naiknya belanja untuk keperluan konsumsi, termasuk konsumsi rumahtangga.

Secara rata-rata, konsumsi per-rumah tangga dari Tahun ke Tahun mengalami kenaikan, baik menurut atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada Tahun 2013, setiap rumah tangga di Kota Jambi menghabiskan dana sekitar 80,63 juta Rupiah seTahun untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Pengeluaran tersebut meningkat menjadi 89,73 juta Rupiah (2014); 96,04 juta Rupiah (2015); 102,51 juta Rupiah (2016); dan 111,84 juta Rupiah (2017). Sementara itu, atas dasar harga Konstan (2010) rata-rata konsumsi per rumahtangga tumbuh pada kisaran 3 s.d 4 persen, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada Tahun 2013 sebesar 4,76 persen.

Di sisi lain, kenaikan rata-rata konsumsi per-kapita cenderung searah dengan kenaikan jumlah penduduk. Pertumbuhan rata-rata konsumsi per-kapita menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Kondisi ini menunjukkan rata-rata konsumsi setiap penduduk meningkat, baik secara kuantitas (volume) maupun secara nilai (termasuk peningkatan kualitas). Rata-rata konsumsi per-kapita secara “riil” meningkat pada kisaran 18,81% s.d 26,53%. Peningkatan tersebut tentu berpengaruh pada struktur konsumsi rumah tangga, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.99.

Struktur Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kota Jambi Tahun 2013-2017

Komponen Pengeluaran	Tahun				
	2013	2014	2015	2016**	2017*
Makanan, Minuman, dan Rokok	42,98	43,42	42,93	44,29	44,55
Pakaian dan Alas Kaki	5,52	5,59	5,50	5,20	5,08
Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	11,40	11,13	11,64	12,01	12,65
Kesehatan & Pendidikan	10,26	10,35	10,71	10,43	10,22
Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	27,70	27,14	26,82	25,63	25,07
Hotel & Restoran	0,19	0,20	0,21	0,21	0,22
Lainnya	1,95	2,17	2,20	2,23	2,21
Total Konsumsi	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kota Jambi, 2018

Secara rata-rata dari Tahun 2013 s.d 2017, nampak pada struktur konsumsi akhir rumah tangga Kota Jambi, bahwa konsumsi bukan makanan tidak jauh berbeda dengan konsumsi makanan. Proporsi pengeluaran untuk makanan cenderung masih berada pada kisaran yang sama. Proporsi untuk makanan pada masing-masing Tahun mencapai 42,98 persen (2013); 43,42 persen (2014); 42,93 persen (2015); 44,29 persen (2016) dan 44,55 (2017).

Pola proporsi konsumsi di atas, menunjukkan tarik menarik antara kebutuhan rumah tangga atas makanan dan non makanan yang masih cukup kuat. Sungguhpun demikian, pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut di antaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan dan sebagainya.

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Suatu fasilitas wilayah dan infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya (*availability*) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Infrastruktur adalah penunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaan (*availability*) fasilitas untuk mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan

antarwilayah. Semakin lengkap ketersediaan wilayah/infrastruktur, semakin kuat dalam menghadapi daya saing daerah.

Gambaran umum kondisi daya saing daerah terkait dengan fasilitas wilayah/infrastruktur dapat dilihat dari aksesibilitas daerah, penataan wilayah, fasilitas bank dan non bank, ketersediaan air bersih, fasilitas listrik, ketersediaan restoran dan rumah makan serta ketersediaan penginapan. Namun demikian pembahasan berikut ini hanya meliputi infrastruktur yang memiliki peranan vital di Kota Jambi.

a. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Sampai dengan Tahun 2017 rasio ketaatan ruang adalah sebesar 100% persen. Hal ini menggambarkan bahwa dalam memanfaatkan ruang masih taat pada aturan yang berlaku yakni belum melebihi daya tampung dan daya dukung serta juga dapat menggambarkan ketaatan warga pada regulasi RTRW serta optimalnya pengendalian tata ruang.

b. Aksesibilitas Daerah

Tumbuh kembangnya suatu kawasan dalam perkotaan tentunya tidak akan terlepas dari peningkatan infrastruktur sebagai trigger, yang biasanya diawali melalui pembangunan jalan dan jembatan. Hal ini merupakan salah satu indikator penting aksesibilitas daerah yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana jalan dalam rangka memberikan kemudahan/ akses bagi seluruh masyarakat dalam melakukan segala aktivitas di semua lokasi dengan kondisi dan karakteristik fisik yang berbeda. Panjang jalan dan jembatan dalam Kota Jambi dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 2.1.
Panjang Jalan dan Jembatan di Kota Jambi Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Panjang Jalan Status Kota Jambi (KM)	506,27	506,27	506,27	510,45	510,45
2.	Panjang Jembatan Kota Jambi (M)	654	654	654	654	654

Sumber: Dinas PUPR Kota Jambi, 2018

c. Ketersediaan Air Bersih

Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak. Sementara air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002). Sumber air bersih dapat dibedakan atas air hujan, air sungai dan danau, mata air, air sumur dangkal, dan air sumur dalam.

Tabel 2.101.
Persentase Jumlah Rumah Tangga (RT) yang menggunakan Air Bersih
di Kota Jambi Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Ledeng (Perpipaan)	61.660	62.883	64.847	69.379	72.965
2.	Sumur Lindung	20.223	21.435	21.862	22.148	20.435
3.	Sumur Tidak Terlindung	5.389	5.389	4.980	3.201	3.241
4..	Total Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan air bersih	91.261	9.572	109.502	110.270	122.389
5.	Jumlah Rumah Tangga	119.935	123.216	124.216	125.007	130.678
6.	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih	65	66	64	72,75	75

Sumber: BPS Kota Jambi & Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2018

d. Fasilitas Listrik

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan fasilitas listrik salah satunya dapat dilihat dari persentase jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik. Pada Tahun 2013 jumlah rumah tangga yang telah menggunakan listrik sebanyak 139.083 rumah tangga. Adapun pada Tahun 2017, rumah tangga pengguna listrik meningkat menjadi 147.784 rumah tangga. Gambaran secara lengkap mengenai persentase jumlah rumah tangga di Kota Jambi yang telah menggunakan listrik dalam kurun lima Tahun terakhir ditampilkan pada berikut

Tabel 2.102.
Persentase Jumlah Rumah Tangga (RT) yang menggunakan Listrik
di Kota Jambi Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Rumah Tangga	139.083	142.016	144.017	145.872	147.784
2.	Jumlah Pelanggan PLN	290.887	290.887	371.983	247.105	428.587
3.	Rasio Elektrifikasi	209%	205%	258%	169%	290%

Sumber: BPS Kota Jambi, 2018

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Dalam rangka meningkatkan iklim investasi di daerah, hal penting yang harus diperhatikan adalah penciptaan iklim kondusif yang mendukung investasi. Indikator yang berkaitan dengan iklim investasi, antara lain kemudahan perizinan, pengenaan pajak daerah, angka kriminalitas yang dilihat dari jumlah kejadian kejahatan dan jumlah demonstrasi.

a. Kemudahan Perizinan

Pembentukan daya saing investasi dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kemudahan perijinan, kemudahan dalam memperoleh perijinan dan berapa lama proses dilakukan, seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.103.
Lama Proses Perizinan di Kota Jambi Tahun 2017

No	Jenis Perizinan	Lama Mengurus	Jumlah Persyaratan	Biaya Resmi (rata-rata maks Rupiah)
1.	Tanda Daftar Industri (TDI)	4 hari	11 dokumen	Gratis
2.	Izin Usaha Industri (IUI)	4 hari	11 dokumen	Gratis
3.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	4 hari	10 dokumen	Gratis
4.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	4 hari	9 dokumen	Gratis
5.	Tanda Daftar Gudang (TDG)	4 hari	11 dokumen	Gratis
6.	Izin Usaha Pusat Perbelajaan (IUPP)	4 hari	11 dokumen	Gratis
7.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	14 hari	9 dokumen	Sesuai Perda 10 Tahun 2015
8.	Izin Mendirikan Bangunan Reklame (IMBR)	14 hari	10 dokumen	Sesuai Perda 10 Tahun 2015
9.	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	4 hari	9 dokumen	Gratis
10.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	4 hari	15 dokumen	Gratis

Sumber: DPMPSTP Kota Jambi, 2018

b. Pengenaan Pajak Daerah

Jumlah penerimaan pajak daerah pada Tahun 2017 sebesar Rp. 201.429.136.841 atau tercapai sebesar 101% dibandingkan target yang harus dicapai sebesar Rp. 187.252.000.000 selain pajak daerah terdapat retribusi yang pada Tahun 2017 sebesar Rp. 43.077.425.944 atau sebesar 93% dari target. Penerimaan pajak dan retribusi diperoleh dari sektor perdagangan dan jasa, yaitu pajak bumi dan bangunan, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame, serta retribusi diperoleh dari parkir.

Tabel 2.104.
Jumlah Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah Di Kota Jambi Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Pajak Daerah					
	Target	81.317.140.000	112.472.000.000	190.882.000.000	187.252.000.000	198.940.000.000
	Realisasi	91.476.549.341	128.824.086.123	147.889.448.423	158.740.884.099	201.429.136.841
	Persentase	112%	115%	77%	85%	101%
2.	Jumlah Retribusi					
	Target	34.458.855.900	46.585.433.400	63.057.026.000	73.679.471.000	46.403.840.000
	Realisasi	37.169.611.073	59.939.980.258	58.812.352.554	80.679.063.851	43.077.425.944
	Persentase	108%	129%	93%	110%	93%

Sumber: Badan Pengelola Pajak & Retribusi Daerah Kota Jambi, 2018

c. Angka Kriminalitas

Jika dilihat dari kejadian kejahatan Tahun 2017 tersebut akan dapat mempengaruhi iklim investasi, dimana orang akan berpikir ulang untuk menanamkan sahamnya apabila tingkat keamanannya kurang.

Kejadian kejahatan tersebut dapat disebabkan karenafaktor ekonomi dimana tingkat kemiskinan terlalu tinggi, faktor lingkungan pergaulan dan belum baiknya disiplin masyarakat dalam mematuhi hukum/peraturan perundang-undangan serta dengan adanya dampak negatif arus globalisasi yang tidak terbandung menimbulkan adanya gangguan keamanan dan ketertiban serta pelanggaran dan tindakan kekerasan dalam masyarakat. Tantangan kedepan yang dihadapi bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban adalah meningkatnya gangguan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, serta tindakan kriminal, kekerasan secara kualitas maupun kuantitas maupun tak terlepas pula munculnya berbagai isu dan teror yang dapat meresahkan masyarakat sebagai akibat kemajuan teknologi yang disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Tabel 2.105.

Jumlah Kasus Kejahatan Di Kota Jambi Tahun 2014-2017

No	Uraian	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Kasus Narkoba	98	194	209	141
2.	Jumlah Kasus Pembunuhan	6	2	5	5
3.	Jumlah Kasus Seksual	23	11	29	9
4.	Jumlah Kasus Penganiayaan	209	352	265	213
5.	Jumlah Kasus Pencurian	528	596	614	686
6.	Jumlah Kasus Penipuan	528	626	616	549
7.	Jumlah Kasus Pemalsuan Uang	-	-	-	-

Sumber: Polresta Jambi, 2018

d. Angka Demonstrasi

Demonstrasi ("demo") atau unjuk rasa adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa dan orang-orang yang tidak setuju dengan pemerintah dan yang menentang kebijakan pemerintah, atau para buruh yang tidak puas dengan perlakuan majikannya. Namun unjuk rasa juga dilakukan oleh kelompok-kelompok lainnya dengan tujuan lainnya. Unjuk rasa kadang dapat menyebabkan pengrusakan terhadap benda-benda. Hal ini dapat terjadi akibat keinginan menunjukkan pendapat para pengunjung rasa yang berlebihan. Demonstrasi di Kota Jambi didominasi oleh

demonstrasi ekonomi. Salah satu permasalahan diantaranya adalah berkaitan dengan Kejadian demo di Kota Jambi bisa dilihat di tabel berikut ini.

Tabel 2.106.
Jumlah Demonstrasi Di Kota Jambi Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Demonstrasi Politik	-	10	-	tad	tad
2.	Demonstrasi Ekonomi	280	158	65	tad	tad
3.	Demonstrasi Mogok Kerja	-	-	-	tad	tad
Jumlah		280	168	65		

Sumber: Kesbangpol Kota Jambi, 2018

2.4.4. Fokus Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset pembangunan suatu wilayah yang sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Sumberdaya manusia yang tangguh, mandiri, berkualitas baik fisik maupun mental akan menjadi modal bagi suatu wilayah dalam mengolah sumberdaya yang ada, memanfaatkan potensi, dan menjawab permasalahan pembangunan yang ada. Pembangunan SDM di Kota Jambi diarahkan untuk menyiapkan SDM yang terampil, inovatif, kompetitif, dan disiplin dalam rangka meningkatkan laju pembangunan daerah. Indikator pembangunan SDM dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk pada suatu wilayah.

a. Kualitas Tenaga Kerja

SDM yang berkualitas akan meningkatkan daya saing dan perkembangan investasi yang masuk di suatu daerah. Kualitas tenaga kerja yang rendah mengakibatkan kesempatan kerja semakin kecil dan terbatas, karena mayoritas perusahaan-perusahaan atau lapangan kerja lainnya lebih memilih tenaga kerja yang berkualitas baik. Selain itu, kualitas tenaga kerja juga ditentukan oleh kondisi internal tenaga kerja itu sendiri seperti: motivasi kerja, keahlian/ketrampilan, pengalaman kerja, serta sikap dan perilaku. Salah satu ukuran kualitas SDM yang terkait dengan kualitas tenaga kerja adalah tingkat pendidikan angkatan kerja. Angkatan kerja yang berkualitas memiliki daya saing lebih dalam mengisi kesempatan kerja baik di dalam maupun luar negeri.

Tabel 2.107.
Perkembangan Ketenagakerjaan Di Kota Jambi Tahun 2013-2017

Tahun	Angkatan Kerja		Total Angkatan Kerja	Bukan Angkatan Kerja	TPAK (%)	TPT (%)
	Bekerja	Pengangguran				
2013	230.243	18.518	248.761	160.376	60,80	7,44
2014	235.722	26.569	262.291	158.137	62,39	10,13
2015	254.351	20.098	274.449	154.093	64,04	7,32
2016	<i>BPS Kota Jambi tidak melakukan Sensus Sakernas 2016</i>					
2017	268.264	15.754	284.018	159.325	64,06	5,55

Jumlah angkatan kerja selama periode 2013 sampai dengan 2017 terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2013 jumlah angkatan kerja sebanyak 248.761 meningkat menjadi 284.018 pada Tahun 2017. Dari sisi jenjang pendidikan, angkatan kerja Kota Jambi juga memiliki kualitas pendidikan yang cukup baik. Jumlah angkatan kerja Tahun 2017 didominasi lulusan SMA umum/kejuruan sebesar 45,7% dan lulusan universitas sebesar 20,7%. Hal ini tidak terlepas dari iklim investasi yang kondusif yang mendukung kesejahteraan tenaga kerja. Pemerintah Kota Jambi telah menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) yang terus meningkat disesuaikan dengan perkembangan harga serta kemampuan pemberi kerja. Nilai UMK Kota Jambi Tahun 2013 sebesar Rp. 1.300.000 per pekerja per bulan dan meningkat menjadi Rp. 2.146.860 per pekerja per bulan. Peningkatan ini menunjukkan positifnya pertumbuhan perekonomian di Kota Jambi sehingga dapat mensejahterakan masyarakat.

Tabel 2.108.
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Di Kota Jambi Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah lulusan S1	52.594	53.778	54.668	55.491	tad
2.	Jumlah lulusan S2	4.382	4.490	4.556	4.610	tad
3.	Jumlah lulusan S3	392	402	406	409	tad
4.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	59.381	60.694	61.645	62.526	tad
5.	Jumlah penduduk	556.332	568.062	576.067	583.487	591.134
6.	Rasio lulusan S1/S2/S3 ((4/5)x10000)	1.067,36	1.068,44	1.070,10	1.071,59	tad

Sumber: BPS Kota Jambi, 2018

Tingkat pengangguran terbuka di Tahun 2017 mencapai 5,55% sedikit lebih tinggi dibandingkan tingkat pengangguran nasional sebesar 5,50%. Ketersediaan angkatan kerja yang cukup banyak dengan tingkat pendidikan yang memadai memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah. Tantangan tersebut harus dijawab oleh pemerintah dengan membuat kebijakan - kebijakan pembangunan yang mampu menyediakan lapangan pekerjaan serta dapat menyerap surplus tenaga kerja cukup banyak (*labour intensive*).

Tabel 2.109.
Rasio Ketergantungan Di Kota Jambi Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 Tahun	148.730	148.722	148.672	148.302	147.899
2.	Jumlah Penduduk usia > 64 Tahun	19.131	19.916	20.828	21.826	22.947
3.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2)	167.861	168.638	169.500	170.128	170.846
4.	Jumlah Penduduk Usia 15-64	392.327	399.424	406.566	413.359	420.288

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
	Tahun					
5.	Rasio ketergantungan (3) / (4)	42.79	42.22	41.69	41.16	40.64

Sumber: BPS Kota Jambi, 2018

Selain itu, salah satu fokus dalam aspek sumber daya manusia adalah angka *dependency ratio* / rasio ketergantungan, yang menunjukkan tingkat ketergantungan SDM produktif (15-64) Tahun terhadap usia nonproduktif (0-15 dan 65+). Per Tahun 2017, rasio ketergantungan Kota Jambi berada pada angka 40,64 dimana angka ini menurun dari Tahun 2016 sebesar 41,16. Hal ini menunjukkan perkembangan yang baik, dimana masyarakat dengan usia produktif memiliki kemampuan untuk menghasilkan pendapatan bagi masyarakat yang kurang produktif.

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Penyusunan gambaran pengelolaan keuangan daerah dilakukan untuk menganalisis capaian dan memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai perencanaan pembangunan daerah. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam rangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan *multiplier effect* yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata.

Kapasitas keuangan daerah harus diketahui, agar daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan, sehingga belanja pembangunan dapat dilakukan secara optimal, efektif dan efisien. Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Untuk kebutuhan itu, dibutuhkan realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 tahun sebelumnya.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Analisis kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kinerja kondisi keuangan dalam periode RPJMD yang lalu yaitu periode tahun 2013 - 2018. Berdasarkan analisis kinerja masa lalu atau beberapa tahun kebelakang, maka akan diketahui rata-rata pertumbuhan yang dapat dijadikan sebagai analisis proyeksi keuangan kedepan.

Kinerja keuangan masa lalu terdiri atas kinerja pelaksanaan APBD dan neraca keuangan daerah. Kinerja pelaksanaan APBD terdiri atas target dan realisasi pendapatan, target dan realisasi belanja, serta penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Sedangkan neraca keuangan daerah berupa perkembangan dan analisis neraca keuangan daerah.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam pengelolaan keuangan daerah selalu diterapkan prinsip dan pendekatan serta norma yang berlaku secara universal, yaitu dilaksanakan dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan serta dapat di pertanggungjawabkan dengan

memperhatikan keadilan, kepatutan dan nilai manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kapasitas keuangan daerah dalam mendukung pencapaian target pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun lalu dapat dilihat dari anggaran pendapatan, belanja daerah, dan pembiayaan. Dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan baik dari aspek fisik maupun non fisik.

Landasan yang dijadikan acuan dalam perhitungan APBD pada 5 (lima) tahun yang lalu, adalah proyeksi indikator makro ekonomi, antara lain terdiri dari (i) laju pertumbuhan ekonomi; (ii) kemiskinan dan pengangguran; (iii) pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan; (iv) daya saing daerah; dan (v) pendapatan perkapita masyarakat dan laju inflasi lokal.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kota Jambi selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang lalu dilakukan dan dirumuskan melalui pendekatan anggaran berbasis kinerja. Pendekatan ini diarahkan dan bertujuan untuk dapat menampung aspirasi dan memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat sebagai penerima manfaat dari setiap program pembangunan secara optimal. Namun demikian, agar ada jaminan bahwa dalam penyusunan anggaran dilakukan secara transparan, efisien, efektif, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat sasaran dan tepat dalam penggunaannya serta dapat dipertanggungjawabkan, maka dalam perumusannya memperhatikan beberapa faktor; diantaranya faktor keseimbangan antara pendapatan dengan belanja serta pembiayaan.

Tabel. 3.1.
Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun 2013-2017 Kota Jambi

No	Uraian	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
A	PENDAPATAN	1.164.352.549.296,0	1.320.648.890.197,2	1.387.222.252.820,4	1.571.332.218.626,4	1.500.633.237.946,7	6,81
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	149.041.969.818,21	246.427.699.826,28	263.925.520.119,42	287.525.214.004,49	397.327.847.289,10	
1.1	Pajak Daerah	91.476.549.341,38	128.824.086.122,82	147.889.448.423,30	158.740.884.098,89	201.429.136.841	
1.2	Retribusi Daerah	37.169.611.073,05	59.939.980.257,70	58.812.352.554,45	80.679.063.851,03	43.077.425.944	
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.388.593.783,78	5.017.222.922,00	7.974.858.186,57	7.266.051.209,95	8.066.340.479	
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	16.007.215.620,00	52.646.410.523,76	49.248.860.955,10	40.839.214.844,62	144.754.944.025,57	
2	DANA PERIMBANGAN	821.633.897.881,00	852.471.935.221,00	858.677.840.368,00	1.177.857.284.208,0	1.013.005.895.282,0	6,91
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	146.767.549.881,00	123.603.433.221,00	83.342.923.368,00	102.727.973.433,00	108.336.723.678,00	
2.2	Dana Alokasi Umum	626.331.743.000,00	678.620.172.000,00	668.201.807.000,00	727.564.344.000,00	714.783.378.000,00	
2.3	Dana Alokasi Khusus	48.534.605.000,00	50.248.330.000,00	107.133.110.000,00	347.564.966.775,00	189.885.793.604,00	
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	193.676.681.596,80	221.749.255.150,00	264.618.892.333,00	105.949.720.413,98	90.299.495.375,60	-10,23
3.1	Hibah	573.637.000,00	521.847.475,00	-	39.039.796.578,00	2.819.000.000,00	
3.2	Dana darurat	9.658.244.274,80	8.750.000.000,00	8.000.000.000,00	-	-	
3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah Daerah lainnya **)	44.644.819.322,00	65.061.601.675,00	73.840.521.333,00	66.598.538.835,98	80.760.495.375,60	

No	Uraian	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
3.4	Dana Penyesuaian dan otonomi khusus	138.799.981.000,00	147.415.806.000,00	182.778.371.000,00	311.385.000,00	-	
3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	-	-	-	-	6.720.000.000,00	
B	BELANJA	1.151.885.966.248,19	1.277.947.245.874,50	1.426.801.893.158,80	1.526.705.967.976,45	1.496.544.155.634,80	6,90
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	639.848.119.610,19	651.963.306.769,00	638.692.856.708,00	735.466.555.433,50	633.792.563.865,00	0,30
1.1	Belanja Pegawai	592.744.670.347,00	642.424.088.743,00	627.677.871.221,00	721.853.145.334,50	609.075.861.181,00	
1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	
1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	
1.4	Belanja Hibah	41.322.686.558,00	3.791.283.500,00	5.627.038.649,00	9.682.097.750,00	18.623.738.650,00	
1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.436.830.000,00	4.282.750.000,00	3.645.000.000,00	1.557.150.000,00	3.407.880.000,00	
1.6	Belanja Bagi hasil	2.019.711.376,00	971.706.526,00	-	-	-	
1.7	Belanja Bantuan keuangan	835.652.829,19	-	1.194.446.838,00	1.292.132.400,00	1.292.132.400,00	
1.8	Belanja Tidak Terduga	488.568.500,00	493.478.000,00	548.500.000,00	1.082.029.949,00	1.392.951.634,00	
2	BELANJA LANGSUNG	512.037.846.638,00	625.983.939.105,50	788.109.036.450,80	791.239.412.542,95	862.751.591.769,80	14,40
2.1	Belanja Pegawai	41.838.019.666,00	58.257.749.136,00	65.075.970.607,00	62.458.092.882,00	74.716.530.322,50	
2.2	Belanja Barang dan Jasa	196.981.332.594,00	271.629.484.774,50	337.904.321.856,00	304.585.364.771,00	368.718.465.478,80	
2.3	Belanja Modal	273.218.494.378,00	296.096.705.195,00	385.128.743.987,80	424.195.954.889,95	419.316.595.968,50	
C	PEMBIAYAAN DAERAH	126.744.644.712,82	126.928.509.214,34	169.630.153.537,12	89.348.040.165,74	127.320.238.476,00	7,24
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	148.238.459.062,82	139.211.227.760,64	169.630.153.537,12	130.079.638.923,74	134.489.386.517,76	-1,04

No	Uraian	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	148.238.459.062,82	139.211.227.760,64	169.630.153.537,12	130.079.638.923,74	134.489.386.517,76	
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	21.493.814.350,00	12.282.718.546,30	-	40.731.598.758,00	7.169.148.041,76	-62,63
2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	20.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-	39.039.796.578,00	6.988.000.000,00	-66,05
2.2	Pembayaran Pokok Utang	1.493.814.350,00	2.282.718.546,30	-	1.691.802.180,00	181.148.041,76	-18,24

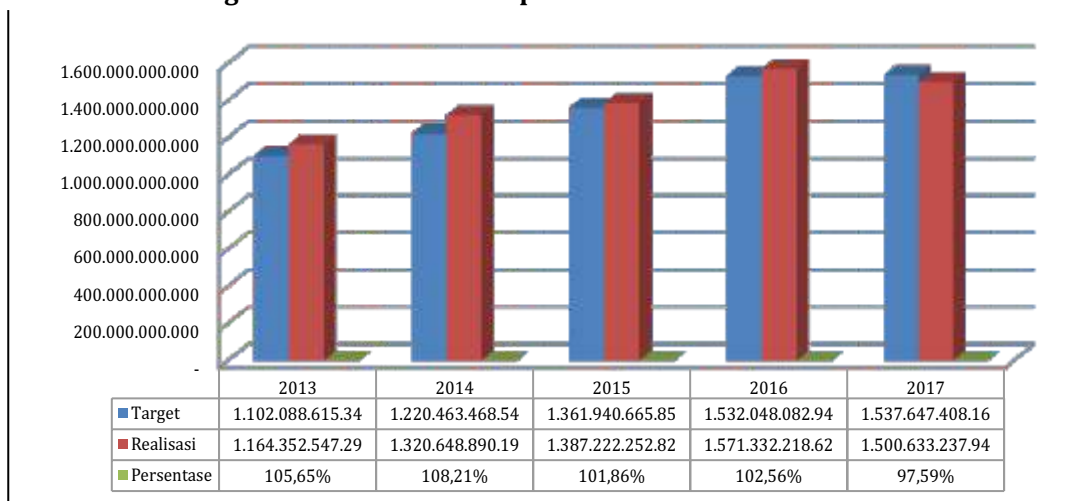
Sumber: Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi, 2018

3.1.1.1. Pendapatan Daerah

Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Target pendapatan daerah merupakan capaian yang harus diperoleh, sedangkan realisasi merupakan capaian pada akhir tahun anggaran. Kapasitas kemampuan keuangan daerah akan menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan dan pembiayaan.

Berdasarkan data dari Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, secara umum pendapatan daerah Kota Jambi selalu mengalami peningkatan. Hal ini didukung meningkatnya Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah. Untuk pertumbuhan pendapatan daerah Kota Jambi Tahun 2013-2017 rata-rata sebesar 6,81%, yang didukung dengan rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah sebesar 29,89%, Dana Perimbangan sebesar 6,91% dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar -10,23%. Selanjutnya peningkatan pendapatan daerah dapat dilihat dari tabel dan gambar berikut:

Grafik 3.1.
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2013 -2017

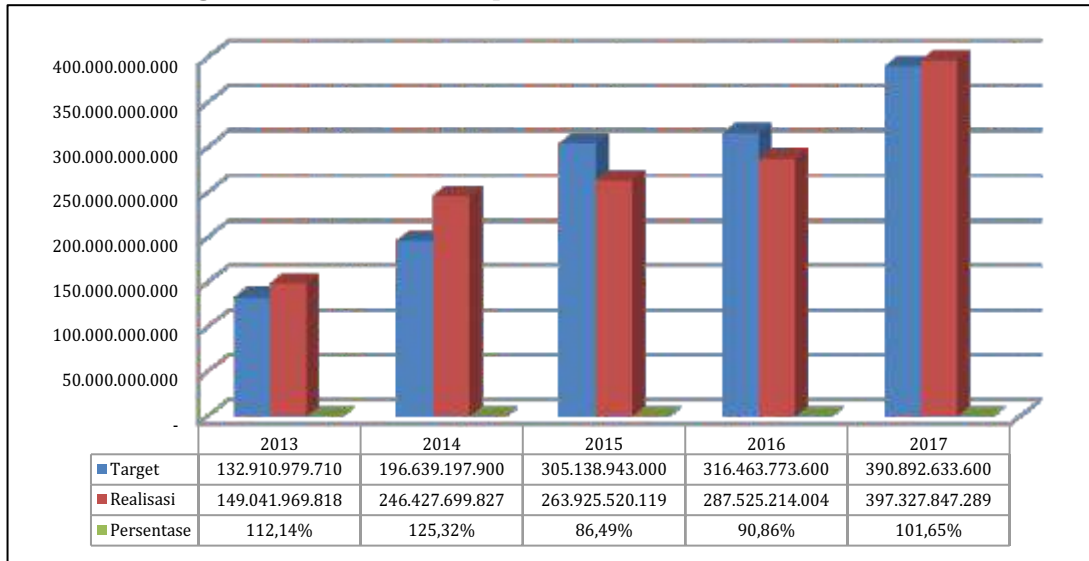


Sumber: Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi, 2018

1. Pendapatan Asli Daerah

Pada tahun 2013, Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi dari target 132,910 milyar rupiah realisasinya 149,041 milyar rupiah (112,14%), selanjutnya meningkat cukup signifikan pada tahun 2017 dari target sebesar 390,892 milyar rupiah terrealisasi sebesar 397,327 milyar rupiah (101,65%). Untuk lebih jelasnya lihat grafik dibawah.

Grafik 3.2.
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013-2017

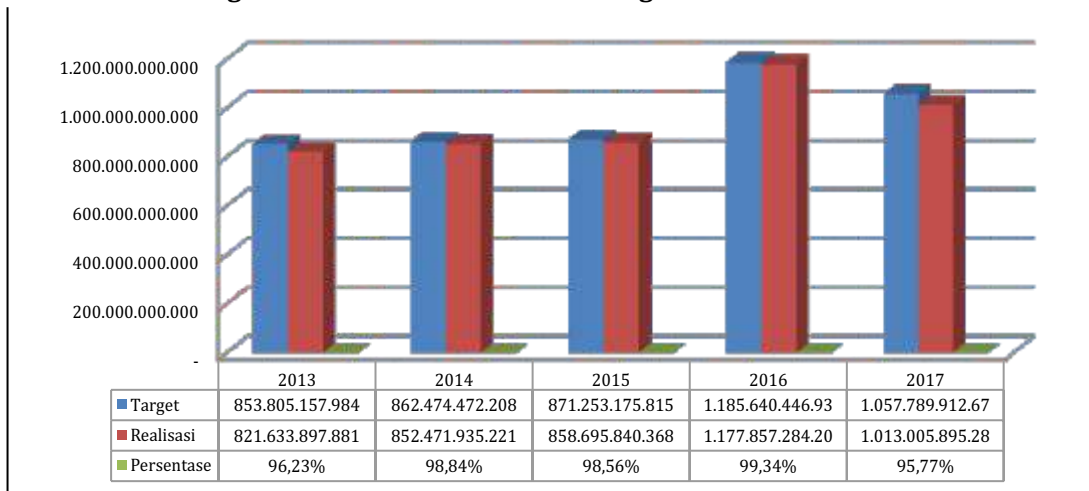


Sumber: Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi, 2018

2. Dana Perimbangan

Selama tahun 2013-2017, realisasi dana perimbangan mengalami peningkatan secara fluktuatif, hal ini terlihat dari target dana perimbangan tahun 2013 sebesar 853,805 milyar rupiah realisasinya 821,633 milyar rupiah (96,23%); dan tahun 2017 dari target sebesar 1,057 triliun rupiah hanya terrealisasi sebesar 1,013 triliun rupiah (95,77%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 3.3.
Target dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2013-2017



Sumber: Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi, 2018

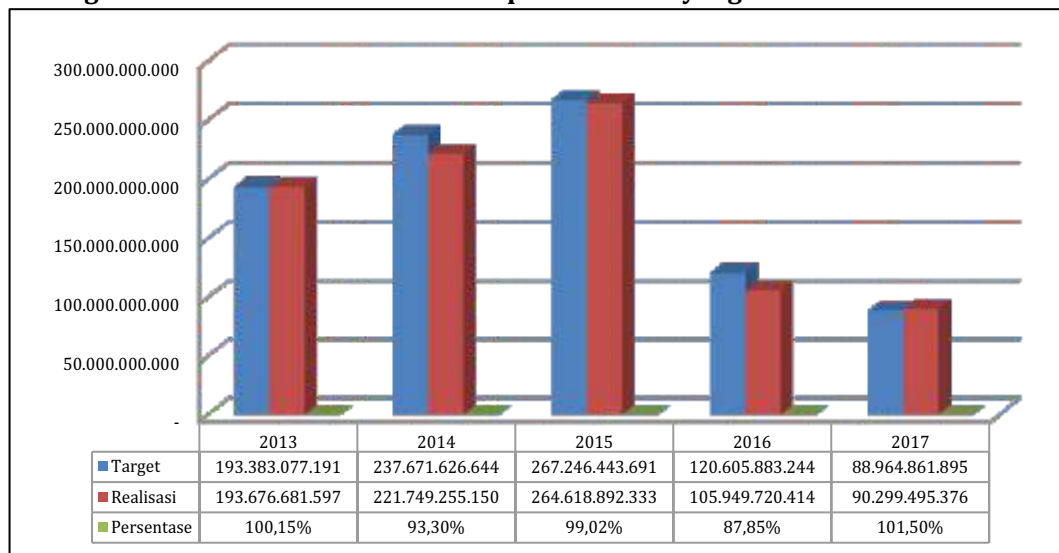
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pada tahun 2013, lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan 193,383 milyar rupiah terealisasi sebesar 203,334 milyar rupiah (105,15%), terus meningkat hingga tahun

2015 yang ditargetkan 267,246 milyar rupiah realisasinya sebesar 264,618 milyar rupiah (99,02%), dan ditahun 2016 terjadi penurunan yang cukup signifikan dengan target 120,605 milyar rupiah realisasinya hanya 105,949 milyar rupiah (87,85%), dan ditahun 2017 terjadi penurunan kembali dari target sebesar 88,964 milyar rupiah terealisasi sebesar 90,299 milyar rupiah (101,50%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 3.4.

Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2013-2017



Sumber: Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi, 2018

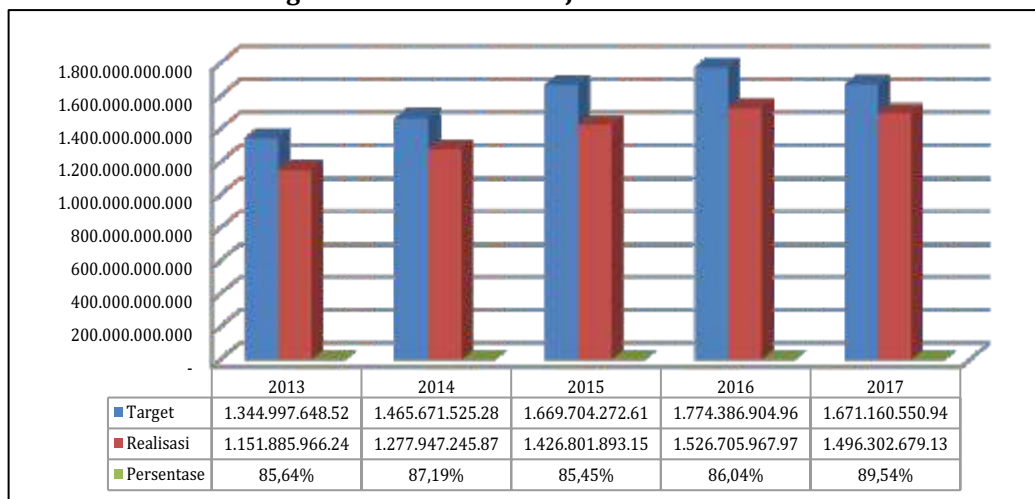
3.1.1.2. Belanja Daerah

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Dari tahun 2013-2017, total akumulasi realisasi belanja daerah Pemerintah Kota Jambi sebesar 6,879 triliun rupiah dari rencana sebesar 7,925 triliun rupiah (86,80%). Belanja daerah tersebut terbagi atas 2 jenis belanja yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Berdasarkan Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yaitu belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Adapun kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 3.5.
Target dan Realisasi Belanja Tahun 2013 -2017

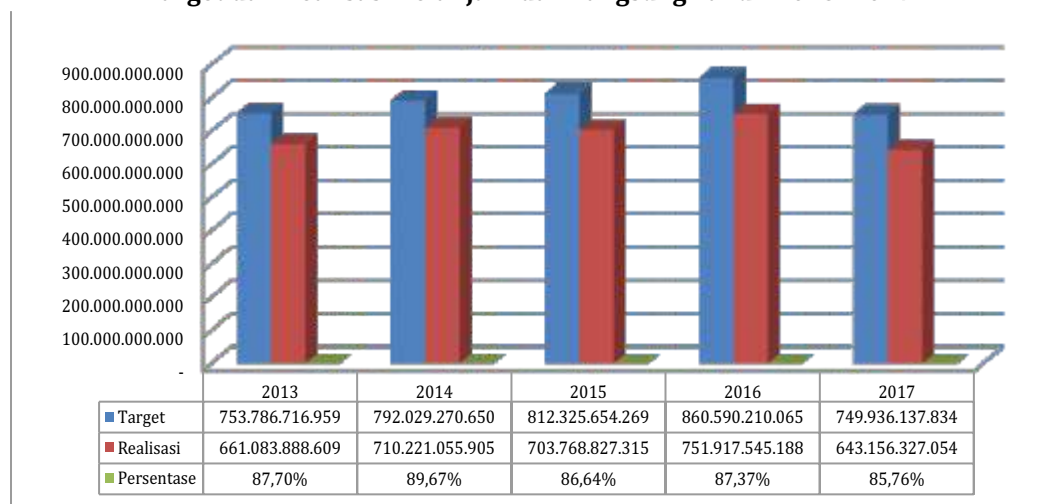


Sumber: Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi, 2018

1. Belanja Tidak Langsung

Realisasi belanja tidak langsung dari tahun 2013-2017 sebesar 3,470 triliun rupiah dari rencana sebesar 3,968 triliun rupiah atau sebesar 87,44%. Rincian rencana dan realisasi belanja tidak langsung dapat dilihat pada grafik berikut

Grafik 3.6.
Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2013 -2017

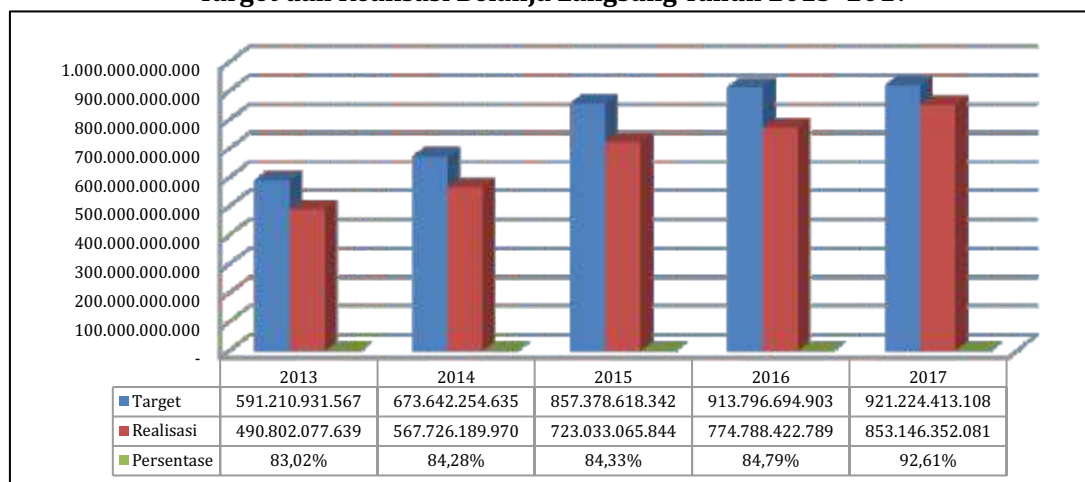


Sumber: Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi, 2018

2. Belanja Langsung

Realisasi Belanja Langsung dari Tahun 2013-2017 sebesar 3,409 triliun rupiah dari target sebesar 3,957 triliun rupiah atau sebesar 86,16%. Rincian rencana dan realisasi belanja langsung dapat dilihat pada grafik berikut

Grafik 3.7.
Target dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2013 -2017



Sumber: Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi, 2018

3.1.1.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan Pembiayaan Daerah di Kota Jambi mencakup : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman. Adapun pengeluaran pembiayaan daerah hanya mencakup penyertaan modal Pemerintah Daerah.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kota Jambi selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang lalu dilakukan dan dirumuskan melalui pendekatan anggaran berbasis kinerja. Pendekatan ini diarahkan untuk dapat menampung aspirasi dan memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat sebagai penerima manfaat dari setiap program pembangunan secara optimal. Namun demikian, agar ada jaminan bahwa dalam penyusunan anggaran dilakukan secara transparan, efisien, efektif, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat sasaran dan tepat dalam penggunaannya serta dapat dipertanggungjawabkan, maka dalam perumusannya memperhatikan beberapa faktor, diantaranya faktor keseimbangan antara pendapatan dengan belanja serta pembiayaan.

- a. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya, didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional;
- b. Penyertaan modal kepada BUMD;
- c. Persentase SILPA diupayakan tidak meningkat dengan semakin efektifnya perencanaan anggaran.

Realisasi pembiayaan daerah Kota Jambi tahun 2013-2017 secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Jambi Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
PENERIMAAN	148.238.459.062	139.211.227.761	169.630.153.537	130.079.638.924	134.489.386.518
SiLPA TA Sebelumnya	148.238.459.062	139.211.227.761	169.630.153.537	130.079.638.924	134.489.386.518
Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	0	0	0	0	0
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	0	0	0	0	0
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0
PENGELUARAN	21.493.814.350	12.282.718.546	0	40.731.598.758	7.169.148.042
Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	20.000.000.000	10.000.000.000	0	39.039.796.578	39.039.796.578
Pembayaran Pokok Utang	1.493.814.350	2.282.718.546,30	0	1.691.802.180	1.691.802.180
Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
Pembayaran Kegiatan Lanjutan	0	0	0	0	0
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	0	0	0	0	0
PEMBIAYAAN NETTO	126.744.644.713	124.645.790.699	169.630.153.537	89.348.040.166	127.320.238.476

Sumber: Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi, 2018

Tabel diatas menunjukkan bahwa sumber satu-satunya penerimaan pembiayaan adalah berasal dari SiLPA yang besarnya fluktuatif. Hal ini menunjukkan peningkatan SiLPA yang tidak diharapkan tidak dapat terwujud. Di masa mendatang Pemerintah Kota Jambi harus lebih cermat lagi dalam perencanaan anggaran. Dari sisi pengeluaran pembiayaan, persentase terbesar dipergunakan untuk penyertaan modal kepada BUMD disusul sebagian kecil dipergunakan untuk pembayaran pokok hutang. Dengan banyaknya penerimaan pembiayaan, seharusnya Pemerintah Kota Jambi lebih berani lagi dalam penggunaan penerimaan pembiayaan, misalnya dipergunakan untuk pembentukan dana cadangan.

3.1.2. Neraca Daerah

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Jambi menyusun laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan.

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada waktu tertentu. Aset daerah merupakan asset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur

dalam uang. Kewajiban baik jangka panjang maupun pendek, memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul dari konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumberdaya ekonomi dimasa yang akan datang. Ekuitas dana yang meliputi Dana lancar dan investasi merupakan selisih antara asset dengan kewajiban pemerintah daerah.

Secara umum kondisi neraca daerah Kota Jambi tergolong baik, terlihat dari rasio lancar dan rasio quick yang mencapai lebih dari angka 1, dan rasio total hutang terhadap total aset dan rasio hutang terhadap modal yang bernilai kurang dari 0,1. Kondisi ini tentunya perlu dijaga dan dipertahankan sehingga kondisi keuangan daerah tetap dalam kondisi sehat. Hasil perhitungan analisis rasio keuangan daerah Kota Jambi dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3.
Analisis Rasio Keuangan Daerah Kota Jambi
Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Rasio lancar (<i>current ratio</i>)	1930,37%	2764,38%	2135,24%	895,09%	700,45%
2.	Rasio quick (<i>quick ratio</i>)	1844,43%	2563,41%	1970,36%	815,44%	618,17%
3.	Rasio total hutang terhadap aset	0,39%	0,30%	0,27%	1,94%	2,03%
4.	Rasio hutang terhadap modal	0,39%	0,27%	0,28%	1,97%	2,07%

Perkembangan jumlah aset Kota Jambi menunjukkan fluktuatif dimana mulai tahun 2013 sebesar Rp. 2.834.180.148.702 meningkat menjadi Rp. 3.389.620.552.563 pada tahun 2015, kemudian terjadi penurunan aset pada tahun 2017 menjadi 2.791.326.204.027, hal ini dikarenakan adanya akumulasi penyusutan dan Amortisasi terhadap aset-aset yang ada pada tahun 2017. Jumlah kewajiban mengalami peningkatan dari Rp. 10.943.610.924 pada tahun 2013 menjadi Rp. 56.529.212.124 pada tahun 2017. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4.
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Jambi Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Aset Lancar					
	Kas di Kas Daerah	139.077.589.994,64	168.885.502.258,12	129.645.704.136,74	133.844.212.656,76	105.775.310.526,87
	Kas di BLUD	-	-	-	-	21.187.010.666,03
	Kas Lainnya Dana BOS	-	-	-	4.309.323.057,40	4.670.389.966,00
	Kas di Bendahara Pengeluaran	207.906.616,00	825.903.539,00	484.533.302,00	194.016.988,00	38.354.212,00
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-	-	-	94.444.710,00
	Kas di Bendahara Penerimaan	9.832.000,00	8.758.000,00	46.449.500,00	19.982.696,00	6.760.360,00
	Kas Yang Dibatasi Penggunaannya	-	-	-	-	50.000.000,00
	Piutang Pajak	41.509.242.791,00	31.580.850.088,00	51.386.861.532,00	59.490.145.409,00	62.730.513.866,00
	Piutang Retribusi	2.461.752.546,00	2.917.293.441,25	3.362.192.048,75	3.076.107.509,75	3.142.088.174,25
	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	-	-	-	200.000,00	88.665.000,00
	Piutang Dana Bagi Hasil dari Provinsi	11.242.884.093,00	15.588.190.887,00	-	-	-
	Piutang Lainnya	7.338.340.411,00	2.386.495.049,00	-	8.080.264.138,00	7.385.795.149,00
	Penyisihan Piutang	-	-	(1.938.967.591,00)	(29.569.021.313,90)	(39.315.190.713,79)
	Beban Dibayar Dimuka	-	-	524.870.564,00	623.270.228,00	245.160.515,25
	Persediaan	9.404.137.096,76	17.419.628.043,64	15.356.584.320,59	17.588.136.637,64	22.108.756.764,27
	Jumlah Aset Lancar	211.251.685.548,40	239.612.621.306,01	198.868.227.813,08	197.656.638.006,65	188.208.059.195,88
2.	Investasi Jangka Panjang					
	Investasi Nonpermanen	255.357.240,10	261.478.036,32	199.296.036,32	19.547.363,98	19.673.400,59
	Investasi Permanen (Penyertaan Modal Pemerintah Daerah)	56.376.589.446,00	66.906.880.646,00	65.051.395.965,82	127.829.676.379,99	134.729.300.093,38

	Jumlah Investasi Jangka Panjang	56.631.946.686,10	67.168.358.682,32	65.250.692.002,14	127.849.223.743,97	134.748.973.493,97
No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
3.	Aset Tetap					
	Tanah	456.825.675.083,00	472.934.455.252,00	475.243.924.252,00	481.346.826.952,00	429.849.671.502,00
	Peralatan dan Mesin	375.602.944.207,00	434.017.560.944,77	479.323.832.515,50	503.473.427.161,57	550.633.614.181,87
	Gedung dan Bangunan	665.332.063.541,40	739.511.420.434,45	774.897.313.909,51	871.183.176.438,12	879.346.393.657,18
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.013.806.748.794,65	1.145.715.391.115,86	1.394.517.596.521,97	1.639.074.967.370,01	1.824.961.081.518,32
	Aset Tetap Lainnya	46.247.683.642,93	53.876.087.373,54	79.242.935.341,15	124.804.427.216,24	196.676.491.102,67
	Konstruksi dalam Pengerjaan	670.541.825,00	-	2.069.825.002,10	31.194.115.704,83	15.000.698.158,49
	Akumulasi Penyusutan	-	-	(96.347.814.283,96)	(1.394.513.185.665,30)	(1.549.786.214.990,86)
	Jumlah Aset Tetap	2.558.485.657.093,98	2.846.054.915.120,62	3.108.947.613.258,27	2.256.563.755.177,47	2.346.681.735.129,67
4.	Aset Lainnya					
	Tuntutan Ganti Rugi	767.787.040,00	767.787.040,00	767.787.040,00	785.110.815,00	827.738.815,00
	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	-	-	-	41.117.000.000,00	41.117.000.000,00
	Aset Tak Berwujud	1.603.166.000,00	1.399.248.518,92	1.877.217.318,92	2.325.381.318,92	2.980.727.318,92
	Aset Lain-Lain	5.439.906.334,00	5.785.267.743,00	13.909.015.130,65	45.706.384.430,92	79.268.953.152,42
	Amortisasi	-	-	-	-	(2.506.983.078,00)
	Jumlah Aset Lainnya	7.810.859.374,00	7.952.303.301,92	16.554.019.489,57	89.933.876.564,84	121.687.436.208,34
	JUMLAH ASET	2.834.180.148.702,48	3.160.788.198.410,87	3.389.620.552.563,06	2.672.003.493.492,93	2.791.326.204.027,86
B.	KEWAJIBAN					
1.	Kewajiban Jangka Pendek					

	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	74.268.850,00	81.252.260,00	79.724.240,00	33.921.525,00	27.028.443,00
	Utang Bunga	8.586.623.528,05	8.586.623.528,05	8.586.623.528,05	8.586.623.528,05	8.586.623.528,05
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-	-	6.191.573.257,00	6.277.714.534,75
	Utang Belanja	-	-	647.280.053,00	4.893.544.641,00	7.161.252.249,54
	Utang jangka Pendek Lainnya	2.282.718.546,30	-	-	2.376.670.990,00	4.816.923.369,06
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	10.943.610.924,35	8.667.875.788,05	9.313.627.821,05	22.082.333.941,05	26.869.542.124,40
2.	Kewajiban Jangka Panjang					
	Utang jangka Panjang Lainnya	-	-	-	29.659.670.000,00	29.659.670.000,00
No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	29.659.670.000,00	29.659.670.000,00
C.	EKUITAS	10.943.610.924,35	8.667.875.788,05	9.313.627.821,05	51.742.003.941,05	56.529.212.124,40
	JUMLAH EKUITAS	2.823.236.537.778,13	3.152.120.322.622,82	3.380.306.924.742,01	2.620.261.489.551,88	2.734.796.991.903,46
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.834.180.148.702,48	3.160.788.198.410,87	3.389.620.552.563,06	2.672.003.493.492,93	2.791.326.204.027,86

Sumber: Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi, 2018

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.2.1. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seringkali timbul permasalahan dengan masyarakat khususnya para pengusaha. Kebijakan ekstensifikasi pajak dan retribusi atau penetapan tarif yang terlalu tinggi seringkali dikeluhkan dan akan menghambat pertumbuhan sektor riil. Untuk itu perlu dikembangkan terobosan baru untuk meningkatkan PAD, yaitu dengan:

a. Perbaikan manajemen

Melalui perbaikan manajemen diharapkan setiap potensi pendapatan daerah dapat direalisasikan. Manajemen yang profesional dapat dicapai dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan perbaikan serta penyederhaan sistem dan prosedur.

b. Peningkatan Investasi

Peningkatan investasi dapat didorong dengan membangun iklim usaha yang kondusif. Hal ini dapat dicapai dengan :

- 1) Menjaga stabilitas ekonomi daerah;
- 2) Menyederhanakan prosedur perijinan;
- 3) Mempertegas peraturan/kebijakan agar tidak tumpang tindih baik antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota, maupun antar sektor;
- 4) Meningkatkan kepastian hukum terhadap usaha;
- 5) Menyejahtakan iklim ketenagakerjaan sekaligus meningkatkan kualitas tenaga kerja;
- 6) Meningkatkan keamanan dan ketertiban;
- 7) Meniadakan tumpang tindih pemungutan;
- 8) Menyederhanakan prosedurnya.

c. Optimalisasi Aset Daerah

Peningkatan PAD juga dapat diraih dengan meningkatkan penggunaan aset daerah. Optimalisasi aset dapat dicapai dengan perbaikan administrasi aset dan peningkatan *turn over*. Optimalisasi aset juga dilaksanakan dengan bekerjasama dengan swasta. Selain itu, diperlukan perbaikan manajemen BUMD dan rencana pembentukan badan usaha baru.

2. Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil

Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena bergantung pada pemerintah pusat. Sumber dana yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan DAK, Bagi hasil pajak Provinsi dan Pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan bagi hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan demikian semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Oleh karena itu pemerintah daerah harus mendorong peningkatan aktivitas perekonomian.

3.2.2. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Arah kebijakan pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

2. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang infrastruktur, daya beli, kesehatan dan pendidikan, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi Kota Jambi.

3. Tolok Ukur dan Target Kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan harus disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

4. Optimalisasi Belanja Langsung

Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Optimalisasi belajalangsung untuk pembangunan infrastruktur publik dapat dilakukan melalui mekanisme kerjasama pemerintah dengan badan usaha (pihak swasta) bila memungkinkan.

5. Transparan dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja, dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui publikasi masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya menyangkut aspek administrasi keuangan, tetapi juga proses, keluaran dan hasilnya.

3.2.3. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

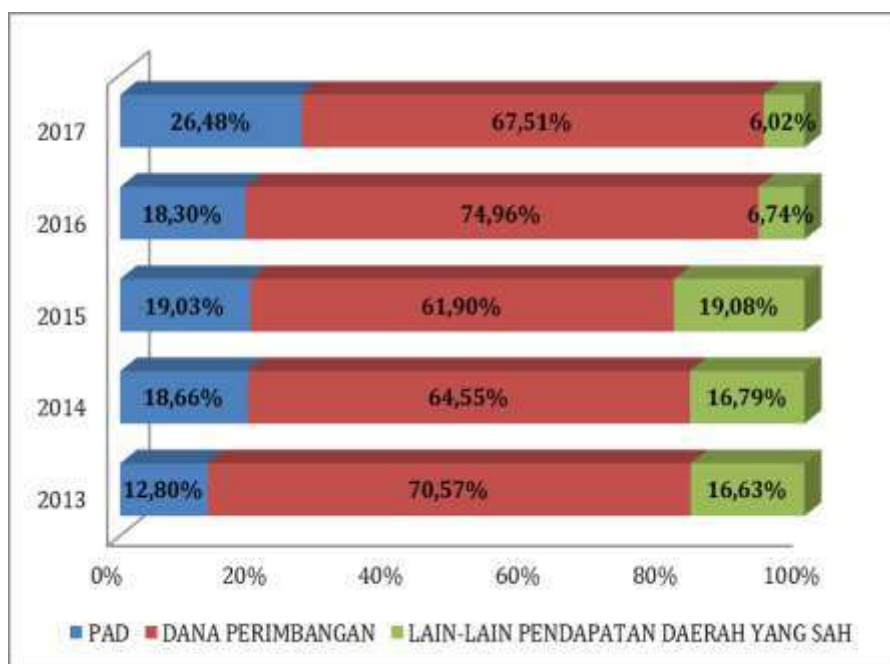
Prinsip pengelolaan keuangan daerah adalah mencapai keseimbangan antara pendapatan dan belanja, sehingga defisit anggaran diupayakan untuk diminimalkan. Jika pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran berjalan, arah pengelolaan pembiayaan harus berdasarkan prinsip kemampuan dan kesinambungan fiskal daerah. Sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit anggaran dapat digali dari pinjaman daerah, tetapi jumlah defisit diupayakan tidak melampaui 4,5% dari pendapatan daerah. Selain itu, besaran pinjaman daerah tidak melebihi kemampuan daerah dalam mengembalikan pinjaman. Hal ini tercermin dari besaran rasio kemampuan membayar kembali pinjaman atau *Debt Services Coverage Ratio* (DSCR) minimal sebesar 2,5 coverage.

3.2.4. Proporsi Anggaran Pendapatan

Sumber pendapatan daerah adalah pendapatan asli daerah; dana perimbangan; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pada tahun 2013-2017 Pemerintah Kota Jambi berhasil meningkatkan sumber pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah dan mendanai pembangunan di Kota Jambi.

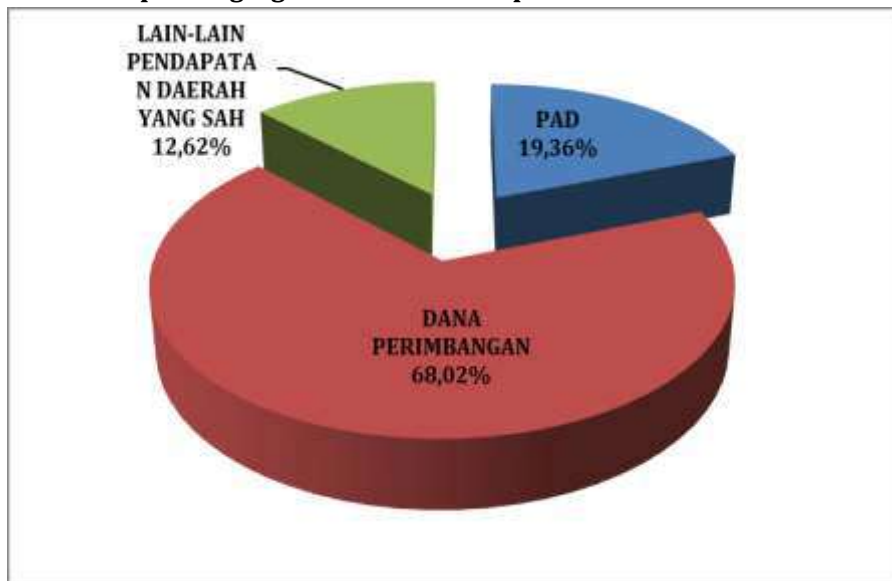
Ditinjau dari nilai atau besaran perolehannya masing-masing sumber pendapatan daerah mengalami peningkatan. Ditinjau dari proporsinya, pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami peningkatan walaupun tetap di bawah dana perimbangan. Proporsi perolehan pendapatan daerah Kota Jambi dari tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 3.8.
Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2013-2017



Bila dihitung secara agregat selama 5 (lima) tahun terakhir, dari tahun 2013-2017, kontribusi keseluruhan pendapatan asli daerah sebesar 19,36%; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 12,62%. Sementara itu dana perimbangan memberi kontribusi terbesar pada pendapatan daerah Kota Jambi yakni 68,02%. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Jambi masih memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi kepada dana-dana dari pusat dan provinsi. Secara skematik proporsi total dari ketiga sumber pendapatan tersebut dapat dilihat pada grafik 3.9.

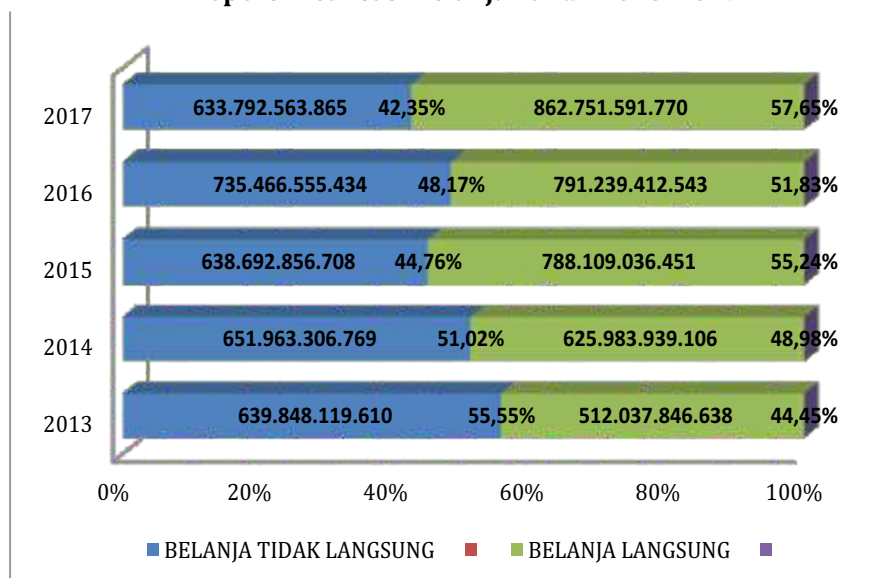
Grafik 3.9.
Proporsi Agregat Realisasi Pendapatan Tahun 2013-2017



3.2.5. Proporsi Penggunaan Anggaran

Realisasi belanja Pemerintah Kota Jambi dari tahun 2013-2017 terus mengalami peningkatan, hal ini didukung oleh makin meningkatnya pendapatan daerah. Secara nilai, masing-masing komponen belanja yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung mengalami peningkatan. Walaupun proporsi belanja tidak langsung memiliki proporsi yang lebih besar dibanding belanja langsung, namun dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik 3.10.

Grafik 3.10.
Proporsi Realisasi Belanja Tahun 2013-2017



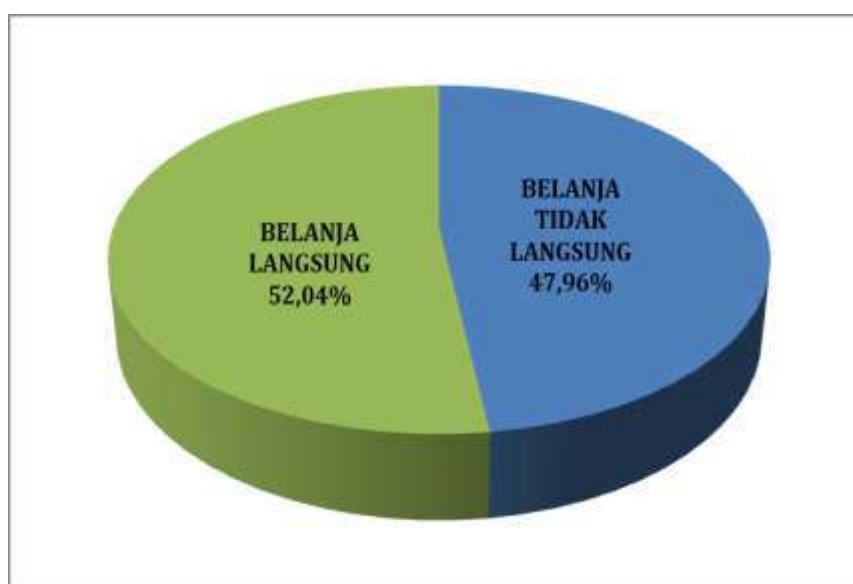
Selanjutnya jika dilihat proporsi belanja aparatur/pegawai terhadap total belanja daerah dapat dilihat pada tabel 3.5. berikut :

Tabel 3.5.
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Jambi
Tahun 2013-2017

No	Uraian	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Rp)	Prosentase (%)
1	2013	592.744.670.347	1.151.885.966.248	51,46%
2	2014	642.424.088.743	1.277.947.245.875	50,27%
3	2015	627.677.871.221	1.426.801.893.159	43,99%
4	2016	721.853.145.335	1.526.705.967.976	47,28%
5	2017	609.075.861.181	1.496.302.679.135	40,70%

Secara agregat selama 5 (lima) tahun terakhir, dari tahun 2013 -2017, proporsi belanja langsung hanya 52,04%. Sementara itu, proporsi realisasi belanja tidak langsung sebesar 47,96%, hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang ada telah lebih banyak untuk belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yaitu belanja barang dan jasa serta belanja modal. Secara skematik proporsi belanja dapat dilihat pada grafik 3.11.

Grafik 3.11.
Proporsi Agregat Realisasi Belanja Tahun 2013-2017



Tabel 3.6
Defisit Riil Anggaran Kota Jambi

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	1.164.352.549.296,01	1.320.648.890.197,28	1.387.222.252.820,42	1.571.332.218.626,47	1.500.633.237.946,70
	Dikurangi Realisasi :					
2.	Belanja Daerah	1.151.885.966.248,19	1.277.947.245.874,50	1.426.801.893.158,80	1.526.705.967.976,45	1.496.544.155.634,80
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	21.493.814.350,00	12.282.718.546,30		40.731.598.758,00	7.169.148.041,76
	Defisit Riil	-9.027.231.302,18	30.418.925.776,48	-39.579.640.339,38	3.894.651.892,02	-3.080.065.729,86

Tabel 3.7.
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Jambi

No	Uraian	Proporsi Dari Total Defisit Riil				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	139.211.227.760,64	169.630.153.537,12	130.050.513.198,74	133.,974.290.815,76	131.650.797.287,90
2.	Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0.00	0.00	95.530.000,00	490.279.094,00	547.233.821,00
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Penerimaan Piutang Daerah	0.00	10.079.390.375,75	0.00	9.883.239.140,50	12.158.403.461,50

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi, 2018

Tabel 3.8.
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Jambi

No	Uraian	2013		2014		2015		2016		2017	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1.	Jumlah SiLPA	139.211.227.760,64		169.630.153.537,12		130.050.513.198,74		133.974.290.815,76		131.650.797.287,90	
2.	Pelampauan Penerimaan PAD	16.130.990.108,21	12,25	49.788.501.926,28	37,82	(41.213.422.880,58)	-31,31	(28.938.559.595,51)	-21,98	6.435.213.689,10	4,89
3.	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	(25.443.048.474,00)	-19,33	(17.696.755.828,00)	-13,44	(7.202.866.805,58)	-5,47	(18.054.225.131,02)	-13,71	(50.988.383.911,40)	-38,73
4.	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	253.337.000,80	0,19	521.847.475,00	0,40	0,00	0,00	(4.385.100.422,00)	-3,33	819.000.000,00	0,62
5.	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	148.269.949.125,63	112,62	137.016.559.963,84	104,08	178.466.822.884,32	135,56	185.352.175.964,29	140,79	175.384.967.510,20	133,22
6.	Kewajiban Kepada Pihak Ke Tiga Sampai Dengan Akhir Tahun Belum Terselamatkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kegiatan Lanjutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabel 3.9
Defisit Rill Anggaran Kota Jambi Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
	Surplus (Defisit)	22.124.827.323	51.451.644.324	(39.561.640.339)	44.626.250.650	4.330.558.812
3.	PEMBIAYAAN DAERAH					
3.1	Penerimaan Pembiayaan	148.238.459.063	139.211.227.761	169.630.153.537	130.079.638.924	134.489.386.518
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	148.238.459.063	139.211.227.761	169.630.153.537	130.079.638.924	134.489.386.518
3.1.2	Pencairan dana cadangan	-	-	-	-	-
3.1.3	Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-	-	-	-	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	21.493.814.350	12.282.718.546	0	40.731.598.758	7.169.148.042
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan modal (investasi) daerah	20.000.000.000	10.000.000.000	0	39.039.796.578	6.988.000.000
3.2.3	Pembayaran pokok utang	1.493.814.350	2.282.718.546	-	1.691.802.180	181.148.042
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	-	-	-	-	-
3.2.5	Pembayaran kegiatan lanjutan tahun lalu	-	-	-	-	-
3.2.6	Pengeluaran perhitungan pihak ketiga	-	-	-	-	-
	Pembiayaan Neto	126.744.644.713	139.211.227.761	169.630.153.537	89.348.040.166	127.320.238.476
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	148.869.472.036	190.662.872.085	130.068.513.198	133.974.290.816	131.650.797.288

Ket : SILPA adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan. SILPA adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya.

Dari tabel 3.6 terlihat bahwa Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Jambi pada tahun 2013-2017 berasal dari pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya, secara berurutan nilainya sebesar 139,2 milyar, 169.6 milyar, 130,05 milyar, 133,9 milyar dan 131,6 milyar. Selain itu, juga berasal dari pos Penerimaan Piutang Daerah pada tahun 2014 sebesar 10,07 milyar, tahun 2016 sebesar 9,8 milyar dan tahun 2017 sebesar 12,15 milyar. Kondisi demikian menggambarkan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Jambi cukup kuat untuk membiayai belanja langsung dan belanja tidak langsungnya.

Pada tabel 3.7 di atas, dapat dilihat bahwa Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Jambi tahun 2013-2017 terbesar berasal dari pos Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya, dimana nilainya berkisar antara 137 milyar hingga 185 milyar. Sedangkan dari pos pelampauan penerimaan PAD nilainya positif pada tahun 2013, 2014 dan tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2015 dan tahun 2016 tidak mengalami pelampauan dari target PAD, hal ini dikarenakan penetapan target PAD yang jauh lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Namun secara realisasi, persentase penerimaan PAD dari tahun 2013-2017 terus mengalami peningkatan yang signifikan.

Selanjutnya, berdasarkan tabel 3.8 diatas pada tahun 2013 dan tahun 2014, APBD Kota Jambi mengalami surplus 22,124 milyar dan 51,451 milyar akan tetapi di tahun 2016 mengalami defisit sebesar 39,561 milyar hal ini disebabkan karena realisasi pendapatan daerah lebih kecil dari realisasi belanja daerah. Namun pada tahun 2016 dan 2017 mengalami surplus kembali sebesar 44,626 Milyar dan 4,330 Milyar.

Untuk menyalurkan surplus dan menutup defisit, dalam penganggaran dikenal pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Untuk mendapatkan surplus atau defisit riil harus diperhitungkan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah berupa pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok hutang, pemberian pinjaman daerah, pembayaran kegiatan lanjutan tahun lalu, dan pengembalian kelebihan penerimaan tahun lalu.

3.3. Kerangka Pendanaan

Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 tahun ke depan. Oleh sebab itu perlu dihitung dulu kemampuan riil anggaran untuk 5 tahun kedepan. Salah satu metode sederhana untuk memperkirakan kemampuan

anggaran tersebut adalah fungsi forecast, yaitu menggunakan regresi linear untuk memperkirakan sebuah nilai berdasarkan hubungan 2 (dua) kumpulan data, ditambah asumsi-asumsi yang diperkirakan akan terjadi pada tahun berkenaan.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2013-2017, dilakukan proyeksi untuk memperoleh gambaran pendapatan tahun 2018-2023. Sedangkan pendapatan tahun 2018 menggunakan data APBD Perubahan Kota Jambi Tahun 2018. Pendapatan daerah Kota Jambi diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar Rp. 1,628,500,835,180.00 pada tahun 2018 dan menjadi sebesar Rp. 1.995.369.239.000,- pada tahun 2023. Beberapa asumsi yang mendasari peningkatan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional meningkat sesuai dengan target dalam RPJMN tahun 2013-2017 berada pada angka rata-rata 5,11%
2. Rata-rata Pertumbuhan ekonomi Kota Jambi tahun 2013-2017 pada angka 6,66%.
3. Pendapatan pajak naik rata-rata sebesar 10,02%.
4. Pendapatan retribusi daerah naik sebesar 3,17%.
5. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan naik sebesar 5,07%.
6. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meningkat sebesar 13,48%.
7. Rata-rata pertumbuhan dana perimbangan (Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak), Dana Alokasi Umum (DAU) 3,72%, Dana Alokasi Khusus (DAK)-2,90% dan Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 5,75%.

Kebijakan dalam peningkatan pendapatan daerah Kota Jambi tahun 2018-2023 diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Intensifikasi dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan potensi yang ada.
2. Pengembangan basis data dan potensi pajak dan retribusi daerah agar valid dan *up to date*.
3. Peningkatan kualitas pelayanan pajak dan retribusi. melalui pemanfaatan Teknologi Informasi (IT) dan Sarpras pada perangkat daerah penghasil, termasuk peningkatan kualitas SDM aparatur pengelola pajak dan retribusi daerah.
4. Peningkatan kinerja bisnis BUMD agar memberikan dampak pada peningkatan bagi hasil laba BUMD terhadap PAD.
5. Peningkatan tata kelola BLUD agar menghasilkan peningkatan pendapatan daerah sehingga dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kualitas pelayanan BLUD.
6. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah agar mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan daerah.

Sementara itu, dalam hal proyeksi belanja daerah tahun 2018 hingga 2023 berdasarkan realisasi Belanja Daerah tahun 2013-2017, sedangkan belanja tahun 2018 menggunakan data APBD Perubahan Kota Jambi Tahun 2018. Belanja Daerah Kota Jambi diproyeksikan mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 1,755,151,632,467.00- pada tahun

2018 dan menjadi sebesar Rp. 2,015,077,903,00,- pada tahun 2023. Kebijakan dalam pengalokasian belanja daerah Kota Jambi sebagai berikut:

1. Belanja daerah dikelola secara tertib dan transparan berbasis akrual sesuai dengan asas efisien, efektif, dan akuntabel.
2. Belanja daerah diutamakan untuk pengalokasian belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama, selanjutnya belanja langsung program unggulan kepala daerah, belanja prioritas perangkat daerah, dan belanja tidak langsung di luar belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama.
3. Belanja langsung diarahkan untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai kewenangan kabupaten yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah baru dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan;
4. Pengalokasian belanja langsung didasarkan pada anggaran berbasis kinerja dengan tolok ukur kinerja yang jelas dan terukur mendasarkan pada prioritas dan target kinerja pembangunan sesuai visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Jambi;
5. Belanja pegawai dianggarkan sesuai regulasi yang berlaku, dan tunjangan pegawai diarahkan pada peningkatan kinerja Aparat Sipil Negara (ASN).

Penerimaan pembiayaan daerah terutama berasal dari SiLPA tahun sebelumnya. Penerimaan pembiayaan daerah diproyeksikan sebesar Rp. 131,650,797,287.00 - pada tahun 2018 menjadi Rp. 20,708,664,000,- tahun 2023 Asumsi pembiayaan yaitu SILPA direncanakan semakin berkurang seiring dengan peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, diharapkan mencapai angka nol. Kebijakan berkaitan penerimaan pembiayaan daerah Kota Jambi yaitu: dalam menetapkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), disesuaikan dengan kapasitas potensi riil yang ada, terutama hanya berasal dari sisa penghematan belanja.

Pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan dari sebesar Rp. 5,000,000,000.00,- pada tahun 2018 menjadi Rp. 1.000,000.000,- tahun 2023. Kebijakan berkaitan pengeluaran pembiayaan daerah Kota Jambi yaitu: penyertaan modal pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan dana yang diinvestasikan/ disertakan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur modal dan memperkuat share permodalan khususnya BUMD yang kepemilikannya bersama oleh Pemerintah Kota Jambi dan Provinsi. Penyertaan modal pemerintah daerah yang dianggarkan dalam APBD didasarkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah.

Tabel 3.10
 Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
 Tahun 2018 s/d Tahun 2023
 Kota Jambi

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata Perumbuhan
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
01.00	PENDAPATAN	1.628.500.835.180	1.660.053.885.000	1.728.854.168.000	1.810.498.430.000	1.896.175.855.000	1.995.369.239.000	4,15%
01.01	Pendapatan Asli Daerah	335.902.135.250	364.142.193.000	401.811.622.000	442.917.916.000	488.420.804.000	540.122.031.000	9,97%
01.01.01	Pajak Daerah	203.500.000.000	223.000.000.000	246.235.000.000	270.860.000.000	298.000.000.000	328.000.000.000	10,02%
01.01.02	Retribusi Daerah	44.012.000.000	46.726.000.000	47.568.000.000	48.826.000.000	49.731.000.000	51.407.000.000	3,17%
01.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	8.850.000.000	9.000.000.000	9.780.000.000	10.269.000.000	10.782.450.000	11.321.573.000	5,07%
01.01.04	Lain-lain PAD yang sah	79.540.135.250	85.416.193.000	98.228.622.000	112.962.916.000	129.907.354.000	149.393.458.000	13,48%
01.02	Dana Perimbangan	1.125.497.214.930	1.134.707.598.000	1.144.291.970.000	1.179.293.447.000	1.213.624.938.000	1.248.289.744.000	2,10%
01.02.01	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	118.890.269.930	137.956.917.000	139.000.000.000	141.000.000.000	142.000.000.000	143.000.000.000	3,93%
01.02.02	Dana Alokasi Umum	714.783.378.000	757.404.051.000	764.748.606.000	795.344.649.000	826.246.652.000	857.457.675.000	3,72%
01.02.03	Dana Alokasi Khusus	291.823.567.000	239.346.630.000	240.543.364.000	242.948.798.000	245.378.286.000	247.832.069.000	-2,90%
01.03	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	167.101.485.000	161.204.094.000	182.750.576.000	188.287.067.000	194.130.113.000	206.957.464.000	4,52%
01.03.01	Hibah	62.534.000.000	61.845.400.000	61.845.400.000	61.845.400.000	61.845.400.000	61.845.400.000	-0,22%
01.03.02	Pendapatan Lainnya							
01.03.03	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan	81.347.485.000	81.347.485.000	100.893.967.000	104.430.458.000	108.273.504.000	119.100.855.000	8,24%

	pemerintah Daerah lainnya **)																					
01.03.04	Dana Penyesuaian dan otonomi khusus	18.000.000.000	11.291.209.000	13.291.209.000	15.291.209.000	17.291.209.000	19.291.209.000														4,03%	
01.03.05	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	5.220.000.000	6.720.000.000	6.720.000.000	6.720.000.000	6.720.000.000	6.720.000.000															5,75%
02.00	BELANJA	1.755.151.632.467	1.710.612.142.885	1.768.300.775.000	1.841.855.716.000	1.921.061.684.000	2.015.077.903.000															2,84%
02.01	Belanja Tidak Langsung	759.889.727.857	795.111.216.885	793.123.410.000	803.729.467.000	821.013.186.000	873.018.709.000															2,84%
02.01.01	Belanja Pegawai	709.626.059.182	769.336.362.485	770.842.287.000	781.427.555.000	798.690.382.000	822.651.093.000															3,04%
02.01.02	Belanja Bunga																					
02.01.03	Belanja Subsidi																					
02.01.04	Belanja Hibah	42.749.214.275	14.725.400.000	14.725.400.000	14.725.400.000	14.725.400.000	42.749.215.000															24,95%
02.01.05	Belanja Bantuan Sosial	4.116.455.000	7.651.455.000	4.157.723.000	4.178.512.000	4.199.404.000	4.220.401.000															8,34%
02.01.06	Belanja Bagi Hasil																					
02.01.07	Belanja Bantuan Keuangan	1.292.132.400	1.292.132.400	1.292.133.000	1.292.133.000	1.292.133.000	1.292.133.000															0,00%
02.01.08	Belanja tidak terduga	2.105.867.000	2.105.867.000	2.105.867.000	2.105.867.000	2.105.867.000	2.105.867.000															0,00%
02.02	Belanja Langsung	995.261.904.610	915.500.926.000	975.177.365.000	1.038.126.249.000	1.100.048.498.000	1.142.059.194.000															2,95%
02.02.01	Belanja Pegawai	70.245.532.548	64.233.008.032	65.517.669.000	66.828.022.000	68.164.582.000	69.527.874.000															-0,11%
02.02.02	Belanja barang dan jasa	460.107.061.790	472.736.494.365	492.330.323.000	501.526.147.000	516.571.932.000	518.323.462.000															2,42%
02.02.03	Belanja Modal	464.909.310.272	378.531.423.603	417.329.373.000	469.772.080.000	515.311.984.000	554.207.858.000															4,30%
03.00	PEMBIAYAAN	126.650.797.287	50.558.257.885	39.446.607.000	31.357.286.000	24.885.829.000	19.708.664.000															-28,80%
03.01	Penerimaan Pembiayaan	131.650.797.287	50.558.257.885	40.446.607.000	32.357.286.000	25.885.829.000	20.708.664.000															-28,32%
03.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	131.650.797.287	50.558.257.885	40.446.607.000	32.357.286.000	25.885.829.000	20.708.664.000															-28,32%

03.02	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000	0	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
03.02.01	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.000.000.000	0	0	0	0	0
03.02.02	Pembayaran Pokok Utang	0	0	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
	SURPLUS/(DEFISIT)	0	0	0	0	0	0

3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Tahapan penghitungan kerangka pendanaan didahului dengan penghitungan kapasitas riil keuangan daerah. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan belanja tidak langsung dan pengeluaran pembiayaan. Penghitungan kerangka pendanaan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya.

Selanjutnya, penggunaan keuangan daerah dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu Prioritas I untuk Belanja Wajib dan Pengeluaran yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama. Prioritas II untuk Belanja Langsung untuk Program Unggulan Kepala daerah dan Program Prioritas di luar Belanja Langsung Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama.

Hasil penghitungan Kapasitas Riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah tahun 2018-2023 dan rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah tahun 2018-2023 tercantum pada Tabel 3.10 dan Tabel 3.11.

Tabel 3.11.
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Tahun 2019 - 2023

No	Uraian	Proyeksi				
		Tahun n+1 (Rp)	Tahun n+2 (Rp)	Tahun n+3 (Rp)	Tahun n+4 (Rp)	Tahun n+5 (Rp)
1	Pendapatan	1.660.053.885,00	1.728.854.168.000,00	1.810.498.430.000,00	1.896.175.855.000,00	1.995.369.239.000,00
2	Pencairian dana cadangan (sesuai perda)					
3	Sisa lebih Riil Perhitungan Anggaran	50.558.257.885,00	40.446.607.000,00	32.357.286.000,00	25.885.829.000,00	20.708.664.000,00
	Total Penerimaan	1.710.612.142.885,00	1.769.300.775.000,00	1.842.855.716.000,00	1.922.061.684.000,00	2.016.077.903.000,00
	Dikurangi:					
4	Belanja Tidak Langsung	795.111.216.885,00	793.123.410.000,00	803.729.467.000,00	821.013.186.000,00	873.018.709.000,00
5	Pengeluaran Pembiayaan		1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	915.500.926.000,00	975.177.365.000,00	1.038.126.249.000,00	1.100.048.498.000,00	1.142.059.194.000,00

Tabel 3.12.
Rencana Penggunaan Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah Kota Jambi
Tahun 2019 - 2023

NO.	URAIAN	Proyeksi				
		2019 (Rp.)	2020 (Rp.)	2021 (Rp.)	2022 (Rp.)	2023 (Rp.)
	Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan	915.500.926.000	975.177.365.000	1.038.126.249.000	1.100.048.498.000	1.142.059.194.000
	Prioritas I					
	Belanja Langsung untuk Program Unggulan Kepala Daerah	582.000.000.000	620.000.000.000	645.000.000.000	681.000.000.000	690.000.000.000
	Prioritas II					
	Belanja Langsung untuk Program Prioritas diluar Belanja Langsung Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama dan Belanja Prioritas I	333.500.926.000	355.177.365.000	393.126.249.000	419.048.498.000	452.059.194.000

3.3.3. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah meliputi kebijakan pada bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Kebijakan keuangan daerah memberikan gambaran tentang arah dan upaya dalam pengelolaan keuangan daerah. Optimalisasi penerimaan dan pembiayaan daerah serta efisiensi dan efektifitas belanja daerah menjadi upaya prioritas dalam arah kebijakan keuangan daerah mendatang.

Selain pendanaan yang bersumber dari APBD baik yang bersumber dari PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pendanaan non APBD seperti dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSLP)/*Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan potensi yang dapat menunjang pendanaan pembangunan di Kota Jambi.

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diantaranya adalah:

- 1) Penggalan dan peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan (intensifikasi dan ekstensifikasi) terutama bagi sumber pendapatan pajak dan retribusi yang potensial;
- 2) Optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan Perangkat Daerah penghasil;
- 3) Optimalisasi penggunaan Teknologi dan Sistem Infomasi untuk pengelolaan pendapatan daerah;
- 4) Peningkatan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Perangkat Daerah Penghasil, Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan;
- 5) Meningkatkan penyertaan modal pada BUMD dan Perusahaan Daerah untuk peningkatan penerimaan bagi hasil (deviden);
- 6) Meningkatkan pendayagunaan aset dan keuangan daerah;

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah :

- 1) Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penghasilan dana bagi hasil baik dari pajak maupun bukan pajak lainnya;
- 2) Meningkatkan akurasi data dan sumber daya yang dijadikan instrumen dasar perhitungan Dana Perimbangan;
- 3) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi Jambi dalam pelaksanaan Dana Perimbangan

Berdasarkan arah kebijakan perencanaan pendapatan daerah tersebut di atas, untuk dapat merealisasikan proyeksi penerimaan pendapatan daerah diperlukan strategi pencapaiannya, antara lain :

- a. Strategi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah, dapat ditempuh melalui:

- 1) Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan;
 - 2) Optimalisasi pemungutan atas pajak dan retribusi serta pengembangan sistem penagihan atas wajib pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
 - 3) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah
 - 4) Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
 - 5) Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak, seperti pengembangan gerai/outlet, dan kerjasama dengan pihak perbankan;
 - 6) Meningkatkan penyertaan modal untuk BUMD dan Perusahaan Daerah guna peningkatan penerimaan bagi hasil (deviden);
 - 7) Revitalisasi Perusahaan Daerah (PD) melalui berbagai upaya, antara lain: pengelolaan PD secara profesional, peningkatan sarana/prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas agar PD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapat kepercayaan dari publik/perbankan;
 - 8) Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
 - 9) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam operasional pemungutan dan pelayanan pendapatan daerah, terutama dengan perbankan sehingga mempermudah pelayanan pembayaran pajak daerah melalui layanan perbankan secara langsung;
 - 10) Mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan perangkat daerah penghasil.
- b. Strategi pencapaian target Dana Perimbangan, dapat ditempuh melalui:
- 1) Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak penghasilan dan Pajak lainnya yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Jambi, serta bukan pajak lainnya
 - 2) Meningkatkan akurasi data-data dan sumber daya yang dijadikan instrumen dasar perhitungan Dana Perimbangan;
 - 3) Sosialisasi mengenai pungutan pajak dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
 - 4) Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengupayakan peningkatan Dana Perimbangan (DAU, DAK, dan dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak).
- c. Strategi pencapaian target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dapat ditempuh melalui :
- 1) Sosialisasi mengenai pungutan pajak yang dikelola oleh provinsi seperti pajak kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, dan pajak

meteorologi, dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;

- 2) Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Bantuan Keuangan.

2. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang efektif, efisien, proporsional, fokus, transparan dan akuntabel, terutama untuk belanja daerah yang prioritas seperti :

1. Pemenuhan alokasi anggaran untuk urusan dan bidang tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2. Pemenuhan alokasi anggaran untuk pelayanan dan operasional perangkat daerah
3. Penganggaran belanja kegiatan yang proporsional, rasional, efektif dan efisien berbasis program prioritas (*Money Follow Programs, Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial*) dalam rangka memenuhi janji politik dan program prioritas kepala daerah
4. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan bidang sosial;
5. Pemenuhan alokasi belanja untuk kegiatan prioritas yang menjadi aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD pada saat pelaksanaan reses
6. Pemenuhan belanja untuk program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam rangka pemenuhan target kinerja dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah
7. Alokasi belanja untuk mendukung program dan kegiatan prioritas pemerintah pusat dan provinsi Jambi.

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan pada :

1. Optimalisasi penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
2. Pembentukan dana cadangan secara bertahap dalam mempersiapkan anggaran untuk kebutuhan pemilihan kepala daerah tahun 2022.
3. Penyertaan Modal atau Investasi Daerah kepada perusahaan daerah

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari Perangkat Daerah dan *stakeholder* lainnya.

Identifikasi permasalahan pembangunan diuraikan melalui pendekatan aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum yang menggambarkan permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini dimaksudkan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

1. Belum Optimalnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan dan pelayanan publik. Upaya mengukur profesionalitas ASN dilakukan berdasarkan Peraturan Menpan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks

Profesionalitas ASN. IP ASN ini merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi dalam rangka pengembangan profesionalitas profesi ASN. Indikator pengukuran profesionalitas ASN meliputi 4 (empat) dimensi yaitu: a) Kualifikasi 25%, b) Kompetensi 40%, c) Kinerja 30% dan d) Disiplin 5%. Posisi IP ASN Kota Jambi pada tahun 2018 sebesar 68, yang berarti berada pada kategori 'Rendah'. Rendahnya profesionalitas ASN ini secara umum disebabkan oleh belum optimalnya dimensi kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki ASN. Upaya Pemerintah Kota Jambi untuk meningkatkan indeks tersebut adalah meningkatkan kualifikasi ASN (pendidikan formal/tugas belajar bagi ASN) dan kompetensi (kompetensi teknis, manajerial maupun sosial kultural

2. Masih Tingginya Jumlah Pelanggaran Terhadap PERDA
3. Belum Tercapainya respon time penanganan bencana dan penyelamatan
4. Adanya Potensi Konflik
5. Masih tingginya angka pelanggaran lalu lintas

Dengan perkembangan yang terjadi khususnya di Kota Jambi salah satunya adalah perkembangan lalu lintas. Kita tahu bahwa dengan terjadinya perkembangan lalu lintas maka pasti ada yang namanya masalah yang perlu diatasi oleh pihak siapapun yang ingin bersimpatik termasuk masyarakat dan mahasiswa secara khususnya dan secara luasnya adalah pemerintah yang terkait.

Masalah yang benar - benar diperhatikan dikota besar adalah salah satunya masalah lalu lintas termasuk pada pelanggaran lalu lintas yang dilakukan manusia sendiri. Hal tersebut bisa dilihat dari angka kecelakaan lalu lintas yang terus meningkat setiap tahunnya. Perkembangan lalu lintas bisa menyebabkan pengaruh positif maupun negatif bagi kehidupan dilingkungan masyarakat apalagi didaerah yang sudah maju dan berkembang. Setiap tahunnya juga jumlah kendaraan terus meningkat dan tidak sedikit masyarakat yang melanggar peraturan-peraturan lalu

lintas sehingga pemerintah maupun kepolisian harus semakin ketat dan tegas untuk masalah lalu lintas, hal tersebut untuk mengurangi atau menekan tingkat kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh banyak hal seperti : pengemudi kendaraan yang buruk, bus besar atau kecil yang sembarangan parkir, ketidakteratur antara transportasi yang besar dan yang kecil atau tidak sesuai dengan luas jalan, pejalan kaki yang kurang hati-hati, jalanan yang tidak layak seperti jalan yang berlubang, kerusakan kendaraan, kendaraan yang sudah tidak layak lagi pakai, pengemudi yang tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan masih banyak lagi yang menimbulkan masalah pelanggaran lalu lintas yang telah ditentukan pemerintah khususnya Dinas Perhubungan dan Kepolisian.

Pelanggaran lalu lintas termasuk masalah transportasi yang sangat berpengaruh terhadap pelanggaran sosial, karena dapat merugikan beberapa pihak dan kalangan yang berkaitan.

6. Minimnya kecepatan tempuh rata - rata (pada saat tertentu)
7. Rendahnya kualitas lingkungan permukiman

Persoalan permukiman merupakan masalah yang serius karena dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya kantong-kantong kemiskinan yang fatal dan kemudian menyebabkan lahirnya berbagai persoalan sosial di luar kontrol atau kemampuan pemerintah kota untuk menangani dan mengawasinya. Permukiman kumuh merupakan salah satu masalah sosial di Indonesia yang tidak mudah untuk diatasi. Beragam upaya dan program dilakukan untuk mengatasinya, namun masih saja banyak kita jumpai permukiman masyarakat miskin di hampir setiap sudut kota yang disertai dengan ketidaktertiban dalam hidup bermasyarakat di perkotaan. Misalnya yaitu, pendirian rumah maupun kios dagang secara liar di lahan-lahan pinggir jalan sehingga mengganggu ketertiban lalu lintas yang akhirnya menimbulkan kemacetan jalanan kota. Masyarakat miskin di perkotaan itu unik dengan berbagai problematika sosialnya sehingga perlu mengupas akar masalah dan merumuskan solusi terbaik bagi kesejahteraan mereka. Dapat dijelaskan bahwa bukanlah kemauan

mereka untuk menjadi sumber masalah bagi kota namun karena faktor-faktor ketidakberdayaanlah yang membuat mereka terpaksa menjadi ancaman bagi eksistensi kota yang mensejahterahkan.

Keluhan yang paling sering disampaikan mengenai permukiman masyarakat miskin tersebut adalah rendahnya kualitas lingkungan yang dianggap sebagai bagian kota yang mesti disingkirkan. Terbentuknya permukiman kumuh, yang sering disebut sebagai slum area sering dipandang potensial menimbulkan banyak masalah perkotaan

8. Masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni

Rumah termasuk kebutuhan pokok di dalam urutan prioritas kebutuhan manusia/ masyarakat. Setiap bagian dari rumah berperan dan saling berkaitan untuk bersama-sama memenuhi fungsi sebenarnya sesuai kebutuhan penghuninya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman bahwa dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, setiap orang berhak menempati, menikmati, dan/ atau memiliki/ memperoleh rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Pemerintah beranggapan bahwa masalah perumahan merupakan tanggung jawab bersama, namun kewajiban untuk pemenuhan kebutuhan rumah tersebut pada hakekatnya merupakan tanggung jawab individual dalam hal ini dilaksanakan secara swadaya oleh masing-masing rumah tangga. Oleh karenanya berbagai upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan prakarsa dan swadaya masyarakat dalam mewujudkan Rumah Layak Huni.

Pengentasan kemiskinan telah menjadi agenda dan prioritas utama pembangunan Nasional. Upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan pemerintah pusat maupun daerah. Berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan pengentasan kemiskinan telah dirancang dan dilaksanakan. Salah satu program adalah program Pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH)

9. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas pelayanan air bersih dan air limbah

Pemenuhan layanan air bersih dan air limbah pada masyarakat perkotaan merupakan kebutuhan dasar yang akan berkaitan langsung kepada derajat kesehatan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong terwujudnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang kompetitif. Saat ini cakupan layanan air minum Jambi baru mencapai 77% atau masih ada 23% masyarakat yang masih memanfaatkan air tanah atau sumber lainnya, sedangkan untuk layanan air limbah saat ini baru mencapai 0,39% yang mencapai akses sanitasi layak berdasarkan SNI. Hal ini tercermin dari masih banyaknya tanki septic yang digunakan masyarakat Kota Jambi tidak kedap air dan relative jarang disedot secara berkala. Sedangkan untuk air minum perluasan jaringan masih terkendala dengan usia pipa asbes yang tidak mampu dialiri dengan tekanan relative tinggi untuk daerah yang jauh dan relative tinggi secara topografi (bagian selatan Kota Jambi). Untuk itu kedepan Pemerintah Kota Jambi merencanakan akselerasi perluasan layanan air limbah melalui pembangunan IPAL terpusat dan peningkatan system pengangkutan dan pengolahan setempat. Sedangkan untuk memperluas cakupan dan peningkatan kualitas layanan air minum pemerintah kota jambi akan berupaya melakukan peremajaan jaringan dan penguatan system produksi maupun distribusi.

10. Rendahnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Infrastruktur Jalan

Penanganan jalan di Kota Jambi di bagi atas dua fokus, yaitu jalan status kota dan jalan non status atau yang dikenal sebagai jalan lingkungan. Untuk kondisi jalan status kota relative dalam kondisi cukup baik yaitu mencapai 86,32%, namun demikian kondisi ini masih memerlukan peningkatan kapasitas, disamping meningkatkan kualitas jalan dalam kondisi baik, jalan perkotaan masih memerlukan pelebaran-pelebaran untuk mengantisipasi jumlah kendaraan yang bertambah seiring kemajuan kota. Sedangkan untuk penanganan jalan lingkungan juga diperlukan mengingat perkembangan pesat beberapa pusat-pusat

pemukiman dan kegiatan di Kota Jambi sebagai trigger sebaran pengembangan kawasan.

11. Banyaknya titik genangan/banjir di Kota Jambi

Pesatnya pembangunan Kota Jambi dalam beberapa tahun terakhir tentunya tidak hanya menimbulkan dampak positif, tetapi juga berdampak langsung pada menurunnya kemampuan drainase perkotaan menerima debit air yang masuk ke drainase yang tidak lagi terserap alami kedalam tanah akibat ruang yang terbangun. Hal ini diperparah dengan kondisi cuaca ekstrem yang mengakibatkan curah hujan lebih tinggi dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menjadi faktor penyebab terjadinya 19 titik genangan di Kota Jambi. Untuk itu kedepan Kota Jambi akan melakukan langkah-langkah penanganan yang komprehensif untuk mengatasi persoalan tersebut dimulai dari peningkatan kerjasama penanganan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan stake holder lainnya hingga kedalam rekayasa teknis untuk mengendalikan debit air yang ditampung dalam drainase perkotaan hingga peningkatan pengawasan pemanfaatan ruang kota.

12. Belum terwujudnya harmonisasi ruang kota

Ruang Kota yang harmonis tentunya merupakan harapan dari setiap masyarakat perkotaan. Sebuah kota yang nyaman untuk ditempati, mendukung aktifitas ekonomi serta mampu menginspirasi setiap orang yang datang merupakan impian dari banyak kota di dunia. Sebelum menuju titik tersebut, tentunya kota tersebut harus terbebas dari segala macam persoalan seperti banjir, titik kemacetan, kualitas udara hingga ke persoalan batas-batas wilayah administrative yang memang merupakan persoalan yang berkaitan erat dengan penataan dan pemanfaatan ruang kota. Untuk itu diperlukan penguatan komitmen Pemerintah Kota Jambi dalam peningkatan kualitas perencanaan tata ruang melalui regulasi, control pemanfaatan ruang serta pengawasan terhadap pelanggaran-pelanggaran tata ruang yang melibatkan setiap lapisan aparatur Pemerintahan.

13. Rendahnya rasio RTH publik

Tabel 2.44.
Rasio Ruang Terbuka Hijau di Kota Jambi Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Luas Kota Jambi	17.533	17.533	17.533	17.533	17.533	17.533	17.533
Luas RTH (Ha)	1.175,40	1.193,72	1.212,05	1.272,14	1.290,47	1.609,53	1.844,47
Ratio RTH (%)	6.70	6.81	6.91	7.26	7.36	9.18	10.52

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, 2018.

Tingginya harga dan terbatasnya lahan merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Jambi dalam mencapai target perluasan, pengembangan dan perlindungan terhadap Ruang Terbuka Hijau (RTH). Sebagaimana tergambar pada tabel di atas rasio RTH di Kota Jambi pada Tahun 2018 baru mencapai 10,52% atau seluas 1.844,47 ha. Hal ini tentunya masih jauh dari arahan yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Penataan Ruang, yaitu RTH publik 20% dan Privat 10% dari luasan wilayah.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Jambi adalah melakukan pendataan RTH publik dan privat yang terdigitasi dengan baik untuk mendapatkan data yang lebih valid dan terkini. Perluasan RTH publik direncanakan dengan terus melaksanakan “*land banking*” setiap Tahunnya, untuk kepentingan prasarana dan sarana umum. Pemanfaatan lahan pekarangan, ruang terbuka pada bangunan dan lingkungan, serta lahan-lahan publik yang masih tersedia untuk meningkatkan tutupan lahan, dengan penanaman vegetasi tanaman dan pohon yang berdaun lebat dan berimplikasi pada volume tutupan lahan.

Indeks kinerja tutupan lahan sangat mempengaruhi indeks kualitas udara dan air pada kinerja lingkungan hidup Kota Jambi. Oleh karenanya, mewujudkan rasio ruang terbuka hijau dan indeks kinerja tutupan lahan akan menjadi tantangan dan permasalahan pembangunan perkotaan Kota Jambi yang berkelanjutan.

14. Belum optimalnya manajemen pengelolaan sampah

Penanganan sampah selama 5 Tahun terakhir mengalami peningkatan dengan asumsi volume timbulan sampah sebesar 2,5 lt/orang/hari. Volume sampah yang masuk ke TPA Talang Gulo sama dengan volume sampah terangkut, rata-rata pada Tahun 2017 sebesar 163 Ton/hari.

Tabel 2.67.
Persentase Penanganan Sampah Kota Jambi

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Sampah yang ditangani (ton)	332.150	370.475	378.670	406.397	410.260
2.	Volume Produksi Sampah (ton)	545.857	571.444	578.475	555.627	560.037
3.	Persentase Penanganan Sampah (%)	60,85	64,83	65,46	73,14	73,25
4.	Jumlah TPS (unit)	335	366	402	443	455
5.	Jumlah Daya Tampung TPS (m ³ /hari)	n/a	836	906	994	1.018
6.	Jumlah Penduduk (jiwa)	556.332	568.062	576.067	583.487	591.134
7.	Rasio Daya Tampung TPS terhadap Jumlah Penduduk	n/a	679,50	635,83	587,01	580,68
8.	Persentase Pengurangan Sampah (%)	2,49	2,86	3,26	3,81	4,69
9.	Jumlah Bank Sampah/TPS 3R (unit)	25/3	25/3	25/5	26/6	26/7
10.	Cakupan Pelayanan Pengelolaan Sampah (%)	63,34	67,69	68,72	76,95	77,94

Sumber: JAKSTRADA Pengelolaan Sampah Kota Jambi, 2018.

Di dalam manajemen pengelolaan persampahan, terdapat pola perlakuan terhadap sampah yaitu dari pewadahan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan mobilisasi, pengolahan dan pemrosesan akhir. Saat ini, cakupan penanganan persampahan di Kota Jambi telah mencapai penanganan 73,25% dari keseluruhan cakupan pelayanan. Cakupan pelayanan pengelolaan persampahan tidak saja ditekankan pada penanganan, akan tetapi juga pada pengurangan sampah di titik sumber atau rumah tangga. Hingga akhir tahun 2018, perlakuan pengurangan sampah di titik sumber atau rumah tangga baru mencapai 4,69%, dengan mendorong berfungsi secara aktifnya 4(empat) TPS 3R dan 25 (duapuluh lima) Bank Sampah yang tersebar di Kota Jambi, menjadi 7(tujuh) TPS 3R dan 26 (duapuluh enam) Bank Sampah.

Pemerintah Kota Jambi telah merumuskan Kebijakan Strategis Daerah Pengelolaan Persampahan, dengan meningkatkan target pengurangan sampah di tingkat rumah tangga hingga 30% pada akhir tahun 2030, serta mengoptimalkan penanganan sampah yang terpilah, modern dan berkelanjutan. Hal ini adalah pekerjaan rumah yang besar dalam mengoptimalkan pelayanan dan utilitas perkotaan di bidang persampahan. Tekanan pembangunan yang berdampak pada peningkatan luasan kawasan terbangun dan timbulan sampah, membutuhkan pengelolaan persampahan yang efektif.

Tidak saja pada pengelolaan terhadap limbah atau sampah yang bersumber dari rumah tangga, Pemerintah Kota Jambi juga mempunyai potensi permasalahan yang timbul dari timbulan limbah B3 di Kota Jambi yang terus meningkat, seiring pertumbuhan aktifitas ekonomi dan industri.

15. Menurunnya kualitas Lingkungan Hidup

Kecenderungan penurunan kualitas lingkungan hidup di Kota Jambi ditunjukkan oleh Indeks Kinerja Lingkungan Hidup yang terdiri dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Cukup signifikan penurunan IKLH Kota Jambi rata-rata selama 5 Tahun terakhir yaitu 0,64 poin tiap tahunnya.

Penurunan kualitas air dan udara di Kota Jambi menunjukkan perkembangan dan pertumbuhan kota, serta tekanannya terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kota Jambi. Tekanan terhadap kualitas lingkungan hidup oleh pembangunan perkotaan dapat diantisipasi dengan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, sesuai kaidah tata ruang, serta komitmen penuh dari seluruh stakeholder untuk tetap melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kota Jambi dalam setiap aktifitas sosial, budaya dan ekonominya.

Pemerintah Kota Jambi telah berupaya merumuskan kebijakan dan implementasinya untuk tetap menjaga perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Jambi. Peningkatan IKTL melalui penanaman vegetasi hijau pada median jalan, pedestrian, fasilitas publik yang telah

diserahkan kepada pemerintah, dan bahkan pada ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah Kota Jambi. Akan tetapi, tekanan terhadap kualitas air dan udara tetap mendorong IKLH Kota Jambi mengalami penurunan hingga pada titik 50,31 poin, jauh di bawah batas ambang bawah (threshold index) skala nasional 66,46 poin, dalam kategori cukup.

Tabel 2.68.
Indikator Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan Kota Jambi
Tahun 2013 – 2017

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Indeks Kualitas Air	46.39	46.32	46.05	45.79	39.41
2.	Indeks Kualitas Udara	99.08	96.48	95.33	93.05	91.27
3.	Indeks Tutupan Lahan	n/a	25.14	26.84	27.77	27.77
	Indeks Kinerja Lingkungan Hidup	n/a	52,89	53,15	52,76	50,31

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, 2018

16. Lemahnya tata niaga perdagangan

Permasalahan lemahnya tata niaga perdagangan disebabkan antara lain kurangnya koordinasi antar Instansi Pemerintah terkait distribusi perdagangan, pembangunan atau revitalisasi Sarana dan prasarana perdagangan sebaiknya berdasarkan SNI, kondisi saat ini Kota Jambi memiliki pasar daerah sebanyak 21 unit yang terdiri dari 7 unit pasar tradisional/rakyat dan 14 unit pasar tematik, idealnya untuk Kecamatan terdapat 1 pasar rakyat, juga belum meratanya perlindungan terhadap konsumen dan pelaku usaha dalam hal tera/tera ulang.

17. Belum optimalnya pengendalian ketersediaan dan distribusi pangan

Kecukupan ketersediaan pangan strategis di Kota Jambi sudah cukup memadai secara kemandirian, situasi kemandirian pangan di Kota Jambi Tahun 2017 adalah: dari segi ketersediaan Energi Kota Jambi terpenuhi sebesar 2.459 kkal/kap/hari (103,9% AKE) dari angka kecukupan energi yang seharusnya dipenuhi sebesar 2.400 kkal/kap/hari; dari segi ketersediaan Protein Kota Jambi terpenuhi sebesar 63,57 gr/kap/hari (109% AKP) dari angka kecukupan protein yang seharusnya dipenuhi sebesar 63 gr/kap/hari; dari segi ketersediaan Lemak Kota Jambi terpenuhi sebesar 59,12 gr/kap/hari (124% AKL) dari angka kecukupan

lemak yang seharusnya dipenuhi sebesar 47,34 gr/kap/hari, dan skor PPH 89,70.

Kendati demikian, perubahan masa tanam dan panen yang disebabkan oleh perubahan iklim dan cuaca, saat ini sangat berdampak pada kelangkaan bahan pangan pada bulan-bulan tertentu. Demikian pula perlunya kesiapan Pemerintah Kota Jambi untuk mengantisipasi kelangkaan bahan pangan ini agar tidak terjadi lonjakan harga pangan (Volatile Food), yang akan berdampak pada inflasi bahan pangan.

Berkaitan dengan kualitas/keamanan pangan segar, pemerintah Kota Jambi secara rutin melakukan pengecekan sampel bahan pangan segar dan kemasan agar dapat dikonsumsi secara aman oleh masyarakat, namun belum dapat menjangkau seluruh kalangan masyarakat.

Tabel 2.63.
Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Kota Jambi Tahun 2017

Kelompok Pangan	Berat Pangan Gram /Kapita /Hari	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
		Kkal /Kapita	%	%AKE	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
Padi-padian	271,5	1.140,8	53,6	53,1	0,5	26,8	26,5	25,0	25,0
Umbi-umbian	42,2	40,2	1,9	1,9	0,5	0,9	0,9	2,5	0,9
Pangan Hewani	135,0	266,4	12,5	12,4	2,0	25,0	24,8	24,0	24,0
Minyak dan Lemak	38,2	344,4	16,2	16,0	0,5	8,1	8,0	5,0	5,0
Buah/Biji Berminyak	6,1	33,0	1,6	1,5	0,5	0,8	0,8	1,0	0,8
Kacang-kacangan	32,3	79,9	3,8	3,7	2,0	7,5	7,4	10,0	7,4
Gula	27,9	101,5	4,8	4,7	0,5	2,4	2,4	2,5	2,4
Sayur dan Buah	271,0	99,4	4,7	4,6	5,0	23,3	23,1	30,0	23,1
Lain-lain	48,8	23,4	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sumber: Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan Kota Jambi, 2018

Berdasarkan hasil analisis konsumsi Tahun 2017, PPH Kota Jambi sudah mendekati nilai optimal, yaitu telah mencapai 89,70 akan tetapi masih berada di bawah nilai skor PPH ideal minimal 90, hal ini diakibatkan salah satunya dengan kurangnya keberagaman konsumsi pangan oleh masyarakat Kota Jambi terutama kurangnya konsumsi Buah/Biji berminyak dengan skor 0,8 dari skor ideal 1; Umbi-umbian dengan skor 0,9 dari skor ideal 2,5; Kacang-kacangan dengan skor 7,4 dari skor ideal 10; sayuran dan buah dengan skor PPHnya hanya 23,1 dari skor idealnya.

18. Rendahnya kemandirian daerah terhadap dana perimbangan

Komponen pendapatan daerah terdiri dari 3 (tiga) komponen besar, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. APBD Kota Jambi beberapa tahun terakhir selalu berada di atas angka 1,6 Triliun. Dari total APBD Kota Jambi, sebagian besar masih didominasi oleh Dana Perimbangan, baik itu Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Jika dilihat dari proporsi secara persentase, Dana Perimbangan menempati persentase tertinggi diikuti oleh PAD dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Kemandirian daerah dapat dilihat dari seberapa besar daerah tersebut bisa membiayai APBD dari PAD. Beberapa tahun terakhir, rata-rata PAD Kota Jambi berkisar diantara angka 18%-26% dari total APBD Kota Jambi. Namun demikian, Pemerintah Kota Jambi selalu berkomitmen untuk meningkatkan PAD dari tahun ke tahun dengan mengupayakan intensifikasi maupun ekstensifikasi dan juga bekerjasama dengan berbagai pihak dan memanfaatkan teknologi, hal ini dapat dilihat dari target dan realiasi PAD yang selalu meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

19. Rendahnya daya saing tenaga kerja

Meningkatnya jumlah angkatan kerja yang tidak tertampung dalam lapangan kerja menyebabkan tingginya tingkat pengangguran. Hal ini secara umum disebabkan oleh beberapa hal seperti terjadinya *mismatch* dalam pasar kerja dan rendahnya skill tenaga kerja, kondisi ini dapat menjadi beban bagi pemerintah Kota Jambi.

Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran diukur dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), di mana TPT merupakan persentase jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Jambi pada tahun 2017 sebesar 5,55 persen.

Oleh karena itu perlu dikembangkan jenis pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja yang sesuai kebutuhan tenaga kerja, pelaksanaan job fair dan peningkatan perlindungan terhadap tenaga kerja.

20. Tingginya penduduk yang terpapar penyakit menular dan tidak menular

Secara umum derajat kesehatan masyarakat Kota Jambi telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Namun demikian masih ditemukan beberapa permasalahan yang perlu penyelesaian dan mendapat perhatian semua pemangku kepentingan antara lain: masih tingginya angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular, masih adanya angka kematian ibu dan anak, keterbatasan mutu tenaga kesehatan, serta penyebarannya yang kurang merata, pelayanan pada rumah sakit dan puskesmas juga masih perlu ditingkatkan kualitasnya, belum optimalnya pelaksanaan sistem pelayanan kesehatan, masih ditemukannya balita gizi kurang serta baduta stanting. Penyelenggaraan kesehatan di Kota Jambi dikembangkan dengan mendorong promosi kesehatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kesehatan lingkungan dan perorangan, optimalisasi sistem jaminan pelayanan kesehatan bagi warga Kota Jambi khususnya keluarga kurang mampu, penerapan ISO pada fasilitas kesehatan, penyempurnaan sistem rujukan, optimalisasi kegawat daruratan, peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana kesehatan.

21. Belum optimalnya daya saing pendidikan

Pendidikan merupakan prasyarat utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah di tingkat global. Oleh karena itu penyelenggaraan pendidikan menjadi perhatian semua pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat. Permasalahan pendidikan di Kota Jambi adalah belum optimalnya akses dan mutu pendidikan yang ditandai dengan masih rendahnya daya tampung siswa terutama ditingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri, masih banyaknya prasarana dan sarana pendidikan dasar yang perlu diperbaiki, belum meratanya penyebaran guru, masih

rendahnya kualitas dan kuantitas guru dan masih rendahnya kualitas siswa.

Penyelenggaraan pendidikan di Kota Jambi dikembangkan untuk mendorong peningkatan daya saing global, dengan meningkatkan akses dan mutu pendidikan melalui penyediaan prasarana dan sarana pendidikan yang berstandar nasional, mengembangkan metode dan sistem mengajar yang efektif dan berdampak pada kualitas dan pembentukan karakter siswa.

22. Belum optimalnya peran serta perempuan di dalam pembangunan.

Perempuan adalah sumber daya manusia yang jumlahnya besar dan memiliki potensi yang tinggi dalam kaitannya sebagai subyek dan obyek pembangunan. Sebagai bagian terbesar dari sumber daya manusia, perempuan memiliki peran strategis dalam kehidupan. Peran penting tersebut tercermin dalam segala aspek kehidupan baik dalam keluarga, masyarakat bahwa negara. Dalam berbagai kajian telah banyak dipaparkan bahwa perempuan adalah agent of development sebagai aset bangsa yang potensial, dan perannya sebagai kontributor sangat dibutuhkan dalam pembangunan bangsa. Meskipun saat ini upaya untuk meningkatkan peran dan kualitas perempuan dalam pembangunan telah banyak dikembangkan, akan tetapi kesenjangan gender masih terjadi diberbagai lini bagi perempuan dibandingkan dengan laki-laki.

Persoalan paling penting yang menghalangi upaya peningkatan kualitas hidup perempuan adalah pendekatan pembangunan yang mengabaikan isu tentang kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan gender, atau kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, mengacu pada kesetaraan hak, tanggung jawab, kesempatan, perlakuan dan penilaian atas perempuan dan laki-laki dalam kehidupan maupun di tempat kerja. Berdasarkan data survey angkatan kerja nasional (sakernas) tahun 2013-2016 jumlah angkatan kerja perempuan sebesar 46,69% atau 89.061 jiwa dari jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan sebanyak 213.694 jiwa. Jika ditinjau dari jumlah angkatan kerja perempuan menunjukkan belum optimalnya peran serta perempuan dalam pembangunan dikota jambi

sehingga perlu adanya langkah-langkah konkrit untuk meningkatkan peran serta perempuan dalam mendukung pembangunan.

23. Tingginya kasus kejahatan anak

Masa depan anak adalah harapan dan impian yang harus diwujudkan yaitu mewujudkan impian anak Indonesia khususnya anak-anak di Kota Jambi agar menjadi anak yang cerdas, berahlak mulia, aktif berpartisipasi serta memiliki jiwa nasionalisme dan semangat patriotisme yang kuat. Anak juga merupakan karunia Tuhan yang Maha Kuasa, ini merupakan potensi kekayaan dan kesejahteraan bangsa di masa depan, anak adalah investasi dan anak juga generasi penerus bangsa yang perlu dilindungi agar hidup, tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang layak dan penerus masa depan. Akan tetapi tindak kekerasan atau kasus kejahatan terhadap anak setiap tahunnya meningkat, baik itu dilakukan di lingkungan keluarga maupun di luar dari keluarga. Dimana berdasarkan data yang masuk dinas pemberdayaan masyarakat perempuan dan perlindungan anak dari tahun 2015 hingga 2017 terdapat 124 kasus kekerasan terhadap anak-anak. Dari kasus tersebut tidak hanya kekerasan terhadap fisik maupun psikis tapi juga kekerasan seksual dan penelantaran. Faktor dari pemicu dari kekerasan anak diantaranya faktor ekonomi, teknologi informasi dan pergaulan lingkungan yang baik. Melihat dari kasus tersebut perlu dilakukan langkah-langkah percepatan dalam upaya sosialisasi yang efektif guna dapat menurunkan kasus kejahatan terhadap anak-anak.

24. Belum optimalnya peran serta kepemudaan dalam pembangunan

25. Tingginya Angka Penyandang PMKS

Sesuai dengan amanat UU nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial diantaranya melalui jaminan sosial dan perlindungan sosial. Jaminan sosial bertujuan menjamin PMKS yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. Di dalam PMKS sendiri terdapat 26 indikator yang harus ditangani, namun dapat disesuaikan dengan kondisi daerah tersebut. Untuk Kota Jambi

sendiri terdapat 23 indikator dari 26 indikator yang ada, dilihat secara trend selama 3 (tiga) tahun PMKS kota jambi menunjukkan peningkatan diantaranya: anak terlantar meningkat sebesar 25,4%, anak nakal yang berhadapan dengan hukum meningkat sebesar 200%, tuna susila juga meningkat dari tahun 2015 hingga 2017 sebesar 131,4%. Jika ditinjau dari aspek penyelenggaraan pemerintah bahwasanya program dan kegiatan terutama pada PMKS belum optimal sehingga ini menjadi tugas dari pemerintah Kota Jambi untuk dapat menyusun langkah-langkah dan strategi dalam upaya menurunkan anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

NO	JENIS PMKS	TAHUN		
		2015	2016	2017
1	Anak balita Terlantar	-	-	-
2	Anak Terlantar	165	180	207
3	Anak Nakal yang Berhadapan dengan Hukum	17	25	51
4	Anak Jalanan	52	18	51
5	Anak dengan Kedisabilitas	506	506	506
6	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah	-	39	46
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	-	-	-
8	Lanjut usia terlantar	8.001	8.246	8.462
9	Penyandang disabilitas	1.558	1.841	1.533
10	Tuna susila	270	110	625
11	Gelandangan	196	141	161
12	Pengemis	28	28	79
13	Pemulung	-	-	55
14	Bekas warga binaan lembaga permasyarakatan	-	-	54
15	Orang dengan HIV/AIDS (OOHA)	395	395	395
16	Korban penyalahgunaan napza	110	450	395
17	Korban trafficking	-	1	-
18	Korban tindak kekerasan	-	20	21
19	Korban bencana alam	1.209	672	1.487
20	Korban bencana sosial	116	120	258
21	Perempuan rawan sosial ekonomi	102	150	45
22	Fakir miskin	31.707	31.707	26.751
23	Keluarga bermasalah sosial psikologis	6.423	8.906	8.564
	Jumlah	50.555	53.555	49.757

Sementara itu perlindungan sosial dimaksud untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan atau masyarakat agar keberlangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai kebutuhan dasar minimal. Tahun 2017 ditetapkan

sebanyak 31.707 orang PMKS memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan dasar, untuk mencapai target tersebut dilaksanakan kegiatan peningkatan dan pembinaan pelayanan PMKS yang didalamnya terdiri dari rangkaian sub kegiatan pelayanan pemberdayaan lanjut usia. Dari target yang ditetapkan baru dapat direalisasikan sebesar 26.751 orang PMKS (84,4%). Disamping itu selain memberikan bantuan kebutuhan dasar Pemerintah Kota Jambi dalam hal ini dinas sosial juga memberikan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti pelatihan kuliner dan bantuan bagi kelompok usaha bersama (KUBE), dll, sesuai dengan ketrampilan masing-masing. Berdasarkan data jumlah populasi penanganan PMKS meningkat 4.340 atau 69,8% dari tahun 2013 sebesar 6.229 orang menjadi 10.569 orang pada tahun 2017, sementara jumlah PMKS yang ditangani hanya sebesar 70% dari tahun 2013 hingga 2017. Kenaikan terjadi pada tahun 2017 yang mencapai 80%. Salah satu tidak tercapainya target penanganan ialah keterbatasan anggaran dan tinggi partisipasi masyarakat PMKS yang ingin mendapatkan kegiatan tersebut.

NO	URUSAN	AKAR MASALAH	MASALAH POKOK	OPD
1.	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya kualitas daya saing siswa; 2. Rendahnya daya tampung sekolah; 3. Rendahnya kualitas lulusan yang dapat diterima di SMA favorit; 4. Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan; 5. Rendahnya kompetensi tenaga pendidik; 6. Tidak optimalnya penerapan Kurikulum K13; 7. Distribusi tenaga pendidik tidak merata. 	Belum optimalnya daya saing pendidikan	DISDIK
2.	Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya kualitas kesehatan masyarakat; 2. Tingginya penduduk yang terpapar penyakit menular; 	Tingginya penduduk yang terpapar penyakit menular dan tidak menular	DINKES

		<p>3. Rendahnya supras pelayanan kesehatan dasar;</p> <p>4. Rendahnya kualitas tenaga kesehatan;</p> <p>5. Masih kurangnya Alat kesehatan;</p> <p>6. Tingginya Masyarakat dengan pola hidup tidak sehat.</p>		
<p>3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p>		<p>1. Banyaknya titik genangan dan banjir di Kota Jambi;</p> <p>2. Tingginya alih fungsi retensi alami;</p> <p>3. Belum terintegrasinya sistem jaringan drainase;</p> <p>4. Rendahnya pengawasan dan perlindungan sumber daya air;</p> <p>5. Masih tingginya sedimentasi pada saluran;</p>	<p>1. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas pelayanan air bersih dan air limbah.</p> <p>2. Rendahnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Infrastruktur Jalan</p> <p>3. Banyaknya titik genangan/banjir di Kota Jambi</p>	<p style="text-align: center;">DPUPR</p>

		<p>6. Banyaknya timbulan sampah yang menyumbat drainase;</p> <p>7. Banyaknya timbunan sampah di pinggir jalan dan lingkungan</p> <p>8. Pengolahan sampah yang tidak terpadu</p> <p>9. Belum meratanya pembangunan saluran drainase;</p> <p>10. Ketidaksesuaian dimensi drainase dengan debit air;</p> <p>11. Belum adanya regulasi yang mengatur secara mendetail (RDTR);</p> <p>12. Lemahnya pengawasan pembangunan bangunan;</p> <p>13. Masih banyaknya bangunan liar dan tidak sesuai spesifikasi;</p> <p>14. Terjadinya degradasi kawasan strategis;</p>	<p>4. Belum terwujudnya harmonisasi ruang kota</p> <p>5. Rendahnya rasio RTH publik</p> <p>6. Belum optimalnya manajemen pengelolaan sampah</p> <p>7. Masih banyaknya bangunan liar dan tidak sesuai spesifikasi</p>	
--	--	--	--	--

		<p>15. Kurangnya penataan dan perlindungan bangunan dan kawasan cagar budaya;</p> <p>16. Kurang representatifnya estetika kota;</p> <p>17. Banyaknya bangunan yang tidak memiliki Sertifikat Layak Fungsi (SLF);</p> <p>18. masih rendahnya kualitas dan kuantitas pelayanan air bersih;</p> <p>19. Rendahnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Infrastruktur dan Keselamatan Jalan.</p>		
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya kualitas lingkungan permukiman; 2. Tingginya luasan kawasan kumuh; 3. Tingginya backlog perumahan; 4. Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan permukiman; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya kualitas lingkungan permukiman 2. Masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni 	DPRKP

		<p>5. Rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap rumah layak huni;</p> <p>6. Aksesibilitas Permukiman;</p> <p>7. Banyaknya masyarakat yang tidak terlayani Fasum dan Fasos;</p> <p>8. Masih banyak Fasum dan Fasos perumahan yang belum diserahkan;</p> <p>9. Tingginya biaya pemakaman;</p> <p>10. Masih banyaknya wilayah yang belum terlayani LPIU.</p>		
5.	<p>Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</p>	<p>1. Rendahnya kenyamanan serta perlindungan masyarakat;</p> <p>2. Lemahnya penegakan PERDA;</p> <p>3. Rendahnya respon time penanganan bencana;</p>	<p>1. Lemahnya penegakan PERDA</p> <p>2. Rendahnya respon time penanganan bencana</p> <p>3. Masih banyaknya kasus pelanggaran PERDA</p>	<p>SATPOL PP, DISDAMKAR dan KESBANGPOL</p>

		<p>4. Kurangnya Jumlah Pejabat PPNS;</p> <p>5. Masih minimnya sarana dan prasarana Satpol PP</p> <p>6. Kurangnya kesadaran Masyarakat dalam Mematuhi Perda;</p> <p>7. Kurangnya pemahaman masyarakat akan bahaya kebakaran;</p> <p>8. Minimnya sarana dan prasarana kebakaran di kecamatan.</p>	<p>yang tidak memiliki ketetapan hukum (INKRACHT)</p> <p>4. Tingginya potensi konflik</p>	
6.	Sosial	<p>1. Tingginya Angka Penyandang PMKS;</p> <p>2. Rendahnya keterampilan penduduk miskin;</p> <p>3. Masih ditemuinya pengemis di jalan-jalan protokol;</p> <p>4. Minimnya fasilitas bagi kaum lansia;</p>	<p>Tingginya Angka Penyandang PMKS</p>	DINSOS

		<p>5. Tingginya penyalahgunaan Napza;</p> <p>6. Tingginya penduduk dibawah garis kemiskinan;</p> <p>7. Tingginya kasus human trafficking.</p>		
7.	Tenaga Kerja	<p>1. Rendahnya daya saing tenaga kerja;</p> <p>2. Rendahnya kualitas tenaga kerja;</p> <p>3. Tingginya angka pengangguran;</p> <p>4. Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja;</p> <p>5. Belum optimalnya penyelesaian Konflik terhadap ketenagakerjaan;</p> <p>6. Kurangnya tenaga pengawasan ketenagakerjaan;</p> <p>7. Rendahnya penyerapan tenaga kerja</p>	Rendahnya daya saing tenaga kerja	DTKK DAN UMKM

		lokal; 1. Belum optimalnya peran serta perempuan di dalam pembangunan; 2. Tingginya angka ketimpangan gender; 3. Tingginya kasus kejahatan anak; 4. Rendahnya rasio pada tenaga kerja perempuan pada lapangan kerja; 5. Tingginya jumlah kejahatan perempuan; 6. Tingginya angka perceraian; 7. Tingginya kekerasan dalam rumah tangga; 8. Tingginya jumlah kejahatan anak; 9. Tingginya kasus pelecehan seksual terhadap anak.	1. Belum optimalnya peran serta perempuan di dalam pembangunan 2. Tingginya kasus kejahatan anak	
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			DPMPPA

9.	Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya ketahanan dan keamanan pangan; 2. Minimnya ketahanan pangan; 3. Rendahnya keamanan pangan; 4. Rendahnya diversifikasi pangan; 5. Banyaknya bahan pangan dalam kategori berbahaya; 6. Tidak adanya data bahan pangan layak dan aman dikonsumsi; 7. Rendahnya sarana dan prasarana keamanan pangan. 	<p>Belum optimal pola pangan harapan di Kota Jambi</p> <p style="text-align: center;">DPKP</p>	
10.	Pertanahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Banyaknya aset pemda yang belum memiliki sertifikat 	<p>Banyaknya aset pemda yang belum memiliki sertifikat</p>	<p style="text-align: center;">Setda Bagian Pemerintahan</p>

11.	Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya kualitas Lingkungan Hidup; 2. Pembangunan tidak berwawasan lingkungan; 3. Tingginya pencemaran air; 4. Tingginya angka pencemaran limbah B3; 5. Belum optimalnya manajemen pengelolaan sampah; 6. Belum optimalnya dokumen perencanaan lingkungan hidup; 7. Kebijakan strategis dan kebijakan spasial tidak disertai dukungan KLHS; 8. Tingginya tingkat polusi (tanah, air dan udara); 9. Banyaknya limbah rumah tangga dan pelaku usaha dibuang ke saluran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya kualitas Lingkungan Hidup 2. Belum optimalnya manajemen pengelolaan sampah 	DLH
-----	-------------------------	--	---	------------

		<p>drainase;</p> <p>10. Rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat serta pelaku usaha terhadap pengelolaan limbah;</p> <p>11. Belum optimalnya pemberian penghargaan lingkungan hidup kepada masyarakat;</p> <p>12. Masih kurangnya SDM yang memiliki sertifikasi lingkungan hidup;</p> <p>13. Kurangnya sapras untuk pengurangan dan pengelolaan sampah;</p> <p>14. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah;</p> <p>15. Rendahnya pengelolaan sampah ditingkat sumber.</p>		
12.	Administrasi Kependudukan	1. Tingginya jumlah penduduk diluar Kota	Belum optimalnya	DISDUKCAPIL

	dan Pencatatan Sipil	Jambi yang tidak tercatat; 2. Belum adanya informasi kependudukan secara terbuka.	pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik	
13.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Belum optimalnya Pemberdayaan Masyarakat dalam perencanaan Pembangunan; 2. Belum optimalnya pembinaan kelembagaan swadaya masyarakat; 3. Belum optimalnya pengumpulan dan analisis data & informasi tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kelurahan.	Belum optimalnya peran serta kepemudaan dalam pembangunan	DPMPPA DAN KECAMATAN
14.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. Tingginya laju pertumbuhan penduduk; 2. Tingginya TFR.	Tingginya laju pertumbuhan penduduk	DPPKB

15.	Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> Masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas; Banyaknya kendaraan parkir dibadan jalan; Kurangnya lahan parkir; Belum adanya angkutan moda massal yang representatif; Rendahnya kesadaran pengguna jalan dalam berkendara; Masih kurangnya sarana dan prasarana keselamatan jalan. 	<ol style="list-style-type: none"> Masih tingginya angka pelanggaran lalu lintas Minimnya kecepatan tempuh rata - rata (pada saat tertentu) 	DISHUB
16.	Komunikasi dan Informatika	<ol style="list-style-type: none"> Lemahnya implementasi <i>smart city</i> dan <i>e-government</i>; Belum optimalnya pembentukan dan pengembangan jaringan kerjasama komunikasi dan informasi untuk 	Belum optimalnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	DISKOMINFO

		<p>mendukung penyampaian informasi kepada masyarakat;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data elektronik; 4. Minimnya Sarana dan Prasarana TIK ; 5. Rendahnya jaringan internet di kantor pemerintahan; 6. Rendahnya integrasi aplikasi pemerintahan; 7. Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM; 8. Belum adanya peraturan pendukung <i>smart city</i>. 		
17.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya manajemen koperasi; 2. Rendahnya pengembangan koperasi; 3. Rendahnya akses Koperasi terhadap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya manajemen koperasi 2. Rendahnya daya saing 	DTKK DAN UMKM, DPP

		<p>sumber-sumber permodalan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Rendahnya kualitas SDM Koperasi; 5. Rendahnya minat terhadap produk lokal; 6. Rendahnya akses UMKM terhadap sumber-sumber permodalan; 7. Rendahnya ketersediaan produk lokal di pasaran; 8. Rendahnya kualitas SDM Koperasi dan UMKM; 9. Rendahnya Kualitas Produk UMKM; 10. Minimnya UMKM yang berdaya saing. 	<p>produk lokal</p>	
18.	Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya iklim investasi; 2. Rendahnya minat investor untuk menanamkan modal; 3. Belum optimalnya pelaksanaan promosi 	<p>Rendahnya kemandirian daerah terhadap dana perimbangan</p>	<p>DPMPSTSP</p>

19.	Kepemudaan dan Olahraga	<p>dan kerjasama penanaman modal;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Rendahnya kepastian hukum dalam berinvestasi; 5. Belum optimalnya pengawasan terhadap penanaman modal; 6. Belum optimalnya kerjasama pemerintah dan badan usaha; 7. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan perizinan; 8. Belum tersedianya data dan sistem informasi; <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya peran serta kepemudaan dalam pembangunan; 2. Rendahnya partisipasi pemuda dalam pembangunan; 	Belum optimalnya peran serta kepemudaan dalam pembangunan	
			DISPORA	

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Minimnya prestasi olahraga dikancah nasional; 4. rendahnya kepedulian pemuda dalam pembangunan; 5. Masih terbatasnya sarana dan prasarana kepemudaan; 6. Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan kepemudaan; 7. Masih rendahnya minat generasi muda ikut dalam kepramukaan. 		
20.	Statistik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data dalam pembangunan; 2. Rendahnya ketersediaan dan validitas data; 3. Kurangnya ketersediaan data pendukung; 4. Belum tersedianya basis data yang valid 	<p>Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data dalam pembangunan</p>	DISKOMINFO

		dan update.		
21.	Persandian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lemahnya pengamanan data dan informasi daerah; 2. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus bidang persandian; 3. Masih banyaknya aplikasi informasi yang belum tersandikan. 	Lemahnya pengamanan data dan informasi daerah	DISKOMINFO
22.	Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya degradasi terhadap nilai - nilai seni dan budaya; 2. Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana bidang kebudayaan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan kebudayaan; 3. Belum optimalnya pelestarian terhadap seni dan budaya daerah; 	Tingginya degradasi terhadap nilai - nilai seni dan budaya	DPK (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan)

23.	Perpustakaan	<p>4. Belum optimalnya pelestarian terhadap sejarah daerah;</p> <p>5. Rendahnya pemahaman siswa terhadap kearifan lokal;</p> <p>6. Semakin tergerus kearifan lokal dan nilai-nilai sejarah;</p> <p>7. Minimnya Pengetahuan Masyarakat terhadap Sejarah Jambi;</p> <p>8. Rendahnya Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan;</p> <p>9. Rendahnya minat masyarakat terhadap museum daerah.</p> <p>1. Minimnya literasi masyarakat;</p> <p>2. Rendahnya minat baca masyarakat;</p> <p>3. Rendahnya budaya dan minat baca</p>	Belum optimalnya daya saing pendidikan	DKP (Dinas Kearsipan dan Perpustakaan)
-----	--------------	--	--	--

		(pendidikan karakter); 4. Pergeseran paradigma dan budaya baca kearah digital; 5. Terbatasnya sarana dan prasarana perpustakaan daerah.		
24.	Kearsipan	1. Belum optimalnya pengelolaan arsip pemerintah; 2. Belum optimalnya pembinaan kearsipan terhadap SDM kearsipan; 3. Belum memadainya sarana prasarana kearsipan pada setiap Perangkat Daerah ditunjukkan persentase perangkat daerah yang telah menerapkan manajemen arsip secara lebih efektif.	Belum optimalnya pengelolaan arsip	DKP (Dinas Kearsipan dan Perpustakaan)
25.	Kelautan dan Perikanan	1. Rendahnya daya saing produk perikanan;	Belum optimalnya pengendalian	DPKP

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Rendahnya produktivitas perikanan; 3. Rendahnya kualitas lingkungan perairan; 4. Menurunnya biodiversitas spesies perikanan; 5. Belum optimalnya penggunaan teknologi perikanan. 	<p>ketersediaan dan distribusi pangan</p>	
26.	Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya kunjungan wisata melalui dan ke Kota Jambi; 2. Rendahnya pembinaan, koordinasi dan sinergi antar stakeholders kepariwisataan; 3. Rendahnya aktivitas kepariwisataan; 4. Rendahnya kreativitas dalam pengelolaan kepariwisataan; 5. Belum adanya pemanfaatan HAKI dalam 	<p>Rendahnya pembinaan, koordinasi dan sinergi antar stakeholders kepariwisataan</p>	<p>DPK (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan)</p>

		<p>pengembangan ekonomi kreatif;</p> <p>6. Belum terpetanya potensi sumber daya pariwisata;</p> <p>7. Minimnya sarana dan prasarana kepariwisataan.</p>		
27.	Pertanian	<p>1. Belum optimalnya pengelolaan hewan peliharaan;</p> <p>2. Minimnya keamanan daging konsumsi secara Aman, Sehat, Unggul dan Halal;</p> <p>3. Minimnya sarana dan prasarana RPH sesuai SNI;</p> <p>4. Rendahnya pemeriksaan terhadap kesmavet.</p>	<p>Belum optimalnya pengendalian ketersediaan dan distribusi pangan</p>	
28.	Perdagangan	<p>1. Rendahnya kualitas pengelolaan sarana prasarana perdagangan;</p>	<p>1. Lemahnya tata niaga perdagangan</p>	DPP

29.	Perindustrian	<p>2. Tingginya Biaya Logistik;</p> <p>3. Tingginya fluktuasi harga;</p> <p>4. Tidak adanya data surplus dan defisit;</p> <p>5. Tingginya oligopoli komoditi;</p> <p>6. Belum optimalnya informasi pasokan, harga dan akses pangan daerah;</p> <p>7. Rendahnya transaksi di pasar induk dan rakyat;</p> <p>8. Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan terhadap pedagang;</p> <p>9. Minimnya pasar rakyat sesuai SNI;</p> <p>10. Tingginya tingkat kecurangan transaksi pasar.</p>	2. Masih lemahnya manajemen perpasaran	
		1. Belum optimalnya pembinaan pemerintah terhadap industri kecil dan	Rendahnya daya saing produk industri IKM	DPP

30.	Perencanaan Pembangunan	<p>menengah;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Rendahnya ketersediaan bahan baku di pasaran; 3. Rendahnya Kualitas Produk Industri yang dihasilkan; 4. Rendahnya daya saing produk industri IKM; 5. Rendahnya kemampuan IKM dalam manajemen, akses permodalan dan penggunaan IT. 		
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah belum optimal, disebabkan kurangnya kapasitas SDM perencana; 2. Banyaknya amanat pemerintah untuk menyusun dokumen perencanaan 	Belum optimalnya perumusan kebijakan dalam proses pembangunan	BAPPEDA

31.	Keuangan	<p>multisektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan; 4. Kurangnya ketersediaan data dan informasi untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas; 5. Belum maksimalnya fungsi monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan yang telah dilaksanakan; 6. Belum terintegrasinya sistem perencanaan dengan sistem keuangan. 	1. Rendahnya	BPKAD
-----	-----------------	--	--------------	--------------

		<p>daerah khususnya yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah terlihat dari persentase besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Belum optimalnya Tertib dan akuntabilitas keuangan daerah; 3. Rendahnya kemandirian daerah terhadap dana perimbangan; 4. Belum optimalnya kualitas manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis accrual; 5. Belum optimalnya pendapatan daerah; 6. Belum terintegrasinya sistem keuangan dengan perencanaan. 	<p>kemandirian daerah terhadap dana perimbangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset daerah 	
32.	Penelitian dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih minimnya produk penelitian yang 	Belum Optimalnya produk	BAPPEDA

	Pengembangan	<p>mendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan pembangunan;</p> <p>2. Masih minimnya produk penelitian yang menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan;</p> <p>3. Masih minimnya kegiatan pengembangan yang mendukung inovasi produk-produk kreatif dalam rangka pengembangan perekonomian.</p>	<p>penelitian didalam perumusan kebijakan</p>	
33.	Kepegawaian	<p>1. Belum optimalnya reformasi birokrasi;</p> <p>2. Masih belum optimalnya pembinaan disiplin dan terdapat ASN yang tidak disiplin di setiap unit kerja PD;</p> <p>3. Belum optimalnya kompetensi ASN yang sesuai dengan unit kerja Perangkat Daerah;</p>	<p>Belum optimalnya kompetensi ASN yang sesuai dengan unit kerja Perangkat Daerah</p>	<p>BKPSDMD</p>

		<p>4. Jumlah ASN yang pensiun lebih besar daripada pengangkatan ASN baru, terutama memenuhi kebutuhan tenaga teknis, tenaga pendidikan, tenaga kesehatan dan tenaga fungsional tertentu.</p>		
34	Sekretariat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya PD yang mampu menyusun laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) yang dihasilkan sesuai dengan peraturan yang berlaku; 2. Masih rendahnya produk hukum daerah yang tersosialisasikan; 3. Masih belum optimalnya capaian Nilai Survei Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan publik. 	<p>Belum Optimalnya Akuntabilitas Pemerintahan</p>	<p style="text-align: center;">SETDA</p>
35.	Sekretariat Dewan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas 	<p>Belum optimalnya</p>	<p style="text-align: center;">SEKRETARIAT DEWAN</p>

36.	Pengawasan	<p>SDM;</p> <p>2. Belum optimalnya kinerja pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD.</p>	Sinergitas penyelenggaraan pemerintah daerah	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya pengawasan dan pengendalian tata kelola pemerintahan; 2. Masih rendahnya capaian penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi; 3. Masih rendahnya level kapabilitas APSP. 			INSPEKTORAT

4.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dimasa datang. Oleh karena pentingnya proses perumusan permasalahan dan analisis isu strategis terhadap arah pembangunan yang akan ditentukan, maka untuk menjamin konsistensi dan sinergitas pembangunan antar wilayah dan antara pusat dan daerah maka perlu memperhatikan isu strategis kota, provinsi, nasional bahkan dunia internasional dalam proses perumusannya.

Fungsi keselarasan dan keterlibatan nasional dan provinsi ialah untuk menjelaskan permasalahan dan isu nasional dan provinsi yang ada di daerah, maupun sebaliknya untuk memberikan masukan permasalahan dan isu yang ada di daerah kepada provinsi. Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan yang dianggap paling prioritas untuk diselesaikan maupun isu dari dunia internasional, nasional maupun regional.

Berdasarkan permasalahan yang perlu penanganan prioritas dan memperhatikan isu strategis di provinsi, nasional serta internasional, maka isu strategis yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Jambi 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar

Kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar menjadi isu strategis yang dititikberatkan pada kondisi kualitas hidup masyarakat terutama pada isu-isu yang menyangkut urusan pendidikan, kesehatan, sosial, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta keterampilan dan keahlian tenaga kerja. Hal ini disebabkan masih belum optimalnya capaian Indek Pembangunan Manusia (IPM), baik indeks pendidikan maupun indeks

kesehatan, masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, belum optimalnya capaian angka harapan hidup, masih cukup tingginya angka kematian ibu dan bayi dan masih ditemukannya kasus balita gizi buruk, belum optimalnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular, belum optimalnya pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan, dan belum optimalnya pelayanan KB yang menyebabkan angka kelahiran total masih belum optimal, serta masih belum optimalnya penanganan PMKS terutama yang berada diluar panti.

2. Penanggulangan kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan masih menjadi isu strategis yang perlu segera ditangani dan mendapat perhatian khusus. Hal ini ditandai dengan masih tingginya angka kemiskinan dan angka pengangguran serta jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I, masih rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja

3. Infrastruktur publik, permukiman dan lingkungan hidup

Infrastruktur publik, permukiman dan lingkungan hidup merupakan isu strategis yang perlu mendapat perhatian. Hal ini ditandai dengan masih luasnya kawasan permukiman kumuh, masih banyaknya rumah tidak layak huni, belum optimalnya capaian rumah tangga bersanitasi seperti kurangnya ketersediaan layanan air minum perpipaan, pengelolaan limbah, dan penanganan sampah, terbatasnya ruang terbuka hijau dan ruang-ruang publik/taman-taman kota, masih terdapat genangan air saat musim hujan, belum optimalnya penataan trotoar dan jaringan drainase, menurunnya kapasitas badan air penerima limpasan air hujan, masih terbatasnya ketersediaan fasilitas pendukung lalu lintas, belum optimalnya manajemen rekayasa lalu lintas, dan belum optimalnya cakupan layanan angkutan umum

4. Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta daya beli masyarakat

Pertumbuhan dan pemerataan perekonomian serta daya beli masyarakat menjadi isu strategis yang perlu mendapat perhatian dan prioritas. Hal ini ditandai dengan masih kurang optimalnya kontribusi kategori unggulan

terhadap pertumbuhan PDRB, masih rendahnya PDRB per kapita dan daya beli masyarakat dan masih tingginya kontribusi bahan makanan terhadap laju inflasi, masih tingginya rasio gini atau kesenjangan pendapatan masyarakat, belum optimalnya nilai investasi daerah dan kunjungan wisatawan yang masuk, kurangnya jumlah pelaku wirausaha, kurangnya daya saing dan kemandirian para pelaku usaha mikro dan kecil, pemasaran dan akses terhadap permodalan, serta belum memadainya sarana dan prasarana perdagangan.

5. Tata nilai kehidupan masyarakat dan kebudayaan daerah

Tata nilai kehidupan masyarakat yang menyangkut kehidupan masyarakat dalam beragama, moral, akhlak, karakter dan kearifan lokal menjadi isu strategis yang menjadi prioritas, hal ini disebabkan dengan masih rendahnya implementasi perda tata nilai kehidupan masyarakat yang religius, menurunnya moral, akhlak dan karakter masyarakat, rentannya kehidupan masyarakat akan konflik, toleransi beragama, berbangsa dan bernegara, masih adanya pelanggaran dan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, masih terbatasnya sarana dan prasarana seni dan budaya, belum optimalnya pembinaan, apresiasi dan pelestarian terhadap seni dan budaya;

6. Pengarusutamaan gender dan ketahanan keluarga

Pengarusutamaan gender dan ketahanan keluarga menjadi isu strategis yang mendapat perhatian. Hal ini ditandai dengan belum optimalnya capaian Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan Gender, masih cukup tingginya kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak, belum optimal dan memadainya perlindungan dan ketersediaan sarana prasarana publik yang ramah perempuan dan anak, serta optimalisasi pengendalian penduduk

7. Tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta berbasis teknologi informasi

Tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel menjadi isu strategis, yang ditandai oleh masih kurangnya tingkat disiplin pegawai, belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah dan kinerja aparatur, belum optimalnya kualitas layanan publik dan akuntabilitas instansi

pemerintah, masih terdapat beberapa gedung kantor perangkat daerah yang belum representatif, masih belum optimalnya implementasi *e-government* pada seluruh perangkat daerah dan pelayanan publik.

BAB V

VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN

Mengacu kepada visi misi serta program prioritas yang dikampanyekan oleh Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2018 - 2023 dan mempertimbangkan kondisi dan potensi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, maka dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran untuk Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018 -2023 sebagai berikut:

5.1. Visi

Visi dapat diartikan sebagai rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus mampu menjawab permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Visi yang dirumuskan dalam rencana pembangunan jangka menengah untuk periode tahun 2018-2023 adalah :

“MENJADIKAN KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA BERBASIS MASYARAKAT BERAKHLAK DAN BERBUDAYA DENGAN MENGEDEPANKAN PELAYANAN PRIMA”

Visi tersebut mengandung makna:

- | | |
|----------------------------|---|
| Pusat Perdagangan dan Jasa | : berarti pemusatan/konsentrasi distribusi barang dan jasa skala pelayanan lokal dan regional yang didukung sarana prasarana yang memadai termasuk penggantian moda; |
| Berbasis Masyarakat | : <i>community based</i> merupakan suatu upaya pemberdayaan kapasitas masyarakat untuk dapat mengenali, menelaah dan mengambil inisiatif untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di lingkungannya serta bersedia untuk menerima perubahan; |
| Berakhlak | : berarti seluruh perilaku masyarakat Kota Jambi harus bersikap sopan santun, baik yang memberikan pelayanan maupun yang menerima pelayanan; |
| Berbudaya | : memiliki etika moral, nilai kebaikan, kebenaran, keadilan dan tanggung jawab agar bermakna bagi pembangunan; |
| Pelayanan Prima | : upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara tepat, cepat dan mudah. |

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik lingkungan eksternal maupun internal. Rumusan misi dapat memberikan gambaran dalam menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi melalui penetapan tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai.

Adapun misi dalam upaya pencapaian visi tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi;
2. Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat;
3. Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan;
4. Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan;
5. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan.

Penjelasan dari misi tersebut adalah sebagai berikut:

Misi ke-1 : Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi

Untuk menunjang tercapainya keberhasilan pembangunan di berbagai bidang, Pemerintah Kota Jambi menetapkan sasaran pokok penguatan tata kelola dan birokrasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat meningkat secara maksimal. Pelayanan yang berkualitas diberikan oleh pemerintah dengan memperhatikan beberapa aspek yaitu bersih, anti korupsi, akuntabel, efektif dan efisien yang berbasis teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat agar dapat mengakses seluruh layanan yang diberikan pemerintah secara cepat, tepat dan aman.

Misi ke-2 : Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat

Pemerintah Kota Jambi memiliki komitmen untuk menjaga stabilitas, keamanan, ketertiban serta kenyamanan bermasyarakat. Penegakan hukum yang dimaksud pada misi ke-2 memiliki tujuan menegakkan dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan dan atau Peraturan Daerah (PERDA). Sehingga masyarakat merasa nyaman dan aman dalam melakukan aktivitas. Selain itu, dalam rangka meningkatkan perlindungan masyarakat, pemerintah berupaya untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terutama dalam upaya kewaspadaan dini.

Misi ke-3 : Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan

Pencapaian misi ke-3 merupakan salah satu poin penting dalam pembangunan sebab Pemerintah Kota Jambi telah memiliki target untuk meningkatkan pengelolaan infrastruktur dan utilitas perkotaan sehingga konektivitas dan pemerataan pembangunan dapat tercapai. Selain itu, sesuai dengan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), lingkungan

merupakan salah satu isu vital dalam pembangunan, maka Pemerintah Kota Jambi memiliki komitmen untuk menjaga kualitas lingkungan hidup.

Misi ke-4 : Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan

Pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat perkotaan diarahkan pada perekonomian inklusif, terutama pada sektor perdagangan dan jasa, khususnya penguatan UMKM dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan serta peluang kerja.

Misi ke-5 : Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan

Kehidupan masyarakat Kota Jambi tercermin dari akses Pendidikan yang berkualitas dengan memberikan perhatian lebih pada siswa tidak mampu. Dan meningkatnya pelayanan kesehatan terutama para ibu, anak, remaja dan lansia. Kualitas Pendidikan dan kesehatan yang tinggi diharapkan akan berdampak pada penurunan angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah dan perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* dan *impact* program-program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Misi ke-1 : Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi

Pada Misi ke-1, terdapat 1 (satu) tujuan yang ingin dicapai adalah Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik diukur dari Indeks Reformasi Birokrasi yang meningkat dari tahun ke tahun, dengan upaya yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut melalui beberapa sasaran yaitu ;

Sasaran 1 : Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK

Misi ke-2 : Penguatan Penegakan Hukum, Tramtibmas dan Kenyamanan Masyarakat

Pada Misi ke-2, terdapat 2 (dua) tujuan yaitu: (1) meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat: yang dapat diukur dari 2 (dua) indikator ialah (1) Persentase pe nurunan tingkat pelanggaran terhadap peraturan daerah dan (2) penurunan jumlah kasus kebakaran dan kebencanaan serta tujuan ke-2 Mewujudkan stabilitas daerah yang kondusif dan aman yang dapat dilihat melalui indikator tujuan Persentase penyelesaian gangguan ideologi, konflik, suku, agama, ras dan antar golongan dengan sasaran:

Sasaran 1 : Menurunkan tingkat pelanggaran terhadap PERDA dan PERWAL .

Sasaran 2 : Meningkatkan pelayanan pada kondisi pra, tanggap dan pasca kebakaran serta kebencanaan.

Sasaran 3 : Meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya ideologi pancasila dan kebhinekaan dalam kehidupan sosial masyarakat

Sasaran 4 : Meningkatkan peranan organisasi kemasyarakatan dan parpol dalam pembangunan

Misi ke-3 : Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan

Pada Misi ke-3, terdapat 1 (satu) tujuan yaitu: Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan yang dilihat dari indikator tujuan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Dengan sasarannya yaitu:

Sasaran 1 : Meningkatkan Layanan Infrastruktur Dan Utilitas Perkotaan

sasaran 2 : Meningkatkan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Misi ke-4 : Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan

Pada misi ke-4, terdapat 1 (satu) tujuan yaitu Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi yang diukur dari 2 (dua) yakni (1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (2) Tingkat pengangguran terbuka yang akan dilihat dengan sasaran, yaitu:

Sasaran 1 : Meningkatkan Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan.

Sasaran 2 : Meningkatkan Ketahanan Pangan

Sasaran 3 : Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB.

Sasaran 4 : Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sasaran 5 : Meningkatkan realisasi investasi.

Sasaran 6 : Meningkatkan penyerapan dan perlindungan tenaga kerja.

Sasaran 7 : Meningkatkan daya saing usaha skala mikro dan kecil

Misi ke-5 : Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan

Pada Misi ke-5, terdapat 1 (satu) tujuan yaitu terwujudnya sumber daya manusia yang berdaya saing yang akan ditandai dengan peningkatan (1) Indeks Pembangunan Manusia, (2) Indeks Pembangunan Gender, (3) Kriteria Kota Layak Anak, (4) Cakupan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan, (5) Persentase Penduduk Miskin, dengan pencapaian beberapa sasaran yang mendukung misi tersebut antara lain:

Sasaran 1 : Meningkatkan derajat kesehatan;

Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan;

Sasaran 3 : Mengendalikan angka Kelahiran Penduduk;

Sasaran 4 : Meningkatkan kesetaraan gender;

Sasaran 5 : Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak;

Sasaran 6 : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;

Sasaran 7 : Meningkatkan prestasi dan kreativitas kepemudaan;

Sasaran 8 : Menurunkan angka PMKS.

Tabel 5.1.
Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah
Kota Jambi

VISI : MENJADIKAN KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA BERBASIS MASYARAKAT BERAKHLAK DAN BERBUDAYA
DENGAN MENGEDEPANKAN PELAYANAN PRIMA

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,33	2,44	2,55	2,66	2,77	2,33	2,44
					Indeks Profesionalitas ASN	55	56	57,5	59	60,5	62	62
					Nilai SAKIP	B	B	BB	BB	BB	A	A
					Indeks survey persepsi Korupsi		3,65	3,69	3,73	3,75	3,8	3,8
					Indeks Kepuasan Masyarakat	85,28	85,5%	86%	87%	87,5%	88,5%	88,5%
2	Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat	Meningkatnya Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penurunan tingkat pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan Walikota	Menurunkan tingkat pelanggaran terhadap PERDA dan PERWAL	Penyelesaian jumlah kasus atau pelanggaran PERDA dan PERWAL	82%	82%	80%	75%	66%	60%	60%
			Penurunan Jumlah kasus atau pelanggaran per tahun	meningkatkan pelayanan pada kondisi pra, tanggap dan pasca kebakaran serta kebencanaan	Cakupan pelayanan pemadam kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		Mewujudkan Stabilitas Daerah yang Kondusif dan aman	Persentase Penyelesaian Gangguan Ideologi, konflik Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan	Meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya ideologi Pancasila dan kebhinekaan dalam kehidupan sosial masyarakat	Persentase pembinaan terhadap masyarakat terkait ideologi Pancasila	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
				Meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan dan Parpol dalam pembangunan	Persentase orkesmas dan Parpol yang berperan aktif di masyarakat	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
3	Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan	Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan	Indeks Keuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Meningkatkan layanan infrastruktur dan Utilitas perkotaan	Cakupan Layanan Infrastruktur Dan Utilitas	50,59%	53,07%	60,77%	70,61%	78,25%	85,79%	85,79%
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	32,11	37,75	38,30	38,50	38,65	38,75	38,75
					Indeks Kualitas Udara	80,68	80,70	80,72	80,74	80,76	80,78	80,78
					Indeks Kualitas Tutupan Lahan	39,33	41,30	41,70	42,00	42,30	42,50	42,50
4	Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan	Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan	Persentase Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan	20	36	52	68	84	100	100
				Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	90,2	90,5	91	91,5	92	92,5	92,5
				Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	2,36%	2,37%	2,38%	2,39%	2,40%	2,41%	2,41%
				Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4%	8%	9%	9%	9%	9%	9%
				Meningkatkan Realisasi Investasi	Realisasi Investasi	410 M	430,5 M	430,5 M	474,62 M	498,35 M	523,37 M	523,37 M

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	
			Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatkan Penyerapan dan perlindungan Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	64,96%	65%	65,25%	65,50%	65,75%	66%	66%
				Meningkatkan Daya Saing Usaha Skala mikro dan Kecil	Persentase usaha mikro kecil yang berkualitas	7,61%	8,08%	8,54%	9,01%	9,47%	9,94%	10,00%
					Persentase Daya Saing Produk IKM	4,3	4,3	5,35	6,5	7,5	8,3	8,3
				Persentase koperasi berkualitas	13%	16,06%	19,27%	23,85%	29,82%	36,70%	36,70%	
5	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatkan Derajat Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	72,34	72,35	72,35	72,36	72,36	72,37	72,37
				Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	14,25	14,60	14,61	14,62	14,63	14,64	14,64
					Persentase masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan pelayanan Pendidikan	21,32	21,32	17,32	12,32	8,32	4,32	4,32
					Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,68	10,68	10,69	10,70	10,71	10,72	10,72
			Mengendalikan angka Kelahiran Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	N/A	1,05	1,05	1,03	1,01	1,01	1,01	
				Persentase Jumlah Keluarga Sejahtera	N/A	96,23%	96,46%	96,69%	96,92%	97,15%	97,15%	
			Indeks Pembangunan Gender	Meningkatkan Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender	94,89	94,90	94,91	94,93	94,94	94,95	94,95
					Indeks Pemberdayaan Gender	68,07	68,10	68,20	68,30	68,40	68,50	68,50

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	
			Kriteria Kota Layak Anak	Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak	Persentase Hak Anak yang Terpenuhi	50%	70%	80%	90%	100%	100%	100%
			Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	60,23	60,23	61,43	63	64	66	66
				Meningkatkan Prestasi dan Kreativitas Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	N/A	50	50,5	51	51,5	52	52
			Persentase Penduduk Miskin	Menurunkan angka PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	60	65	70	75	80	85	85

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan

6.1.1. Strategi Pembangunan Daerah

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsip sebagai pelayan masyarakat.

Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.

Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan yang akan dijelaskan lebih lanjut.

Dalam menentukan strategi pembangunan daerah tidak serta merta disusun tanpa adanya kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi pembangunan periode sebelumnya. Beberapa langkah yang ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah antara lain :

1. Mengkaji sasaran pembangunan periode sebelumnya maupun periode pembangunan yang akan datang (periode lima tahunan);
2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
3. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya;

4. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memperhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran pembangunan.

Penentuan alternatif strategi untuk pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran dirumuskan dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas yang telah diuraikan dan dirumuskan dalam bab-bab sebelumnya. Guna lebih mempertajam dan memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaannya, maka strategi umum pembangunan tersebut dirinci lagi kedalam strategi dan sasaran pembangunan, seperti yang tercantum dalam tabel dibawah ini.

Tabel 6.1.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi
Kota Jambi

VISI :Menjadikan Kota Jambi Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa Berbasis Masyarakat Berakhlak Dan Berbudaya dengan Mengedepankan Pelayanan Prima

Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 1 : Penguatan birokrasi dan Meningkatkan pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi		
T.1. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	S1. Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	Pengembangan infrastruktur dan aplikasi TIK
		Peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur
		Peningkatan transparansi kinerja instansi pemerintah
		Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dari KKN
		Menyelenggarakan Pelayanan Publik Berbasis TIK
Misi 2 : Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat		
T.2. Meningkatnya Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	S.2. Menurunkan tingkat pelanggaran terhadap PERDA dan PERWAL	Peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan regulasi daerah
	S3. Meningkatkan pelayanan pada kondisi pra, tanggap dan pasca kebakaran serta kebencanaan	Peningkatan manajemen logistik dan pelayanan kebakaran
T.3. Mewujudkan stabilitas daerah yang kondusif dan aman	S.4. Meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya ideologi pancasila dan kebhinekaan dalam kehidupan sosial masyarakat	Membangun dan memfasilitasi masyarakat dalam kerangka Konesus dasar bangsa
	S5. Meningkatkan peranan organisasi kemasyarakatan dan parpol dalam pembangunan	Membina, memberdayakan memfasilitas orkemas dan parpol

Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 3 : Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan		
T. 4. Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan	S.6.Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana perhubungan yang handal	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perhubungan perkotaan
	S.7. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas perumahan dan permukiman yang layak huni	Peningkatan Kualitas Perumahan dan Lingkungan Permukiman yang berkelanjutan
	S.8. Meningkatkan cakupan layanan infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan berkelanjutan	Peningkatan sarana dan prasarana serta pengelolaan air bersih, air limbah dan bangunan
		Peningkatan infrastruktur jalan yang mantap
		Peningkatan sistem jaringan drainase dan perlindungan retensi
		Peningkatan sinergisitas penanganan titik genangan
	S.9. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Persampahan	Peningkatan manajemen pengelolaan persampahan
S.10. Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan	
Misi 4 : Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan		
T. 5. Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	S.11. Meningkatnya Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan	Penguatan pembinaan, pengawasan dan pelayanan perdagangan
	S.12. Meningkatnya Ketahanan Pangan	Meningkatkan Ketahanan Pangan
	S.13. Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Penguatan daya saing kepariwisataan
	S.14. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	S15. Meningkatkan Realisasi Investasi	Peningkatan Iklim Investasi

Tujuan	Sasaran	Strategi
	S.16. Meningkatkan Penyerapan dan perlindungan Tenaga Kerja	Peningkatan peluang kerja pada usia produktif serta perluasan lapangan usaha
		Sinergitas hubungan antar stakeholder ketenagakerjaan
	S.17. Meningkatkan Daya Saing Usaha Skala mikro dan Kecil	Peningkatan daya saing usaha mikro kecil untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan yang kreatif
		Mendorong Terciptanya Produktivitas IKM
Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan		
T. 6. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	S.18. Meningkatkan Derajat Kesehatan	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat (universal healthcare)
		Peningkatan Akses Kesehatan Terhadap Miskin yang Tepat Sasaran
	S.19. Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Peningkatan akses mutu dan tata kelola pendidikan dasar
		Peningkatan Akses Pendidikan Terhadap Miskin yang Tepat Sasaran
	S.20. Mengendalikan angka Kelahiran Penduduk	Peningkatan Akses dan Pelayanan Keluarga Berencana yang Berkualitas
	S.21. Meningkatkan Kesetaraan Gender	Peningkatan Pengarusutamaan Gender
	S.22. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak	Peningkatan pemenuhan hak anak
	S.23. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Peningkatan pembinaan, monev pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan
	S.24. Meningkatkan Prestasi dan Kreativitas Kepemudaan	Peningkatan partisipasi generasi muda dalam pembangunan
S.25. Menurunkan angka PMKS	Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan terhadap PMKS	

6.1.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah dan perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran dari strategi.

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Setiap pernyataan arah kebijakan dirumuskan secara spesifik terhadap horizon waktu. Dengan adanya penentuan horizon waktu pencapaian arah kebijakan, secara logis kapan suatu arah kebijakan dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi arah kebijakan lainnya. Urut-urutan arah kebijakan dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun untuk penyusunan RPJMD. Arah kebijakan dapat dijalankan dalam 1 (satu) tahun periode atau dapat pula membutuhkan lebih dari satu tahun. Namun, yang terpenting keseluruhan arah kebijakan harus menjadi prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang padu dan mampu memberdayakan segenap potensi daerah dan pemerintahan daerah sekaligus memanfaatkan segala peluang yang ada.

Guna mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka pelaksanaan prioritas pembangunan harus fokus dan terarah dengan jelas. Untuk itu diperlukan arah kebijakan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan dalam horizon waktu yang dituangkan dalam tema pembangunan pada setiap tahun yang akan dijabarkan dalam dokumen rencana kerja pemerintah daerah.

Adapun arah kebijakan dalam horizon waktu atau tema pembangunan tahunan disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6.1.2.
Arah Kebijakan

TEMA PEMBANGUNAN				
TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas (Perpres 72 tahun 2018)	Peningkatan SDM untuk pelayanan Prima berbasis TIK	Peningkatan Akses Mutu Layanan dan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Daya Saing dan Promosi Daerah untuk menunjang Pariwisata	Pemantapan Pelayanan Publik untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan
ARAH KEBIJAKAN				
Meningkatkan ketatalaksanaan pemerintahan yang berbasis TIK	Meningkatkan ketatalaksanaan pemerintahan yang berbasis TIK	Meningkatkan ketatalaksanaan pemerintahan yang berbasis TIK	Optimalisasi ketatalaksanaan pemerintahan yang berbasis TIK	Optimalisasi ketatalaksanaan pemerintahan yang berbasis TIK
Meningkatkan kompetensi dan integritas ASN	Meningkatkan kompetensi dan integritas ASN	Meningkatkan kompetensi dan integritas ASN	Meningkatkan kompetensi dan integritas ASN	Meningkatkan kompetensi dan integritas ASN
Meningkatkan Akuntabilitas kinerja keuangan daerah	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja keuangan daerah	Mengoptimalkan Akuntabilitas kinerja keuangan daerah	Mengoptimalkan Akuntabilitas kinerja keuangan daerah	Mengoptimalkan Akuntabilitas kinerja keuangan daerah
Meningkatkan kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan	Meningkatkan kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan	Mengoptimalkan kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan	Mengoptimalkan kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan	Mengoptimalkan kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan
Meningkatkan pengawasan pembangunan secara komprehensif, transparan dan akuntabel	Meningkatkan pengawasan pembangunan secara komprehensif, transparan dan akuntabel	Meningkatkan pengawasan pembangunan secara komprehensif, transparan dan akuntabel	Meningkatkan pengawasan pembangunan secara komprehensif, transparan dan akuntabel	Meningkatkan pengawasan pembangunan secara komprehensif, transparan dan akuntabel

Meningkatkan Koordinasi , Fasilitasi dan kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatkan Koordinasi , Fasilitasi dan kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatkan Koordinasi , Fasilitasi dan kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatkan Koordinasi , Fasilitasi dan kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatkan Koordinasi , Fasilitasi dan kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan
Meningkatkan cakupan pelayanan publik berbasis TIK	Meningkatkan cakupan pelayanan publik berbasis TIK	Meningkatkan cakupan pelayanan publik berbasis TIK	Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis TIK	Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis TIK
Meningkatkan perlindungan, penyelamatan arsip dan sistem informasi kearsipan daerah	Meningkatkan perlindungan, penyelamatan arsip dan sistem informasi kearsipan daerah	Meningkatkan perlindungan, penyelamatan arsip dan sistem informasi kearsipan daerah	Meningkatkan perlindungan, penyelamatan arsip dan sistem informasi kearsipan daerah	Meningkatkan perlindungan, penyelamatan arsip dan sistem informasi kearsipan daerah
Meningkatkan pengawasan dan pengendalian masyarakat terhadap kepatuhan perda	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian masyarakat terhadap kepatuhan perda	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian masyarakat terhadap kepatuhan perda	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian masyarakat terhadap kepatuhan perda	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian masyarakat terhadap kepatuhan perda
Meningkatkan sistem manajemen logistikkebencanaan	Meningkatkan sistem manajemen logistik kebencanaan	Meningkatkan sistem manajemen logistik kebencanaan	Meningkatkan sistem manajemen logistik kebencanaan	Meningkatkan sistem manajemen logistik kebencanaan
Meningkatkan karakter, ideologi dan wawasan kebangsaan serta peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatkan karakter, ideologi dan wawasan kebangsaan serta peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatkan karakter, ideologi dan wawasan kebangsaan serta peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatkan karakter, ideologi dan wawasan kebangsaan serta peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatkan karakter, ideologi dan wawasan kebangsaan serta peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

meningkatkan pembinaan pemberdayaan fasilitas orkemas dan parpol	meningkatkan pembinaan pemberdayaan fasilitas orkemas dan parpol	meningkatkan pembinaan pemberdayaan fasilitas orkemas dan parpol	meningkatkan pembinaan pemberdayaan fasilitas orkemas dan parpol	meningkatkan pembinaan pemberdayaan fasilitas orkemas dan parpol
Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan	Mengembangkan sarana dan prasarana perhubungan	Mengembangkan sarana dan prasarana perhubungan
Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas
Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan air bersih, air limbah dan Bangunan	Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan air bersih, air limbah dan Bangunan	Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan air bersih, air limbah dan Bangunan	Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan air bersih, air limbah dan Bangunan	Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan air bersih, air limbah dan Bangunan
Meningkatkan jaringan jalan dan jembatan yang berkondisi baik	Meningkatkan jaringan jalan dan jembatan yang berkondisi baik	Meningkatkan jaringan jalan dan jembatan yang berkondisi baik	Meningkatkan jaringan jalan dan jembatan yang berkondisi baik	Meningkatkan jaringan jalan dan jembatan yang berkondisi baik
Menurunkan jumlah titik genangan perkotaan	Menurunkan jumlah titik genangan perkotaan	Menurunkan jumlah titik genangan perkotaan	Menurunkan jumlah titik genangan perkotaan	Menurunkan jumlah titik genangan perkotaan
Meningkatkan sinergitas pembangunan infrastruktur	Meningkatkan sinergitas pembangunan infrastruktur	Meningkatkan sinergitas pembangunan infrastruktur	Meningkatkan sinergitas pembangunan infrastruktur	Meningkatkan sinergitas pembangunan infrastruktur
Meningkatkan harmonisasi & konsistensi tata ruang	Meningkatkan harmonisasi & konsistensi tata ruang	Meningkatkan harmonisasi & konsistensi tata ruang	Meningkatkan harmonisasi & konsistensi tata ruang	Meningkatkan harmonisasi & konsistensi tata ruang

Meningkatkan manajemen pengendalian dan pengelolaan persampahan	Meningkatkan manajemen pengendalian dan pengelolaan persampahan	Meningkatkan manajemen pengendalian dan pengelolaan persampahan	Mengoptimalkan pengelolaan persampahan	Mengoptimalkan pengelolaan persampahan
Mendorong partisipasi masyarakat untuk pengurangan tingkat pencemaran lingkungan	Meningkatkan perlindungan, pengendalian dan pengawasan lingkungan	Meningkatkan perlindungan, pengendalian dan pengawasan lingkungan	Meningkatkan perlindungan, pengendalian dan pengawasan lingkungan	Meningkatkan perlindungan, pengendalian dan pengawasan lingkungan
Pengendalian dan pengawasan lingkungan				
Peningkatan dan pengelolaan tutupan lahan binaan				
Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan
Meningkatkan manajemen pengelolaan perpasaran	Meningkatkan manajemen tataniaga	Meningkatkan manajemen tataniaga	Mengoptimalkan manajemen tataniaga	Mengoptimalkan manajemen tataniaga
Meningkatkan pengawasan dan pengendalian harga	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian harga	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian harga	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian harga	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian harga
Pengendalian ketersediaan dan distribusi bahan pangan	Pengendalian ketersediaan dan distribusi bahan pangan	Pengendalian ketersediaan dan distribusi bahan pangan	Pengendalian ketersediaan dan distribusi bahan pangan	Pengendalian ketersediaan dan distribusi bahan pangan
Meningkatkan keamanan konsumsi pangan masyarakat perkotaan	Meningkatkan keamanan konsumsi pangan masyarakat perkotaan	Meningkatkan keamanan konsumsi pangan masyarakat perkotaan	Meningkatkan keamanan konsumsi pangan masyarakat perkotaan	Meningkatkan keamanan konsumsi pangan masyarakat perkotaan
Meningkatkan kreatifitas seni budaya dan pengelolaan peninggalan budaya	Meningkatkan kreatifitas seni budaya dan pengelolaan peninggalan budaya	Meningkatkan kreatifitas seni budaya dan pengelolaan peninggalan budaya	Meningkatkan kreatifitas seni budaya dan pengelolaan peninggalan budaya	Meningkatkan kreatifitas seni budaya dan pengelolaan peninggalan budaya

Meningkatkan fasilitasi penyelenggaraan MICE (<i>Meeting, Incentive, Convention, Exhibition</i>)	Meningkatkan fasilitasi penyelenggaraan MICE (<i>Meeting, Incentive, Convention, Exhibition</i>)	Meningkatkan fasilitasi penyelenggaraan MICE (<i>Meeting, Incentive, Convention, Exhibition</i>)	Mendorong aktivitas MICE (<i>Meeting, Incentive, Convention, Exhibition</i>)	Mendorong aktivitas MICE (<i>Meeting, Incentive, Convention, Exhibition</i>)
Mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak daerah	Mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak daerah	Mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak daerah	Mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak daerah	Mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak daerah
Mengoptimalkan pengelolaan penerimaan retribusi daerah	Mengoptimalkan pengelolaan penerimaan retribusi daerah	Mengoptimalkan pengelolaan penerimaan retribusi daerah	Mengoptimalkan pengelolaan penerimaan retribusi daerah	Mengoptimalkan pengelolaan penerimaan retribusi daerah
Meningkatkan Kemudahan Perizinan dan Promosi Investasi	Meningkatkan Kemudahan Perizinan dan Promosi Investasi	Meningkatkan Kemudahan Perizinan dan Promosi Investasi	Meningkatkan Kemudahan Perizinan dan Promosi Investasi	Meningkatkan Kemudahan Perizinan dan Promosi Investasi
Mendorong kewirausahaan untuk angkatan kerja produktif	Mendorong kewirausahaan untuk angkatan kerja produktif	Mendorong kewirausahaan dan kompetensi tenaga kerja	Mendorong kewirausahaan dan kompetensi tenaga kerja	Mendorong kewirausahaan dan kompetensi tenaga kerja
Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja			
Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis	Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis	Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis	Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis	Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis
Meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro kecil dan ekonomi kreatif	Meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro kecil dan ekonomi kreatif	Meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro kecil dan ekonomi kreatif	Meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro kecil dan ekonomi kreatif	Meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro kecil dan ekonomi kreatif
Meningkatkan proteksi, pengembangan dan pemasaran produk lokal	Meningkatkan proteksi, pengembangan dan pemasaran produk lokal	Meningkatkan proteksi, pengembangan dan pemasaran produk lokal	Meningkatkan pemasaran produk lokal	Meningkatkan pemasaran produk lokal

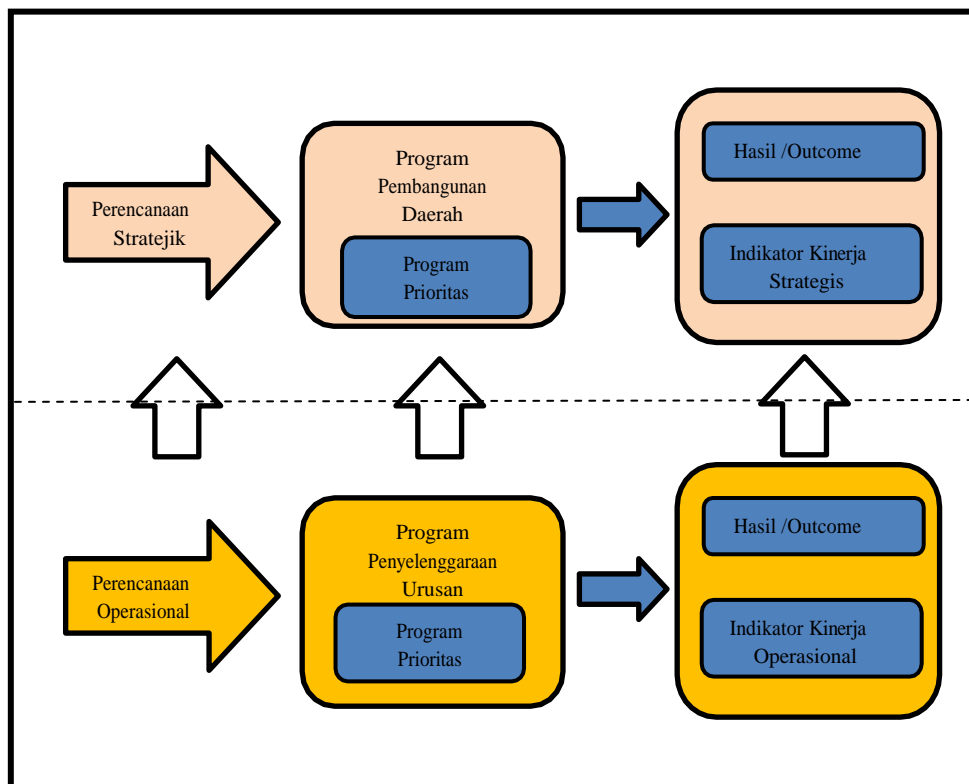
Meningkatkan koperasi berkualitas	Penguatan Kelembagaan Koperasi	Penguatan Kelembagaan Koperasi	Pengembangan Koperasi	Pengembangan Koperasi
Meningkatkan sarana prasarana kesehatan	Meningkatkan sarana prasarana kesehatan	Meningkatkan sarana prasarana kesehatan	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
Kartu Jambi Bugar	Kartu Jambi Bugar	Kartu Jambi Bugar	Kartu Jambi Bugar	Kartu Jambi Bugar
Meningkatkan sarana prasarana pendidikan	Meningkatkan sarana prasarana pendidikan	Meningkatkan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas	Meningkatkan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas	Meningkatkan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas
Menekan angka putus sekolah	Mengembangkan pola pembiayaan pendidikan	Mengembangkan pola pembiayaan pendidikan	Mengembangkan pola pembiayaan pendidikan	Mengembangkan pola pembiayaan pendidikan
	Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik	Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik	Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik	Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik
Kartu Jambi Cerdas	Kartu Jambi Cerdas	Kartu Jambi Cerdas	Kartu Jambi Cerdas	Kartu Jambi Cerdas
Meningkatkan minat baca masyarakat perkotaan	Meningkatkan minat baca masyarakat perkotaan	Meningkatkan minat baca masyarakat perkotaan	Meningkatkan minat baca masyarakat perkotaan	Meningkatkan minat baca masyarakat perkotaan
Meningkatkan Akses Pelayanan Keluarga Berencana, Pembinaan Ketahanan dan Pembangunan Keluarga	Meningkatkan Akses Pelayanan Keluarga Berencana, Pembinaan Ketahanan dan Pembangunan Keluarga	Meningkatkan Akses Pelayanan Keluarga Berencana, Pembinaan Ketahanan dan Pembangunan Keluarga	Meningkatkan Akses Pelayanan Keluarga Berencana, Pembinaan Ketahanan dan Pembangunan Keluarga yang berkualitas	Meningkatkan Akses Pelayanan Keluarga Berencana, Pembinaan Ketahanan dan Pembangunan Keluarga yang berkualitas
Meningkatkan partisipasi dan perlindungan terhadap perempuan	Meningkatkan partisipasi dan perlindungan terhadap perempuan	Meningkatkan partisipasi dan perlindungan terhadap perempuan	Meningkatkan partisipasi dan perlindungan terhadap perempuan	Meningkatkan partisipasi dan perlindungan terhadap perempuan

Meningkatkan akses perempuan terhadap sumberdaya pembangunan	Meningkatkan akses perempuan terhadap sumberdaya pembangunan	Meningkatkan akses perempuan terhadap sumberdaya pembangunan	Mengoptimalkan peran perempuan terhadap pembangunan	Mengoptimalkan peran perempuan terhadap pembangunan
Meningkatkan pemenuhan hak anak	Meningkatkan pemenuhan hak anak	Meningkatkan pemenuhan hak anak	Mengoptimalkan pemenuhan hak anak	Mengoptimalkan pemenuhan hak anak
Meningkatkan pembinaan dan monev pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan pembinaan dan monev pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan pembinaan dan monev pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Mengoptimalkan pembinaan dan monev pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Mengoptimalkan pembinaan dan monev pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan
Meningkatkan pembinaan olahraga dan pengembangan kepemudaan	Meningkatkan pembinaan olahraga dan pengembangan kepemudaan	Mengembangkan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga	Mengembangkan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga	Mengembangkan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga
		Meningkatkan prestasi atlit dan pemuda	Meningkatkan prestasi atlit dan pemuda	Meningkatkan prestasi atlit dan pemuda
Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan kepada PMKS	Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan kepada PMKS	Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan kepada PMKS	Mengoptimalkan pemberdayaan dan pembinaan kepada PMKS	Mengoptimalkan pemberdayaan dan pembinaan kepada PMKS
Meningkatkan perlindungan sosial terhadap PMKS	Meningkatkan perlindungan sosial terhadap PMKS	Meningkatkan perlindungan sosial terhadap PMKS	Meningkatkan perlindungan sosial terhadap PMKS	Meningkatkan perlindungan sosial terhadap PMKS

6.2. Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Suatu program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Suatu program prioritas bersifat strategis mengikuti diagram kinerja pembangunan sebagaimana gambar berikut :

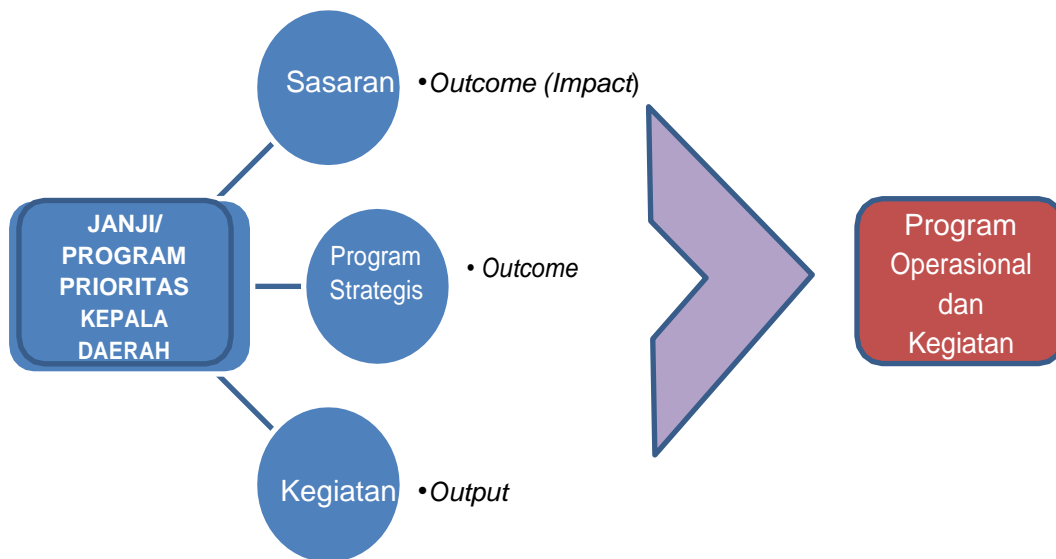


Gambar 6.2.

Arsitektur Perencanaan Kinerja Pembangunan Daerah

Sesuai arsitektur perencanaan dan kinerja tersebut di atas, perencanaan dipisahkan antara aspek strategis dan operasional, program dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu program untuk perencanaan strategis dan program untuk perencanaan operasional. Dalam hal program didalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional, yang demikian karena urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena memiliki pengaruh yang sangat luas dan *urgent*. Program strategis selanjutnya disebut dengan program pembangunan daerah. Program pembangunan daerah pada intinya merupakan implementasi dari janji-janji dan program prioritas serta agenda politik kepala daerah terpilih yang diusung pada waktu kampanye. Sesuai dengan kaidah perencanaan dan pengukuran kinerja, janji dan program prioritas kepala daerah terpilih diimplementasi dalam tataran sasaran, program dan kegiatan

yang mempunyai tingkatan indikator sasaran (*outcome/impact*), program (*outcome*) atau kegiatan (*output*) yang dilaksanakan dalam bentuk program operasional dan kegiatan di perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya, sebagaimana ilustrasi gambar berikut ini:



Gambar 6.3.
Ilustrasi Implementasi Janji/Program Prioritas Kepala Daerah

Program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

1. Program Prioritas Pembangunan

1. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan

Infrastruktur merupakan aspek penting dalam upaya penyediaan ruang kota yang harmonis, baik dalam meningkatkan kenyamanan bagi kehidupan sosial masyarakat, mendorong kemajuan kegiatan perekonomian daerah serta dapat memberikan perlindungan maupun perbaikan/recovery terhadap degradasi lingkungan guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Adapun pembangunan infrastruktur ini dilaksanakan melalui perluasan dan peningkatan kualitas layanan infrastruktur dasar, penataan Kawasan strategis guna mendorong potensi ekonomi, penyediaan ruang publik serta penyediaan/penataan fungsi-fungsi konservasi lingkungan yang di dukung penyediaan sarana dan prasarana perkotaan. Termasuk di dalamnya penyediaan transportasi publik yang didukung jaringan transportasi dalam kota maupun daerah *hinterland* dalam suatu keterpaduan pembangunan dalam perspektif pembangunan regional.

2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Salah satu prioritas pembangunan Pemerintah Kota Jambi ialah peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat, karena keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan tetapi yang paling

penting adalah keberhasilan pembangunan manusianya, sehingga nantinya dapat terwujud manusia yang kompeten dan mandiri.

Prioritas Pengembangan SDM ini akan menjadi perhatian dari setiap Perangkat Daerah baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung. Pengembangan yang dilakukan antara lain Pengembangan SDM Aparatur Pemerintah maupun pengembangan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja/pelaku UMKM melalui pelatihan kerja yang terencana agar peningkatan pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan sikap kerja (attitude) dapat dilakukan. Diharapkan dengan adanya peningkatan kapasitas dasar penduduk akan memperbesar kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan yang berkelanjutan.

3. Penanggulangan Kemiskinan

Permasalahan kemiskinan bukan hanya merupakan masalah ekonomi semata, akan tetapi juga merupakan masalah sosial dan kemanusiaan. Oleh karena itu, implikasi permasalahan kemiskinan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia secara keseluruhan, yang pada akhirnya akan menentukan kelangsungan pembangunan kualitas manusia itu sendiri yang meliputi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Dalam kaitan proses perkembangan dinamika kehidupan masyarakat, maka masalah kemiskinan dipandang sebagai masalah yang sangat dinamis, sehingga membutuhkan peran institusi, program serta metode pendekatan yang mampu menjawab permasalahan kemiskinan.

Beberapa permasalahan yang ditemukan dalam implementasi penanggulangan kemiskinan yaitu:

- a) Masih lemahnya koordinasi terutama dalam hal: pendataan, pendanaan, dan kelembagaan;
- b) Lemahnya koordinasi antar program-program penanggulangan kemiskinan antara instansi pemerintah pusat dan daerah;
- c) Lemahnya integrasi program pada tahap perencanaan, sinkronisasi program pada tahap pelaksanaan, dan sinergi antar pelaku (pemerintah, dunia usaha, masyarakat madani);
- d) Belum optimalnya kelembagaan di pemerintah, dunia usaha, LSM, dan masyarakat madani dalam bermitra dan bekerjasama dalam penanggulangan kemiskinan serta penciptaan lapangan kerja

Dengan dimensinya yang luas dan kompleks, kemiskinan perlu ditangani secara komprehensif dan sistemik. Pemecahan masalah kemiskinan juga tidak lagi dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri melalui kebijakan yang terpusat dan berjangka pendek, melainkan memerlukan pendekatan yang terpadu, terencana, berkesinambungan, dan menuntut keterlibatan berbagai pihak.

4. Pengembangan Pariwisata dan Promosi Daerah

Apabila melihat tren dan menganalisis berbagai sektor ekonomi, maka sektor pariwisata menjadi sektor yang paling memiliki potensi besar untuk dijadikan sebagai andalan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Setiap tahun performa pariwisata Indonesia terus menanjak, sektor ini terus tumbuh dan bergerak lincah dalam peningkatan ekonomi Indonesia.

Potensi pengembangan pariwisata di Kota Jambi juga telah dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal. Berbagai pembangunan fisik maupun non fisik dilakukan dalam rangka pengembangan pariwisata di Kota Jambi seperti pengembangan Danau Sipin sebagai kawasan wisata terpadu, perbaikan infrastruktur publik, pembangunan berbagai fasilitas umum dan juga perbaikan sistem pelayanan publik yang pada akhirnya akan mengakselerasi aktivitas ekonomi masyarakat.

Konsep pengembangan pariwisata di Kota Jambi kedepannya adalah pengembangan pariwisata berbasis penataan kawasan, diantaranya adalah penataan kawasan Pasar Kota Jambi, pembangunan kawasan wisata Jambi Kota Seberang yang memiliki potensi wisata alam dan juga wisata budaya.

Selain sebagai ibu kota Provinsi Jambi, Kota Jambi juga merupakan daerah strategis sebagai pintu masuk dan perlintasan ke daerah lainnya, baik perlintasan antar kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi maupun perlintasan antar provinsi. Hal ini tentu juga akan memberi banyak manfaat bagi pengembangan pariwisata di Kota Jambi, terutama bidang perhotelan, restoran, transportasi dan penyelenggaraan aktivitas MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*).

Ketika promosi dan akomodasi transportasi berjalan seiring, tentu diperlukan perhatian yang cukup intensif terhadap kualitas objek wisata dan keramahan tuan rumah itu sendiri. Inovasi paket wisata dan berbagai kreativitas lainnya juga harus digerakkan berkesinambungan. Selain itu, juga dibutuhkan sinergitas semua stakeholder terkait dalam pengembangan pariwisata di Kota Jambi. Hal lain yang tidak boleh dilupakan adalah peran masyarakat pengguna teknologi untuk memaksimalkan promosi sektor pariwisata di Kota Jambi. Kombinasi apik antara perkembangan teknologi, pariwisata, serta keramahan budaya akan menjadi nilai tambah bagi pengembangan aktivitas kepariwisataan.

Apabila aktivitas kepariwisataan mampu dikelola dengan baik dan diorganisasi dengan manajemen yang sehat, maka hal ini tentu akan meningkatkan promosi daerah Kota Jambi di level nasional maupun internasional. Dengan demikian, peningkatan investasi di Kota Jambi pun juga akan tumbuh, dan selanjutnya akan berdampak pada peningkatan lapangan usaha dan pengurangan pengangguran. Muaranya tentu adalah perbaikan struktur dan peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Jambi.

2. Janji Politik Kepala Daerah

1. Peningkatan Implementasi IT Dalam Pengelolaan Perkotaan dan Pemerintahan
2. Jambi Cerdas
3. Jambi Bugar
4. Kota Layak Anak
5. Kegiatan Khusus Lansia
6. Perluasan Layanan Kesehatan 119
7. Peningkatan Jumlah dan Kualitas PKM Rawat Inap
8. Pelayanan Prima Perizinan
9. Peningkatan Frekuensi Job Fair
10. Kepastian Hukum
11. Peningkatan SDM dan Prasarana Bagi Pelaku IKM/UMKM

12. Laporan Keuangan Yang Akuntabel
13. Peningkatan Rekrutmen Guru Agama
14. Peningkatan Akses Dan Responsibilitas Terhadap Keluhan Masyarakat Berbasis IT
15. Peningkatan Destinasi Wisata Serta Prasarananya
16. Peningkatan Sarana Prasarana Kantor Pelayanan Publik
17. Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Dan Swasta

Guna mempercepat implementasi dari program pembangunan daerah tersebut, diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada hasil dengan menggunakan pendekatan yang bersifat *holistik-tematik*, *integratif* dan *spasial*.

Pendekatan *holistik-tematik*, *integratif* dan *spasial* adalah sebagai berikut :

- § Pendekatan *holistik-tematik* dalam perencanaan pembangunan daerah, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
- § Pendekatan *integratif* dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
- § Pendekatan *spasial* dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Tabel 6.3.
Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Misi 1 : Penguatan birokrasi dan Meningkatkan pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi															
T1 : Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	N/A	BB		BB		A		A		A		A		
S1 : Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.33	2.33		2.44		2.55		2.66		2.77		2.77		
	Indeks Profesionalitas ASN	55	56		57,5		59		60,5		62		62		
	Nilai SAKIP	B	B		BB		BB		BB		A		A		
	Indeks persepsi anti Korupsi	n/a	3,65		3,69		3,73		3,75		3,8		3,8		
	Indeks Kepuasan Masyarakat	85.28	85.5		86		87		87.5		88.5		88.5		
P1 : Peningkatan akses dan kualitas informasi publik	Persentase Peningkatan ekosistem TIK	20%	30%	0	45%	6.400.000.000	60%	5.932.800.000	70%	6.621.296.000	80%	7.622.863.770	80%	7.622.863.770	KOMINFO

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Cakupan akses dan kualitas informasi Publik	30%	40%		60%		70%		80%		90%		90%		
P2 : Penyelenggaraan pengamanan informasi pemerintah daerah	Rasio Jumlah Informasi Milik Pemerintah yang Diamankan	15%	20%	0	35%	600.000.000	50%	556.200.000	55%	541.059.000	65%	714.643.240	65%	714.643.240	
P3 : Manajemen data/informasi/statistik daerah	Tingkat ketersediaan data/informasi/statistik Daerah	5%	10%	0	20%	155.000.000	39%	143.100.000	40%	139.204.500	50%	183.864.470	50%	183.864.470	
P4 : Penataan, pelayanan, pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur	Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan Kebutuhan	93,23%	93,23%	3.856.200.000	96%	4.971.000.000	97%	4.608.000.000	98%	4.482.560.000	100%	10.920.670.720	100%	10.920.670.720	BKPSDMD
	Persentase Penyelesaian administrasi kepegawaian tepat Waktu	85%	85%		89%		91%		93%		95%		95%		
	Persentase ASN yang mendapatkan pembinaan Pengendalian	72%	72%		83%		88%		94%		100%		100%		

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Persentase Penilaian Kinerja ASN	85%	85%	87%		87%		87%		87%		87%		87%	
	Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi	32%	32%	46%		53%		60%		67%		67%		67%	
	Persentase Pengembangan Kualifikasi ASN			27%		52%		84%		100%		100%		100%	
P5 : Peningkatan dan pengembangan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah	Jumlah OPD yang melaksanakan Penyusunan Dokumen Penganggaran, Pengendalian Keuangan Daerah Tepat Waktu dan sesuai aturan	33 OPD	33 OPD 2.546.041.150	35 OPD 3.622.000.000		37 OPD 3.343.500.000		38 OPD 3.239.732.500		40 OPD 4.262.764.370		40 OPD 4.262.764.370		40 OPD 4.262.764.370	BPKAD

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Persentase Kemampuan OPD dalam hal Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Belanja	75%	75%	80%	85%	95%	100%	100%							
	Jumlah OPD dan BLUD yang menyajikan laporan keuangan tepat waktu dan sesuai SAP dan SAK	37 OPD	37 OPD	40 OPD dan 11 BLUD	40 OPD dan 21 BLUD	40 OPD dan 21 BLUD	40 OPD dan 22 BLUD	40 OPD dan 22 BLUD							
	Jumlah OPD yang menyampaikan Laporan Data Barang Milik Daerah yang Akurat dan Tepat Waktu	20 PD	20 PD	20 PD	30 PD	40 PD	40 PD	40 PD							
P6: Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Persentase kesesuaian capaian kinerja perangkat Daerah	100%	100%	4.278.543.000	100%	4.906.000.000	100%	4.547.700.000	100%	4.423.901.500	100%	5.843.193.520	100%	5.843.193.520	BAPPEDA

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
P7: Penelitian dan pengembangan pembangunan daerah	Persentase Dokumen hasil penelitian yang digunakan sebagai dasar perencanaan	I	100%		100%	200.000.000	100%	270.000.000	100%	297.500.000	100%	436.000.000	100%	436.000.000	
P8 : Peningkatan Sistem pengawasan internal, Pembinaan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Cakupan pelaksanaan pembinaan internal dan pengendalian kebijakan KDH	85%	100%	2.343.990.000	100%	2.914.000.000	100%	2.700.900.000	100%	2.627.375.500	100%	8.470.299.490	100%	8.470.299.490	INSPEKTORAT
P9 : Peningkatan kapasitas lembaga dan pelayanan kedinasan DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD	1 dok	6 dok		6 dok		6 dok	6 dok	6 dok	6 dok	6 dok	6 dok	6 dok	6 dok	
	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran untuk mengakomodir Program-program kerja DPRD	9 dok	9 dok	34.956.263.500	9 dok	36.004.000.000	9 dok	33.375.600.000	9 dok	32.467.042.000	9 dok	42.883.233.440	9 dok	42.883.233.440	SETWAN

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
P10: Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah, sekretariat daerah, Aparatur dan Keprotokolan	Meningkatnya kinerja layanan keprotokolan	70%	70%	3.400.000.000	80%	4.000.000.000	90%	3.696.300.000	100%	3.582.928.500	100%	4.716.065.940	100%	4.716.065.940	SETDA
	Jumlah telaah/rekomendasi staf ahli walikota terhadap kebijakan pemerintahan Daerah	1 Telaah/rekomendasi	1 Telaah/rekomendasi		2 Telaah/rekomendasi	3 Telaah/rekomendasi	3 Telaah/rekomendasi	3 Telaah/rekomendasi	3 Telaah/rekomendasi	3 Telaah/rekomendasi	3 Telaah/rekomendasi	3 Telaah/rekomendasi	3 Telaah/rekomendasi		
P11 : Peningkatan pelayanan administrasi umum, keuangan setda dan kerumahtanggaan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana rumah jabatan dan kantor Sekretariat Daerah	32,08%	32,08%	1.590.060.000	17,3%	1.279.000.000	17,07%	1.188.900.000	17,07%	1.310.989.000	17,07%	1.846.540.660	17,07%	1.846.540.660	
P12: Penataan Administrasi pemerintahan dan kewilayahan	Ketepatan waktu Penyampaian LPPD	48%	48%		61%	12.953.000.000	74%	13.806.900.000	87%	15.131.045.500	100%	22.165.441.030	100%	22.165.441.030	
	Persentase Ketersediaan Lahan Tanah Untuk Pelayanan Masyarakat	13%	13%		16%		20%		23%		32%		32%		

Misi/Tujuan/Sasaran/Program/Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Nilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	N/A	3 Kec		6 Kec		9 Kec		11 Kec		11 Kec		11 Kec		
P13: Penataan Peraturan Perundang-undangan dan penyelesaian perkara pemerintah daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang diselesaikan	20%	20%	1.092.000.000	20%	1.124.000.000	20%	1.041.300.000	20%	1.012.953.500	20%	1.337.932.490	20%	1.337.932.490	
	Persentase penyelesaian perkara Pemerintah Daerah	27,27%	27,27%		27,27%		27,27%		27,27%		27,27%		27,27%		
P14: Peningkatan Kerjasama Daerah	Persentase Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Kesepakatan bersama yang di tindaklanjuti	66,67%	66,67%	725.000.000	76,92%	846.000.000	85,71%	781.200.000	93,33%	757.384.000	100%	997.100.390	100%	997.100.390	
	Persentase Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
P15: Peningkatan koordinasi, fasilitasi dan monitoring bidang perekonomian	Persentase tindak lanjut pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan Monitoring Bidang perekonomian	45%	75%	799.850.000	75%	823.000.000	75%	762.300.000	75%	741.548.500	75%	979.454.380	75%	979.454.380	
P16: Tata Kelola	Persentase meningkatnya	16%	16%		38%		59%		79%		100%		100%	1.343.949.	

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Organisasi dan Ketatalaksanaan	kualitas anjab dan ABK sesuai dengan peraturan yang berlaku				435.00 0.000		1.053.0 00.000		1.024.250. 000		1.343.949. 290		290		
	Ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja	15%	15%	30%	50%	75%	100%	100%							
	Rata-rata indeks pelayanan Publik	B	B	B	A	A	A	A							
P17: Fasilitasi dan Koordinasi kegiatan dan kelembagaan Keagamaan	Persentase tindak lanjut pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan keagamaan, kesejahteraan sosial dan kepemudaan	66,67%	66,67%	8.963.7 13.750	75%	9.232.0 00.000	80%	8.557.2 00.000	100%	8.324.254. 000	100%	10.994.87 0.330	100%	10.994.87 0.330	
P18: Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	71,43%	71,43%	6.200.0 00.000	72,23%	6.386.0 00.000	73,68%	5.919.3 00.000	75%	5.758.163. 500	76,19%	7.605.517. 510	76,19%	7.605.517. 510	
P19: Tata Kelola Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase tertib administrasi pembangunan	50%	70%	75%	2.279.000.0 00	80%	2.112.3 00.000	85%	2.054.798. 500	100%	2.714.025. 880	100%	2.714.025. 880		

Misi/Tujuan/Sasaran/Program/Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Persentase Kinerja Kelembagaan Pengadaan	19,13%	19,13%		37,81%		30,44%		65,00%		69,06%		69,06%		
P20: Penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	93%	93%	2.550.648.000	96%	2.627.000.000	99%	2.434.500.000	100%	2.368.227.500	100%	3.128.011.150	100%	3.128.011.150	DISDUKCAPIL
	cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil	82%	82%		86,5%		91 %		95,5%		100%		100%		
	validitas database kependudukan	87%	87%		89%		91%		93%		95%		95%		
	Cakupan Pemanfaatan data Kependudukan	-	26,8%		33,3%		45%		72,7%		100%		100%		
P21: Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan dan non perijinan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	86,45%	86,45%	673.760.000	86,75 %	793.000.000	86,85 %	734.400.000	86,95 %	714.408.000	87 %	943.606.460	87 %	943.606.460	DPMPPTSP
P22: Pelayanan Umum Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan	83%	85%		89%	13.831.600.000	92%	13.109.400.000	95%	13.047.058.000	98%	17.689.569.670	98%	17.689.569.670	Semua Kecamatan

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
S5: Meningkatkan peranan organisasi kemasyarakatan dan parpol dalam pembangunan	Persentase orkemas dan parpol yang berperan aktif di masyarakat	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%		
P27 : Pembinaan, Pemberdayaan dan Fasilitas bagi Orkemas dan Parpol	Persentase peningkatan pembinaan organisasi kemasyarakatan dalam mewujudkan kondisi daerah yang kondusif	-	-	25.425.000	100%	500.000.000	100%	463.500.000	100%	450.882.500	100%	595.536.760	100%	595.536.760	BADAN KESBANGPOL
P28 : Peningkatan Karakter, Ideologi dan Wawasan Kebangsaan serta Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase peningkatan peran forum kemasyarakatan dalam mengantisipasi potensi konflik di daerah	-	-	494.889.000	100%	700.000.000	100%	648.900.000	100%	631.235.500	100%	833.751.900	100%	833.751.900	
Misi 3 : Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan															
T4 : Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	N/A	5.1		5.67		6.0		6.40		7.00		7.00		

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	49,57	52,06		52,39		52,57		52,74		52,86		52,86		
S6 :meningkatkan layanan infrastruktur dan utilitas perkotaan	Cakupan Layanan Infrastruktur Dan Utilitas	50.59%	53,07%		60,77%		70,61%		78,25%		85,79%		85,79%		
P29: Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan	Capaian ruas jalan yang memenuhi standar Keselamatan	65%	65%	3.825.530.000	74%	6.940.000.000	84%	6.433.200.000	91%	6.258.074.000	100%	8.265.811.170	100%	8.265.811.170	DISHUB
	Cakupan yang terlayani angkutan Umum	33.89%	41.39%		54.75%		70.19%		85.09%		100%		100%		
P30: Pengendalian dan Peningkatan Disiplin Berlalu Lintas	Pengurangan Jumlah Titik Kemacetan	60 Titik	41 Titik	4.423.020.000	36 Titik	1.555.000.000	28 Titik	1.440.900.000	20 Titik	1.401.675.500	0 Titik	1.797.442.700	0 Titik	1.797.442.700	
P31 : Peningkatan Pelayanan Perpustakaan	Persentase Pelayanan Perpustakaan	68.17%	74.76%	2.239.964.000	80.74%	2.307.000.000	88.99%	2.138.400.000	94.58%	2.080.188.000	100%	27.475.510.100	100%	27.475.510.100	
P32 : Penataan dan Peningkatan kualitas Lingkungan Permukiman Perkotaan	Persentase penanganan Luasan permukiman Kumuh	78.79%	78.79%	3.804.751.000	83%	3.918.000.000	87%	3.631.500.000	87%	3.532.642.500	87%	4.665.996.790	87%	4.665.996.790	DPRKP

Misi/Tujuan/Sasaran/Program/Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
	dikawasan perkotaan														
P33 : Pengembangan dan Fasilitas Penyelenggaraan Perumahan	Persentase Pemenuhan Rumah bagi MBR	12.5%	12.5%	2.500.000.000	25%	2.500.000.000	50%	6.817.500.000	75%	6.631.912.500	100%	8.759.585.530	100%	8.759.585.530	
P34 : Peningkatan, Pemeliharaan dan Penataan Utilitas Umum	Persentase Permukiman yang dilayani Utilitas Umum	20%	20%	24.758.245.000	40%	23.000.000.000	60%	21.321.000.000	80%	20.740.595.000	100%	27.394.665.890	100%	27.394.665.890	
P35 : Pembangunan, pemeliharaan dan perluasan utilitas perkotaan	Rasio Cakupan Pelayanan Air Minum	66,39%	67,39%	88.627.428.650	69,39%	525.884.157.000	71,39%	107.855.147.059	73,39%	113.707.253.336	75,39%	132.122.55.147	75,39%	132.122.55.147	PUPR
	Rasio Cakupan Pelayanan Air Limbah	0,39%	0,97%		1,56%		2,16%		2,77%		3,38%		3,38%		
	Rasio Bangunan dalam kondisi baik	37,20%	53,37%		61,46%		69,54%		77,63%		85,18%		85,18%		
P36 : Pembangunan , peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Ratio jalan status kota dalam Kondisi Baik	86.32%	89.06%	112.288.616.400	91.79%	112.373.273.000	94.53%	106.112.742.498	97.26%	105.228.469.644	100%	141.687.039.420	100%	141.687.039.420	
	Ratio jembatan dalam Kondisi Baik	94.59%	94.59%		97.3%		97.3%		100%		100%				
P37 : Peningkatan dan pemeliharaan sistem jaringan	Rasio Sistem Jaringan Drainase/su	n/a	5,26	10.990.300.000	15,79%	30.125.382.000	47,37%	33.204.284.379	57,89%	30.855.000.000	68,42%	44.799.000.000	68,42%	44.799.000.000	PUPR

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
drainase/sungai	ngai dalam Kondisi Baik														
P38: Perencanaan Teknis ke PU-an	Rasio dokumen perencanaan yang diimplementasi Kan	76%	80%	837.120.600	84%	7.182.478.000	90%	6.550.740.000	94%	6.496.150.500	100%	8.746.875.585	100%	8.746.875.585	
P39: Fasilitasi, koordinasi pembinaan dan keterpaduan tata ruang	Rasio Kesesuaian Ruang	94,46%	95%	904.097.000	95,2%	1.640.062.000	95,5%	1.612.854.000	95,7%	1.726.913.550	95,9%	2.325.238.304	95,9%	2.325.238.304	
S7 :Meningkatkan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks kualitas air	32,11	37,75		38,30		38,50		38,65		38,75		38,75		
	Indeks kualitas Udara	80,68	80,70		80,72		80,74		80,76		80,78		80,78		
	Indeks tutupan Lahan	39,33	41,30		41,70		42,00		42,30		42,50		42,50		
P40: Peningkatan kinerja pengelolaan sampah	Persentase Jumlah Sampah yang ditangani	79,16%	78,66%	29.483.208.050	78,16%	41.417.000.000	77,66%	38.392.063.564	77,16%	37.349.689.201	76,66%	49.336.289.445	76,66%	49.336.289.445	DLH
	Persentase jumlah pengurangan sampah ditingkat Sumber	11,73%	12,23%		12,73%		13,23%		13,73%		14,23%		14,23%		
P41 : Pengendalian Pencemaran dan	Jumlah Kegiatan Usaha yang	136	145	2.015.919.666	153	2.076.000.000	160	2.138.000.000	170	2.202.140.000,00	180	2.268.204.000	180	2.268.204.000	DLH

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Kerusakan Lingkungan Hidup	Sudah Mengelola Lingkungan sesuai dengan Dokumen Lingkungan				00.000										
P42 : Perlindungan dan Rehabilitasi Sumber daya alam	Persentase Kecukupan Ruang Terbuka Hijau Publik	11,79%	12%	10.658.995.600	14%	10.978.000.000	16%	10.176.300.000	18%	9.899.278.500	20%	13.075.199.640	20%	13.075.199.640	
Misi 4 : Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan															
T5 : Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,26	5,28		5,39		5,50		5,61		5,72		5,72		
	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,56	6,56		6,42		6,28		6,14		6,00		6,00		
S11 : Meningkatkan Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan	Persentase Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan	20	36		52		68		84		100		100		
P43 : Pembinaan, Peningkatan, dan Pengawasan	Cakupan Bina Perdagangan	88%	90%	4.389.858.500	92,25%	5.950.000.000	95,25%	5.463.900.000	97,50%	5.257.250.000	100%	7.014.150.000	100%	7.014.150.000	DPP

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Lama Kunjungan wisata	3 hari	3 hari		3 hari		3 hari		3 hari		3 hari		3 hari		
P47 : Pembinaan, Peningkatan dan Perluasan Pengelolaan Kebudayaan	Jumlah pelestarian, penyelenggaraan even seni dan budaya	5	5		5	1.500.000.000	6	1.390.500.000	6	1.352.647.500	6	1.786.608.100	6	1.786.608.100	
S14 : Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4%	8%		9%		9%		9%		9%		9%		
P48 : Peningkatan dan pengelolaan pendapatan daerah	Persentase pertumbuhan wajib pajak daerah	9%	9%	3.053.202.000	9%	3.644.000.000	9%	3.377.700.000	9%	3.285.751.500	9%	4.339.898.220	9%	4.339.898.220	BPPRD
	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Keakuratan Basis Data dan Pelaporan Pajak	60%	60%		63%		65%		68%		70%		70%		
	Persentase Penyelesaian Piutang Pajak	10%	10%		15%		20%		25%		30%		30%		
S15 : Meningkatkan Realisasi Investasi	Realisasi Investasi	410 M	430.5 M		430.5 M		474.62 M		498.35 M		523.37 M		523.37 M		

Misi/Tujuan/Sasaran/Program/Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
P50 : Peningkatan realisasi investasi	Realisasi Investasi	410 M	430.5 M	269.955.500	430.5 M	678.000.000	474.62 M	628.200.000	498.35 M	611.099.000	523.37 M	807.153.720	523.37 M	807.153.720	DPMPPTSP
S16 : Meningkatkan Penyerapan dan perlindungan Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	64,96%	65%	65,25%	65,50%	65,75%	66%	66%	66%	66%	66%	66%	66%	66%	
P51 : Peningkatan kualitas, perlindungan dan produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja terdaftar yang dilatih dan ditempatkan	6%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	DTKK DAN UKM
	Persentase Peningkatan penyerapan perlindungan tenaga kerja dan hubungan industrial yang Harmonis	56%	56%	796.731.500	57%	1.820.000.000	58%	1.686.627.810	59%	1.640.714.053	60%	2.167.093.310	60%	2.167.093.310	
S17 : Meningkatkan Daya Saing Usaha Skala mikro dan Kecil	Persentase usaha mikro kecil yang Berkualitas	7,61%	8,08%		8,54%		9,01%		9,47%		9,94%		10,00%		
	Persentase Daya Saing Produk IKM	4,3	4,3		5,35		6,5		7,5		8,3		8,3		
	Persentase koperasi	13%	16,06%		19,27%		23,85%		29,82%		36,70%		37,00%		

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	berkualitas														
P52 : Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	48,31%	49%	859.445.250	49,69%	885.000.000	50,38%	819.900.000	51,07%	797.580.500	51,76%	1.053.463.200	51,76%	1.053.463.200	DTKK DAN UKM
P53: Pembinaan dan peningkatan Industri Kecil Menengah	Cakupan Bina IKM	4,3	4,3	4.108.763.500	5,35	2.450.000.000	6,5	2.313.000.000	7,5	2.320.500.000	8,3	3.210.050.000	8,3	3.210.050.000	DPP
P54 : Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif yang melaksanakan RAT	41,28%	48,16%	609.120.250	57,33%	627.000.000	68,8%	580.500.000	82,56%	564.697.500	98,62%	745.865.200	98,62%	745.865.200	DTKK DAN UKM
Misi 5 : peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan															
T6 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	76.74	77.14		77.54		77.94		78.44		78.84		78.84		
	Indeks Pembangunan Gender	94.90	94.90		94.91		94.93		94.94		94.95		94.95		
	Kriteria Kota Layak Anak	Pratama	Madya		Nindya		Utama		KLA		KLA		KLA		
	Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam	60,23%	60,23%		61,43%		63%		64%		66%		66%		

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	pembangunan														
	Persentase Penduduk Miskin	8,49	7,89	7,29	6,69	6,09	5,49	5,49							
S18 : Meningkatkan Derajat Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	72,34%	72,35%	72,35%	72,36%	72,36%	72,37%	72,37%							
P55: Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Meningkatkan status puskesmas Yang Terakreditasi	5 Puskemas utama dan 0 Puskemas Paripurna	3 Puskemas Utama	8 Puskemas Utama	6 Puskemas Utama	3 Puskemas Paripurna	2 Puskemas Paripurna	2 Puskemas Paripurna							DINKES Dan RSUD
	Persentase Puskesmas dan Rumah Sakit yang telah memenuhi kelengkapan Sarana, Prasarana dan alat Kesehatan Sesuai Standar Minimal 85%.	0	20%	30%	40%	50%	60%	60%							
	Indeks kepuasan masyarakat Pelayanan	B	B	B	A	A	A	A							

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,68	10,68	10,69	10,70	10,71	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72			
P56 : Peningkatan akses, mutu dan tata kelola pendidikan	Angka partisipasi kasar (APK) PAUD dan PNF	'- APK PAUD usia 5-6 tahun 75 %, usia 3-5 50 %, usia 0-3 20%	'APK PAUD usia 5-6 tahun 90 %, usia 3-5 55 %, usia 0-3 30%	121.598.505.200	'APK PAUD usia 5-6 tahun 100 %, usia 3-5 60%, usia 0-3 35%	132.492.000.000	'APK PAUD usia 5-6 tahun 100 %, usia 3-5 65%, usia 0-3 40%	124.572.600.000	'APK PAUD usia 5-6 tahun 100 %, usia 3-5 70%, usia 0-3 45%	121.068.849.000	'APK PAUD usia 5-6 tahun 100 %, usia 3-5 75%, usia 0-3 50%	166.766.181.020	'APK PAUD usia 5-6 tahun 100 %, usia 3-5 75%, usia 0-3 50%	166.766.181.020	
	'Jumlah anak putus sekolah atau yang tidak melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi memperoleh layanan pendidikan	'Paket A : 128 Orang, Paket B : 370 Orang , Paket C : 418 Orang	'Paket A : 68 Orang, Paket B : 418 Orang , Paket C : 617 Orang		'Paket A : 60 Orang, Paket B : 310 Orang , Paket C : 408 Orang		'Paket A : 40 Orang, Paket B : 300 Orang , Paket C : 450 Orang		'Paket A : 35 Orang, Paket B : 250 Orang , Paket C : 425 Orang		'Paket A : 30 Orang, Paket B : 225 Orang , Paket C : 400 Orang		'Paket A : 30 Orang, Paket B : 225 Orang , Paket C : 400 Orang		
	'Jumlah anak putus sekolah atau yang tidak melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi memperoleh kecakapan hidup	'250 Orang	'140 Orang		'160 Orang		'180 Orang		'200 Orang		'220 Orang		'220 Orang		

Misi/Tujuan/Sasaran/Program/Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Angka partisipasi kasar (APK) SD	114,3%	114,4%		114,5%		114,6%		114,7%		114,8%		114,8%		
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	97,6%	97,8%		97,9%		98%		98,1%		98,2%		98,2%		
	Angka Partisipasi SD	100,48%	100,62%		100,70%		100,80%		100,85%		100,88%		100,88%		
	Rerata UAS SD	60,25%	60,50%		60,65%		60,73%		60,79%		60,82%		60,82%		
	Angka partisipasi kasar (APK) SMP	98,8%	99,0%		99,3%		99,5%		99,6%		99,8%		99,8%		
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	71,7%	72,0%		72,3%		72,5%		72,6%		72,8%		72,8%		
	Angka Partisipasi SMP	83%	83,5%		83,8%		84%		84,2%		84,4%		84,4%		
	Rerata UN SMP	50,93%	51,20%		51,40%		51,50%		51,60%		51,65%		51,65%		
	Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar nasional	92,60%	92,80%		93%		93,20%		93,40%		93,50%		93,50%		
P57 : Peningkatan Mutu dan Pelayanan Perpustakaan	Jumlah Rata - Rata pengunjung	32.092 Pengunjung	35.173 Pengunjung	552.691.000	37.836 Pengunjung	1.069.000	42.836 Pengunjung	990.900.000	47.836 Pengunjung	963.925.500	52.836 Pengunjung	1.273.175.590	52.836 Pengunjung	1.273.175.590	DKP (Dinas Kearsipan dan Perpustakaan)

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
	Perpustakaan Pertahun				00.000										
S20 : Mengendalikan angka Kelahiran Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	N/A	1,05		1,05		1,03		1,01		1,01		1,01		
	Persentase Jumlah Keluarga Sejahtera	N/A	96,23%		96,46%		96,69%		96,92%		97,15%		97,15%		
P58 : Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Laju Pertumbuhan Penduduk	N/A	1,05	4.759.993.000	1,05	4.902.000.000	1,03	4.544.100.000	1,01	4.420.039.950	1,01	5.838.567.560	1,01	5.838.567.560	DPPKB
	Persentase Jumlah Keluarga Sejahtera	N/A	96,23%		96,46%		96,69%		96,92%		97,15%		97,15%		
S21 : Meningkatkan Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender	94.89	94.90		94.91		94.93		94.94		94.95		94.95		
	Indeks Pemberdayaan Gender	68.07	68.10		68.20		68.30		68.40		68.50		68.50		
S22 : Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak	Persentase Hak Anak yang Terpenuhi	50%	70%		80%		90%		100%		100%		100%		
P59 : Peningkatan Kesetaraan Gender, perlindungan	Penurunan Ratio KDRT	0,025%	0,023%	3.591.385.000	0,021%	3.699.000.000	0,020%	3.428.100.000	0,019%	3.334.779.500	0,017%	4.404.655.120	0,017%	4.404.655.120	DPMPPA

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
perempuan dan anak															
	Rasio Penurunan Kekerasan Terhadap Anak	0,0247	0,02371	0,0227	0,0217	0,0207	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197		
	Persentase Organisasi Perempuan Yang Aktif	75%	80%	82%	85%	87%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%		
S23 : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	60.23%	60.23%	61.43%	63%	64%	66%	66%	66%	66%	66%	66%	66%		
P60 : Peningkatan pemberdayaan dan penguatan kelembagaan masyarakat	Persentase Kelompok UEM yang Aktif	73%	75%	4.351.493.000	77%	4.482.000.000	79%	4.154.400.000	81%	4.154.400.000	83%	5.337.854.260	83%	5.337.854.260	DPMPPA
	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Aktif	63%	65%		66%		67%		68%		70%		70%		
	Persentase Pemanfaatan Alat Teknologi Tepat Guna	70%	75%		77%		80%		83%		85%		85%		

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Persentase Usulan Sarana Prasarana Kelurahan yang Terakomodir	92%	93%	94%	95%	96%	97%	97%							
P61 : Peningkatan Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Persentase kelompok masyarakat yang dibina ditingkat kecamatan	40%	70%	75%	15.296.400.000	80%	13.886.730.000	85%	13.214.177.350	90%	16.996.886.802	90%	16.996.886.802	Semua Kecamatan	
P62: Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Persentase usulan masyarakat dikelurahan yang diakomodir	50%	50%	50%	27.812.000.000	60%	25.781.724.000	70%	25.079.888.180	80%	33.126.106.423	80%	33.126.106.423		
P63: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persentase kelembagaan masyarakat yang dibina ditingkat kelurahan	40%	45%	50%	7.998.000.000	60%	7.414.146.000	70%	7.213.166.470	80%	9.526.197.295	80%	9.526.197.295		
S24 : Meningkatkan Prestasi dan Kreativitas Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	N/A	50	50,5		51	51,5	52		52		52			
P64 : Program Pembinaan dan peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dan kepemudaan	Persentase pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam organisasi	30%	40%	50%	7.752.810.000	60%	8.442.810.090	70%	8.771.141.594	80%	12.372.469.142	80%	12.372.469.142	DISPORA	

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah

Kerangka pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional

Sumber-sumber pendanaan yang akan digunakan untuk mendanai pembangunan daerah terdiri dari APBD Kota Jambi, APBD Provinsi Jambi, APBN serta dana-dana dari pihak-pihak lain seperti swasta, CSR, masyarakat, bantuan lain yang tidak mengikat, dan, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja serta pembiayaan sebagaimana diuraikan pada bab III, maka kerangka pendanaan pembangunan daerah yang didasarkan pada perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang akan didistribusikan pada program-program pembangunan daerah dan program perangkat daerah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 7.1
 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi
 Tahun 2018 -2023

KAPASITAS RIIL KEUANGAN	PROYEKSI				
	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KAPASITAS RIIL KEUANGAN	915.500.926.000,00	975.177.365.000,00	1.038.126.249.000,00	1.100.048.498.000,00	1.142.059.194.000,00
BELANJA	1.710.612.142.885	1.768.300.775.000	1.841.855.716.000	1.921.061.684.000	2.015.077.903.000
Belanja Tidak Langsung	795.111.216.885	793.123.410.000	803.729.467.000	821.013.186.000	873.018.709.000
- Belanja Pegawai	769.336.362.485	770.842.287.000	781.427.555.000	798.690.382.000	822.651.093.000
- Belanja Bunga	-	-	-	-	-
- Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
- Belanja Hibah	14.725.400.000	14.725.400.000	14.725.400.000	14.725.400.000	42.749.215.000
- Belanja Bantuan Sosial	7.651.455.000	4.157.723.000	4.178.512.000	4.199.404.000	4.220.401.000
- Belanja Bagi Hasil					
- Belanja Bantuan Keuangan	1.292.132.400	1.292.133.000	1.292.133.000	1.292.133.000	1.292.133.000
- Belanja Tidak Terduga	2.105.867.000	2.105.867.000	2.105.867.000	2.105.867.000	2.105.867.000
Belanja Langsung	915.500.926.000	975.177.365.000	1.038.126.249.000	1.100.048.498.000	1.142.059.194.000
- Belanja Pegawai	64.233.008.032	65.517.669.000	66.828.022.000	68.164.582.000	69.527.874.000
- Belanja Modal	378.531.423.603	417.329.373.000	469.772.080.000	515.311.984.000	554.207.858.000
- Belanja Barang dan Jasa	460.107.061.790	472.736.494.365	492.330.323.000	501.526.147.000	516.571.932.000

7.2. **Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan**

Indikasi rencana program pembangunan dalam RPJMD terdiri dari rencana program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung terhadap janji dan program prioritas kepala daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta program prioritas pembangunan lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), mendukung program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), prioritas pusat dan provinsi, yang selanjutnya dijabarkan dan diimplementasikan dalam program prioritas yang bersifat operasional pada perangkat daerah yang disesuaikan dengan program-program yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, serta program-program tambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Selain itu akan disajikan pula pencapaian indikator dan target kinerja serta alokasi pendanaan pagu indikatif program. Pagu indikatif merupakan jumlah anggaran sementara yang dialokasikan untuk melaksanakan program dan kegiatan. Program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun renstra perangkat daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhannya.

Program operasional pada perangkat daerah yang disertai kebutuhan pendanaannya terbagi ke dalam 6 urusan wajib pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh 8(delapan) perangkat daerah, 18 urusan wajib bukan pelayanan dasar dan 6 urusan pilihan yang dilaksanakan oleh 13 (tigabelas) perangkat daerah, serta fungsi pendukung dan penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh 18 (delapanbelas)perangkat daerah.

Jumlah program operasional yang pada perangkat daerah sebanyak 73 program, yang terdiri dari 6 program untuk operasional kesekretariatan yang berada pada seluruh perangkat daerah dan 67 program yang terbagi pada perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaannya terinci pada tabel berikut ini :

Tabel 7.2
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Tahun 2018 -2023

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJMD			
				Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Urusan Wajib																
	Terkait Pelayanan Dasar																
	Pendidikan																DISDIK
	Program Peningkatan Akses, Mutu dan Tata Kelola Pendidikan (tahun 2019-2023)	Angka partisipasi kasar (APK) PAUD dan PNF	'- APK PAUD usia 5-6 tahun 75 %, usia 3-5 50 %, usia 0-3 20%	'APK PAUD usia 5-6 tahun 90 %, usia 3-5 55 %, usia 0-3 30%	121.598.505.200	'APK PAUD usia 5-6 tahun 100 %, usia 3-5 60%, usia 0-3 35%	132.492.000.000	'APK PAUD usia 5-6 tahun 100 %, usia 3-5 65%, usia 0-3 40%	124.572.600.000	'APK PAUD usia 5-6 tahun 100 %, usia 3-5 70%, usia 0-3 45%	121.068.849.000	'APK PAUD usia 5-6 tahun 100 %, usia 3-5 75%, usia 0-3 50%	166.766.181.020	'APK PAUD usia 5-6 tahun 100 %, usia 3-5 75%, usia 0-3 50%	166.766.181.020		
		'Jumlah anak putus sekolah atau yang tidak melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi memperoleh layanan pendidikan	'Paket A : 128 Orang, Paket B : 370 Orang , Paket C : 418 Orang	'Paket A: 68 Orang, Paket B: 418 Orang , Paket C: 617 Orang		'Paket A: 60 Orang, Paket B: 310 Orang , Paket C: 408 Orang		'Paket A : 40 Orang, Paket B : 300 Orang ,Paket C : 450 Orang		'Paket A: 35 Orang, Paket B : 250 Orang , Paket C : 425 Orang		'Paket A : 30 Orang, Paket B : 225 Orang , Paket C: 400 Orang		'Paket A : 30 Orang, Paket B : 225 Orang , Paket C : 400 Orang			
		'Jumlah anak putus sekolah atau yang tidak melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi memperoleh pendidikan	'250 Orang	'140 Orang		'160 Orang		'180 Orang		'200 Orang		'220 Orang		'220 Orang			

				kecakapan hidup															
				Angka partisipasi kasar (APK) SD	114,3%	114,4%		114,5%		114,6%		114,7%		114,8%		114,8%			
				Angka Partisipasi Murni (APM) SD	97,6%	97,8%		97,9%		98%		98,1%		98,2%		98,2%			
				Angka Partisipasi SD	100,48%	100,62%		100,70%		100,80%		100,85%		100,88%		100,88%			
				Rerata UAS SD	60,25%	60,50%		60,65%		60,73%		60,79%		60,82%		60,82%			
				Angka partisipasi kasar (APK) SMP	98,8%	99,0%		99,3%		99,5%		99,6%		99,8%		99,8%			
				Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	71,7%	72,0%		72,3%		72,5%		72,6%		72,8%		72,8%			
				Angka Partisipasi SMP	83%	83,5%		83,8%		84%		84,2%		84,4%		84,4%			
				Rerata UN SMP	50,93%	51,20%		51,40%		51,50%		51,60%		51,65%		51,65%			
				Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar nasional	92,60%	92,80%		93%		93,20%		93,40%		93,50%		93,50%			
				Kesehatan														DINKES DAN RSUD	
				Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan (tahun 2018-2019)	Jumlah puskesmas dengan pelayanan 24 jam	100%	100%	76.629.583.850											DINKES
				Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat (tahun 2020-2023)	Meningkatkan status puskesmas yang terakreditasi	5 Puskesmas utama dan 0 Puskesmas Paripurna	3 Puskesmas Utama	8 Puskesmas Utama	80.928.000.000	6 Puskesmas Utama	77.719.500.000	3 Puskesmas Paripurna	75.603.802.500	2 Puskesmas Paripurna	105.703.325.992	2 Puskesmas Paripurna	105.703.325.992		DINKES DAN RSUD
					Persentase Puskesmas dan Rumah Sakit yang telah memenuhi kelengkapan Sarana, Prasarana dan alat kesehatan sesuai standar minimal 85%.	0	20%	30%		40%		50%		60%		60%			

					Cakupan Pelayanan kesehatan ibu hamil	93,37%	100%		100%		100%		100%		100%		100%
					Cakupan Pelayanan Kesehatan ibu bersalin dan bayi baru lahir	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%
					Indeks kepuasan masyarakat pelayanan kesehatan rujukan	B	B		B		A		A		A		A
					Persentase pelayanan penyakit menular dan tidak menular	76,50%	100%		100%		100%		100%		100%		100%
					Persentase Rumah Sakit pemerintah yang ter akreditasi	50%	50%		50%		100%		100%		100%		100%
					Persentase Puskesmas yang menjalankan pelayanan kesehatan tradisional	80%	100%		100%		100%		100%		100%		100%
					Persentase masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan pelayanan kesehatan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%
					Persentase Pelayanan Imunisasi	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%
					Persentase pelayanan gizi masyarakat	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%
					Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	75%	100%		100%		100%		100%		100%		100%
					Cakupan pelayanan kesehatan remaja	40%	100%		100%		100%		100%		100%		100%
					Cakupan pelayanan kesehatan lansia	75%	100%		100%		100%		100%		100%		100%

		Program fasilitas koordinasi pembinaan dan keterpaduan tata ruang (tahun 2020-2023)	Rasio Kesesuaian Ruang			95.2%	1.640.062.000	95.5%	1.612.854.000	95.7%	1.726.913.550	95.9%	2.325.238.304	95.9%	2.325.238.304	
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Berbasis (tahun 2018-2019)	Rasio Pelayanan jaringan air minum perjumlah rumah	100%												
		Pembangunan, Pemeliharaan dan Perluasan Utilitas Perkotaan	Rasio Cakupan Pelayanan Air Minum	66,39%	67,39%	88.627.428.650	69,39%	525.884.157.000	71,39%	107.855.147.059	73,39%	113.707.253.336	75,39%	132.122.55.147	75,39%	132.122.55.147
			Rasio Cakupan Pelayanan Air Limbah	0,39%	0,97%		1,56%		2,16%		2,77%		3,38%		3,38%	
			Rasio Bangunan dalam kondisi baik	37,20%	53,37%		61,46%		69,54%		77,63%		85,18%		85,18%	
		Program Perencanaan Teknis ke PU-an (tahun 2020-2023)	Rasio dokumen perencanaan yang diimplementasikan	76%	80%	837.120.600	84%	7.182.478.000	90%	6.550.740.000	94%	6.496.150.500	100%	8.746.875.585	100%	8.746.875.585
		Pembangunan, Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-gorong (tahun 2018-2019)	Rasio Panjang Drainase dalam kondisi baik	n/a	5,26	10.990.300.000										
		Peningkatan dan pemeliharaan sistem jaringan drainase/sungai (tahun 2020-2023)	Rasio Sistem Jaringan Drainase/sungai dalam Kondisi Baik	n/a	5,26	10.990.300.000	15,79%	30.125.382.000	47,37%	33.204.284.379	57,89%	30.855.000.000	68,42%	44.799.000.000	68,42%	44.799.000.000

				Ratio jalan status kota dalam Kondisi Baik	86.32%	89.06%		91.79%		94.53%		97.26%		100%		100%		
			Pembangunan , peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (tahun 2018-2023)				112.288.616.400		112.373.273.000		106.112.742.498		105.228.469.644		141.687.039.420		141.687.039.420	
				Ratio jembatan dalam Kondisi Baik	94.59%	94.59%		97.3%		97.3%		100%		100%		100%		
			Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman															DPRKP
			Program Peningkatan kualitas Lingkungan Permukiman Berbasis Kawasan (tahun 2018-2019)	Persentase kawasan permukiman yang ditangani	78.79%													
			Program Penataan dan Peningkatan kualitas Lingkungan Permukiman Perkotaan (tahun 2020-2023)	Persentase penanganan Luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan		78.79%	3.804.751.000	83%	3.918.000.000	87%	3.631.500.000	87%	3.532.642.500	87%	4.665.996.790	87%	4.665.996.790	
			Program Pembangunan, pemeliharaan dan perluasan utilitas perkotaan (tahun 2018-2019)	Persentase Permukiman yang dilayani utilitas umum	20%	20%												
			Program Peningkatan, Pemeliharaan dan Penataan Utilitas Umum (TAHUN 2020-2023)	Persentase Permukiman yang dilayani Utilitas Umum			24.758.245.000	40%	23.000.000.000	60%	21.321.000.000	80%	20.740.595.000	100%	27.394.665.890	100%	27.394.665.890	

			Program Pengembangan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Perumahan	Persentase Pemenuhan Rumah bagi MBR	12.5%	12.5%	2.500.000.000	25%	2.500.000.000	50%	6.817.500.000	75%	6.631.912.500	100%	8.759.585.530	100%	8.759.585.530	
			Ketramtiran, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat															SATPOL PP, KESBANGPOL
			Program Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Trantibum Serta Penegakan Regulasi Daerah (tahun 2018-2019)	Terwujudnya penyelenggaraan trantibum dan penegakkan perda	100%	100%	5.069.000.000											SATPOL PP
			Program Penyelenggaraan Trantibum Serta Penegakan Regulasi Daerah (tahun 2020-2023)	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum Dan Ketramtiran Masyarakat	60%	75%	5.069.000.000	85%	6.221.000.000	90%	5.766.300.000	90%	5.609.328.500	98%	7.408.932.740	98%	7.408.932.740	
				Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kota Jambi	55%	69%		74%		79%		84%		98%		98%		
			Program Pembinaan Dan Perlindungan Masyarakat (tahun 2018-2023)	Rasio Petugas perlindungan masyarakat	45%	54%	798.718.800	68%	822.000.000	72%	761.400.000	80%	740.673.000	85%	978.297.890	85%	978.297.890	
			Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (tahun 2018-2019)	Terwujudnya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	76,71%	100%	563.819.000											KESBANGPOL
			Program Peningkatan Karakter, Ideologi dan Wawasan Kebangsaan serta Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (tahun 2020-2023)	Persentase peningkatan peran forum kemasyarakatan dalam mengantisipasi sumber potensi konflik di daerah				100%	700.000.000	100%	648.900.000	100%	631.235.500	100%	833.751.900	100%	833.751.900	
			Program Pembinaan, Pemberdayaan dan Fasilitasi bagi Orkemas dan Parpol (tahun 2019-2023)	Persentase peningkatan pembinaan organisasi kemasyarakatan dalam mewujudkan kondisi daerah yang	100%	100%	273.848.000	100%	500.000.000	100%	463.500.000	100%	450.882.500	100%	595.536.760	100%	595.536.760	

			Peningkatan Kualitas, Perlindungan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja terdaftar yang dilatih dan ditempatkan	6%	7%	796.731.500	7%	1.820.000.000	7%	1.686.627.810	7%	1.640.714.053	7%	2.167.093.310	7%	2.167.093.310	
				Persentase Peningkatan penyerapan perlindungan tenaga kerja dan hubungan industrial yang harmonis	56%	56%		57%		58%		59%		60%	60%			
			Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak															DPMPPA
			Peningkatan Kesetaraan Gender, perlindungan perempuan dan anak	Penurunan Ratio KDRT	0,025%	0,023%	3.591.385.000	0,021%	3.699.000.000	0,020%	3.428.100.000	0,019%	3.334.779.500	0,017%	4.404.655.120	0,017%	4.404.655.120	
				Rasio Penurunan Kekerasan Terhadap Anak	0,0247	0,02371		0,0227		0,0217		0,0207		0,0197		0,0197		
				Persentase Organisasi Perempuan Yang Aktif	75%	80%		82%		85%		87%		90%		90%		
			Pangan															DPKP
			Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat dan Pemberdayaan Kelembagaan Tani (tahun 2018-2023)	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	88,5	88,5	1.143.319.000	89	2.375.200.000	89,5	2.927.943.000	90	2.765.279.500	96,90	3.819.360.000	96,90	3.819.360.000	
				Penurunan Pangan segar yang Tercemar	7	7		6		5		4		3		3		
			Lingkungan Hidup															DLH
			Program Penurunan Beban Pencemaran (tahun 2018-2019)	Jumlah sungai dan danau yang memenuhi baku mutu kelas IV	64,79%	64,79%	2,015,919,666											
			Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (tahun 2020-2023)	Jumlah Kegiatan Usaha yang Sudah Mengelola Lingkungan sesuai dengan Dokumen				153	2.076.000.000	160	2.138.000.000	170	2.202.140.000,00	180	2.268.204.000	180	2.268.204.000	

				Lingkungan														
				Program Peningkatan Pengelolaan Lingkungan, RTH, ruang publik dan keanekaragaman hayati (tahun 2018-2019)	Persentase RTH terhadap luas wilayah	20%	20%	10.658.995.6000										
					Jumlah dokumen kajian lingkungan													
					Jumlah usaha yang wajib rekomendasi izin gangguan													
					Persentase ketaatan kegiatan usaha													
					Jumlah pohon pelindung													
					Persentase RTH terhadap luas wilayah													
				Perlindungan dan Rehabilitasi Sumber daya alam	Persentase Kecukupan Ruang Terbuka Hijau Publik	11,79%	12%	10.658.995.600	14%	10.978.000.000	16%	10.176.300.000	18%	9.899.278.500	20%	13.075.199.640	20%	13.075.199.640
				Program Peningkatan Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Pengelolaan Persampahan (tahun 2018-2019)	Persentase cakupan pelayanan persampahan	75,43%	79,66%											
				Peningkatan kinerja pengelolaan sampah (tahun 2020-2023)	Persentase Jumlah Sampah yang ditangani	79,16%	78,66%	29.483.208.050	78,16%	41.417.000.000	77,66%	38.392.063.564	77,16%	37.349.689.201	76,66%	49.336.289.445	72%	49.336.289.445
					Persentase jumlah pengurangan sampah ditingkat sumber	11,73%	12,23%		12,73%		13,23%		13,73%		14,23%		14,23%	
				Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil														DUKCAPIL
				Program Peningkatan Tata Kelola Administrasi Kependudukan (tahun 2018-2023)	cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	93%	93%	2.550.648.000	96%	2.627.000.000	99%	2.434.500.000	100%	2.368.227.500	100%	3.128.011.150	100%	3.128.011.150

			Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan (tahun 2018-2019)	capaian ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan sesuai yang ditargetkan	65%	65%	3.825.530.000										
			Program Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan (tahun 2020-2023)	Capaian ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan				74%		84%	6.433.200.000	91%	6.258.074.000	100%	8.265.811.170	100%	8.265.811.170
				Cakupan yang terlayani angkutan umum		41,39%		54,75%		70,19%		85,09%		100%		100%	
			Program Peningkatan Pengelolaan dan keselamatan perhubungan (tahun 2018-2019)	Pengurangan jumlah Titik Kemacetan	60 Titik	41 Titik	4.423.020.000										
			Program Pengendalian dan Peningkatan Disiplin Berlalu Lintas (tahun 2020-2023)	Pengurangan Jumlah Titik Kemacetan				36 Titik	1.555.000.000	28 Titik	1.440.900.000	20 Titik	1.401.675.500	0 Titik	1.797.442.700	0 Titik	1.797.442.700
			Program Peningkatan Pelayanan Perparkiran	Persentase Pelayanan Perparkiran	68,17%	74,76%	2.239.964.000	80,74%	2.307.000.000	88,99%	2.138.400.000	94,58%	2.080.188.000	100%	27.475.510.100	100%	27.475.510.100
			Diskominfo														DISKOMINFO
			Program Optimalisasi Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pembangunan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (tahun 2018-2019)	Persentase peningkatan ekosistem TIK	20%												
			Program Peningkatan akses dan kualitas informasi publik (tahun 2020-2023)	Persentase Peningkatan ekosistem TIK	20%	30%	0	45%	6.400.000.000	60%	5.932.800.000	70%	6.621.296.000	80%	7.622.863.770	80%	7.622.863.770
				Cakupan akses dan kualitas informasi publik	30%	40%		60%		70%		80%		90%		90%	
			Koperasi, Usaha kecil dan menengah														NAKER DAN UMKM
			Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi (tahun 2018-2023)	Persentase koperasi aktif yang melaksanakan RAT	41,28%	48,16%	609.120.250	57,33%	627.000.000	68,8%	580.500.000	82,56%	564.697.500	98,62%	745.865.200	98,62%	745.865.200

	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM (tahun 2018-2023)	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	48,31%	49%	859.445.250	49,69%	885.000.000	50,38%	819.900.000	51,07%	797.580.500	51,76%	1.053.463.200	51,76%	1.053.463.200	
	Penanaman Modal															DPMPTSP
		Persentase peningkatan jumlah pemohon yang mengajukan izin	65%													
	Program Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan Pelayanan Publik (tahun 2018-2019)	Persentase penerbitan perizinan sesuai SOP dan SP														
		Persentase peningkatan Indeks Kepuasan masyarakat														
	Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan (tahun 2020-2023)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	86,45%	86,55%	673.760.000	86,75 %	793.000.000	86,85 %	734.400.000	86,95 %	714.408.000	87 %	943.606.460	87 %	943.606.460	
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi (tahun 2018-2019)	Persentase peningkatan nilai realisasi investasi	410 M													
	Peningkatan Realisasi Investasi (tahun 2020-2023)	Realisasi Investasi		430,5 M	269.955.500	430,5 M	678.000.000	474,62M	628.200.000	498,35 M	611.099.000	523,37 M	807.153.720	523,37 M	807.153.720	
	Kepemudaan dan Olahraga															DISPORA
	Program Pembinaan dan peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dan kepemudaan (tahun 2019-2023)	Persentase pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam organisasi	30%	40%		50%		60%	8.442.810.090	70%	8.771.141.594	80%	12.372.469.142	80%	12.372.469.142	
		Persentase pembinaan cabang olahraga prestasi	68,89%	71,11%	7.752.810.000	73,33%	8.528.091.000	75,56%		77,78 %		80%		80%		

			Statistik																DISKOMINFO
			Program Manajemen data/informasi/statistik daerah (tahun 2020-2023)	Tingkat ketersediaan data/informasi/statistik daerah	5%	10%	0	20%	155.000.000	39%	143.100.000	40%	139.204.500	50%	183.864.470	50%	183.864.470		DISKOMINFO
			Persandian																DISKOMINFO
			Program Penyelenggaraan pengamanan informasi pemerintah daerah (tahun 2020-2023)	Rasio Jumlah Informasi Milik Pemerintah yang diamankan	15%	20%	0	35%	600.000.000	50%	556.200.000	55%	541.059.000	65%	714.643.240	65%	714.643.240		DISKOMINFO
			Kebudayaan																DISPARBUD
			Pembinaan, Peningkatan dan Perluasan Pengelolaan Budaya dan Pariwisata (tahun 2018-2019)	Jumlah penyelenggaraan dan partisipasi dalam event seni budaya dan cagar budaya yang dipugar	N/A														
			Pembinaan, peningkatan dan perluasan pengelolaan kebudayaan (tahun 2020-2023)	Jumlah pelestarian, penyelenggaraan even seni dan budaya	5	5		5	1.500.000.000	6	1.390.500.000	6	1.352.647.500	6	1.786.608.100	6	1.786.608.100		
			Perpustakaan																DKP
			Program Peningkatan Mutu dan pelayanan Perpustakaan	Jumlah Rata - Rata pengunjung Perpustakaan Pertahun	32.092 Pengunjung	35.173 Pengunjung	552.691.000	37.836 Pengunjung	1.069.000.000	42.836 Pengunjung	990.900.000	47.836 Pengunjung	963.925.500	52.836 Pengunjung	1.273.175.590	52.836 Pengunjung	1.273.175.590		
			Kearsipan																DKP
			Program Pengelolaan, Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah (tahun 2018-2023)	Jumlah arsip yang terselamatkan	46.019	1.200	725.920.500	1.200	1.247.000.000	1.200	1.155.600.000	1.200	1.124.142.000	1.200	1.484.793.640	52.019	1.484.793.640		

			Pembinaan, Peningkatan dan Pengawasan Perdagangan (tahun 2020-2023)	Cakupan bina perdagangan		90%		92,25%	5.950.000.000	95,25%	5.463.900.000	97,50%	5.257.250.000	100%	7.014.150.000	100%	7.014.150.000	
			Perindustrian															DPP
			Program Pembinaan, Pengembangan, Peningkatan dan Pengawasan Industri Kecil dan Menengah (tahun 2018-2019)	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	4,3													
			Pembinaan dan peningkatan Industri kecil menengah (tahun 2020-2023)	cakupan bina industri kecil menengah		4,3	4.108.763.500	5,35	2.450.000.000	6,5	2.313.000.000	7,5	2.320.500.000	8,3	3.210.050.000	8,3	3.210.050.000	
			Kelautan dan Perikanan															DPKP
			Fungsi Penunjang Urusan															
			Perencanaan															BAPPEDA
			Program Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	Persentase kesesuaian capaian kinerja perangkat daerah	100%	100%	4.278.543.000	100%	4.906.000.000	100%	4.547.700.000	100%	4.423.901.500	100%	5.843.193.520	100%	5.843.193.520	
			Keuangan															BPKAD DAN BPPRD
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset Daerah (tahun 2018-2023)	Jumlah OPD yang melaksanakan Penyusunan Dokumen Penganggaran, Pengendalian Keuangan Daerah Tepat Waktu dan sesuai aturan	33 OPD	33 OPD	2.546.041.150	35 OPD	3.622.000.000	37 OPD	3.343.500.000	38 OPD	3.239.732.500	40 OPD	4.262.764.370	40 OPD	4.262.764.370	BPKAD
				Persentase Kemampuan OPD dalam hal Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Belanja	75%	75%		80%		85%		95%		100%		100%		

				Jumlah OPD yang menyampaikan Laporan Data Barang Milik Daerah yang Akurat dan Tepat waktu	20 PD	20 PD		20 PD		30 PD		40 PD		40 PD		40 PD		
				Jumlah OPD dan BLUD yang menyajikan Laporan Keuangan tepat waktu dan sesuai SAP dan SAK	37 OPD	37 OPD		40 OPD dan 11 BLUD		40 OPD dan 21 BLUD		40 OPD dan 21 BLUD		40 OPD dan 22 BLUD		40 OPD dan 22 BLUD		
				Persentase pertumbuhan wajib pajak daerah	9%	9%	3.053.202.000	9%	3.644.000.000	9%	3.377.700.000	9%	3.285.751.500	9%	4.339.898.220	9%	4.339.898.220	BPPRD
			Program Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah (tahun 2018-2023)	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase Keakuratan Basis Data dan Pelaporan Pajak	60%	60%		63%		65%		68%		70%		70%		
				Persentase Penyelesaian Piutang Pajak	10%	10%		15%		20%		25%		30%		30%		
			Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan															BKPSDMD
			Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (tahun 2018-2019)	Indeks Profesionalitas ASN	55%	56%	3.856.200.000	57,5%		59%		60,5%		62%		62%		
			Program Penataan, pelayanan, pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur (tahun 2020-2023)	Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kebutuhan	93,23%	93,23%		96%	4.971.000.000	97%	4.608.000.000	98%	4.482.560.000	100%	10.920.670.720	100%	10.920.670.720	
				Persentase Penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu	85%	85%		89%		91%		93%		95%		95%		

			Peningkatan koordinasi, fasilitasi dan monitoring bidang perekonomian (tahun 2020-2023)	Persentase tindak lanjut pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan Monitoring Bidang perekonomian	75%		75%	823.000.000	75%	762.300.000	75%	741.548.500	75%	979.454.380	75%	979.454.380	
			Optimalisasi Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (2018-2019)	Tercapainya penyebarluasan informasi pembangunan daerah	71,43%	71,43%	6.200.000.000										
			Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan pemerintah daerah (2020-2023)	Persentase Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	71,43%	71,43%		72,23%	6.386.000.000	73,68%	5.919.300.000	75%	5.758.163.500	76,19%	7.605.517.510	76,19%	7.605.517.510
			Program Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah, sekretariat daerah, Aparatur dan Keprotokolan	Meningkatnya kinerja layanan keprotokolan	70%	70%	3.400.000.000	80%	4.000.000.000	90%	3.696.300.000	100%	3.582.928.500	100%	4.716.065.940	100%	4.716.065.940
				Jumlah telaah/rekomendasi staf ahli walikota terhadap kebijakan pemerintah daerah	1 Telaah/rekomendasi	1 Telaah/rekomendasi		2 Telaah/rekomendasi		3 Telaah rekomendasi	3 Telaah rekomendasi		3 Telaah rekomendasi	3 Telaah rekomendasi			
			Peningkatan pelayanan administrasi umum, keuangan setda dan kerumahtanggaan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana rumah jabatan dan kantor Sekretariat Daerah	32,08%	32,08%	1.590.060.000	17,3%	1.279.000.000	17,07%	1.188.900.000	17,07%	1.310.989.000	17,07%	1.846.540.660	17,07%	1.846.540.660
			Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan (tahun 2018-2019)	Terwujudnya sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan yang berkualitas dan tersedianya sarana dan prasarana pemkot	100%	80%	175.000.000										
			Penataan Administrasi pemerintahan dan kewilayahan (tahun 2020-2023)	Ketepatan waktu Penyampaian LPPD	48%	48%		61%		74%		87%		100%		100%	
		Persentase Ketersediaan Lahan Tanah Untuk Pelayanan Masyarakat		13%	13%		16%	12.953.000.000	20%	13.806.900.000	23%	15.131.045.500	32%	22.165.441.030	32%	22.165.441.030	
		Nilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		N/A	3 Kec		6 Kec		9 Kec		11 Kec		11 Kec		11 Kec		
			Peningkatan Kerjasama Daerah (tahun 2018-2023)	Persentase Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	100%	100%	725.000.000	100%	846.000.000	100%	781.200.000	100%	757.384.000	100%	997.100.390	100%	997.100.390

				Persentase Kesepakatan bersama yang di tindaklanjuti	66,67%	66,67%		76,92%		85,71%		93,33 %		100%		100%		
				Persentase Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Penataan Peraturan Perundang-undangan dan penyelesaian perkara pemerintah daerah (tahun 2018-2023)	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang diselesaikan	20%	20%	1.092.000.000	20%	1.124.000.000	20%	1.041.300.000	20%	1.012.953.500	20%	1.337.932.490	20%	1.337.932.490
					Persentase penyelesaian perkara Pemerintah Daerah	27,27%	27,27%		27,27%		27,27%		27,27 %		27,27%		27,27%	
				Tata Kelola Organisasi Pemerintahan dan Administrasi Pembangunan (tahun 2018-2019)	Terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, efisien, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas	50%	50%	385.620.000										
				Tata Kelola Organisasi dan Ketatalaksanaan (tahun 2020-2023)	Rata-rata indeks pelayanan publik	20%	20%		20%	765.00.000	20%	747.000.000	20%	726.750.000	20%	951.549.290	20%	951.549.290
					Persentase meningkatnya kualitas anjab dan ABK sesuai dengan peraturan yang berlaku	21%	16%		30%	120.000.000	50%	112.500.000	75%	110.500.000	100%	147.150.000	100%	147.150.000
					Ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja	100%	15%		38%	315.000.000	59%	193.500.000	79%	187.000.000	100%	245.250.000	100%	245.250.000
				Tata Kelola Organisasi Pemerintahan dan Administrasi Pembangunan (tahun 2018-2019)	Terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, efisien, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas	20%	20%	494.060.000										
				Tata Kelola Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa (tahun 2020-2023)	Persentase tertib administrasi pembangunan	50%	70%		75%	2.279.000.000	80%	2.112.300.000	85%	2.054.798.500	100%	2.714.025.880	100%	2.714.025.880
					Persentase Kinerja Kelembagaan Pengadaan	19,13%	19,13%		37,81%		30,44%		65,00 %		69,06%		69,06%	
				Pemerintahan Umum			-		-		-		-		-		-	KECAMATAN
				Pemberdayaan Masyarakat (tahun 2018-2019)	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kecamatan	40%	40%											
				Pelayanan Umum Kecamatan (tahun	Indeks Kepuasan Masyarakat	83	85		89	13.831.600.000	92	13.109.400.0	95	13.047.058.00	98	17.689.569.67	98	17.689.569.67

			2020-2023)	terhadap Pelayanan Kecamatan			16501443.584			00		0		0		0	
			Peningkatan Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan tahun 2020-2023)	Persentase kelompok masyarakat yang dibina ditingkat kecamatan	40%	70%		75%	15.296.400.000	80%	13.886.730.000	85%	13.214.177.350	90%	16.996.886.802	90%	16.996.886.802
			Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan (tahun 2020-2023)	Persentase usulan masyarakat dikelurahan yang diakomodir	50%	50%		50%	27.812.000.000	60%	25.781.724.000	70%	25.079.888.180	80%	33.126.106.423	80%	33.126.106.423
			Pemberdaya masyarakat kelurahan (tahun 2020-2023)	Persentase kelembagaan masyarakat yang dibina ditingkat kelurahan	40%	45%		50%	7.998.000.000	60%	7.414.146.000	70%	7.213.166.470	80%	9.526.197.295	80%	9.526.197.295

Program Rutin OPD

NO	NAMA OPD	PROGRAM	2019	2020	2021	2022	2023
1	BAPPEDA	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.844.378.000,00				
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	728.220.000,00				
		Peningkatan Displin Aparatur	58.500.000,00				
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	40.000.000,00				
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0				
		Perencanaan SKPD	0				
		Pengembangan Data/Informasi	235.000.000,00				
		Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran		1.567.532.000,00	1.621.000.000,00	1.783.100.000,00	1.961.410.000,00
		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1.120.000.000,00	1.158.000.000,00	1.273.800.000,00	1.401.180.000,00
		Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		45.000.000,00	46.000.000,00	50.600.000,00	55.660.000,00
2	BKPSDMD	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.524.959.000,00				
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	581.750.000,00				
		Peningkatan Displin Aparatur	46.000.000,00				

		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	20.000.000,00				
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000,00				
		Perencanaan SKPD	10.000.000,00				
		Pengembangan Data/Informasi	259.911.000,00				
		Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran		2.946.681.000,00	3.048.000.000,00	3.352.800.000,00	3.688.080.000,00
		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1.019.700.000,00	1.054.000.000,00	1.159.400.000,00	1.275.340.000,00
		Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		738.600.000,00	764.000.000,00	840.400.000,00	924.440.000,00
3	BPKAD	Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.035.358.850,00				
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.788.240.000,00				
		Peningkatan Disiplin Aparatur	118.000.000,00				
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	82.500.000,00				
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	14.455.000,00				
		Perencanaan SKPD	9.950.000,00				
		Pengembangan Data/Informasi	0				
		Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran		4.350.000.000,00	4.499.000.000,00	4.948.900.000,00	5.443.790.000,00
		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		921.250.000,00	952.000.000,00	1.047.200.000,00	1.151.920.000,00

		Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		171.000.000,00	176.000.000,00	193.600.000,00	212.960.000,00
4	BPPRD	Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.121.248.000,00				
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	981.400.000,00				
		Peningkatan Displin Aparatur	100.150.000,00				
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	35.000.000,00				
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	199.000.000,00				
		Perencanaan SKPD	10.000.000,00				
		Pengembangan Data/Informasi	0				
		Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran		5.572.852.000,00	5.764.000.000,00	6.340.400.000,00	6.974.440.000,00
		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		600.750.000,00	621.000.000,00	683.100.000,00	751.410.000,00
		Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		43.000.000,00	44.000.000,00	48.400.000,00	53.240.000,00
5	DISDIK	Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.498.284.700,00				
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.182.346.600,00				
		Peningkatan Displin Aparatur	117.895.000,00				
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	297.999.500,00				
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0				

		Perencanaan SKPD	0				
		Pengembangan Data/Informasi	191.370.000,00				
		Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran		7.374.992.000,00	7.628.000.000,00	8.390.800.000,00	9.229.880.000,00
		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1.370.784.000,00	1.417.000.000,00	1.558.700.000,00	1.714.570.000,00
		Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		220.507.000,00	228.000.000,00	250.800.000,00	275.880.000,00
6	DINKES	Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.466.576.500,00				
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	930.700.000,00				
		Peningkatan Disiplin Aparatur	72.000.000,00				
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	202.549.000,00				
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000,00				
		Perencanaan SKPD	10.000.000,00				
		Pengembangan Data/Informasi	82.264.650,00				
		Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran		4.925.316.500,00	5.094.000.000,00	5.603.400.000,00	6.163.740.000,00
		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1.073.395.000,00	1.110.000.000,00	1.221.000.000,00	1.343.100.000,00
		Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		197.264.650,00	204.000.000,00	224.400.000,00	246.840.000,00
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.673.264.000,00				
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	42.387.669.114,00				

		Peningkatan Displin Aparatur					
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	450.686.000,00				
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2.000.000,00				
		Perencanaan SKPD	2.500.000,00				
		Pengembangan Data/Informasi					
7	DPUPR	Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.701.887.000,00				
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.425.850.000,00				
		Peningkatan Displin Aparatur	125.000.000,00				
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	200.000.000,00				
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0				
		Perencanaan SKPD	10.000.000,00				
		Pengembangan Data/Informasi	5.964.000,00				
		Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran		5.513.257.000,00	5.702.000.000,00	6.272.200.000,00	6.899.420.000,00
		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1.000.000.000,00	1.034.000.000,00	1.137.400.000,00	1.251.140.000,00
		Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		20.000.000,00	20.000.000,00	22.000.000,00	24.200.000,00
8	DPRKP	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.192.244.000,00				

		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	480.740.000,00				
		Peningkatan Displin Aparatur	40.500.000,00				
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	55.000.000,00				
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	7.000.000,00				
		Perencanaan SKPD	25.000.000,00				
		Pengembangan Data/Informasi	15.000.000,00				
		Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran		4.647.567.200,00	4.807.000.000,00	5.287.700.000,00	5.816.470.000,00
		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		600.800.000,00	621.000.000,00	683.100.000,00	751.410.000,00
		Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		220.000.000,00	227.000.000,00	249.700.000,00	274.670.000,00
9	BKPB	Pelayanan Administrasi Perkantoran	934.569.000,00				
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	251.074.000,00				
		Peningkatan Displin Aparatur	20.000.000,00				
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5.000.000,00				
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0				
		Perencanaan SKPD	0				
		Pengembangan Data/Informasi	0				

		Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran		963.404.000,00	996.000.000,00	1.095.600.000,00	1.205.160.000,00
		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		449.500.000,00	464.000.000,00	510.400.000,00	561.440.000,00
		Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		22.000.000,00	22.000.000,00	24.200.000,00	26.620.000,00
10	DINSOS	Pelayanan Administrasi Perkantoran	959.298.000,00				
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	567.800.000,00				
		Peningkatan Disiplin Aparatur	34.800.000,00				
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	15.000.000,00				
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000,00				
		Perencanaan SKPD	5.000.000,00				
		Pengembangan Data/Informasi	8.000.000,00				
		Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran		2.115.250.000,00	2.188.000.000,00	2.406.800.000,00	2.647.480.000,00
		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		380.000.000,00	393.000.000,00	432.300.000,00	475.530.000,00
		Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		40.000.000,00	41.000.000,00	45.100.000,00	49.610.000,00
11	DPPKB	Pelayanan Administrasi Perkantoran	881.045.000,00				
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	985.800.000,00				
		Peningkatan Disiplin Aparatur	93.750.000,00				
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	17.000.000,00				

		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9.000.000,00				
		Perencanaan SKPD	6.000.000,00				
		Pengembangan Data/Informasi	307.000.000,00				
		Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran		1.303.901.000,00	1.348.000.000,00	1.482.800.000,00	1.631.080.000,00
		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		439.500.000,00	454.000.000,00	499.400.000,00	549.340.000,00
		Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		18.000.000,00	18.000.000,00	19.800.000,00	21.780.000,00
12	DPMPPA	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.214.477.000,00				
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.229.495.000,00				
		Peningkatan Disiplin Aparatur	35.700.000,00				
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	16.000.000,00				
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000,00				
		Perencanaan SKPD	8.000.000,00				
		Pengembangan Data/Informasi	100.000.000,00				
		Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran		2.831.553.100,00	2.928.000.000,00	3.220.800.000,00	3.542.880.000,00
		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		379.047.500,00	392.000.000,00	431.200.000,00	474.320.000,00
		Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		146.900.000,00	151.000.000,00	166.100.000,00	182.710.000,00

13	DLH	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.601.067.584,00				
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	708.920.000,00				
		Peningkatan Displin Aparatur	50.850.000,00				
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100.000.000,00				
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2.498.000,00				
		Perencanaan SKPD	3.884.400,00				
		Pengembangan Data/Informasi	0				
		Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran		2.865.432.963,00	2.964.000.000,00	3.260.400.000,00	3.586.440.000,00
		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		683.392.500,00	706.000.000,00	776.600.000,00	854.260.000,00
		Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		63.001.520,00	65.000.000,00	71.500.000,00	78.650.000,00
		14	DKPS	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.916.990.000,00		
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.709.156.000,00						
Peningkatan Displin Aparatur	67.200.000,00						
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.000.000,00						
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000,00						
Perencanaan SKPD	7.000.000,00						

		Pengembangan Data/Informasi	96.250.000,00				
		Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran		4.103.554.000,00	4.244.000.000,00	4.668.400.000,00	5.135.240.000,00
		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		359.000.000,00	371.000.000,00	408.100.000,00	448.910.000,00
		Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		198.000.000,00	204.000.000,00	224.400.000,00	246.840.000,00
15	DINAS PERHUBUNGAN	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.981.051.000,00				
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.661.580.000,00				
		Peningkatan Disiplin Aparatur	445.520.000,00				
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000.000,00				
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	8.800.000,00				
		Perencanaan SKPD	20.000.000,00				
		Pengembangan Data/Informasi	0				
		Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran		11.300.000.000,00	11.688.000.000,00	12.856.800.000,00	14.142.480.000,00
		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1.420.000.000,00	1.468.000.000,00	1.614.800.000,00	1.776.280.000,00
		Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		17.000.000,00	17.000.000,00	18.700.000,00	20.570.000,00
16	DISKOMINFO	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.086.790.000,00				
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	339.220.000,00				
		Peningkatan Disiplin Aparatur	42.000.000,00				

		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	25.000.000,00				
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.400.000,00				
		Perencanaan SKPD	1.800.000,00				
		Pengembangan Data/Informasi	126.600.000,00				
		Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran		2.688.001.000,00	2.780.000.000,00	3.058.000.000,00	3.363.800.000,00
		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		745.000.000,00	787.000.000,00	865.700.000,00	952.270.000,00
		Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		115.000.000,00	118.000.000,00	129.800.000,00	142.780.000,00
17	DTKK	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.405.655.000,00				
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	424.550.000,00				
		Peningkatan Disiplin Aparatur	43.400.000,00				
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	113.000.000,00				
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2.588.000,00				
		Perencanaan SKPD	9.136.000,00				
		Pengembangan Data/Informasi	42.300.000,00				
		Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran		1.610.590.000,00	1.665.000.000,00	1.831.500.000,00	2.014.650.000,00
		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		938.500.000,00	970.000.000,00	1.067.000.000,00	1.173.700.000,00

		Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		67.300.000,00	69.000.000,00	75.900.000,00	83.490.000,00
18	DPMPTSP	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.459.812.500,00				
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	938.083.000,00				
		Peningkatan Displin Aparatur	189.965.000,00				
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	20.000.000,00				
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3.750.000,00				
		Perencanaan SKPD	7.709.000,00				
		Pengembangan Data/Informasi	80.000.000,00				
		Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran		2.088.813.000,00	2.160.000.000,00	2.376.000.000,00	2.613.600.000,00
		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		599.965.000,00	620.000.000,00	682.000.000,00	750.200.000,00
		Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		120.000.000,00	124.000.000,00	136.400.000,00	150.040.000,00
19	DKP	Pelayanan Administrasi Perkantoran	952.236.000,00				
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.288.932.500,00				
		Peningkatan Displin Aparatur	41.500.000,00				
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	6.000.000,00				
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		0			

		Perencanaan SKPD	0				
		Pengembangan Data/Informasi	0				
		Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran		4.792.673.675,00	4.957.000.000,00	5.452.700.000,00	5.997.970.000,00
		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		360.050.000,00	372.000.000,00	409.200.000,00	450.120.000,00
		Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		3.527.150,00	3.000.000,00	3.300.000,00	3.630.000,00
20	DISPORA	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.157.360.000,00				
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	884.090.000,00				
		Peningkatan Disiplin Aparatur	37.500.000,00				
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	30.000.000,00				
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0				
		Perencanaan SKPD	0				
		Pengembangan Data/Informasi	0				
		Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran		1.282.000.000,00	1.326.000.000,00	1.458.600.000,00	1.604.460.000,00
		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		475.000.000,00	491.000.000,00	540.100.000,00	594.110.000,00
		Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		50.000.000,00	51.000.000,00	56.100.000,00	61.710.000,00
		21	DPK	Pelayanan Administrasi Perkantoran	793.210.000,00		
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	272.060.000,00						

		Peningkatan Displin Aparatur	20.000.000,00				
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.000.000,00				
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0				
		Perencanaan SKPD	10.000.000,00				
		Pengembangan Data/Informasi	174.000.000,00				
		Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran		1.470.000.000,00	1.520.000.000,00	1.672.000.000,00	1.839.200.000,00
		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		435.000.000,00	449.000.000,00	493.900.000,00	543.290.000,00
		Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		130.000.000,00	134.000.000,00	147.400.000,00	162.140.000,00
22	DPP	Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.120.614.000,00				
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.176.580.000,00				
		Peningkatan Displin Aparatur	144.400.000,00				
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	15.000.000,00				
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.400.000,00				
		Perencanaan SKPD	3.600.000,00				
		Pengembangan Data/Informasi	0				
		Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran		4.364.000.000,00	4.514.000.000,00	4.965.400.000,00	5.461.940.000,00

		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		2.150.000.000,00	2.223.000.000,00	2.445.300.000,00	2.689.830.000,00
		Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		180.000.000,00	186.000.000,00	204.600.000,00	225.060.000,00
23	DISDAMKAR	Pelayanan Administrasi Perkantoran	898.170.000,00				
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	758.295.000,00				
		Peningkatan Disiplin Aparatur	426.750.000,00				
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	278.100.000,00				
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4.550.000,00				
		Perencanaan SKPD	5.500.000,00				
		Pengembangan Data/Informasi					
		Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran		5.006.000.000,00	5.178.000.000,00	5.695.800.000,00	6.265.380.000,00
		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1.245.000.000,00	1.290.000.000,00	1.419.000.000,00	1.560.900.000,00
		Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		17.000.000,00	17.000.000,00	18.700.000,00	20.570.000,00
		24	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.093.134.000,00		
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	981.010.000,00						
Peningkatan Disiplin Aparatur	135.000.000,00						
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	53.800.000,00						
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan	1.000.000,00						

		Keuangan					
		Perencanaan SKPD	9.060.000,00				
		Pengembangan Data/Informasi	15.600.000,00				
		Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran		4.431.540.000,00	4.583.000.000,00	5.041.300.000,00	5.545.430.000,00
		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		741.500.000,00	767.000.000,00	843.700.000,00	928.070.000,00
		Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		35.600.000,00	36.000.000,00	39.600.000,00	43.560.000,00
25	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Pelayanan Administrasi Perkantoran	586.220.000,00				
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	597.400.000,00				
		Peningkatan Disiplin Aparatur	0				
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0				
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0				
		Perencanaan SKPD	0				
		Pengembangan Data/Informasi	0				
		Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran		6.917.465.000,00	7.155.000.000,00	7.870.500.000,00	8.657.550.000,00
		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		600.253.000,00	625.000.000,00	687.500.000,00	756.250.000,00
		Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		34.500.000,00	35.000.000,00	38.500.000,00	42.350.000,00
26	INSPEKTORAT DAERAH	Pelayanan Administrasi Perkantoran	997.000.000,00				

		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	442.710.000,00				
		Peningkatan Displin Aparatur	34.000.000,00				
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	216.600.000,00				
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0				
		Perencanaan SKPD	0				
		Pengembangan Data/Informasi	0				
		Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran		1.243.855.000,00	1.286.000.000,00	1.414.600.000,00	1.556.060.000,00
		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		720.000.000,00	750.000.000,00	825.000.000,00	907.500.000,00
		Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		58.800.000,00	60.000.000,00	66.000.000,00	72.600.000,00
27	SEKRETARIAT DPRD	Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.944.225.000,00				
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.550.361.500,00				
		Peningkatan Displin Aparatur	321.350.000,00				
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	74.000.000,00				
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0				
		Perencanaan SKPD	0				
		Pengembangan Data/Informasi	100.000.000,00				

		Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran		15.889.295.000,00	16.435.000.000,00	18.078.500.000,00	19.886.350.000,00
		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		3.511.417.000,00	3.632.000.000,00	3.995.200.000,00	4.394.720.000,00
		Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		120.000.000,00	124.000.000,00	136.400.000,00	150.040.000,00
28	SEKRETARIAT DAERAH	Pelayanan Administrasi Perkantoran	10.538.450.000,00				
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4.259.248.000,00				
		Peningkatan Disiplin Aparatur	212.040.000,00				
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	215.000.000,00				
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.131.010.000,00				
		Perencanaan SKPD	0				
		Pengembangan Data/Informasi	0				
		Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran		13.385.290.915,00	13.845.000.000,00	15.229.500.000,00	16.752.450.000,00
		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		5.348.920.400,00	5.532.000.000,00	6.085.200.000,00	6.693.720.000,00
		Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		1.004.150.000,00	1.040.000.000,00	1.144.000.000,00	1.258.400.000,00
				-	-	-	
	KECAMATAN				-	-	-
30	KECAMATAN KOTA BARU	Pelayanan Administrasi Perkantoran	997.591.500,00				
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	248.400.000,00				

		Peningkatan Displin Aparatur	32.500.000,00				
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.000.000,00				
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2.025.000,00				
		Perencanaan SKPD	1.500.000,00				
		Pengembangan Data/Informasi	6.000.000,00				
		Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran		3.828.992.000,00	3.960.000.000,00	4.356.000.000,00	4.791.600.000,00
		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		300.000.000,00	310.000.000,00	341.000.000,00	375.100.000,00
		Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		260.000.000,00	270.000.000,00	297.000.000,00	326.700.000,00
31	KECAMATAN TELANAIPURA	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.199.580.000,00				
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	206.137.000,00				
		Peningkatan Displin Aparatur	48.750.000,00				
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.000.000,00				
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2.120.000,00				
		Perencanaan SKPD	2.120.000,00				
		Pengembangan Data/Informasi	2.500.000,00				
		Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran		1.703.326.000,00	1.761.000.000,00	1.937.100.000,00	2.130.810.000,00

		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		300.500.000,00	310.000.000,00	341.000.000,00	375.100.000,00		
		Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		217.000.000,00	225.000.000,00	247.500.000,00	272.250.000,00		
32	KECAMATAN JELUTUNG	Pelayanan Administrasi Perkantoran	815.019.000,00						
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	130.540.000,00						
		Peningkatan Disiplin Aparatur	34.000.000,00						
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	42.500.000,00						
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000,00						
		Perencanaan SKPD	5.000.000,00						
		Pengembangan Data/Informasi	77.175.000,00						
		Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran		2.442.919.160,00	2.526.000.000,00	2.778.600.000,00	3.056.460.000,00		
		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		241.800.000,00	250.000.000,00	275.000.000,00	302.500.000,00		
		Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		323.000.000,00	335.000.000,00	368.500.000,00	405.350.000,00		
				Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.083.796.000,00				
		33	KECAMATAN PASAR	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	491.800.000,00				
Peningkatan Disiplin Aparatur	27.500.000,00								
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	20.000.000,00								
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan	5.000.000,00								

		Kuangan					
		Perencanaan SKPD	5.000.000,00				
		Pengembangan Data/Informasi	30.000.000,00				
		Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran		2.410.800.000,00	2.493.000.000,00	2.742.300.000,00	3.016.530.000,00
		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		344.500.000,00	356.000.000,00	391.600.000,00	430.760.000,00
		Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		225.000.000,00	235.000.000,00	258.500.000,00	284.350.000,00
34	KECAMATAN JAMBI SELATAN	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.142.265.000,00				
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	34.000.000,00				
		Peningkatan Displin Aparatur					
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.000.000,00				
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2.010.000,00				
		Perencanaan SKPD	3.060.000,00				
		Pengembangan Data/Informasi	4.800.000,00				
		Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran		2.500.400.000,00	2.586.000.000,00	2.844.600.000,00	3.129.060.000,00
		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		185.000.000,00	200.000.000,00	220.000.000,00	242.000.000,00
		Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		60.000.000,00	65.000.000,00	71.500.000,00	78.650.000,00
35	KECAMATAN JAMBI TIMUR	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.709.175.000,00				

		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	321.700.000,00				
		Peningkatan Displin Aparatur	0				
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0				
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3.000.000,00				
		Perencanaan SKPD	16.000.000,00				
		Pengembangan Data/Informasi	16.000.000,00				
		Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran		2.550.028.000,00	2.637.000.000,00	2.900.700.000,00	3.190.770.000,00
		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		410.000.000,00	425.000.000,00	467.500.000,00	514.250.000,00
		Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		302.000.000,00	312.000.000,00	343.200.000,00	377.520.000,00
36	KECAMATAN DANAU TELUK	Pelayanan Administrasi Perkantoran	961.764.000,00				
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	164.450.000,00				
		Peningkatan Displin Aparatur	39.000.000,00				
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000,00				
		Perencanaan SKPD	10.000.000,00				
		Pengembangan Data/Informasi	5.000.000,00				

		Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran		1.111.734.000,00	1.149.000.000,00	1.263.900.000,00	1.390.290.000,00
		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		149.000.000,00	154.000.000,00	169.400.000,00	186.340.000,00
		Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		35.000.000,00	40.000.000,00	44.000.000,00	48.400.000,00
37	KECAMATAN PELAYANGAN	Pelayanan Administrasi Perkantoran	806.080.000,00				
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	158.300.000,00				
		Peningkatan Disiplin Aparatur	30.000.000,00				
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.000.000,00				
		Perencanaan SKPD	4.500.000,00				
		Pengembangan Data/Informasi	15.520.000,00				
		Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran		2.261.236.000,00	2.339.000.000,00	2.572.900.000,00	2.830.190.000,00
		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		226.000.000,00	235.000.000,00	258.500.000,00	284.350.000,00
		Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		131.000.000,00	135.000.000,00	148.500.000,00	163.350.000,00
38	KECAMATAN ALAM BARAJO	Pelayanan Administrasi Perkantoran	914.200.000,00				
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	400.000.000,00				
		Peningkatan Disiplin Aparatur	36.900.000,00				
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	15.000.000,00				

		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3.000.000,00				
		Perencanaan SKPD	6.000.000,00				
		Pengembangan Data/Informasi	20.000.000,00				
		Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran		2.005.000.000,00	2.073.000.000,00	2.280.300.000,00	2.508.330.000,00
		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		237.400.000,00	245.000.000,00	269.500.000,00	296.450.000,00
		Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		214.000.000,00	225.000.000,00	247.500.000,00	272.250.000,00
39	KECAMATAN DANAU SIPIN	Pelayanan Administrasi Perkantoran	934.514.000,00				
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	380.562.000,00				
		Peningkatan Disiplin Aparatur	33.500.000,00				
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.000.000,00				
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2.000.000,00				
		Perencanaan SKPD	2.000.000,00				
		Pengembangan Data/Informasi	7.000.000,00				
		Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran		2.133.264.000,00	2.206.000.000,00	2.426.600.000,00	2.669.260.000,00
		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		236.500.000,00	245.000.000,00	269.500.000,00	296.450.000,00
		Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		247.000.000,00	255.000.000,00	280.500.000,00	308.550.000,00

40	KECAMATAN PAAL MERAH	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.171.380.357,00				
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	265.608.750,00				
		Peningkatan Displin Aparatur	37.500.000,00				
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	6.283.235,00				
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9.756.623,00				
		Perencanaan SKPD	4.531.090,00				
		Pengembangan Data/Informasi	5.100.000,00				
		Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran		2.203.925.600,00	2.279.000.000,00	2.506.900.000,00	2.757.590.000,00
		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		192.000.000,00	200.000.000,00	220.000.000,00	242.000.000,00
		Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		57.350.000,00	60.218.100,00	66.240.173,00	72.871.000,00

operasional. Kinerja menggambarkan berhasil atau tidaknya tujuan organisasi. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja.

Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) bertujuan memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir masa jabatan, yang ditunjukkan melalui akumulasi pencapaian indikator keluaran (*outcome*) program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator Kinerja Daerah secara teknis dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcome*) atau komposisinya (*impact*). Indikator Kinerja Daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan, setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

8.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Target indikator kinerja utama pembangunan Kota Jambi tahun 2018-2023, dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah tahun 2013-2018 dan memperhatikan peluang serta tantangan selama kurun waktu lima tahun mendatang sampai dengan tahun 2023, tersaji dalam Tabel 8.1.

Pada dasarnya, seluruh indikator yang tercantum dalam Tabel 8.1 diharapkan menjadi indikator dari visi Kota Jambi Tahun 2018-2023 yaitu “Menjadikan Kota Jambi Sebagai Pusat Perdagangan Jasa Berbasis Masyarakat Berakhlak dan Berbudaya, Dengan Mengedepankan Pelayanan Prima” dengan misi:

1. Penguatan birokrasi dan meningkatkan pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi.
2. Penguatan penegakan hukum, ketentraman, ketertiban dan kenyamanan masyarakat.
3. Penguatan pengelolaan infrastruktur dan utilitas perkotaan, serta penataan lingkungan.
4. Penguatan kapasitas ekonomi perkotaan.
5. Meningkatkan kualitas masyarakat perkotaan.

IPM Kota Jambi ditargetkan meningkat menurut hasil proyeksi berdasarkan pencapaian IPM tahun-tahun sebelumnya, sebagai acuan adalah pencapaian IPM pada tahun 2017 sebesar 76,74. Peningkatan target IPM ini selaras dengan meningkatnya komponen-komponen pendukung IPM. Komponen IPM yang perannya cukup dinamis dalam mempengaruhi pencapaian IPM adalah Pengeluaran Per Kapita Per Tahun yang Disesuaikan. Hal ini terlihat dari tabel di atas bahwa pergerakan komponen lain seperti Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup, relatif lebih lambat kenaikannya.

Pengeluaran Per Kapita Per Tahun, sangat dipengaruhi kondisi perekonomian daerah. Namun yang menjadi persoalan, perekonomian daerah sangat tergantung kepada situasi kondisi perekonomian nasional, regional bahkan internasional. Di sisi lain situasi kondisi perekonomian nasional, regional, dan internasional jauh diluar kewenangan pemerintah daerah.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Jambi ditargetkan berkisar antara 5-6 persen per tahun selama kurun waktu, dari tahun 2019 sampai dengan 2023. Target ini diproyeksikan berdasarkan pencapaian LPE yang hanya mencapai 4,68 persen pada akhir RPJMD tahun 2013-2018. Pertumbuhan diproyeksikan stabil, mengingat pencapaian diatas 5 persen itu dapat dikategorikan termasuk tinggi.

Uraian tentang LPE ini akan terkait dengan PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. Hal ini terjadi karena konsep-konsep yang ada saling

berkaitan.PDRB atas dasar harga berlaku adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, yang digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah.Sementara PDRB atas dasar harga konstan adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga tahun dasar, yang digunakan untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi (LPE) atau dengan bahasa teknis perhitungan LPE berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun beriringan.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Indikator ini merupakan akumulasi pencapaian indikator *outcome* atau *impact* dari pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Penetapan indikator dan target kinerja didasarkan pada hasil evaluasi capaian kinerja pemerintahan daerah masa lalu, dan proyeksi yang disertai perhitungan atas hasil pelaksanaan program dan kegiatan kedepan dalam kurun waktu 2018 – 2023.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang perencanaan pembangunan daerah dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penetapan indikator kinerja daerah dibagi kedalam dua kelompok, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

IKU yang termuat dalam RPJMD adalah IKU Kepala Daerah yang merupakan gambaran ukuran keberhasilan Kepala Daerah secara umum dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah disamping pemenuhan janji politik yang disampaikan pada saat kampanye.Sedangkan IKD merupakan indikator kinerja pemerintahan daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 8.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Jambi

No	Indikator	Target Tahun ke				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Reformasi Birokrasi	BB	BB	A	A	A
2	Persentase tingkat pelanggaran terhadap peraturan daerah	9%	6%	5%	3%	3%
3	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	5,1	5,67	6,0	6,40	7,0
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	52,06	52,39	52,57	52,74	52,86
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,28	5,39	5,50	5,61	5,72
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,56	6,42	6,28	6,14	6,00
7	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	8%	9%	9%	9%	9%
8	Indeks Pembangunan Manusia	77,14	77,54	77,94	78,44	78,84

Tabel 8.2

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Jambi

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian							
	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,26	5,28	5,39	5,50	5,61	5,72	5,72
	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	2,36%	2,37%	2,38%	2,39%	2,40%	2,41%	2,41%
	Laju Inflasi	3,02	3,02	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	PDRB Perkapita ADHK (Ribu Rupiah) / ADHB (Juta)	31,2/ 48,47	32,4/ 50,1	33,6/ 52,9	34,8 / 54,3	36,1/ 56	37,2 / 57,6	37,2 / 57,6
	Indeks Gini	0,375	0,37	0,36	0,36	0,35	0,35	0,35
	Kemiskinan (persen) / Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	8,49 / 50,68	8,09 / 49,28	7,69 / 47,88	7,29 / 46,48	6,89 / 45,08	6,89 / 43,68	6,89 / 43,68
	Indeks Pembangunan Masyarakat	76,74	77,14	77,54	77,94	78,44	78,44	78,44
	Pengeluaran Perkapita (Ribu Rupiah)	11.312	11.637	11.912	12.187	12.462	12.737	12.737

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	ASPEK DAYA SAING							
	ASPEK PELAYANAN UMUM							
	Pelayanan Urusan Wajib							
	Terkait Pelayanan Dasar							
	PEDIDIKAN							
	Pendidikan dasar							
	Angka partisipasi kasar (APK) PAUD dan PNF	- APKPAUD usia 5-6 tahun 75 %, usia 3-5 50 %, usia 0-3 20%	'APKPAUD usia 5-6 tahun 90 %, usia 3-5 55 %, usia 0-3 30%	'APKPAUD usia 5-6 tahun 100 %, usia 3-5 60%, usia 0-3 35%	'APK PAUD usia 5-6 tahun 100 %, usia 3-5 65%, usia 0-3 40%	'APK PAUD usia 5-6 tahun 100 %, usia 3-5 70%, usia 0-3 45%	'APK PAUD usia 5-6 tahun 100 %, usia 3-5 75%, usia 0-3 50%	'APK PAUD usia 5-6 tahun 100 %, usia 3-5 75%, usia 0-3 50%
	Angka partisipasi kasar (APK) SD	114,3%	114,4%	114,5%	114,6%	114,7%	114,8%	114,8%
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	97,6%	97,8%	97,9%	98%	98,1%	98,2%	98,2%
	Angka Partisipasi SD	100,48%	100,62%	100,70%	100,80%	100,85%	100,88%	100,88%
	Rerata UAS SD	60,25%	60,50%	60,65%	60,73%	60,79%	60,82%	60,82%

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Persentase Ketenagaan kesehatan sesuai dengan kompetensi	96%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Peningkatan pelayanan kefarmasian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan Pasien masyarakat miskin	24.282 org	30.000 org	30.000 org	30.000 org	30.000 org	30.000 org	30.000 org
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	N/A	5,1	5,67	6,0	6,40	7,00	7,00
	Cakupan Layanan Infrastruktur Dan Utilitas	50,59%	53,07%	60,77%	70,61%	78,25%	85,79%	85,79%
	Rasio Cakupan Pelayanan Air Minum	66,39%	67,39%	69,39%	71,39%	73,39%	75,39%	75,39%
	Rasio Cakupan Pelayanan Air Limbah	0,39%	0,97%	1,56%	2,16%	2,77%	3,38%	3,38%
	Rasio jalan status kota dalam Kondisi Baik	86,32%	89,06%	91,79%	94,53%	97,26%	100%	100%
	Rasio Bangunan dalam kondisi baik	37,20%	53,37%	61,46%	69,54%	77,63%	85,18%	85,18%
	Rasio Kesesuaian Ruang	94,46%	95%	95,2%	95,5%	95,7%	95,9%	95,9%
	Ratio jembatan dalam Kondisi Baik	94,59%	94,59%	97,3%	97,3%	100%	100%	100%
	Rasio Sistem Jaringan Drainase/sungai dalam Kondisi Baik	n/a	5,26	15,79%	47,37%	57,89%	68,42%	68,42%
	Rasio dokumen perencanaan yang diimplementasikan	76%	80%	84%	90%	94%	100%	100%

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Persentase pemberdayaan sosial potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam menangani PMKS	60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase peningkatan penangan jumlah keluarga miskin	60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Layanan Wajib Non Dasar							
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
	Indeks Pembangunan Gender	94.89	94.90	94.91	94.93	94.94	94.95	94.95
	Indeks Pemberdayaan Gender	68.07	68.10	68.20	68.30	68.40	68.50	68.50
	Persentase Hak Anak yang Terpenuhi	50%	70%	80%	90%	100%	100%	100%
	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	60.23%	60.23%	61.43%	63%	64%	66%	66%
	Penurunan Ratio KDRT	0,025%	0,023%	0,021%	0,02%	0,019%	0,017%	0,017%
	Rasio Penurunan Kekerasan Terhadap Anak	0,0247	0,02371	0,0227	0,0217	0,0207	0,0197	0,0197
	Persentase Organisasi Perempuan Yang Aktif	75%	80%	82%	85%	87%	90%	90%

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	PANGAN							
	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan (gram/ kapita/ hari)	2.944	2.944	2.989	3.080	3.180	3.200	3.200
		76,24	76,24	79	82	85	88	88
	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	87,90%	90,59%	95,80%	96,40%	96,40%	96,60%	96,60%
	Penurunan Pangan segar yang Tercemar	7	7	6	5	4	3	3
	LINGKUNGAN HIDUP							
	Indeks Kualitas Air	32,11	37,75	38,30	38,50	38,65	38,75	38,75
	Indeks Kualitas Udara	80,68	80,70	80,72	80,74	80,76	80,78	80,78
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	39,33	41,30	41,70	42,00	42,30	42,50	42,50
	Persentase Jumlah Sampah yang ditangani	79,16%	78,66%	78,16%	77,66%	77,16%	76,66%	76,66%

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Persentase jumlah pengurangan sampah ditingkat sumber	11,73%	12,23%	12,73%	13,23%	13,73%	14,23%	14,23%
	Jumlah Kegiatan Usaha yang Sudah Mengelola Lingkungan sesuai dengan Dokumen Lingkungan	136	145	153	160	170	180	180
	Persentase Kecukupan Ruang Terbuka Hijau Publik	11,79%	12%	14%	16%	18%	20%	20%
	ADMINISTRASI PECATATAN SIPIL							
	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	93%	93%	96%	99%	100%	100%	100%
	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	82%	82%	86,5%	91 %	95,5%	100%	100%
	Validitas Database Kependudukan	87%	87%	89%	91%	93%	95%	95%
	Cakupan Pemanfaatan data Kependudukan	-	26,8%	33,3%	45%	72,7%	100%	100%
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT							
	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	60.23%	60.23%	61.43%	63%	64%	66%	66%
	Persentase Kelompok UEM yang Aktif	73%	75%	77%	79%	81%	83%	83%
	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Aktif	63%	65%	66%	67%	68%	70%	70%
	Persentase Pemanfaatan Alat Teknologi Tepat Guna	70%	75%	77%	80%	83%	85%	85%

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Usulan Sarana Prasarana Kelurahan yang Terakomodir	92%	93%	94%	95%	96%	97%	97%
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
	Laju Pertumbuhan Penduduk	N/A	1,05	1,05	1,03	1,01	1,01	1,01
	Persentase Jumlah Keluarga Sejahtera	N/A	96,23%	96,46%	96,69%	96,92%	97,15%	97,15%
	PERHUBUNGAN							
	Capaian ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan	65%	65%	74%	84%	91%	100%	100%
	Cakupan yang terlayani angkutan umum	33.89%	41.39%	54.75%	70.19%	85.09%	100%	100%
	Pengurangan Jumlah Titik Kemacetan	60 Titik	41 Titik	36 Titik	28 Titik	20 Titik	0 Titik	0 Titik
	Persentase Pelayanan Perpustakaan	68.17%	74.76%	80.74%	88.99%	94.58%	100%	100%
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,33	2,33	2,44	2,55	2,66	2,77	2,77
	Persentase Peningkatan ekosistem TIK	20%	30%	45%	60%	70%	80%	80%
	Cakupan akses dan kualitas informasi publik	30%	40%	60%	70%	80%	90%	90%

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	KOPERASI , USAHA KECIL DAN MENENGAH							
	Persentase usaha mikro kecil yang berkualitas	7,61%	8,08%	8,54%	9,01%	9,47%	9,94%	10,00%
	Persentase koperasi berkualitas	13%	16,06%	19,27%	23,85%	29,82%	36,70%	37,00%
	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	48,31%	49%	49,69%	50,38%	51,07%	51,76%	51,76%
	Persentase koperasi aktif yang melaksanakan RAT	41,28%	48,16%	57,33%	68,8%	82,56%	98,62%	98,62%
	PENANAMAN MODAL							
	Realisasi Investasi	410 M	430.5 M	430.5 M	474.62 M	498.35 M	523.37 M	523.37 M
	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							
	Indeks Pembangunan Pemuda	N/A	50	50,5	51	51,5	52	52
	Persentase pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam organisasi	30%	40%	50%	60%	70%	80%	80%
	Persentase pembinaan cabang olahraga prestasi	68,89%	71,11%	73,33%	75,56%	77,78%	80%	80%
	STATISTIK							

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tingkat ketersediaan data/informasi/statistik daerah	5%	10%	20%	39%	40%	50%	50%
	PERSANDIAN							
	Rasio Jumlah Informasi Milik Pemerintah yang diamankan	15%	20%	35%	50%	55%	65%	65%
	KEBUDAYAAN							
	Jumlah pelestarian, penyelenggaraan even seni dan budaya	5	5	5	6	6	6	6
	PERPUSTAKAAN							
	Jumlah Rata - Rata pengunjung Perpustakaan Pertahun	32.092 Pengunjung	35.173 Pengunjung	37.836 Pengunjung	42.836 Pengunjung	47.836 Pengunjung	52.836 Pengunjung	52.836 Pengunjung
	KEARSIPAN							
	Jumlah arsip yang terselamatkan	46.019	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	52.019
	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	-	20	36	36	36	36	164
	Layanan Urusan Pilihan							

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	PARIWISATA							
	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	2,36%	2,37%	2,38%	2,39%	2,40%	2,41%	2,41%
	Jumlah kunjungan wisatawan	400.000	450.000	500.000	600.000	650.000	700.000	700.000
	PAD sektor pariwisata	43 M	43,5 M	45,5 M	47 M	48 M	50 M	50 M
	Lama Kunjungan wisata	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari
	PERTANIAN							
	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan (gram/ kapita/ hari)	2.944	2.944	2.989	3.080	3.180	3.200	3.200
		76,24	76,24	79	82	85	88	88
	PERDAGANGAN							
	Persentase Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan	20	36	52	68	84	100	100
	Cakupan Bina Perdagangan	88%	90%	92,25%	95,25%	97,50%	100%	100%
	PERINDUSTRIAN							

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Persentase Daya Saing Produk IKM	4,3	4,3	5,35	6,5	7,5	8,3	8,3
	Cakupan Bina IKM	4,3	4,3	5,35	6,5	7,5	8,3	8,3
	Penunjang Urusan							
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN							
	Persentase kesesuaian capaian kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	KEUANGAN							
	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4%	8%	9%	9%	9%	9%	9%
	Jumlah OPD yang melaksanakan Penyusunan Dokumen Penganggaran, Pengendalian Keuangan Daerah Tepat Waktu dan sesuai aturan	33 OPD	33 OPD	35 OPD	37 OPD	38 OPD	40 OPD	40 OPD
	Persentase Kemampuan OPD dalam hal Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Belanja	75%	75%	80%	85%	95%	100%	100%
	Jumlah OPD dan BLUD yang mneyajikan laporan keuangan tepat waktu dan sesuai SAP dan SAK	37 OPD	37 OPD	40 OPD dan 11 BLUD	40 OPD dan 21 BLUD	40 OPD dan 21 BLUD	40 OPD dan 22 BLUD	40 OPD dan 22 BLUD
	Jumlah OPD yang menyampaikan Laporan Data Barang Milik Daerah yang Akurat dan Tepat waktu	20 PD	20 PD	20 PD	30 PD	40 PD	40 PD	40 PD

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Persentase pertumbuhan wajib pajak daerah	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Keakuratan Basis Data dan Pelaporan Pajak	60%	60%	63%	65%	68%	70%	70%
	Persentase Penyelesaian Piutang Pajak	10%	10%	15%	20%	25%	30%	30%
	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							
	Indeks Profesionalitas ASN	55%	56%	57,5%	59%	60,5%	62%	62%
	Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kebutuhan	93,23%	93,23%	96%	97%	98%	100%	100%
	Persentase Penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu	85%	85%	89%	91%	93%	95%	95%
	Persentase ASN yang mendapatkan pembinaan pengendalian	72%	72%	83%	88%	94%	100%	100%
	Persentase Penilaian Kinerja ASN	85%	85%	87%	87%	87%	87%	87%
	Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi	32%	32%	46%	53%	60%	67%	67%
	Persentase Pengembangan Kualifikasi ASN			27%	52%	84%	100%	100%
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Persentase Dokumen hasil penelitian yang digunakan sebagai dasar perencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	PENGAWASAN							
	Indeks persepsi anti Korupsi	n/a	3,65	3,69	3,73	3,75	3,8	3,8
	Cakupan pelaksanaan pembinaan internal dan pengendalian kebijakan KDH	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	SETWAN							
	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD	1 dok	6 dok	6 dok	6 dok	6 dok	6 dok	6 dok
	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran untuk mengakomodir Program- program kerja DPRD	9 dok	9 dok	9 dok	9dok	9dok	9dok	9dok
	SEKRETARIAT DAERAH							
	Meningkatnya kinerja layanan keprotokolan	70%	70%	80%	90%	100%	100%	100%
	Jumlah telaah/rekomendasi staf ahli walikota terhadap kebijakan pemerintah daerah	1 Telaah/rekomendasi	1 Telaah/rekomendasi	2 Telaah/rekomendasi	3 Telaah/rekomendasi	3 Telaah/rekomendasi	3 Telaah/rekomendasi	3 Telaah/rekomendasi

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana rumah jabatan dan kantor Sekretariat Daerah	32,08%	32,08%	17,3%	17,07%	17,07%	17,07%	17,07%
	Ketepatan waktu Penyampaian LPPD	48%	48%	61%	74%	87%	100%	100%
	Persentase Ketersediaan Lahan Tanah Untuk Pelayanan Masyarakat	13%	13%	16%	20%	23%	32%	32%
	Nilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	N/A	3 Kec	6 Kec	9 Kec	11 Kec	11 Kec	11 Kec
	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang diselesaikan	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
	Persentase penyelesaian perkara Pemerintah Daerah	27,27%	27,27%	27,27%	27,27%	27,27%	27,27%	27,27%
	Persentase Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Kesepakatan bersama yang di tindaklanjuti	66,67%	66,67%	76,92%	85,71%	93,33%	100%	100%
	Persentase Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase tindak lanjut pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan Monitoring Bidang perekonomian	45%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
	Rata-rata indeks pelayanan publik	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
	Persentase meningkatnya kualitas anjab dan ABK sesuai dengan peraturan yang berlaku	21%	16%	30%	50%	75%	100%	100%
	Ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja	100%	15%	38%	59%	79%	100%	100%
	Persentase meningkatnya kualitas anjab dan ABK sesuai dengan peraturan yang berlaku	16%	16%	38%	59%	79%	100%	100%
	Ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja	15%	15%	30%	50%	75%	100%	100%

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Rata-rata indeks pelayanan publik	B	B	B	A	A	A	A
	Persentase tindak lanjut pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan keagamaan, kesejahteraan sosial dan kepemudaan	66,67%	66,67%	75%	80%	100%	100%	100%
	Persentase Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	71,43%	71,43%	72,23%	73,68%	75%	76,19%	76,19%
	Persentase tertib administrasi pembangunan	50%	70%	75%	80%	85%	100%	100%
	Persentase Kinerja pengadaan barang/jasa	19,13%	19,13%	37,81%	30,44%	65,00%	69,06%	69,06%
	Pemerintahan Umum							
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap PATEN	83%	85%	89%	92%	95%	98%	98%
	Persentase kelompok masyarakat yang dibina ditingkat kecamatan	40%	70%	75%	80%	85%	90%	90%
	Persentase usulan masyarakat dikelurahan yang diakomodir	50%	50%	50%	60%	70%	80%	80%
	Persentase kelembagaan masyarakat yang dibina ditingkat kelurahan	40%	45%	50%	60%	70%	80%	80%
	ASPEK DAYA SAING							
	ASPEK DAYA SAING DAERAH							
	Kemampuan Ekonomi							

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
1.1	Indeks Reformasi Birokrasi	N/A	BB	BB	A	A	A	A	
1.2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	N/A	2,33	2,44	2,55	2,66	2,77	2,77	
1.3	Nilai SAKIP	B	B	BB	BB	BB	A	A	
2.	Pertanian								
2.1	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan (gram/kapita/hari)	Energi	2.944	2.944	2.989	3.080	3.180	3.200	3.200
		Protein	76,24	76,24	79	82	85	88	88



WALIKOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA JAMBI TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Republik Indonesia Nomor 20);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
22. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015– 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 2-218/2018);
26. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2009 Nomor 13);
27. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 09);
28. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Struktur Perangkat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI
dan
WALIKOTA JAMBI**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNGAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA
JAMBI TAHUN 2018-2023.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Jambi dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Jambi.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Jambi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Jambi.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

10. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
11. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
12. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
15. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
16. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Jambi
17. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
18. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
19. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
20. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah RPJPD dan RPJMD untuk mengetahui kesesuaian dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

21. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Walikota.
23. Rancangan teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan Oleh pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Walikota dan Wakil Walikota.
24. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
25. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
26. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
27. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
28. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
29. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
30. Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

32. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
33. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
34. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
35. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
36. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
37. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
38. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
39. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Walikota serta target pembangunan nasional.
40. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
41. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan

42. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
43. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
44. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
45. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
46. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
47. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
48. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
49. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
50. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
51. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
52. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
53. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
54. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
55. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan

56. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
57. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
58. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
59. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
60. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
61. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
62. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.
63. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
64. Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya adalah Daerah otonom yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.
65. Hari adalah hari kerja.

BAB II
RUANG LINGKUP
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

- (1) RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 tahun yang memuat: Tujuan, Sasaran, Strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah; dan disertai dengan perangkat pendanaan yang bersifat indikatif
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra PD dan Renja PD
- (4) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada RPJPD, RTRW, RPJMD Provinsi Jambi dan RPJMN.

BAB III
SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 3

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - BAB I : PENDAHULUAN;
 - BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
 - BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH;
 - BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH;
 - BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN;
 - BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH;
 - BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH;
 - BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH;
 - BAB IX : PENUTUP.
- (2) Isi beserta uraian RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJMD

Pasal 4

- (1) Walikota melalui BAPPEDA melakukan pengendalian dan evaluasi

- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian terhadap :
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
 - c. hasil rencana pembangunan daerah.
- (4) BAPPEDA dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

BAB V PERUBAHAN RPJMD

Pasal 5

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijadikan dasar untuk penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama rentang waktu 5 tahun kepemimpinan Kepala Daerah.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan Perubahan apabila:
 - a. berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
 - b. terjadi perubahan kebijakan yang mendasar;
 - c. sisa masa berlaku RPJMD tidak kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman perubahan RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, sebelum ditetapkannya RPJMD Tahun 2023-2028, Penyusunan RKPD tahun 2024 berpedoman kepada RPJPD Kota Jambi dengan mengacu RPJMD Provinsi

program pembangunan yang belum seluruhnya tertangani tahun 2018-2023 dan program pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun 2024.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2013-2018 yang dijadikan dasar penyusunan RKPD Tahun 2019, masih dianggap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

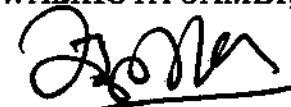
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Kota Jambi
pada tanggal 28 MEI 2019

WALIKOTA JAMBI,



SYARIF FASHA

Diundangkan di Kota Jambi

pada tanggal 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,



BUDIDAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2019 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI, PROVINSI JAMBI: (7-30/2019).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA JAMBI TAHUN 2018 - 2023

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud meliputi: (i) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun; (ii) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan (iii) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setelah Kepala Daerah dilantik, diwajibkan untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pada Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa: "Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik".

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup
jelas.

Pasal 3

Cukup
jelas.

Pasal 4

Cukup
jelas.

Pasal 5

Cukup
jelas.

Pasal 6

Cukup
jelas.

Pasal 7

Perlu penjelasan

Pasal 8

Cukup
jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 7..